

Analisa kritis Bung Musfi Yendra di buku ini membuka mata politisi dan kita semua agar demokrasi tetap *on the track* dengan bingkai moral dalam menjalankan amanah rakyat. Pemikiran cukup berdinamika dalam buku ini juga memperkaya literatur di bidang politik.

Dr. M. Fadjroel Rachman, SE, MH
(Duta Besar RI untuk Kazakhstan & Tajikistan)

Buku Ring Piston Kekuasaan ini *recommended* untuk dibaca oleh politisi yang sedang berjuang melakukan perubahan di bidang politik dan pemerintahan.

Dr. Sandiaga S. Uno, BBA, MBA
(Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia)

Buku ini menggambarkan banyak hal tentang keseharian yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan pergerakan politik. Ke depannya peran milenial dalam politik sangat besar demi kemajuan di berbagai bidang.

**Dr. Ir. Audy Joinaldy,
S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN.Eng**
(Wakil Gubernur Sumatera Barat)

Politik merupakan instrumen utama kehidupan bernegara. Berbagai kebijakan lahir melalui proses politik, baik di eksekutif maupun legislatif. Sebagai negara demokrasi kedaulatan sesungguhnya ada di tangan rakyat. Artinya kebijakan politik semestinya berorientasi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Pembinaan sistem politik Indonesia pasca reformasi memberikan ruang agar demokrasi berjalan sesuai kaidahnya. Pemilu, Pilkada, otonomi daerah dan tatakelola birokrasi harus terus ditingkatkan kualitasnya. Buku Ring Piston Kekuasaan ini menyoroti berbagai dinamika politik, tidak hanya sebentar pemikiran kritis tapi juga menjadi instrumen kontrol dalam proses perjalanan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

**H. Leonardy Harmainy
Dt. Bandaro Basa,
S.IP, MH**
(Anggota DPD RI, MPR RI)

ISBN: 978-602-0738-95-6



9 786020 738956



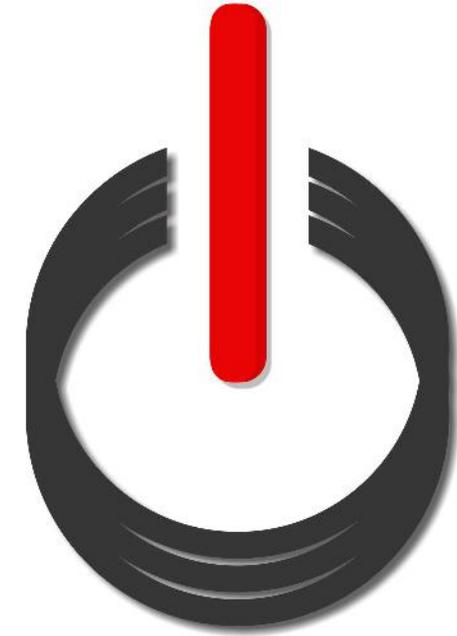
RING PISTON KEKUASAAN
ANALISIS KRITIS RESONANSI DAN REALITAS POLITIK

MUSFI YENDRA



ANALISIS KRITIS RESONANSI DAN REALITAS POLITIK

RING PISTON KEKUASAAN



MUSFI YENDRA

Sebagai intelektual dan cendekiawan muda, Musfi berhasil membuka pandora pikiran yang tertutup, dimana penulis lain ragu menayangkannya. Musfi tidak saja memuji yang patut diapresiasi, tetapi juga mengkritik mana, apa dan siapa yang patut berbenah untuk kebaikan politik sekarang dan ke depan.

Dr. Shofwan Karim, MA

(Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Dosen dan Kolumnis)

Membaca kumpulan tulisan penulis buku ini, adalah membaca kegelisahan intelektual yang tak sekadar mengkritisi namun juga memberi solusi. Buku ini bakal membuka cakrawala pembaca, bahwa dibalik masalah, selalu ada jalan keluarnya.

Fadly Amran, B.B.A

(Wali Kota Padang Panjang)

Musfi Yendra saya kenal sebagai anak muda yang idealis dan berprinsip kuat. Buku ini sesungguhnya mendeskripsikan tentang cara berpikirnya yang terbuka dan relevan untuk perubahan politik.

Sengaja Budi Syukur, SH

(Pengusaha, Ketua ISMI Sumbar)

Saya suka sekali dengan istilah yang dipopulerkan oleh Musfi Yendra, "Ring Piston Kekuasaan". Hal-hal empuk sering ditentukan dan dirusak oleh kelompok sekitar penguasa. Buku ini lugas dan renyah rugi kalau tak dibaca.

Khairul Jasmi, S.Pd, MM

(Komisaris PT. Semen Padang, Pemimpin Redaksi Harian Singgalang)

Anak muda harus berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku adinda Musfi ini adalah salah satu contoh kontribusi pemikiran kritis dan konstruktif agar politik tetap memberikan nilai untuk kebaikan bersama.

Mayjend TNI (Purn) Unggul K. Yudhoyono, SH

(Danpuspom TNI AD 2013-2015)

Anak muda harus terlibat aktif mengawal berjalannya demokrasi agar tidak keluar dari jalurnya. Buku Ring Piston Kekuasaan ini adalah gagasan konstruktif terhadap realitas politik agar tetap konsisten membawa perubahan.

Drg. Muh. Arief Rosyid, M.KM

(Komisaris Bank Syariah Indonesia, Mantan Ketum PB HMI)

Substansi buku ini ingin memberikan perspektif, agar kekuasaan menjadi bermakna bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Makna kekuasaan adalah tentang inovasi, sensitifitas dan kepedulian terhadap kemajuan dan peningkatan kehidupan rakyat. Rezim penguasa dikatakan gagal ketika tidak mampu menggerakkan perubahan kearah yang lebih baik.

Prof. Dr. Helmi, M.Sc

(Ketua Dewan Profesor Universitas Andalas, Koordinator Program Doktor Studi Kebijakan FISIP Unand)

Meski ini adalah tulisan-tulisan kolom, ia ditulis dengan bobot akademik yang cukup kuat karena berpijak pada fakta dan merujuk pada referensi-referensi yang sudah teruji, dan setiap tulisan, ditulis secara sistematis dengan bahasa komunikatif.

Andrinof A. Chaniago, M.Si

(Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI)

Buku ini menjadi bacaan wajib terutama bagi milenial yang akan mendominasi ruang kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif ke depan.

Sepris Yonaldi, SE, MM

(Rektor Universitas Tamansiswa)

Buku Ring Piston Kekuasaan ini menunjukkan, bahwa seorang Aktivist Tullen tidak pernah berhenti menyalakan semangat perubahan. Bung Musfi membuktikannya, transformasi seorang aktivis menjadi intelektual dalam garis perjuangan menegakkan nilai kebaikan dan kebenaran.

Dr. Handi Risza, SE, M.Ec

(Wakil Rektor Universitas Paramadina)

Buku ini secara komprehensif telah mengupas bagaimana kekuasaan di ranah politik dan pemerintahan harusnya diselenggarakan.

Dr. Asrinaldi, M.Si

(Dosen Ilmu Politik FISIP Unand)

Buku ini ditulis berdasarkan observasi dan pengalaman yang digabungkan dengan literatur akademis, menarik untuk dijadikan rujukan bagi akademisi dan praktisi.

Henry Mappesona, SE, M.Sc

(Pegiat Kampus Digital)

ANALISIS KRITIS RESONANSI DAN REALITAS POLITIK

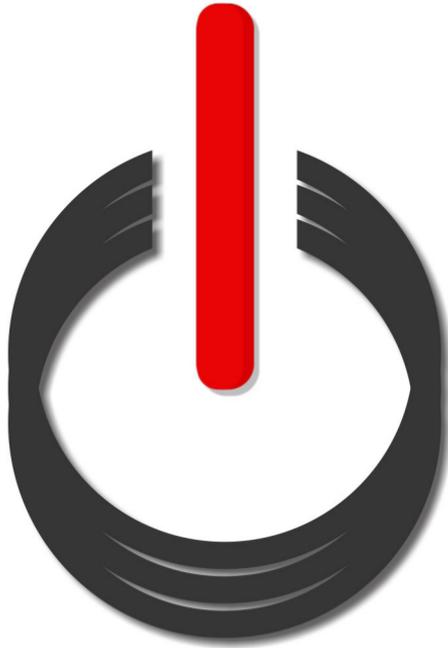
**RING
PISTON
KEKUASAAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ANALISIS KRITIS RESONANSI DAN REALITAS POLITIK

**RING
PISTON
KEKUASAAN**



MUSFI YENDRA

RING PISTON KEKUASAAN

*Analisis Kritis Resonansi
dan Realitas Politik*

Penulis: **Musfi Yendra**

Editor: **Abdullah Khusairi**

Pendesain Sampul: **Alizar Tanjung**

Penata Letak: **Tim Rumahkayu Pustaka**

Ukuran: **13.5x20.3, cm**

Halaman: **xxxii+440**

Penerbit: **Rumahkayu Pustaka**

ISBN: 978-602-0738-95-6

Cetakan, **September 2022**

Redaksi:

CV. Rumahkayu Pustaka Utama

Jl. Berok 1, No. 47, Kelurahan Berok Nipah,

Kec. Padang Barat, Kota Padang. Kodepos 25118.

instagram: rumahkayupustaka

Twitter: bukumahkayu

Facebook: rumahkayupustaka

email: redaksirumahkayu@gmail.com

website rumahkayupustaka.com

Prolog

PISTOL, PITON DAN RING PISTON KEKUASAAN

Parni Hadi

(Wartawan Senior Indonesia)

JUDUL buku ini menarik, mengundang untuk dilirik. Buru-buru lirik, bisa salah baca: Pistol, bukan Piston. Kebetulan, Kekuasaan sering berkelindan diraih atau dipertahankan dengan kekerasan.

Dan, Pistol adalah senjata yang sering disalahgunakan. Kekuasaan Politik ditengarai sarat intrik dan uang atau fulus.

Saya pernah populerkan istilah Fulitik, gabungan fulus dan itik, alias politik pembodohan, membeli suara (foolitics). Rakyat, pemilih, dianggap itik yang bisa dibodohin dengan uang.

Ring adalah bagian penting dari mesin supaya bisa berfungsi sebagai penggerak. Ring juga berarti lingkaran. Orang politik tidak bekerja sendirian. Ia dikelilingi banyak orang yang jadi operatornya.

Ada yang bilang, kerja politik itu melingkar-lingkar seperti ular. Susah dipegang omongan atau janji politik.

Sekali baca judul buku ini dengan cermat agar tidak salah baca: Ring Piton (ular).

Buku ini wajib dibaca oleh para pemburu kekuasaan

politik, petahana dan juga oleh publik, pemilik suara.

Ditanggung Anda tidak akan kecewa! *Baca aja deh.*

Penulis buku ini saya kenal baik, Bung Musfi Yendra. Ia anak muda *multasking* yang cerdas, berani, kritis, realistis dan pergaulannya luas.

Ia panggil saya Ayahanda, ganti saya sapa dia Ananda.

Ia juga pengamat yang jeli dan cermat untuk banyak hal, termasuk politik lokal dan nasional. Hasil pengamatan dan analisisnya yang kritis dituliskan di media massa. Maklum, ia pernah berprofesi sebagai jurnalis dan kolumnis.

Teruslah berkarya, Ananda Musfi!

Jakarta, 11 Juli 2022

Pengantar Buku

MENGGELITIK POLITIK STATUS QUO

Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. S.Psi, M.Sc

(Gubernur Sumbar 2010-2021,

Rektor Universitas Adzкия)

MEMBACA buku Ring Piston Kekuasaan yang ditulis sahabat saya Musfi Yendra membuat mata kita terbelalak. Kenapa tidak? Ulasan yang digambarkan dalam tulisannya adalah sesuatu yang jarang disebut orang tapi nyata di lapangan.

Jarang disebut orang karena begitu menohok kepada para pelaku kekuasaan. Jarang ditulis orang karena bisa membuat merah telinga politisi atau penguasa. Tapi apa yang disampaikan memang benar adanya, tidak mengada-ada, tidak fiktif atau tidak cerita penikmat saja.

Sahabat Musfi ini bukan politisi, setahu saya beliau belum terlibat aktif di parpol manapun. Beliau tidak pernah juga berperan di politik praktis. Tapi analisa terhadap politik begitu mendalam seolah-olah memang pernah ikut terlibat politik.

Analisa yang kritis mungkin disebabkan karena idealisme yang dimilikinya, juga keberanian dan independensi yang menjadi karakternya. Alhasil tulisan yang kritis tapi objektif bisa keluar dari pikiran dan tulisannya.

Praktek politik di negara kita memang perlu dikritisi. Dari hulu berupa kebijakan hingga hilir berupa program, ini perlu

dikontrol oleh aturan dan norma yang berlaku.

Sahabat Musfi menulis apa adanya dengan panduan norma yang dimiliki dari hati nuraninya dan aturan umum yang berlaku. Saya tahu sahabat Musfi bukan orang hukum apalagi pakar hukum, tapi 'rasa hukum' yang dimilikinya bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah.

Contoh hadirnya tim di sekitar pejabat publik yang berkuasa kadang melebihi dari pejabat yang sebenarnya. Ini dikritisi habis olehnya. Memang itu fakta adanya. Memang perlu dikritik. Memang itu praktek tidak benar. Itu mesti dirubah ke arah jalan yang benar.

Tulisan sahabat Musfi menjadi penilai atas praktek yang tidak benar tersebut.

Kebijakan otonomi daerah, inipun tak luput dikritisi. Bagus pembagian kewenangan merata ke daerah tapi prakteknya salah kaprah. Kadang euforia otonomi daerah ini memunculkan 'raja kecil' di daerah.

Kewenangan disalahgunakan. Mengganti atau memecat pegawai sesukanya tanpa dasar kuat kecuali *like and dislike* pemimpin.

Para caleg yang berjanji tapi tidak menepati begitu juga Cakada yang berkampanye ini itu tapi tak ada realisasi. PHP diberi tapi kenyataan tak ada. Ini juga fakta terjadi. Perlu dikritisi agar demokrasi berjalan sehat dan normal. Kadangkala yang gagal bisa masuk rumah sakit jiwa, sedangkan yang berhasil lupa daratan.

Keteladanan politisi dan kepala daerah tidak terwujud dalam kepemimpinan. Kadang jauh panggang dari api. Tapi apa boleh dikata. Mereka menang dipilih rakyat.

Apakah rakyat salah atau tertipu? Banyak jawaban untuk menjawabnya. Sahabat Musfi melihat kurangnya keteladanan

kepemimpinan yang ada. Pemimpin mesti disiapkan dan dilatih agar berteladan dalam semua prilaku yang tercermin di sikap dan prilaku.

Belum lagi bicara dinamika politik. Demokrasi membolehkan kita berdinamika dalam politik tapi juga mesti ikuti norma dan etika. Bukan semata-mata saja. Rakyat melihat dan menilai. Hukuman masyarakat adalah tidak terpilih lagi di kontestasi berikutnya.

Kadang di era pilihan langsung ini rakyat bisa menjadi korban. Salah memilih pemimpin karena uang atau janji. Terpilihlah pemimpin yang menzalami rakyatnya sendiri. Kebijakan yang merugikan rakyat bahkan membuat rakyat menjadi takut dan mundur. Ini juga terjadi. Perlu dikritisi!

Memang tidak semua ini terjadi. Walau sedikit terjadi tapi sedikit itu menjadi besar bila dibiarkan tanpa dikritisi. Perlu kritikan yang konstruktif dan membangun agar ke depan negara yang kita cintai ini menuju kemajuan yang dirasakan semua orang.

Buku ini penting dibaca oleh siapapun, apalagi bagi mereka yang terlibat di bidang politik praktis.

Selamat membaca! Semoga menjadi ilmu penambah wawasan dan penilai bagi kita yang mempunyai akal sehat. Amin. []

Padang, Juli 2022



Pengantar Buku

KRITIS DAN REALISTIS DALAM REALITAS POLITIK

Andre Rosiade, SE

(Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra)

SEBAGAI sesama aktivis yang pernah bernaung di bawah bendera Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), saya mengenal Bung Musfi Yendra sebagai sosok yang multitalenta.

Selain menjadi seorang aktivis, Bung Musfi Yendra juga merupakan seorang pegiat sosial, penulis, jurnalis, pelaku usaha serta menjadi seorang dosen. Setiap artikel yang ia dikeluarkan sangat kuat analisisnya. Hal tersebutlah yang membuat para pembaca luluh dan hanyut dalam setiap tulisannya.

Dalam banyak artikel yang dikeluarkan oleh beliau, sebagian besar yang saya baca merupakan analisis kritis terhadap realitas politik yang ada, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Bicara soal politik, kita memahami bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*.

Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena

sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.

Bagaimana caranya mencapai tujuan dengan bermacam cara, yang kadang seolah bertentangan satu sama lainnya. Akan tetapi, umumnya semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu perlu diejawantahkan dalam kebijakan termasuk didalamnya soal pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada.

Seperti halnya tujuan Negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 : Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, Hakikat Ilmu Politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Bung Musfi Yendra dalam melakukan analisis kritis terhadap realitas politik melalui tulisan-tulisannya.

Itu pula yang saya lakukan saat ini ketika saya dipercaya mewakili masyarakat Sumatera Barat untuk duduk sebagai Wakil Rakyat di DPR RI. Saya berusaha menjadi anggota DPR RI sebaik mungkin dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, ketika ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat dan negara, saya akan bersikap tegas

menolak. Dan sebaliknya saya rasional, mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif untuk rakyat.

Begitu juga dengan sahabat saya Bung Musfi Yendra, ketika ada sesuatu yang menggajal dilubuk sanubarinya terkait fenomena sosial politik dan ekonomi, beliau langsung bersikap kritis melalui tulisan-tulisannya yang menusuk masuk kedalam. Sehingga, publik atau masyarakat yang membaca tulisan beliau langsung tergugah dan membuka mata hati si pembaca.

Iniilah bentuk kepedulian dan sikap kritis yang kami jalankan dalam peran masing-masing sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara untuk mencapai kehidupan yang merdeka dan sejahtera.

Pemikiran-pemikiran Bung Musfi Yendra yang solutif dan inspiratif ini, seharusnya ia terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sebab, ia bisa memberikan arahan secara langsung tentang haluan politik sosial kerakyatan yang merupakan amanat konstitusi.

Tak berlebihan rasanya jika saya menempatkan buku Analisis Kritis Resonansi dan Realitas Politik, Ring Piston Kekuasaan ini sebagai buku yang dapat membuka pikiran kita untuk berfikir kritis terhadap tujuan bernegara dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sebagai penutup, buku yang sangat luas ini mencoba untuk mengkritisi berbagai kebijakan, menggali nilai keteladanan, termasuk juga mengapresiasi inovasi-inovasi kepala daerah yang dianggap berhasil.

Semoga gagasan-gagasan yang konstruktif dalam buku ini dapat bermanfaat, khususnya untuk mereka yang berkecimpung di ranah kebijakan publik.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2022

Catatan Editor

KOMUNIKASI DALAM POLITIK; POLITIK DALAM KOMUNIKASI

Dr. Abdullah Khusairi, MA

SUATU hari, di tahun 1997 beredar foto Presiden Amerika Serikat Bill Clinton sedang meniup saxophone. Foto itu dimuat di halaman utama surat kabar-surat kabar besar yang terbitan New York, di tengah berita dugaan dan tuduhan atas skandal seks Bill Clinton - Monica Lewinsky. Bill memang penyuka berat musik Jazz tetapi pada foto yang beredar dan diedarkan, ia hendak menanggapi santai badai yang ditiupkan lawan politik atas isu yang menerpanya. Bill memberi pelajaran tentang sebuah cara baru dalam komunikasi politik modern.

Seks memang sering menjadi badai bagi seseorang dan partai politik yang berhubungkait dengan kekuasaan. Semacam kutukan bagi beberapa partai yang pernah dihujat karena aktor atau kader politiknya. Di dalam negeri juga pernah terjadi, tak perlu diceritakan lebih lanjut, siapa dan partai mana saja yang pernah mendapatkan hal-hal semacam itu namun yang jelas, seks adalah senjata klasik dalam mengguncang kekuasaan.

Politik adalah pertarungan wacana. Wacana adalah kekuasaan. Dimulai dari isu-isu kecil, lalu membengkak, hingga meledak. Semua itu bisa direkayasa, dibangun dengan strategi komunikasi politik. Politik pada dasarnya baik dan

benar jika saja ia dibangun untuk kemaslahatan rakyat, namun selalu ada celah kejahatan mengintip kesempatan. Sebagai sebuah pertarungan, bagi yang memaknainya begitu, ia bisa dijalankan dengan pertarungan yang sehat begitu juga sebaliknya, dengan pertarungan yang jahat. Iwan Fals sampai harus bertanya; apakah selamanya politik itu kejam? Bisa jadi begitu, tetapi politisi ulung selalu mampu menempatkan kekejaman dengan dingin dan sepi tanpa publik tahu secuil pun.

Begitulah.

Politik kekuasaan menjadi sebuah komoditas bagi akademisi di tengah pertarungan wacana aktor politik untuk mendapatkan kekuasaan dan simpati publik. Menjadi bahan tafsir yang bisa melebar dan menyempit sesuai dengan fakta-dugaan-opini yang dibangun atas dasar kepentingan maupun berdasarkan kadar ilmiah dari fakta-data.

Pada panggung politik bisa jadi semua tampak baik, mesra dan juga indah. Tidak jorok dan amoral sebagaimana aktor-aktor politik yang dituduh oleh lawan politik. Bagi yang kalah politik, tentu saja muncul pernyataan negatif, politik itu jalan buruk dan berliku namun bagi yang menikmati tantangan dan menyukai badai-badai politik, akan menjalankan dengan terasa indah. Lebih-lebih para penguasa yang sudah menempatkan diri sebagai aktor politik yang kuat dan sukses. Politik adalah seni peran paling agung.

“Langit memang masih biru tetapi padi-padi sudah menguning,” ujar Ketua Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie di hadapan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjabat sebagai ketua Partai Demokrat. Partai Golkar dikenal dengan dominasi warna kuning, sedangkan Partai Demokrat dikenal dengan dominasi warna

biru. Komunikasi politik serupa ini dapat dinikmati ketika bahasa politik yang digunakan memiliki kesamaan makna dalam idiom-idiom politik yang dipakai. Pada konteks ini, komunikasi politik menjadi sebuah pemantik selera sastra bagi penikmatnya. Politik tiba-tiba bisa menjadi indah, bukan sesuatu yang buruk.

Demikianlah, setelah membaca puluhan tulisan di buku ini, senyatanya politik kekuasaan yang sederhana memiliki tafsir yang tidak akan mampu menyederhanakan keadaan. Mau jadi aktor politik, harus ada ilmunya. Tidak tiba-tiba karena hanya ada kesempatan. Perlu syarat dan rukun yang tak mudah tetapi bisa dipelajari dalam waktu singkat.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, adalah respon wacana politik dari seorang penulis yang berkecimpung secara keilmuan dan secara praksis di lingkungan politik. Musfi Yendra, dikenal tokoh muda yang melesat ke panggung sosial politik sejak ia menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Andalas. Menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unand, mendirikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum dan Politik Unand. Setelah tamat S1, ia meneruskan program magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah di Unand. Aktif sebagai jurnalis dan editor Padang-Today.Com (Jawa Pos Group), aktif di gerakan filantropi Dompot Dhuafa, ia juga menjadi pengurus di berbagai organisasi di tingkat Sumatera Barat dan menduduki jabatan strategis. Saat ini Musfi Yendra juga mengabdikan diri sebagai dosen Ilmu Politik di Fisipol Universitas Ekasakti Padang.

Mengeditori tulisan-tulisan Musfi Yendra, seperti melihat perkembangan seorang dalam menangkap fenomena, menganalisis serta mengembalikan pikiran-pikiran baru

kepada publik. Bentuk respon yang ditulis menempatkan posisi penulisnya dalam persoalan. Umumnya bercita-rasa kritis dan nakal dalam memberi saran yang membangun keadaban dan peradaban.

Kehebatan Musfi Yendra merespon memang dimodali kerja keilmuwan, keluasan wawasan serta kedekatan dengan persoalan. Sehingga terasa tajam menghujam ke hulu jantung kekuasaan tanpa perlu merasa marah. Politik kekuasaan memang komoditas utama yang memang tak akan pernah habis saban tahun. Selalu ada suksesi di negeri ini yang memilih jalan berdemokrasi di tengah rasa lapar publik. Publik yang telah lama tak memiliki kebebasan berekspresi dalam politik, dimonopoli dalam satu dominasi rezim, sepertinya tak pernah puas atas suguhan pesta demokrasi.

Musfi mengambil jarak tembak, posisi yang strategis dalam mengkampanyekan kepemimpinan ideal, politik yang santun, calon anggota legislatif yang ideal, serta simpati terhadap aktor-aktor politik. Ia cerdas menempatkan diri tanpa perlu sungkan dalam menulis dalam skala kritik yang sangat panas dan tajam. Semua itu, untuk memperlihatkan nalar politik Musfi patut didengar dan dibaca oleh siapapun untuk kebaikan.

Menulis untuk kebaikan keadaban dan peradaban adalah salah satu bentuk dakwah menurut kajian ilmu dakwah adalah *dakwah bil qalam*. Inilah yang dilakukan oleh aktivis kelahiran Tanahdatar ini. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, politik merupakan jalan dan alat untuk mendapatkan kesempatan kekuasaan yang kebaikan keadaban dan peradaban. Sayangnya, jalan kekuasaan memiliki kecenderungan untuk dibelokkan karena kepentingan sesaat, kelompok, serta menyesatkan peradaban. Pada sisi inilah, kehadiran tulisan-tulisan di dalam

buku ini hadir menempatkan; bahwa politik kekuasaan tak boleh bengkok. Harus lurus, baik, benar dan elok, dijalankan oleh siapapun yang hendak berada di situ.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini seperti semprit wasit ketika ada yang *offside* di lapangan politik. Kadang-kadang juga seperti penonton di VVIP yang berdecak kagum terhadap perjalanan aktor politik yang benar dan mulus. Sementara pada kesempatan lain, berada di belakang, mendorong agar aktor politik melakukan sesuatu melebihi yang sudah dikerjakan.

Puluhan tulisan yang bernas, patut dibaca dengan jeda, waktu senggang dan kopi. Menghibur, memberi pengetahuan tentang komunikasi dalam politik; politik dalam komunikasi, serta membangun keadaban dan peradaban.

Selamat membaca. []

***Akademisi dan Praktisi Komunikasi Massa, Doktor Pengkajian Islam, berkhidmat di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang**

Pengantar Penulis

RING PISTON KEKUASAAN ANALISIS KRITIS RESONANSI DAN REALITAS POLITIK

Musfi Yendra

BUKU Ring Piston Kekuasaan yang ada di tangan anda ini adalah kumpulan gagasan dan pemikiran tentang politik yang saya tulis dari tahun 2008-2022. Cukup panjang memang. Semua tulisan yang ada dalam buku ini pernah dipublikasi berbagai media.

Buku ini karya ketiga saya. Menulis adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Buku ini menjadi anak ideologis yang saya ciptakan sebagai input bagi perbaikan tatakelola politik dan demokrasi kita.

Ring Piston adalah istilah yang saya pungut dari kendaraan bermotor, merupakan satu komponen penting yang mempengaruhi kinerja mesin. Sementara kekuasaan merupakan bagian terpenting dalam politik. Orientasi utama politik adalah kekuasaan.

Ring Piston Kekuasaan secara sederhana diartikan sekelompok orang yang berada di lingkaran kekuasaan, memiliki peranan penting mempengaruhi perumusan kebijakan, mengisi posisi strategis baik secara politik, pemerintahan, badan usaha pemerintah, organisasi pemerintah, penguasaan sumber daya ekonomi hingga orang

tanpa posisi apapun, tapi keberadaannya sangat sakral untuk semua urusan dengan penguasa.

Melalui buku ini saya men-*cilotehi* berbagai gema-gaung dan realitas perkembangan politik lokal dan nasional. Mengkritisi berbagai kebijakan, memuji dan merekomendasi inovasi kepala daerah untuk diadopsi di daerah lain, menggali *value* kepahlawanan, hingga gagasan-gagasan konstruktif bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan sesuai kaidah moral untuk tercapainya kedaulatan rakyat.

Buku ini tentu bukan hanya sekedar mengkritisi fenomena di lingkaran kekuasaan. Juga tidak semata menyoroti *kurenah* orang per orang. Dalam kurun waktu cukup panjang menulis tema politik dan pemerintahan, berbagai pemikiran muncul seiring dengan isu terjadi saat itu.

Kontestasi politik untuk mencapai puncak kekuasaan mulai dari tingkat terendah pemilihan wal nagari atau kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan presiden momentum paling banyak disoroti rakyat. Partai politik sebagai organisasi infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia merupakan instrumen utama dalam pemilu maupun pilkada.

Dinamika partai politik, disfungsi dan konflik internal partai pemicu menurunnya partisipasi rakyat dalam memilih. Golput menjadi ancaman sendiri bagi lembaga penyelenggara pemilu, sehingga menjadi perhatian diantisipasi.

Kadang rakyat mulai jenuh dengan ulah pemain politik, yang hanya berjanji saat kampanye, tapi minim realisasi ketika sudah mendapatkan kursi. Isu-isu kampanye *garing*-normatif, tidak terukur, irrasional dan sekedar *bualan*. Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, namun perubahan dan kehidupan lebih baik untuk rakyat tak kunjung hadir.

Pemilihan legislatif ibarat pembukaan lowongan kerja limatahunan. Politisi berebut menjadi caleg, mengundi nasib politik, hingga yang serius menghabiskan berbagai sumberdaya ekonomi. Tidak sedikit juga caleg yang kalah akhirnya masuk rumah sakit jiwa bahkan ada yang bunuh diri.

Kurenah di lingkaran kekuasaan kadang membuat kita tertawa, prihatin bahkan sedih. Ada-ada saja perilaku politisi di negeri ini. Gus Dur pernah membuat seloroh DPR seperti Taman Kanak-kanak. Ini humor kritis dan tingkat tinggi seorang Negarawan. Belum lagi perilaku menyimpang oknum pejabat, dari arogansi, perbuatan asusila hingga korupsi yang terus menjadi-jadi.

Agak susah menemukan ketauladan dalam praktek perpolitikan kita. Konflik sering muncul karena pendeknya sumbu berpikir dan bertindak dalam menyikapi dinamika politik. Hampir semua partai politik berkonflik-pecah, dan membuat partai politik baru. Koalisi politik tidak lepas dari persengkokolan membagi-bagi jatah kue kekuasaan. Semangat berposisi hanya di awal sebagai gertakan sambal, dan akan goyah ketika digaransi jabatan menteri sebagai dispensasi.

Rakyat menjadi komoditas politik musiman saat pilkada dan pemilu. Hampir semua program pemerintah dan juga kegiatan sosial masyarakat dipolitisir untuk kepentingan politik penguasa. Sikap pragmatisme politik tumbuh dengan pesat di tengah masyarakat kita.

Budaya konstruktif hilang digantikan cacik-maki, bully dan penghinaan di sosial media, ketika berbeda pilihan dalam pemilu. Rakyat terlalu lama *move on*, sementara elit sudah bersatu seiring *deal-dealan* baru di antara mereka.

Politik ini ibarat candu. Candu hingga memabukkan. Kekuasaan itu enak kata yang sudah menikmatinya.

Termasuk juga bagi pemain di ring kekuasaan itu sendiri. Politik jika dibawa ke perasaan, setiap yang mengkritik dianggap lawan. Lawan harus dimusnahkan. Membuat narasi *satire* seolah penguasa selalu benar bukanlah cara sportif mengimplementasikan kepemimpinan ideal. Penguasa harus terbuka untuk dinasehati.

Perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi langsung, merupakan ruang kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat di suatu daerah bisa memilih siapa walikota, bupati dan gubernur yang diinginkan. Tantangan besar bagi kepala daerah terpilih di era otonomi daerah ini adalah memanfaatkan kewenangan desentralisasi dengan berbagai kreativitas dan inovasi, untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Inovasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan baru, pendidikan dan kesehatan murah atau gratis bagi rakyat, membawa program pusat ke daerah, mencari investor untuk pengembangan potensi sumber daya alam, hingga membangun kerjasama dengan multi stakholder.

Lahirnya kebijakan yang pro rakyat merupakan cerminan prestasi kepala daerah yang bisa bersinergi dan bermitra dengan lembaga legislatif di daerah tersebut. Inilah *output* yang diharapkan dari otonomi daerah.

Kita mengapresiasi saat ini banyak anak muda yang terjun ke gelanggang politik. Baik di legislatif dan juga dieksekutif. Memberikan ruang kepemimpinan bagi anak muda merupakan ciri bangkitnya peradaban.

Merawat Indonesia agar tetap terjaga nilai-nilai luhurnya, berjaya di dunia dan berkemajuan dalam segala bidang adalah tugas berkelanjutan generasi ke generasi. Pahlawan bangsa

berjuang merebut kemerdekaan, tugas generasi adalah mengisi kemerdekaan itu, tanpa meninggalkan semangat kepahlawanan.

Buku ini hanya berisi gagasan kecil dan kritikan konstruktif mencermati fenomena politik lokal dan nasional beberapa kurun waktu belakangan ini. Sebagai penulis saya tentu berharap, ada manfaatnya.

Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, dosen, mentor, media, senior dan tokoh yang banyak mendukung saya dalam berkarya.

Penghargaan saya kepada Guru yang sudah seperti orang tua sendiri, Ayahanda Parni Hadi, Wartawan Senior Indonesia, inisiator lembaga Dompot Dhuafa Republika, pernah menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), yang selalu mendukung karya saya, dan berkenan memberikan prolog untuk buku ini.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc, Mantan Gubernur Sumbar Periode 2010–2015 dan 2016–2021, kini menjabat Rektor Universitas Adzkiya yang menulis untuk pengantar buku ini.

Terima kasih kepada Kakanda H. Andre Rosiade, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, sahabat dan senior yang luar biasa, berkenan menuliskan pengantar untuk buku ini. Tulisan pengantarnya saya terima saat ia masih berada di Kota Madinah, karena baru menyelesaikan ibadah Haji tahun 2022.

Terima kasih kepada Bang Dr. Abdullah Khusairi, MA sebagai editor buku ini. Kepada Saudaraku Alizar Tanjung, Penerbit RumahKayu Pustaka Utama, yang sangat maksimal membukukan gagasan dan pemikiran saya ini.

Buku ini saya persembahkan sebagai penghormatan tertinggi untuk kedua orang tua saya, H. Asmadikar Iskandar dan Hj. Liza Yuniarti, serta mertua saya, H. Ikhnas Mansyur dan Hj. Murnihetty (almh).

Untuk dua bidadari saya, Syafitri Ikhnas, istri tersayang dan Hanna Rubiah Musfi, puteri tercinta, yang selalu menjadi penyemangat saya untuk terus berkarya.[]

Padang, 17 Agustus 2022

Daftar Isi

Prolog

PISTOL, PITON DAN RING PISTON KEKUASAAN

oleh Parni Hadiv

Pengantar Buku

MENGGELITIK POLITIK STATUS QUO

oleh Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. S.Psi., M.Sc.vii

Pengantar Buku

KRITIS DAN REALISTIS DALAM REALITAS POLITIK

oleh Andre Rosiade, SExi

Catatan Editor

KOMUNIKASI DALAM POLITIK;

POLITIK DALAM KOMUNIKASI

oleh Dr. Abdullah Khusairi, MAxv

Pengantar Penulis

RING PISTON KEKUASAAN

ANALISIS KRITIS RESONANSI

DAN REALITAS POLITIK

oleh Musfi Yendraxxi

DAFTAR ISI xxvii

BABAK I. KONTESTASI POLITIK DAN KEKUASAAN

Konflik Pilkada 3

Dilema Penunjukkan Langsung Gubernur 8

Evaluasi Partai Politik 13

Fungsi Partai Politik 18

Catatan *Incumbent* 21

Kompetensi Walinagari.....	27
Politik Sportif Hillary	32
Partisipasi Politik.....	37
Berebut Menjadi Caleg.....	42
Demokrasi Multi Partai	45
Isu Kampanye dan Pendidikan Politik.....	50
Ketika Golput Menjadi Pilihan.....	55
<i>Security Printing</i> Pilkada.....	59
Pilkada Padang, Evaluasi Demokrasi	62
Pemilu Dekat, KPU Lambat.....	65
<i>E-Voting</i> Pilkada.....	68
Pilkada Pandemi.....	72

BABAK II. IDEAL POLITIK KEBANGSAAN

Politik Kerja Andre Rosiade.....	79
<i>Reinventing Government</i> Otoda	86
Membangkitkan Wawasan Kebangsaan.....	94
Mencari Intelektual Profetik.....	101
Meneladani Buya HAMKA	106
Menanti HAMKA Baru.....	113
Surat Politik Kartini	116
Belajar Otoda dari Jembrana.....	121
<i>E-Government</i> Sragen	127
Pentingnya Inovasi dalam Otoda.....	134
Otoda, Sudahkah Rakyat Sejahtera?.....	139
Pemekaran Daerah Dampak Otonomi Penuh	146
Mengubah Paradigma Birokrasi	153
Menggagas Hari Partai Politik.....	158
Dari Otoda ke Federal.....	163
Merangkai Konsolidasi Demokrasi.....	168

Legislator <i>Pro Poor</i>	173
Cerdas Mengelola Informasi	176
Politik Belum Jalan Saya.....	179
Transformasi Pelayanan Publik.....	181
Mencari Figur Kombinasi; Preferensi Pilkada Tanah Datar 2020	185
Politik Gagasan.....	192
Ayah NA, Teruslah ke Syurga	198
Jagalah Buya Mahyeldi!	201
Magnet Politik Sutan Riska.....	204

BABAK III. KURENAH KEKUASAAN POLITIK

Ring Piston Kekuasaan	213
DPR di Mata Rakyat.....	217
Menyorot Citra DPR Kita.....	221
Konflik Internal Partai	225
Menyoal Moral dan Etika Politik	230
Esensi Kekuasaan.....	235
Mungkinkah Kampanye Damai?.....	240
Kepemimpinan Dua Periode	243
Iklan Politik PKS.....	248
Kurban Politik.....	251
Sepatu Al Zeidi dan Demokrasi.....	255
Caleg-caleg Latah	259
Politik Kangkung Darat	262
Arogansi Oknum Pejabat	265
Membaca Baliho Gubernur	271
Generasi Bersumbu Pendek	275
Korupsi dan Kemiskinan.....	278
Koalisi Basa-basi	280

Candu Politik.....	286
Politik, Jangan Baper!.....	291
Kegagalan <i>Satire</i> Gubernur.....	296

BABAK IV. SOSIAL BUDAYA POLITIK

Kepemimpinan Kaum Muda.....	303
Bangsa Instan	308
Gerakan Mahasiswa di Tahun Politik	313
Patologi Birokrasi Vs <i>New Public Management</i>	318
Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik.....	323
Kebangkitan, Reformasi dan Kemiskinan.....	328
FPI, Kronologis Monas dan Sejarah.....	333
Dinamika Politik Lokal dan Otonomi Daerah	338
NKRI dan Gerakan Separatis.....	345
Politisi Jalanan.....	352
Dukun Politik.....	355
Kebangkitan Politik Anak Muda Minangkabau.....	358
Mengenang Tragedi Simpang Kandih	364
KNPI Sumbar, Apa Kabar?.....	369
Membangun Negarawan Muda	373
Zakat Membangun Negara	376
Merawat Indonesia.....	379
Kemiskinan di Antara Bencana dan Harga BBM	382
Doa untuk Koruptor.....	386
Nasihat untuk Pemimpin.....	390
Perda Sampah Apa Kabar?	394
Akuntabilitas Etika.....	398
Politik Olahraga	400
Kekuasaan Tukang Parkir.....	406
Berdialog Masalah Siloam	409

Sumpah Pemuda, Apa kata Anak Muda?.....	413
JK dan Spirit Perubahan.....	418
Politik Santun Pensiunan Polisi	422
Sisi Lain MHM.....	426
DAFTAR PUSTAKA.....	430
DAFTAR RIWAYAT TULISAN	433
TENTANG PENULIS.....	437

BABAK I

**KONTESTASI POLITIK
DAN KEKUASAAN**

Konflik Pilkada

NEGARA suka konflik itulah bangsa kita. Dari lapangan bola kaki sampai lapangan politik, rusuh! Memalukan tapi bagaimana lagi tanah air kita juga. Tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Beginilah wajah sportifitas dan demokrasi negeri tercinta.

Sepanjang pelaksanaannya Pilkada yang digelar di beberapa propinsi dan kabupaten di Indonesia hampir secara umum menyisakan konflik. Pemilihan langsung kepala daerah yang dimulai pasca revisi UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah itu bertujuan terciptanya kesempurnaan berdemokrasi. Tapi pada kenyataannya menciptakan konflik-konflik baru dalam sistem dan tatanan politik bangsa ini.

Beberapa pelaksanaan Pilkada belakangan ini dimulai, di proses dan diselesaikan dengan konflik. Sebut penyelesaian Pilkada Sulsel dan Malut yang sampai pada Mahkamah Agung (MA). Tentu banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik-konflik tersebut. Kita berharap kedepan proses demokrasi di negara ini bisa berjalan dengan lebih dewasa. Tentu dengan mengetahui akar konflik dan solusinya.

Akar Konflik

Ada dua hal penting yang masih patut dijadikan sebagai catatan koreksi atas pelaksanaan pilkada secara umum, yaitu persoalan mekanisme pilkada dan hasil pilkada itu sendiri. Kedua hal tersebut merupakan muara dari berbagai persoalan yang muncul selama pilkada. Persoalan pilkada yang terkesan

dipaksakan, pertarungan elite politik lokal dengan politik uang, media massa yang belum netral, kuatnya patriarkisme politik dan juga kasus pemenang pilkada kembar.

Dalam hal mekanisme ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Pertama; munculnya perdebatan berkaitan dengan diberlakukannya UU No 32/2004 yang mengadopsi seluruh asas dan tahapan dalam UU Nomor 23/2003. Sesungguhnya antara pilkada dan pemilu tidak bisa dipisahkan. Sementara itu juga muncul perdebatan apakah KPU pusat berwenang menyelenggarakan Pilkada atau tidak. Ada yang berpendapat KPU berwenang menyelenggarakan pilkada mengingat pilkada itu juga pemilu. Kalau demikian otomatis lembaga itu memiliki kekuasaan menyelenggarakan pilkada. Akan tetapi ada pihak-pihak lain yang menentang. Alasannya pilkada itu berbeda dari pemilu. Sebagai konsekuensinya KPU tidak berwenang menyelenggarakan pilkada. Perdebatan tidak selesai sampai di situ. Ada yang mempersoalkan kepada siapa KPUD sebagai penyelenggara Pilkada harus bertanggung jawab. Ada yang berpendapat KPUD tidak bertanggung jawab kepada KPU pusat tetapi kepada DPRD.

Perdebatan itu berakhir dengan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada bukan bagian dari pemilu. Jadi KPU pusat itu tidak berwenang menyelenggarakan pilkada. Ia hanya diberi wewenang untuk melakukan supervisi dalam pilkada. Penyelenggaraan pilkada selanjutnya menjadi wewenang KPUD, dan lembaga ini tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD tetapi kepada publik.

Kedua; berkurangnya kewenangan KPUD. Hal ini dapat terjadi karena dalam menyelenggarakan pilkada KPUD harus bermitra dengan pemerintah daerah (penyedia dana)

dan DPRD. Hal ini menunjukkan pilkada bukan rezim pemilu tetapi cenderung menjadi rezim pemerintah. *Ketiga*; konflik pilkada juga bisa bersumber dari banyaknya aturan main yang tertulis dalam pasal-pasal di UU Nomor 32/2004 dan PP Nomor 6/2005 yang kurang aplikatif dan saling bertentangan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan konflik manakala terjadi salah tafsir. *Keempat*; kita harus ingat bahwa pilkada yang digelar 'secara paksa' oleh pemerintah juga membuka peluang munculnya mobokrasi. Karena secara politik pemerintah kurang siap dalam menyediakan instrumen pilkada, maka setiap kasus pilkada akan bermunculan tanpa sandaran penyelesaian yang jelas.

Dalam hal penyikapan hasil pilkada pun bisa konflik karena. *Pertama*; tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih rendah juga memudahkan elite parpol yang kalah dalam pilkada untuk memobilisasi massa dalam memperjuangkan kepentingan negatifnya. Massa yang berpotensi dimobilisasi adalah mereka yang tidak melek politik, dan mungkin juga mereka melek politik tapi bersedia diajak tidak sportif untuk melakukan tindakan sesat. *Kedua*; parpol diberi peran yang sangat dominan dalam penentuan kandidat Pilkada serta menutup akses calon independen. Dalam kondisi ini, masyarakat seolah hanya berharap bahwa calon kepala daerah yang terbaik adalah mereka yang diusung oleh parpol. Konsekuensinya mereka akan memberikan dukungan secara fanatik pada jagoanya. Jika jagoan mereka kalah, seolah harapan-harapan politik mereka musnah sama sekali. Akibatnya, sikap fanatik buta akan muncul dari massa pendukungnya.

Ketiga; internal partai yang mendukung calon. Konflik rentan muncul, mengingat aturan yang mensyaratkan setiap calon didukung oleh partai yang memiliki perolehan 20%

suara dalam pemilu legislatif yang lalu. Artinya, akan banyak partai yang berkoalisi untuk mencalonkan jagoannya. Konflik internal ini dapat timbul diawal, jika masing-masing partai yang melakukan koalisi tidak merasa puas dengan kerja partai kawan koalisinya. Konflik juga bisa timbul, ketika jagoan yang diusung berhasil memenangkan pilkada, perebutan jabatan-jabatan strategis atau “basah” akan menimbulkan pergesekan.

Keempat; Konflik juga bisa melibatkan antara kandidat dan partai pengusungnya, hal ini mungkin terjadi karena kandidat bukan berasal dari internal partai. Kesepakatan yang dijalin antara kandidat dan partai pendukungnya bisa berakhir dengan kekecewaan, jika kandidat yang terpilih tidak menepati janji politiknya kepada partai yang bersangkutan.

Kelima; konflik biasanya juga terpicu oleh ketidaknetralan aparat keamanan dalam melakukan tugas pengamanan. Termasuk juga ketidaknetralan penyelenggara pilkada. Mungkin ini hanya sebatas persepsi satu kubu pendukung, tetapi jika tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari aparat, bisa terjadi akumulasi ketidakpuasan terhadap aparat keamanan itu sendiri.

Solusi

Sebagai proses pembelajaran demokrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah lompatan jauh di kancah perpolitikan negeri ini. Namun, harus diakui pilkada ternyata belum mampu menyemai desentralisasi demokrasi. Konflik antar *elite* politik lokal yang terjadi dalam pilkada memperkuat hipotesis tersebut. Satu sisi pilkada memberikan rona demokrasi, tetapi di sisi lain memunculkan sejumlah ironi. Polarisasi antar kelompok masyarakat dan merenggangnya hubungan interaksi sosial menjadi salah satu dampak nyata dan tidak bisa dikesampingkan selama pelaksanaan pilkada.

Ke depan dalam proses menuju dewasa berdemokrasi diharapkan pilkada tidak lagi sebagai lahan-lahan konflik baru. Kita berharap para elit politik memberikan pembelajaran politik yang lebih baik kepada masyarakat. Ada beberapa yang solusi yang harus dilakukan. *Pertama*; menurut Eep Syaifullah Fatah Pakar Politik dari UI , perlu dilakukan institusionalisasi konflik. Artinya, konflik bisa ditampung melalui lembaga-lembaga yang telah ada. Seperti penggunaan mekanisme hukum untuk melakukan gugatan apabila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga konflik horizontal antar pendukung kandidat bisa dieliminasi. Di samping itu penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPUD juga harus membuat aturan yang jelas, jangan terulang kasus sosialisasi yang sempat membuat ketegangan antara KPUD dan Panwas.

Kedua; diupayakan pengendalian secara terarah dan efektif sumber-sumber konflik agar tidak manifes ke permukaan. *Ketiga*; langkah membatasi atau limitatif adalah untuk membatasi skala ruang, waktu dan person yang terlibat ke arah sekecil-kecilnya tersentuh oleh penjarahan dan provokasi konflik. *Keempat*; langkah mengubah, mengalihkan atau transformatif dengan gerakan bersama atau kebanggaan bersama yang mampu merevitalisasi energi konflik negatif ke arah energi positif integratif. *Kelima*; meninjau kembali anggaran pilkada yang masuk dalam APBD propinsi dan kabupaten/kota.

Semua solusi diatas akan terimplementasi dengan baik di tangan aktor politik yang memiliki karakteristik sebagai negarawan yang mengayomi dan disegani. Tidak pada seorang pecundang yang mau jadi pejabat untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya saja.

Dilema Penunjukan Langsung Gubernur

PENERAPAN otonomi daerah pasca reformasi sesungguhnya belum terformat dengan baik. Seperti *trial and error* saja. Betapa tidak, UU Tentang Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tidak memberikan perubahan berarti. Yang membedakan hanyalah pengaturan pilkada langsung oleh rakyat. Pilkada pun menjadi *momok* yang menakutkan bagi rakyat karena syarat konflik.

Otonomi daerah memberikan wewenang yang sangat luas kepada daerah. Sehingga daerah terpacu untuk menggali potensi yang ada dengan maksimal. Pengurangan subsidi dari pusat mengharuskan daerah untuk itu. Peran kepala daerah dan seluruh *stakeholders* sangat penting di daerah otonom. Apalagi tantangan daerah untuk juga menghadang arus globalisasi.

Dalam hal pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya pasal 18 ayat 4. yang intinya, “pemilihan kepala daerah (pilkada), gubernur, bupati dan wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota adalah dipilih secara demokratis. Juga Undang-Undang No 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 56 ayat 1 yang intinya, “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokratis dalam artian bahwa kepala daerah gubernur dan

bupati/walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah antara gubernur dan bupati/walikota sering terjadi tumpang tindih wewenang. Otonomi sesungguhnya ada pada kabupaten/ kota bukan provinsi. Bupati/walikota lebih bersifat *cuek* terhadap gubernur yang hanya dianggap punya wewenang administratif saja. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kondisi seperti ini tetap berjalan walaupun Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sudah direvisi.

Wacana cukup hangat berkembang belakangan adalah tentang penunjukan langsung gubernur oleh presiden. Ini menjadi rekomendasi seminar yang dilakukan oleh 100 anggota PPRA ke-40 Lemhannas 2007 yang mengambil tema “Memantapkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Menyongsong Seabad Kebangkitan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Kemudian rekomendasi ini telah disampaikan langsung Dr. Agus Prabowo salah seorang peserta kepada Presiden SBY. Presiden sendiri menanggapi rekomendasi itu secara positif.

Sebenarnya ada beberapa landasan ide terhadap wacana penunjukan kembali gubernur oleh presiden. *Pertama*, Presiden memiliki kewenangan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seyogyanya dibantu oleh menteri dalam aspek sektoral/ministerial dan gubernur dalam aspek regional/kewilayahan yang ditunjuk atas kepercayaan presiden. Pada kenyataannya gubernur dipilih langsung oleh rakyat artinya telah mereduksi wewenang Presiden dalam hal pelaksanaan tugasnya. *Kedua*, untuk menghemat “biaya demokrasi” khususnya yang dialokasikan untuk Pilkada Gubernur secara langsung. Dengan adanya penghematan biaya tersebut, maka investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat akan semakin besar. Terutama dalam hal penghapusan kemiskinan. *Ketiga*, penunjukan Gubernur oleh Presiden juga akan dapat meredakan potensi konflik antar komponen masyarakat di daerah yang biasanya terjadi sebelum maupun setelah Pilkada. Pilkada sangat identik dengan konflik sehingga penyelesaiannya butuh waktu dan dana yang lebih besar.

Keempat, otonomi daerah secara luas dan nyata terletak di tingkat kabupaten/kota, bukan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat cukup bupati/walikota saja. *kelima*, untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan secara nasional mengingat demikian luasnya wilayah Nusantara dan juga banyaknya kabupaten/kota di Indonesia, baik yang sudah ada sekarang maupun yang sedang menunggu proses pemekaran wilayah.

Wacana diatas menuai pro dan kontra dikalangan legislatif dan juga masyarakat. Benar, bahwa lima alasan diatas sangat rasional. Tetapi secara regulasi menjadi bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 dan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat 1 yang jelas menyatakan bahwa kepala daerah gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis. Sehingga kalau rekomenadasi tersebut disetujui akan menganggangi prinsip-prinsip demokrasi yang sudah mulai tumbuh di bangsa ini dengan baik pasca reformasi politik dan birokrasi. Artinya menuju kembali kepada kemunduran. Kalau seandainya UUD 1945 di amanden baru bisa dilakukan tapi tetap dalam lingkup demokratis.

Alternatif Pilihan

Perdebatan penunjukan langsung Gubernur oleh Presiden masih tetap bergulir. Pada satu sisi ada yang setuju, sisi lain

menolak mentah-mentah wacana ini. Karena ada beberapa konsekuensi politis yang akan terjadi. Ketika ini disetujui maka akan kembali kepada sistem sentralistik ala orde baru. Kemudian juga akan semakin melemahkan/meniadakan peran DPRD provinsi. Bisa jadi gagasan penunjukan langsung gubernur oleh presiden itu merupakan strategi baru guna memperkuat struktur kekuasaan pemerintah pusat di daerah sebagai manifestasi kembalinya rezim otoritarianisme. Akan melemahnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (*community development*) berbasis lokal. Hal ini terjadi karena kuatnya tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan pemerintah pusat.

Menanggapi persoalan diatas menurut penulis ada beberapa alternatif pilihan yang harus dilakukan. *Pertama*, harus dibenahi pembagian kewenangan yang jelas antara bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom dan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Sehingga gubernur mempunyai peran politik yang signifikan terhadap bupati/walikota dan bukan hanya pelaksana administratif saja. Bupati/walikota tidak lagi menganggap gubernur tidak ada arti. *Kedua*, mekanismenya dipilih DPRD, pusat tinggal menyetujui. Konsekuensinya adalah rakyat tidak bisa memilih langsung tapi melalui wakil-wakilnya di DPRD. Tetap terdapat/mengakomodir varian demokrasi dan akan lebih efisien/hemat dalam pembiayaan.

Ketiga, alternatif terakhir dari persoalan ini adalah bermuara pada amandemen UUD 1945 dan revisi kembali UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini mesti dilakukan seandainya tidak ada pilihan lain. Karena yang sangat mendasar dari wacana penunjukan langsung ini adalah pertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.

Mengubah UUD benar-benar ditujukan untuk menciptakan efektivitas pemerintahan dan membangun pelayanan publik yang lebih baik terhadap masyarakat. Bukan untuk memperkuat hegemoni rezim yang berkuasa.

Evaluasi Partai Parpol

SETIAP momentum pemilu rakyat Indonesia akan disuguhkan berbagai macam nama partai politik. Banyak menu, kalau ibarat makan. Dengan *platform* yang berbeda-beda satu sama lain. Kita negara demokrasi yang menganut sistem multi partai. Dari Pemilu ke Pemilu selalu lebih dari dua partai politik yang ikut kontestasi.

Masyarakat semestinya mengetahui apa yang disebut dengan partai politik. Sampai pemilu tahun depan mata dan telinga kita rakyat Indonesia akan sangat akrab dengan yang namanya partai politik ini.

Menurut Carl J Friedrich partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

R. H Soltau, menterjemahkan partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang — dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih — bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Sigmund Neumann, mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau

golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Kemudian Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik — (biasanya) dengan cara konstitusional — untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dari beberapa pengertian diatas ilmuwan politik sepakat bahwa tujuan pendirian sebuah partai politik adalah untuk mencapai kekuasaan. Untuk sampai pada tujuan tersebut partai politik akan berjuang sekuat-kuatnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menjual berbagai macam slogan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Mengambil hati rakyat.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider, *“political parties created democracy”*.

Karena itu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis. Sebagaimana dikatakan oleh Schattscheider, *modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*.

Namun dalam pelaksanaannya banyak orang yang berpandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik.

Yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu birahi kekuasaannya sendiri.

Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung dan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, kemudian memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of general will* kata Rousseau atau kepentingan umum menurut Perot, ilmuwan politik.

Krisis identitas dan tak memiliki ideologi. Itu gambaran umum partai-partai politik di Indonesia dewasa ini. Para tokoh dan elite parpol tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka lebih sibuk gontok-gontokan dan bagi-bagi kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana membenahi persoalan-persoalan bangsa. Walaupun ini gejala umum tentu ada juga partai yang serius tingkat kepeduliannya terhadap rakyat. Tapi hanya satu dua partai saja.

Kurang kukuhnya daya adaptabilitas sistem kepartaian telah membuat ruang partisipasi politik semakin mengecil, dan hal itu pada gilirannya dapat mendorong kecenderungan munculnya aktivitas politik anomik yang sering disertai dengan kekerasan atau bahkan kerusuhan sosial.

Hal seperti ini yang kita saksikan belakangan pada banyak pelaksanaan Pilkada. Ketidaksiapan kalah oleh pasangan tertentu akan memobilisir masa untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Kita lihat kasus ini pernah terjadi di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, termasuk juga terjadi di Maluku Utara.

Partai politik di Indonesia setidaknya-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu *pertama*, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain.

Kedua, secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota. *Ketiga*, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Kelemahan itu akan segera tampak, bila dihadapkan pada realitas berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam masyarakat yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik yang lebih besar.

Realitas itu dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, atau memperluas saluran-saluran partisipasi yang sudah ada. Perluasan ruang atau saluran partisipasi politik tidak selamanya harus diikuti oleh pembentukan partai-partai baru. Pengalaman beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbarui.

Partai Masa Depan

Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik diperlukan beberapa mekanisme. *Pertama*, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of party*) dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan.

Kedua, mekanisme keterbukaan partai melalui warga masyarakat diluar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.

Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik (*public services*), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.

Keempat, berkembangnya pers kearah profesioanal karena dianggap sebagai *the fourth estate of democracy*.

Kelima, kuatnya jaminan kebebasan berpikir (*freedom of thought*), berekspresi (*freedom of expression*) serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai (*freedom of peaceful assembly and association*).

Fungsi Partai Politik

PARTAI politik menjadi instrumen sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Disebut demokrasi karena ada proses pemilu. Proses pemilu akan sangat identik dengan kompetisi partai dalam perebutan kekuasaan/jabatan publik.

Para ilmuwan politik biasa menjelaskan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Prof. Miriam Budiardjo yakni; *pertama*, sarana komunikasi politik maksudnya partai memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interest articulation) atau '*political interest*' yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam hal fungsi komunikasi ini berbagai kepentingan diserap sebaik- baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Kemudian ide-ide dan kebijakan atau aspirasi tersebut diadvokasikan sehingga dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*) maksudnya partai politik berfungsi dalam hal pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat/warga negara.

Misalnya dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkontitusi, partai politik dapat memainkan peran yang penting tentu bukan partai politik saja yang punya

tanggungjawab melakukan fungsi ini, karena semua kalangan dan lembaga-lembaganegara juga mempunyai tanggungjawab yang sama.

Ketiga, sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*) maksudnya partai politik dibentuk dengan tujuan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin bangsa pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader pemimpin ini dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan oleh legislatif atau melalui cara pemilihan langsung lainnya.

Juga tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawaian- negeri yang tidak bersifat politik (*political appointment*) tidak boleh melibatkan peran partai politik.

Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pangangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula. Untuk menghindari terjadinya pencampur-adukan perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan profesional.

Keempat, pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Sehingga partai politik dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut dan menyalurkannya sesuai dengan ideologi, program dan alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain.

Sebagai pengatur konflik (*conflict management*) partai

politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (agregation of interest) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik.

Semestinya dalam menuju proses demokrasi yang ideal sebuah bangsa ke-empat fungsi partai politik diatas harus dilalukan dengan baik.

Tidak lama lagi kita akan kembali melaksanakan agenda tahunan yaitu Pemilihan Umum. Partai politik saat ini mulai beberes. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh partai politik untuk menghadapi kompetisi menuju kekuasaan tersebut. Partai lama yang lulus *electoral treshold* serta partai-partai baru yang akan mendaftar menjadi peserta pemilu sudah melakukan 'tebar pesona' kepada rakyat.

Sepanjang jalan dari kota sampai kampung kita lihat bendera-bendera partai berkibar ditiup angin. Baliho- baliho dan spanduk tokoh-tokoh partai terpancang dimana- mana. Kalender-kalender partai dan tokoh-tokoh politik tertempel di rumah-rumah warga. Silaturrahmi-silaturrahmi politik di tingkat nasional sampai ke daerah sudah mulai marak.

Tidak kalah penting *black campaign* tokoh dan partai politik dari tingkat nasional sampai daerah pun mulai menggosip. Saling tuding dan menyalahkan satu sama lain. Sangat disayangkan semuanya atas nama rakyat.

Ya, atas nama rakyat!

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. kenyataannya, fungsi pendidikan politik parpol belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Catatan *Incumbent*

TIDAK semua orang punya kesempatan menjadi pemimpin sebuah negara ataupun daerah. Karena itu sangat mustahil. Tapi juga hampir semua orang yang pernah berada pada posisi penting itu *enggan* meninggalkan jabatannya. Kalaulah tidak dibatasi oleh undang-undang hanya dua periode saja, maka semua mereka mau untuk selamanya. Karena jabatan sebagai presiden, gubernur, bupati/walikota bahkan lurah sekalipun memang syarat dengan banyak fasilitas. Apalagi popularitas. Disanjung dan dihargai banyak orang. Banyak cara dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan agar tidak berpindah kelain tangan. Mendapatkan bagi yang belum pernah merasakan. Mempertahankan bagi yang masih ada kesempatan.

Dalam tulisan ini saya akan menjelaskan fakta politik *incumbent* yang yang masih punya kesempatan untuk maju. Baik untuk pemilu presiden, pilkada gubernur, pilkada bupati/walikota. Masa jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota diatur dalam regulasinya adalah 5 tahun. Sistem pemilihan langsung ternyata punya efek besar terhadap kinerja bagi yang sedang menjabat. 3 tahun awal jabatan masih bisa fokus melayani rakyat. Masuk tahun selanjutnya kekhawatiran besar mulai muncul. Seiring mengapungnya calon kompetitor. Fenomena kemengan *incumbent* menjadi sesuatu yang menarik kita telusuri lebih jauh di era pemilihan langsung ini. Karena terdapat nilai *plus* dan *minus* terhadap kemenangan tersebut.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) tentang besarnya peluang *incumbent* untuk kembali ketampuk kekuasaan. Dalam penelitiannya LSI menemukan, sejak Juni 2005-Desember 2006 telah berlangsung 296 pilkada di wilayah Indonesia. *Incumbent* yang maju dalam pilkada sebanyak 230 orang (78,77%) dan tidak ikut pilkada dengan berbagai alasan 62 orang (21,23%). Sedangkan empat wilayah lain tidak ada datanya.

Yang lebih menarik, hasil menunjukkan *incumbent* memang perkasa atau memiliki peluang lebih besar. Kepala daerah *incumbent* yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan *incumbent* yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%).

Keunggulan *incumbent* terlihat mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang, yakni yang menang 50% dan kalah 50%.

Kepala daerah *incumbent* bukan hanya berhasil memperdaya penantang baru, tapi pintar juga membuat pukulan telak terhadap wakil kepala daerah *incumbent*. Wakil kepala daerah *incumbent* yang maju dan ternyata kalah sebesar 71,43%, sedangkan yang menang hanya 28,57%. Penelitian itu lebih detail menunjukkan, ternyata wakil bupati/wakil wali kota *incumbent* yang coba melawan hasilnya "KO" sebesar 70,49% dan yang berhasil menang hanya 29,51%. Wakil gubernur *incumbent* yang coba maju untuk propinsi satu lebih parah lagi, dibuat "terkapar" dengan kata lain tidak ada yang menang satu pun.

Kemudian dalam penelitian tersebut juga disigi faktor apa yang menyebabkan peluang menang *incumbent* lebih besar.

LSI melakukan survei nasional menanyakan kepada responden selaku pemilih, bagaimana sebaiknya latar belakang kepala daerah? Hasilnya, yang menjawab kepala daerah sebaiknya orang yang pernah jadi pejabat (35,4%), kepala daerah sebaiknya mereka yang tidak pernah jadi pejabat (19,4%), sama saja yang pernah dan tidak pernah menjabat (30,4%), dan tidak tahu/tidak jawab (14,8%). Jika kepala daerah sebaiknya orang yang pernah menjadi pejabat, LSI kembali bertanya kenapa alasannya? Mereka menjawab, lebih punya pengalaman memimpin (78,9%), lebih tahu kondisi daerah (16,2%), bisa langsung cepat kerja (4,3%), dan alasan lain (0,6%).

Jika kepala daerah sebaiknya orang yang tidak pernah menjadi pejabat, LSI juga bertanya kenapa alasannya? Pemilih menilai, umumnya lebih bersih tidak terlibat korupsi (59,2%), lebih mampu memimpin dan mengelola daerah (23,0%), bisa memberantas praktik korupsi di pemerintah daerah (8,9%), dan alasan lainnya (8,9%).

Antisipasi Penyalahgunaan Kekuasaan

Posisi *incumbent* yang maju kembali berkompetisi pada ajang pemilihan selanjutnya rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga akan terjadi persaingan yang tidak *fair* dalam pilkada atau pemilihan presiden antara *incumbent* dan non *incumbent*. Karena ada beberapa faktor;

Pertama, selama masih menjabat. Kesempatan calon *incumbent* berinvestasi dukungan terhadap rakyat/pemilih lebih besar karena selalu ada kesempatan. Investasi dukungan ini dilakukan dengan kampanye permanen atau *the permanent of campaign* (Dan Nimmo, 2001; Darren G. Lilleker dan Jannifer Lees-Marshment, 2005). Disebut kampanye permanen karena semua aktivitas pejabat yang

tengah memerintah pada dasarnya adalah kampanye. Mereka menjalankan tugasnya sebagai pejabat dan pada saat bersamaan, secara tidak langsung juga melakukan kampanye. Mengunjungi masyarakat, memberikan informasi, dan menyajikan tanggapan atas pertanyaan masyarakat, memasang iklan layanan masyarakat, meresmikan sebuah proyek adalah bagian dari tugas seorang pejabat. Tentu saja dengan kesempatan ini masyarakat akan lebih mengenal figur sang pejabat. Bahkan pejabat itupun sendiri akan semakin menjadi-jadi ketika libido politiknya untuk maju kedua kalinya naik. Sang pejabat akan mengusahakan selalu hadir/membuat acara-acara yang mendatangkan masa yang banyak. Akan terbuka kesempatan menggunakan kekuasaan secara tidak benar/penyalahan.

Kedua, ketika akan berakhir jabatan jilid satu. Keuntungan selanjutnya ternyata dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti PP No 6/2005 bahwa, gubernur/wagub, bupati/wabup, dan wali kota/wakil wali kota yang dicalonkan menjadi calon kepala daerah hanya cuti di luar tanggungan negara pada saat kampanye. Dengan demikian, pejabat (*incumbent*) yang akan maju lagi dalam pilkada tak perlu mundur dari jabatannya. Padahal, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya, menyebut kepala daerah yang *incumbent* harus mundur bila mencalonkan diri dalam pilkada. Menjadi sangat jelas dalam kehidupan berdemokrasi, PP itu pun dapat dikatakan merupakan sebuah kemunduran. Kita sepakat bahwa keadilan dan keterbukaan mesti dikedepankan dalam membangun demokrasi, tidak terkecuali dalam pilkada. Siapa pun calon yang maju wajib mendapat keadilan dan kesempatan yang sama. Sedangkan bila *incumbent* yang maju tidak melepas atribut kepejabatannya, maka akan membuka

peluang terjadinya ketidakadilan.

Ketiga, dalam hal pendanaan/modal. Setiap kepala daerah punya wewenang terhadap dana taktis yang bisa digunakan. Bisa saja dalam bentuk bantuan terhadap masyarakat yang mengataskan nama pejabat tersebut. Ternasuk juga penggunaan dana anggaran terhadap program-program pemerintah, namun menggunakan atribut pribadi. Contohnya kampanye posyandu, antinarkoba, pemusnahan flu burung, kebersihan lingkungan, banjir, pesantren kilat, acara/*event* yang diangkat didaerah tersebut ataupun ucapan selamat dalam rangka hari-hari besar keagamaan yang menyertakan foto sang kepala daerah. Tidak ada pesan yang lebih substansi kecuali hanya memajang tampang manis dan nama sang pejabat. Bisa saja di *billboard* atau brosur yang ditulis sedikit imbauan-imbaun kepada masyarakat.

Keempat, tekanan politik terhadap bawahan. Penyalahgunaan jabatan juga dapat dilakukan calon *incumbent* terhadap para pejabat struktural di bawahnya. Dengan kekuasaannya dia bisa memerintahkan pejabat di bawahnya agar mendukungnya dengan melakukan mobilisasi. Ini bisa dilakukan karena calon *incumbent* memiliki aparat hingga tingkat kelurahan dan desa. Meski tak bisa dibuktikan secara langsung, namun pada pilkada-pilkada yang sudah lalu masyarakat bisa melihat betapa aparat pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas negara untuk mendukung kampanye calon *incumbent*.

Semestinya kita sebagai rakyat harus lebih kritis terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Mekanisme kontrol dari publik harus berjalan dengan baik. Karena tentu saja kita menginginkan hadirnya seorang pemimpin yang juga sebagai panutan. Pemimpin yang tetap memperhatikan kaedah dan

etika politik yang benar. Seorang negarawan yang sportif. Tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai kekuasaan. Hadirnya ibarat oase di tengah padang pasir.

Kompetensi Walinagari

SALAH satu dampak positif reformasi adalah diberlakukannya otonomi penuh bagi daerah. Sistem desentralisasi membuka ruang kepada daerah-daerah di Indonesia untuk bisa menggali potensi masing-masing. Daerah diberikan wewenang lebih luas untuk mengembangkan dan mengelola sendiri rumah tangganya asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Otonomi penuh juga memberikan ruang untuk daerah mengkomodir karakteristik masing-masing seperti adat istiadat dan budaya lokal.

Sumatera Barat di awal otonomi daerah telah memberlakukan kembali ke sistem pemerintahan nagari sebagai bentuk keaslian tatanan hidup bermasyarakat dengan budaya Minangkabau. Sistem pemerintahan nagari ini menjadi sistem pemerintahan terendah. Diperkuat dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari oleh Gubernur Sumatera Barat, Zainal Bakar pada waktu itu.

Hampir 20 tahun (1979-1999), sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Orde Baru telah Menghilangkan nilai-nilai hidup bernagari di Sumatera Barat. Pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik telah memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Akibat perubahan nagari menjadi desa telah terjadi *culture shock* (goncangan kebudayaan) karena perubahan yang dialami tidak hanya

sekedar perubahan struktural tetapi juga sekaligus perubahan filosofis dan orientasi, karena menurut Mochtar Naim (1990), konklusinya bukan saja keterbukaan (*glasnost*) dan proses demokratisasi yang diperlukan tetapi juga restrukturisasi (*perestroika*).

Akibat dari perkembangan pembangunan dan modernisasi yang begitu cepat di segala bidang, yang pada akhirnya menempatkan negara bukan lagi sekedar memiliki posisi konvensional sebagai inovator pembangunan, tetapi negara juga berperan lebih konservatif dengan kecenderungan mengontrol kekuatan-kekuatan masyarakat (Harrison, 1988). Dalam situasi yang demikian keikutsertaan kelompok-kelompok sosial politik dan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung menghadapi kendala yang tidak kecil, karena birokrasi begitu solidnya (Yasril Yunus: 2000).

Artinya bahwa pengambilan keputusan politik menurut Nugroho (1992), yang mengutip pendapat Mc Lennan menyatakan bahwa keputusan politik antara elit politik yang sedang berkuasa dengan kekuatan-kekuatan sosial politik menjadi persoalan tarik-menarik (*push and pull*) antara mempertahankan pola keamanan politik dengan upaya mempengaruhi pola keamanan politik.

Ada perbedaan yang mendasar antara pemerintahan desa dan nagari. Desa adalah cerminan dari sebuah sistem pemerintahan yang feodalistis dan sentralis-vertikal-*topdown* yang berasal dari Jawa. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan desa ini dikembangkan secara seragam ke seluruh wilayah Indonesia dengan mematikan dan menggantikan pemerintahan terendah yang beragam di seluruh tanah air. Walaupun berumur singkat di Sumatera

Barat (1979-1999), dampaknya bagai air bah yang sempat memporandakan sendi-sendi pemerintahan terendah di daerah ini.

Sistem pemerintahan nagari yang sejak nenek moyang orang Minang bercirikan egaliter, mandiri, dan berorientasi ke masyarakat (kerakyatan), sejak pemberlakuan pemerintahan desa justru berubah menjadi hierarkis, tergantung dan berorientasi ke atas, ke pejabat. Lembaga-lembaga tradisional yang tadinya berperan aktif dalam masyarakat, ketika menjadi pemerintahan desa unsur-unsurnya hanya menjadi pajangan kalau pejabat turun ke desa. Dengan desa, semangat gotong-royong yang tadinya bersifat komunal, spontan, dan resiprokal berubah menjadi gotong-royong yang dimobilisasi dan dikomandokan dari atas (Mochtar Naim, Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari).

Sejak dicanangkan pertama kali di Kabupaten Solok, 2 Januari 2001, kembalinya Sumbar ke sistem pemerintahan terendah bernama pemerintahan nagari betul-betul disambut seluruh elemen masyarakat secara antusias. Dibentuknya Perda Sumbar No. 9/2000 tidak terlepas dari bergulirnya era reformasi yang melahirkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 huruf o UU No 22/1999 yang kemudian direvisi (Pasal 1 angka 12 UU No 32/2004) *desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Dalam Penjelasan Umum angka 10. UU No.32/2004 dipertegas lagi bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan demokrasi yang lebih terbuka juga memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari. Akulturasi sistem demokrasi yang dipahami secara umum pun mulai diberlakukan. Dahulu nagari dipimpin oleh seorang pemuka adat yang dipilih secara musyawarah mufakat. Sekarang walinagari sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat secara terbuka, *one men one vote*. Mengikuti pada aturan pemilihan langsung presiden, anggota legislatif, gubernur dan bupati/walikota. Perubahan ini mengilhami masing-masing kabupaten di Sumatera Barat membentuk peraturan pemilihan langsung juga.

Kompetensi Walinagari

Pergeseran paradigma nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan terendah dalam tatanan perpolitikan formal yang mengacu pada kedewasaan demokrasi di nagari ini, menuntut terciptanya SDM yang lebih berkapasitas. Otonomi penuh terhadap rakyat itu ada pada nagari. Artinya pemerintahan nagari harus dikelola oleh SDM yang terbaik. Nagari harus dipimpin oleh orang yang berkompetensi; pendidikan yang tinggi/intelektual, mengerti tentang tata pemerintahan, birokrasi dan administrasi, berpengalaman secara organisasi, mengerti dan bisa meng-operasionalkan teknologi, memiliki visi yang jelas dalam memajukan daerah, memiliki kemampuan lobi dan negosiasi terhadap pemerintah yang lebih tinggi maupun kepada pihak luar yang berpotensi untuk *invest* di nagari.

Mengapa penting kompetensi? Karena nagari adalah ujung tombak realisasi program-program yang

dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Mekanisme pertanggungjawaban setiap program itu harus jelas dengan aturan administrasi yang berlaku. Banyaknya bantuan-bantuan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah itu kedepan akan di audit oleh lembaga-lembaga pengawasan. Kita tidak inginkan dengan ketidakmengertian wal nagari tentang administrasi akan melahirkan koruptor-koruptor baru tingkat lokal. Makanya tidak mutlak lagi yang dipilih itu adalah tokoh-tokoh lama yang tidak punya kompetensi. Nagari kedepan harus dipimpin dan dikelola oleh anak-anak nagari yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam sistem pemerintahan yang modern. Masyarakat harus memberikan ruang kepada generasi muda intelektual untuk memimpin nagari.

Politik Sportif Hillary

"Saya akan bekerja dengan sepenuh hati siapa pun yang akan dinominasikan (sebagai calon presiden dari Partai Demokrat), tentu saja saya masih berharap bahwa sayalah yang akan dinominasikan. Tetapi saya akan melakukan apa saja untuk meyakinkan pendukung saya, bahwa adalah sebuah kesalahan yang luar biasa bila mereka tidak mendukung Senator Obama"
(Hillary Rodham Clinto, 2008)

PADA pemilihan Presiden Amerika Serikat November 2008, banyak pendidikan politik yang dapat kita jadikan acuan berdemokrasi dan berbudaya politik yang baik. Perebutan dukungan menuju Amerika Serikat 1 (AS 1) pada Partai Demokrat antara Barrack Obama dan Hillary Clinton telah berakhir. Pemilu internal yang dilakukan memakan waktu 6 bulan itu dan biaya yang besar antara keduanya dimenangkan oleh Barrack Obama. Kini masyarakat Amerika Serikat sudah memiliki dua calon presiden yaitu Barrack Obama dari Partai Demokrat dan Mc Cain dari Partai Republik.

Tujuan dari politik adalah kekuasaan, itu pasti. Pertarungan antara kubu Obama dan Hillary dari partai yang sama merebut dukungan suara dari pendukung Partai Demokrat tujuannya adalah menuju "Gedung Putih". Obama yang keturunan kulit hitam dan berusia relatif muda, berusaha mengalahkan Hillary yang juga istri seorang presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Pemilu yang dilakukan dinegara-negara bagian selama 6 bulan menjadi sangat menarik diikuti. Berbeda dengan Partai

Republik yang dimenangkan Mc Cain dalam tiga bulan tidak menjadi perhatian pengamat-pengamat politik dunia.

Partai Demokrat Amerika Serikat telah menetapkan bahwa calon presidennya adalah Obama. Perjuangan terakhir *primary* di Montana dan South Dakota, Hillary Clinton dipastikan kalah dari Barack Obama untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat. Pelajaran politik yang sangat luar biasa dilakukan oleh Hillary adalah mengakui kekalahan, memberikan dukungan selanjutnya pada Obama dan meminta pendukungnya untuk memilih Obama pada pemilu nanti. Sikap sportif yang sangat luar biasa dari seorang negarawan.

Sportif dan Jiwa Besar

Istilah *sportif* mungkin lebih sering kita dengar dalam dunia olah raga. Benar sekali, tapi sesungguhnya sportif juga bisa kita gunakan dalam dunia politik yang bertarung merebut kekuasaan. Olah raga bertarung merebut juara. Tidak beda dengan bertarung dalam politik yang berebut puncak kekuasaan seperti posisi presiden, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa/walimurah. Saya temukan pengertian sportif pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III *sportif* diartikan '*bersifat ksatria, jujur dan sebagainya*': Jadilah petarung yang sportif, jangan emosional.

Penyusun Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia JS Badudu menandai *sportif* sebagai sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda dengan arti '*ksatria, jujur tentang sifat, misalnya, menghargai kelebihan lawan, mengakui kekalahan karena lawan lebih unggul*'.

Hillary telah mengajarkan kepada elit politik dimanapun bagaimana berlaku sportif, dengan mengakui secara ksatria kemenangan Obama. Sepertinya tidak ada dendam politik dari kekalahannya. Walaupun secara pengalaman berpolitik

Hillary jauh lebih dari Obama. Tapi dimata rakyatnya Obama dianggap lebih berpeluang membawa perubahan kedepan.

Orang yang berjiwa besar adalah orang-orang yang selalu berusaha melepaskan ikatan-ikatan yang melingkupi jiwanya, tidak melihat semua dengan ukuran hawa nafsunya. Ketika dia bisa melewati ikatan-ikatan tersebut, maka dia masuk pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu orang yang bisa melepaskan semua keinginan hawa nafsunya. Dia bisa berhubungan dengan orang, siap menerima kesalahan, kekurangan, dan kelemahan yang muncul dari dirinya. Orang yang ingin mencapai derajat yang tinggi tidak mungkin dapat mencapainya tanpa jiwa seperti ini dan berakhlak sebagaimana telah disebutkan.

Pelajaran yang patut diambil ialah sikap *sportif* dalam menerima kekalahan dalam persaingan politik. Persaingan yang keras, ketat, bahkan saling menjatuhkan harus cepat berhenti begitu penghitungan suara pemilih selesai. Begitu pemenangnya diumumkan.

Hillary sangat menyadari, bahwa usaha menggelorakan jiwa besar kepemimpinan ditandai oleh satu suasana dimana setiap orang mendapatkan akses informasi terbuka untuk setiap calon, memiliki peluang terbuka dimana disatu sisi kita menghargai adanya kemenangan dari kemampuan. Tapi dari sisi lain ada kelemahan Hillary dalam membangun kerjasama tim kampanyenya. Oleh karena itu, Hillary menyadari sepenuhnya arti "*tidak ada keberhasilan tanpa pengganti*".

Sikap sportif dan berjiwa besar adalah sikap petarung sejati, politisi hebat dan seorang negarawan ulung. Bahwa sesungguhnya kemajuan suatu bangsa akan tercapai dimana para elitnya mesti berpikir lebih dewasa dan memiliki visi untuk bangsanya. Tidak mementingkan diri dan golongan. Tidak juga menempuh cara-cara yang tidak sehat/tidak fair

dalam menyikapi kekalahan. Seperti memobilisir pendukung untuk membuat konflik politik baru. Tidak juga melakukan *money politic* dan mencari-cari kesalahan rival apalagi memfitnah secara membabi buta.

Gambaran Pilkada Kita

Sepanjang pelaksanaannya Pilkada yang digelar di beberapa propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia hampir secara umum menyisakan konflik. Pemilihan langsung kepala daerah yang dimulai pasca revisi UU no 22 tahun 1999 menjadi UU no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah itu bertujuan terciptanya kesempurnaan berdemokrasi. Tapi pada kenyataannya menciptakan konflik-konflik baru dalam sistem dan tatanan politik bangsa ini.

Sepertinya Pilkada sangat syarat dengan konflik. Beberapa waktu lalu kita menyoroti konflik Pilkada di Sulawesi Selatan. Sebelumnya konflik Pilkada yang juga cukup menjadi berita nasional adalah Pilkada Kota Depok, Kabupaten Cilacap, Propinsi Lampung, Banten. Sekarang konflik besar terjadi di Maluku Utara, padahal Pilkadanya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Persoalannya pun sampai ke pemerintah pusat dan Mahkamah Agung (MA). Semakin memprihatinkan lagi konflik di Maluku Utara tersebut berdampak juga secara vertikal ke partai pengusung di pusat. Golkar sebagai pendukung pemerintahan SBY kecewa besar. Penyebabnya adalah Mendagri memenangkan calon gubernur dari Partai Demokrat di Maluku Utara tersebut. Ini sebenarnya mau apa bangsa kita? Padahal kita lihat rakyat ini semakin melarat.

Sebagai proses pembelajaran demokrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah lompatan jauh di kancah perpolitikan negeri ini. Namun, harus diakui, pilkada ternyata belum mampu menyemai desentralisasi demokrasi. Konflik

antarelite politik lokal yang terjadi dalam pilkada memperkuat hipotesis tersebut. Satu sisi pilkada memberikan rona demokrasi, tetapi di sisi lain memunculkan sejumlah ironi. Polarisasi antar kelompok masyarakat dan merenggangnya hubungan interaksi sosial menjadi salah satu dampak nyata dan tidak bisa dikesampingkan selama pelaksanaan pilkada.

Sebagai rakyat tentu kita berharap kedepan, apalagi menjelang Pemilihan umum nanti para elit politik kita benar-benar sadar bahwa kekuasaan itu adalah sebuah amanah dan tanggungjawab yang sangat besar. Berlaku-lah sportif dan berjiwa besar dalam berkompetisi. Jangan keterusan membuat dosa politik terhadap rakyat!

Partisipasi Politik

“Partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat” (Tjokroamidjojo, 1991)

PARTISIPASI berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah refleksi dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat; semakin banyak partisipasi akan semakin baik. Karena tingginya tingkat partisipasi adalah petunjuk tingkat pemahaman dan keterlibatan warga negara dalam aktivitas-aktivitas politik. Dan sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dipercaya sebagai bentuk permukaan dari apatisisme politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat *Pertama*, faktor sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga. *Kedua*, Faktor politik, peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi : *Pertama*, Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik (*Nimmo, 1993*). Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika (*Surbakti, 1992*).

Kedua, Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (*Eko, 2000*). Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (*Budiarjo, 1985*). *Ketiga*, Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (*Ramlan Surbakti 1992*). *Keempat*, Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah *the power of directing*. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat (*Widodo, 2000*), untuk

meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan (*Cristina, 2000*).

Partisipasi Politik di Indonesia

Tingkat partisipasi politik di Indonesia, sebagaimana dicatat Miriam Budiardjo (1982) partisipasi politik dalam pemilu selalu di atas 90 persen, kecuali Pemilu 1955, yang hanya 87,65 persen. Tentu angka ini bermanfaat untuk menjaring legitimasi, atau paling tidak merupakan simbol kepercayaan dan ketaatan rakyat pada negara. Tapi cukup disayangkan bahwa partisipasi politik rakyat Indonesia yang tinggi itu lebih cenderung pada tingkat partisipasi politik irrasional, maksudnya bahwa rakyat memilih lebih cenderung pada keikutsertaan kuantitas yang dipengaruhi oleh imbalance materi dan janji-janji sesaat oleh partai politik maupun juga calon pemimpin.

Tapi tesis yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo di atas telah mulai terbantahkan pasca tumbangny rezim Orde Baru, dimana tingkat partisipasi politik di Indonesia mulai melorot. Pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, naik menjadi 7,2 persen dibandingkan Pemilu 1997 yang hanya 6,4 persen saja. Lebih ironis lagi, penurunan partisipasi itu terjadi saat Pemilu 2004 lalu.

Dalam tiga rangkaian pemilu yang diselenggarakan secara berurutan kala itu, sebanyak 16 persen dari pemilih terdaftar tidak menyumbangkan suaranya untuk pemilu legislatif. Kemudian, angka ini mengalami kenaikan menjadi 21,77 persen pada saat pilpres putaran pertama. Pada akhirnya, angka ini kembali mengalami kenaikan pada saat pilpres putaran kedua menjadi 23,37 persen. Padahal, dalam Pemilu

2004, sistem pemilu sudah berubah menjadi pemilihan secara langsung dan euforia demokrasi sedang marak-maraknya.

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia tentu ada penyebab, semestinya pada pertumbuhan demokrasi dinegara ini pasca tumbanganya rezim otoriter partisipasi politik masyarakat juga meningkat. Tapi malah sebaliknya, ini ada apa?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2008 Hafiz Anshary menyatakan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa pemilihan kepala daerah disebabkan oleh kekecewaan kepada pemimpin politik. Dalam pidatonya pada acara penancangan gerakan nasional sosialisasi Pemilu 2009 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 06 Juni 2008, Hafidz mengatakan fenomena rendahnya partisipasi masyarakat itu juga disebabkan oleh kejenuhan masyarakat pada Pemilihan Umum dan karena kurangnya sosialisasi Pemilu. Kekecewaan adalah kunci persoalannya. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan yang sangat signifikan di era pemilihan langsung ini.

Bagaimana kedepannya menghadapi Pemilu mendatang? Tentu semua kita berharap terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat secara rasional, bahwa masyarakat memilih parpol dan pemimpin sesuai dengan hati nuraninya tanpa “paksaan” dari komponen apapun. Setelah itu mengawasi jalannya pemerintahan, sebagai bentuk mekanisme kontrol dari rakyat dalam mewujudkan budaya politik partisipan.

Dalam rangka penguatan peran partai politik untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, harus didahului atau terlebih dahulu harus diberdayakan partai politik itu sendiri dalam kancah percaturan politik nasional dengan menempatkannya pada posisi yang kuat dan memiliki

daya tawar yang cukup memadai. Caranya adalah dengan restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme, budayanya, serta kapasitasnya dalam melakukan fungsinya sebagai saluran komunikasi politik.

Bila partai politik sudah dalam keadaan yang berdaya, maka penajaman salah satu dari keempat perannya hanya bersifat kontesktual untuk menghadapi situasi dan kondisi yang mendesak dan vital. Dalam jangka panjang keempat peran itu harus diporsikan pada skala intensitas yang relatif seimbang dan serasi, agar masing-masing dapat saling memperkuat dan memperluas kapasitasnya.

Penyelenggaraan Pemilu yang relatif lebih baik dari masa lalu harus disadari sebagai keberhasilan semua pihak terutama Partai Politik, dan tidak boleh didistorsi menjadi hal-hal yang bersifat kepentingan sempit dan sesaat. Dalam kaitan ini semua pihak wajib ikut berpartisipasi untuk makin mendewasakan perilaku politik semua pelaku, terutama di kalangan elit politik.

Berebut Menjadi Caleg

JELAS sudah partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009, setelah ditetapkan bahwa 16 partai politik lolos otomatis ditambah dengan 13 partai politik lolos verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah 34 partai politik yang bertarung merebut kekuasaan di parlemen. Mulai tanggal 9 juli 2008 ini kampanye pun dimulai lebih cepat, berharap partai politik maksimal melakukan pengenalan kepada masyarakat.

Sembilan bulan masa kampanye parpol masyarakat berharap adanya pendidikan politik yang lebih baik. Akankah parpol bisa melaksanakan empat fungsinya dengan sungguh-sungguh? Yaitu sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*). Atau hanya akankah politisi berebutan saja menjadi anggota legislatif (aleg)?

Kita lihat saja proses demokrasi seperti apa yang akan dipertontonkan lagi oleh elit politik kepada rakyat sampai waktu pemilihan tahun depan. Tapi sepertinya menurut saya tidak akan muncul pendewasaan politik baru dinegara ini. Ya, pesimislah!

Para elit politik, sebut saja pengurus partai politik dari pusat sampai ke ranting/pengurus terendah struktural partai sedang melakukan gerakan *back to* rakyat. Setelah empat tahun melupakan konstituen karena menikmati empuknya kursi

dewan terhormat, berekreasi kedaerah lain dengan agenda kunker, studi banding keluar negeri, berpakaian mahal yang di anggarkan, bermobil dinas yang disiapkan tidak hanya untuk kepentingan rakyat tapi juga pribadi dan keluarga, disanjung/dihormati/dilayani oleh rakyat dan semua fasilitas yang bisa didapatkan dengan status anggota dewan terhormat.

Siapa yang mau kehilangan kenikmatan ini? Saya yakin tentu semua orang/elit politik juga ingin merasakan lagi empuknya kursi yang didapatkan dengan mengumpulkan suara demi suara dari rakyat ini. Pengurus partai yang belum pernah menjadi Aleg berjuang bagaimana bisa jadi Caleg jadi, yang sudah satu periode ingin maju lagi kedua kali, yang sudah dua kali di kabupaten/kota ingin maju ketingkat propinsi, yang sudah pernah di propinsi ingin maju ke pusat. Semuanya berebut agar dapat dipilih. Kadang segala cara di benarkan, *menelikung* teman dengan memfitnah, membeli kursi dan suara (*money politic*), membuat *deal* kalau terpilih akan *setor* perbulan kepada nomor urut lain, memanfaatkan semua apa yang mungkin bisa mendongkrak jumlah suara.

Tidak semua elit politik kita dari *background* ekonomi yang *save*, status sosial yang dipandang, pendidikan yang memadai, pemahaman politik yang berkapasitas. Ada yang sebelumnya looper koran, buruh tani, agen terminal, pengangguran terselubung/sarjana, tiba-tiba menjadi seorang anggota dewan terhormat karena berhasil meyakinkan masyarakat dengan partai yang dimiliki untuk mengisi parlemen. Tentu saja ada ketidakrelaan suasana ini beralih tangan.

Berebut menjadi aleg oleh elit politik adalah drama yang akan melibatkan rakyat sebagai pemeran pelengkap. Setelah drama usai pemeran pelengkap akan dibuang begitu saja. Bagi politisi yang sungguh-sungguh telah berjuang tetaplah

komitmen/istiqomah, jangan lupa diri kalian ada karena kami sebagai rakyat yang memberi amanah!

Demokrasi Multi Partai

WACANA penyerdahanaan sistem kepartaian di Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2009 hanyalah isapan jempol belaka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa partai politik peserta Pemilu langsung telah ditetapkan sebanyak 34 partai. Jumlah peserta Pemilu 2009 lebih banyak di bandingkan tahun 2004 yakni sebanyak 24 partai politik. Artinya kita kembali menganut sistem multi partai.

Sejarah perpolitikan berdemokrasi partai di Indonesia sejak awalnya memang lebih identik menganut sistem multipartai. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan partai dari pemilu ke-pemilu di negara ini. *Pertama*, Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan Partai Politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). *Kedua*, Pemilu 1971 diikuti oleh sepuluh kontestan (Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama , Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam PERTI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Ketiga, Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh tiga kontestan yang sama, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. *Keempat*, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. *Kelima*, Pemilu tahun 2004 diikuti sebanyak 24 kontestan partai politik. *Keenam*, Pemilu tahun 2009 diikuti sebanyak 34 kontestan partai politik yang berjuang merebut hati rakyat.

Berbagai alasan politis muncul ketika adanya penambahan sebanyak 10 partai politik peserta Pemilu tahun depan. Hampir semua bermuara kepada jawaban inilah demokrasi, mengatasnamakan rakyat, memperjuangkan rakyat miskin, berjuang melakukan perubahan. Kita tahu bahwa banyaknya muncul partai baru tentu juga banyak kepentingan yang ada didalamnya, semua menuju kepada jalan kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Partai baru muncul sebagai sebuah akibat dari kepentingan para elit politik di negeri ini, juga meraup keuntungan sesaat karena semua partai politik mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita tidak bisa mata terhadap fenomena ini, karena bercermin dari moment-moment Pemilu sebelumnya.

Sepertinya dengan sistem multi partai lagi pada pemilu yang akan datang akan membuat rakyat semakin bingung. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik belakangan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Banyak penyebab yang muncul, diantaranya; banyak kasus-kasus baik moral dan asusila yang muncul oleh elit parlemen, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan penyuapan, elit politik yang hanya mau tahu dengan rakyat hanya mendekat Pemilu saja, sehingga persoalan ini semakin membuat rakyat lebih berpikir rasioanal politik dan nurani yang mulai memilih. Rakyat kita sudah mulai melek politik dan tidak mau di bodohi.

Harapan terbentuknya jumlah partai yang lebih sederhana sudah dikalahkan oleh “libido” politik elit. Harapan terciptanya eksekutif yang kuat kedepan pun sudah kandas. Dibutuhkan waktu lama untuk menyaksikan sistem multipartai yang sederhana. Lebih-lebih parlemen juga tak punya cetak biru sistem kepartaian yang hendak dituju bangsa ini. Bayangkan

saja, ketentuan peralihan dalam UU 10/2008 tentang Pemilu, menyatakan seluruh parpol yang memperoleh kursi di DPR bisa langsung berpartisipasi di Pemilu 2009.

Ketentuan peralihan ini sebagai kompensasi diterapkannya *parliamentary threshold* Pemilu tahun ini. Apabila parlemen punya cetak biru, hanya tujuh parpol yang lolos tanpa verifikasi KPU pada Pemilu 2009. Nasi sudah jadi bubur, harapan banyak orang kalah dengan keinginan para elit politik di parlemen termasuk juga eksekutif. Sistem kepartaian seharusnya mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang kuat dan bersih, namun kenyataannya setiap partai lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Ideologi partai ternyata hanya tameng atau alat untuk merebut kekuasaan dan jabatan politik. Parpol lebu merupakan *broker* politik ketimbang wadah seleksi dalam pembentukan pemimpin politik.

Pendidikan Politik

Nomor urut partai politik peserta Pemilu 2009 ditetapkan pada 9 Juli 2008, masa kampanye pun dimulai sejak tanggal itu. KPU memang memberikan waktu kampanye lebih panjang pada Pemilu periode ini, yaitu selama 9 bulan dengan harapan masyarakat lebih bisa mengenal visi dan misi partai politik. Harapa kita adalah dalam jangka waktu yang panjang itu partai politik benar-benar bisa melakukan pendidikan politik sebagaimana fungsi yang melekat padanya.

Pertama, sarana komunikasi politik maksudnya partai memiliki peran yang sanagat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau '*political interest*' yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal fungsi komunikasi ini berbagai kepentingan diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-

kebijakan partai politik yang bersangkutan. Kemudian ide-ide dan kebijakan atau aspirasi tersebut diadvokasikan sehingga dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*) maksudnya partai politik berfungsi dalam hal pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat/warga negara. Misalnya dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkontitusi, partai politik dapat memainkan peran yang penting. tentu bukan partai politik saja yang punya tanggungjawab melakukan fungsi ini, karena semua kalangan dan lembaga-lembaga negara juga mempunyai tanggungjawab yang sama.

Ketiga, sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*) maksudnya partai politik dibentuk dengan tujuan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin bangsa pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader pemimpin ini dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan oleh legislatif atau melalui cara pemilihan langsung lainnya. Juga tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawaian-negeri yang tidak bersifat politik (*political appointment*) tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pangangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula. Untuk menghindari terjadinya pencampur-adukan perlu dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat teknis-administratif dan

profesional.

Keempat, pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict manajement*). Nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Sehingga partai politik dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut dan menyalurkannya sesuai dengan ideologi, program dan alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain. Sebagai pengatur konflik (*conflict management*) partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*agregation of interest*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik.

Multi partai akankah memberikan kontribusi kemajuan demokrasi?

Isu Kampanye dan Pendidikan Politik

BEBERAPA Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 2005 banyak hal yang menjadi sorotan. Munculnya konflik antar kubu pendukung sebagai bentuk akumulasi ketidaksiapan kalah oleh calon yang bertarung, banyak para elit lokal dengan *capital financial* yang besar untuk maju walaupun tidak berkompeten di bidang pemerintahan dan administrasi publik, munculnya daerah pemekaran baru yang diprakarsai oleh elit politik tertentu yang haus kekuasaan sampai pada isu kampanye yang cenderung membodohi dan menipu rakyat, tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Salah satu isu kampanye yang paling laku dijual oleh calon kepala daerah adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Pendidikan dan kesehatan memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi rakyat kita. Si calon kepala daerah sangat tahu bahwa rakyat juga sangat butuh itu. Maka untuk menarik dukungan, simpati dan suara dari rakyat pada waktu hari pemilihan, isu ini pun di jadikan *icon* program di kampanye.

Kalau itu niat baik yang akan direalisasikan setelah menang pasti kita sangat mendukung. Tapi kalau hanya akan jadi isu isapan jempol yang mengantarkan si calon kepala daerah sampai menang saja, ini yang namanya pembodohan dan penipuan terhadap rakyat. Kita pun tahu ini sudah menjadi tabiat elit politik di negeri ini. Ya, banyak yang menipu rakyat sampai dapat kursi!

Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat miskin merupakan anugerah untuk rakyat miskin dari pemimpinnya. Tapi kalau bersifat etatisme/penyamaan/semua dibiayai negara, berlaku gratis untuk semua orang ini adalah melanggar prinsip-prinsip keadilan. Salah satu cita-cita demokrasi adalah prinsip keadilan sosial. Betapa tidak adil seluruh lapisan masyarakat digratiskan.

Adil bukan berarti sama tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah pelajaran kita di sekolah dasar dulu. Menjual isu kampanye pun bagi calon kepala daerah, harus mendidik bagi masyarakat (*political education*). Jangan hanya menjual isu murahan, isu sampah yang justru menyesatkan dengan kata-kata gratis. Kita analisa lebih dalam, kalau pendidikan gratis untuk semua orang di daerah tertentu, berarti dari anak pejabat sampai orang melarat gratis, dari orang kaya sampai miskin gratis. Betapa enak nya anak-anak pejabat dan anak-anak orang kaya bisa menikmati fasilitas yang gratis sama dengan anak tukang becak, anak buruh tani, anak kuli bangunan, anak pemulung, anak tukang angkat dan anak siapapun yang di depan rumahnya ada tulisan “rumah tangga miskin”.

Begitupun dengan kesehatan gratis untuk semua lapisan masyarakat yang sedang *didandang*-kan oleh si calon kepala daerah untuk meraih dukungan pada pilkada. Alangkah beruntungnya para pejabat dan orang-orang kaya di daerah tertentu bisa menikmati fasilitas kesehatan gratis.

Dimana prinsip keadilan yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya? Etatisme lebih dekat dengan komunisme. Etatisme dimana semua dibiayai negara telah terbukti gagal di negara besar yang dulu jaya seperti Uni Sovyet. Kita tidak ingin otonomi penuh ini gagal dan kita kembali pada sistem

sentralisasi seperti dulu.

Gratis boleh saja tapi tidak untuk semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah harus membuat SK orang miskin, kemudian di buat program agar mereka keluar dari kemiskinannya. Orang kaya dan pejabat harus men-subsidi pendidikan dan kesehatan, bukan menikmati haknya orang miskin. Wahai, Si calon kepala daerah rubahlah paradigma anda! Bangun daerah dengan kualitas dan inovasi besar.

Kampanye Parpol Minim Pendidikan Politik

Kampanye merupakan bagian dari pesta demokrasi yang harus dilalui oleh masing-masing partai politik peserta pemilu, yang bertujuan untuk memperkenalkan parpol beserta calegnya kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat memilih parpol dan caleg tersebut. Kampanye ini merupakan sarana paling efektif disamping penggodokan kader maupun iklan-iklan di media massa. Namun kerap kali para juru kampanye (jurkam) kebablasan dalam mengutarakan visi dan misi parpolnya, sehingga cenderung obral janji.

Menghadapi pemilihan umum kedepan sepertinya akan sarat dengan pendidikan politik. Melihat banyaknya peserta Pemilu, mengharuskan parpol berjuang dengan berbagai upaya agar dilirik dan dipilih oleh rakyat.

Menilik kampanye partai politik (parpol) dalam pemilu sebelumnya, kampanye kali ini juga akan sama. Kampanye selalu diselenggarakan secara meriah dan dihadiri ribuan dan bahkan mungkin jutaan massa pendukung parpol. Dalam setiap kampanye itu pula, masing-masing partai mencoba menghadirkan hiburan dengan cara mendatangkan artis-artis terkenal.

Sebagian besar partai menjadikan artis dangdut dengan goyongannya selalu memukau para pendukung partai. Juru

kampanye biasanya hanya memberikan pesan-pesan singkat terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan hiburan. Sedangkan masyarakat terlihat lebih ingin menikmati hiburannya dibanding mendengar program-program partai. Walaupun tidak semua partai yang melakukan itu, seperti adanya partai Islam yang komitmen menjaga moral perjuangannya.

Di sisi lain, memang tidak dapat dipungkiri era reformasi telah memberikan ruang bagi perdebatan tentang program politik, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan ketika Orde Baru. Perdebatan itu sering ditemui dalam sebuah acara televisi yang telah dikemas khusus. Dalam setiap kali perdebatan, tokoh-tokoh yang mewakili partai berargumentasi sesuai dengan pandangan partainya. Perdebatan itu dapat membuat penonton terkesima oleh pandangan-pandangan yang brilliant dari tokoh yang dihadirkan tersebut. Namun, acara itu pun akhirnya hanya menjadi hiburan saja dan berlalu seiring dengan berakhirnya waktu tayang.

Pelaksanaan kampanye Pemilu sekarang sedikit banyak telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan media informasi. Karena pada intinya kampanye memang sebuah broadcast informasi. Penggunaan media televisi, radio, dan internet mewarnai pelaksanaan Pemilu kali ini.

Sayangnya *effort* terbesar yang dikeluarkan para peserta Pemilu masih salah sasaran. Kampanye pengumpulan massa tetap menjadi primadona. Pengorganisasian pesta jalanan besar-besaran dijadikan patokan keberhasilan kampanye.

Sementara banyaknya massa dan warna bendera partai yang menyelimuti jalanan tetap bukan patokan perolehan suara. Masyarakat umumnya telah mempunyai pilihan suaranya masing-masing secara historis.

Ditambah lagi dengan cara pemilihan legislatif yang

langsung kepada personil. Para calon pemilih yang bingung biasanya mendedikasikan suaranya pada personal yang paling dekat kekerabatannya. Misalnya tetangganya yang jadi caleg, atau teman kakak iparnya, mertua tetangganya, dan lain-lain. Sedikit hasil kampanye yang bisa dinilai positif adalah keberhasilan sebuah hiburan rakyat tingkat nasional. Mulai dari anak-anak dan orang tua larut dalam sorak-sorai dan joged bersama artis-artis ibukota.

Kita sangat berharap kepada semua partai politik peserta Pemilu tahun depan, dengan masa kampanye yang sangat panjang, yaitu selama 9 bulan substansi atau muatan pendidikan politik bisa dirasakan oleh rakyat.

Ketika Golput Menjadi Pilihan

“Partisipasi politik selain melalui aktivitas elektoral (pemilu) juga bisa melalui lobi, aktivitas organisasional (nonparpol), kontak individual dengan pejabat publik, dan (bahkan) dengan kekerasan sekalipun walaupun tidak ada cara lain, revolusi termasuk dalam konteks ini” (Robert P Clark, 1986).

PROSES pesta demokrasi pemilu 9 April 2009, sudah dimulai sejak tahun 2008. Para pelaku politik yang siap-siap menuju parlemen lagi *kalangkabuik* mengurus proses administrasi yang harus diserahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik Calon Legislatif (Caleg) pusat maupun daerah. Semua syarat harus dipenuhi diantaranya yang ditetapkan undang-undang adalah, syarat lulus test kesehatan baik jasmani maupun rohani/psikologi, ijazah yang dilegalisir dari Sekolah Dasar (SD) sampai pendidikan terakhir si calon, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai catatan bahwa si calon tidak pernah melakukan tindak pidana, surat menetap di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan sebagai pemilih tetap, surat keterangan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi warga negara berprofesi sebagai PNS, dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh internal partai seperti siap mengundurkan diri, setoran persentase ke partai kalau nanti duduk dan lain-lain.

Di sisi lain, baik di pinggir-pinggir jalan raya kota maupun

di perkampungan bendera-bendera partai ber-aneka warna berjejer berkibar di terbang angin, basah kena hujan, memudar kena debu dan panasnya terik matahari. Bagi partai yang punya modal sedikit, hanya mengandalkan bendera untuk di pajang dimana-mana, atau di media cetak sesekali. Bagi partai yang bermodal besar, sebentar-sebentar bisa muncul di media elektronik seperti televisi dan internet. Kadang yang *nongol* partainya, kadang calon legislatif dan presidennya. Biaya untuk bisa ber iklan di televisi tentu tidak sedikit. Bagi partai dan elit yang ber uang iklan mahal tidak masalah, karena investasi politiknya juga tidak tanggung-tanggung. Mereka tahu jutaan pasang mata akan bisa melihat dan mendengar jualan partai dan elit tersebut. Sebaliknya media televisi akan meraup keuntungan yang besar dari mega proyek kampanye tersebut.

Tujuan kampanye dalam bentuk apapun tidak lain adalah meraih simpati dari rakyat. Satu suara rakyat akan sangat berarti untuk menuju kursi empuk eksekutif maupun legislatif. Kadang cara-cara yang tidak fair/menipu pun dilakukan demi satu suara untuk dukungan, beberapa waktu yang lalu kita baca di media lokal Sumbar, di Lubuk Basung ada isu pembagian harta karun Soekarno, masyarakat akan dibagi-bagikan uang sebanyak 5 juta rupiah dengan catatan KTP dikumpulkan. Setelah KTP diserahkan uang tak kunjung datang dan bahkan Si pengumpul KTP hilang tak tahu rimbanya. Pada waktu bersamaan adalah pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), apakah mereka kaki tangan para calon senator tersebut? Entahlah!

Di balik usaha keras partai dan para elit politik menjual dagangan politiknya, ternyata rakyat juga sudah sampai pada titik kejenuhan. Rakyat sudah bosan dengan janji-janji palsu

yang membodohi dari partai dan elit politik tersebut. Harapan meningkatnya partisipasi politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru pun sulit terwujud. Banyak Pilkada yang di gelar sejak tahun 2005 telah membuat rakyat semakin merasa di bodohi, apalagi para elit sering memanfaatkan massa untuk membuat konflik ketika hasrat kekuasaan mereka tidak terpenuhi.

Dan Golongan Putih (Goput) pun menjadi pilihan bagi rakyat. Rakyat tidak mau berlumur dosa politik, karena bagi mereka Pemilu dan Pilkada tidak memberi manfaat apa-apa. Yang miskin tetap miskin, harga tetap naik, lapangan kerja tak kunjung di tambah, PHK merajalela di perusahaan-perusahaan dan balita kurang gizi juga ada dimana-mana. Ikut memilih dalam Pilkada atau Pemilu adalah sebuah pilihan, golput pun menjadi sebuah pilihan. Bahkan dalam banyak Pilkada dan bahkan Pemilu tahun depan mungkin Golongan Putih yang akan menang.

Faktor utama terbentuknya golput adalah akumulasi kekecewaan rakyat terhadap partai dan elit politik, walaupun di sisi lain menurut Indra J Piliang juga disebabkan oleh pendataan di tingkat bawah, kadang juga dilakukan oleh oknum-oknum elit yang bermain untuk kepentingannya. Lahirnya calon pemimpin melalui jalur perseorangan mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat, alasannya adalah sudah tidak percaya dengan partai politik.

Meski sedikit kurang demokratis bahkan kurang rasional dalam memandang masalah golput, dengan alasan apapun, meskipun itu alasan nasionalisme. Apalagi harus menjustifikasi golput sebagai sikap yang bertentangan dengan Undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia. Tetapi sebagai wacana perdebatan tentu perlu mendapat apresiasi, boleh jadi ada makna lain di balik itu.

Untuk itu, golput tidak hanya dilihat dari satu sisi, paling tidak golput harus dilihat dalam tiga hal. Apakah yang terjadi golput ideologis, golput pragmatis, atau golput politis. Tentu bukan jaminan tingginya partisipasi publik pada setiap pemilu akan memberikan pengaruh baik pada kondisi demokrasi termasuk kondisi suatu bangsa.

Karena golput memang bukan barang haram dalam demokrasi. Larangan golput merupakan pelanggaran terhadap demokrasi, karena golput atau tidak memilih adalah hak setiap orang karena Pemilu itu bukan kewajiban warga negara. Sebagai hak, boleh digunakan dan boleh juga tidak. Sebab, menggunakan hak adalah hak, tidak menggunakan hak adalah juga hak. Berbeda dengan kewajiban yang merupakan keharusan.

Sebaliknya, yang menggunakan hak pilihnya juga tentu tidak salah, karena telah menggunakan haknya sesuai dengan pilihannya, entah memilih karena pragmatisme atau karena ideologis, tentu bukan persoalan. Memilih karena masih ada harapan perbaikan yang lebih baik. Diantara mereka yang buruk mungkin masih ada yang baik, atau berubah menjadi orang baik. Dengan harapan bisa menutup peluang politisi buruk untuk berkiprah.

Security Printing Pilkada

SEPANJANG pelaksanaan Pilkada yang digelar di beberapa propinsi dan kabupaten di Indonesia hampir secara umum menyisakan konflik. Pemilihan langsung kepala daerah yang dimulai pasca revisi UU no 22 tahun 1999 menjadi UU no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian juga diadakan revisi kedua/terbatas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu point pentingnya adalah mengakomodir calon perseorangan yang lebih populer dengan istilah calon independen. Langkah ini dilakukan dengan tujuan terciptanya kesempurnaan berdemokrasi.

Sebelum dilakukan revisi terbatas terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah hampir semua daerah yang melakukan Pilkada hampir menyisakan konflik-konflik baru dalam sistem dan tatanan politik bangsa ini. Beberapa pelaksanaan Pilkada belakangan ini dimulai, di proses dan diselesaikan dengan konflik. Sebut penyelesaian Pilkada Sulsel dan Malut yang sampai pada Mahkamah Agung (MA).

Tentu banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik-konflik tersebut. Kita berharap kedepan proses demokrasi dinegara ini bisa berjalan dengan lebih dewasa. Tentu dengan mengetahui akar konflik dan solusinya.

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Padang yang telah memasuki tahapan penetapan pasangan calon dan nomor urut calon kemaren di Gedung Rangkayo Basa (Senin/08 September 2008), sebanyak 5 pasang calon bertarung pada tanggal 23 Oktober mendatang.

Sampai pada tahapan ini KPU Padang dan dinas terkait lainnya telah mampu melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kita sampai pada tahapan selanjutnya juga aman terkendali.

Pilkada langsung pertama yang dilakukan di pusat ibu kota propinsi ini diikuti 2 pasang jalur perseorangan (non partai) dan 3 pasang calon dari jalur partai politik, mereka adalah Ibrahim-Murlis Muhammad nomor urut 1, Mudrika-Dahnil Aswad nomor urut 2, Fauzi Bahar-Mahyeldi nomor 3, Jasrial-Mukhlis Sani nomor urut 4 dan Yusman Kasim-Yul Akhyari Sastra nomor urut 5 . Masyarakat sangat berharap Pilkada ini tidak seperti daerah lain yang menyisakan konflik, dan sangat merugikan masyarakat.

Salah satu antisipasi konflik pilkada dari awal yang mesti/ harus dilakukan oleh KPU Padang adalah pengadaan surat suara dengan sistem *security printing*. Sistem *security printing* akan bisa memberikan tingkat keamanan dari penipuan dalam bentuk penggandaan surat suara oleh percetakan yang akan menyediakan/memfasilitasi surat suara tersebut. Kita bukan tidak percaya dengan percetakan, tapi ini penekanannya lebih kepada tingkat keamanan dengan sistem komputerisasi yang tingkat *error*-nya sangat tipis. Dan kemungkinan surat suara untuk dicetak lagi atau digandakan sudah tidak bisa. Meskipun belum diatur oleh undang-undang atau peraturan KPU, alangkah lebih baik ada antisipasi aman yang dilakukan dalam tiap ruang yang ada dalam proses pilkada ini. Harusnya KPU Padang sebagai penyelenggara pilkada bisa memperhatikan aspek keamanan dalam proses demokrasi ini. *Security printing* pengadaan surat suara adalah langkah yang tepat untuk dilakukan.

Masih baru dalam ingatan kita ketika terjadi peggelembungan suara pada pilkada Provinsi Sulawesi Selatan

dan Maluku Utara pada waktu yang lalu, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah penggandaan surat suara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat dari persoalan ini adalah, adanya ketidakpuasan dari calon yang merasa dirugikan. Akumulasi ketidakpuasan elit politik dalam pilkada akan menggerakkan massa dalam konflik horizontal yang akan sangat merugikan rakyat dalam segala aspek kehidupan.

Pilkada Padang, Evaluasi Demokrasi

PESTA perhelatan demokrasi kota Padang baru saja selesai. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama “Kota Bangoang” ini telah melahirkan pemimpin baru lima tahun kedepan. Secara umum Pilkada berjalan dengan aman dan damai. Pemilu *badunsanak* yang di dideklarasikan sebelumnya berjalan dengan efektif. Tidak ada riak atau benih-benih konflik.

Sumatera Barat Intellectual Society (SIS) berkontribusi memberikan informasi terkini seputar Pilkada kota Padang beberapa waktu yang lalu. Lembaga ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pada tahapan pra, pelaksanaan dan pasca Pilkada. Pra Pilkada SIS melakukan survei tentang evaluasi kinerja pemerintah kota Padang selama 4 tahun terakhir. Termasuk juga kinerja DPRD. Kemudian juga melakukan survei tentang harapan masyarakat terhadap kepemimpinan baru mendatang, keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada, visi dan misi calon Walikota, program-program yang harus diprioritaskan oleh Walikota. Termasuk mendekati Pilkada, SIS melakukan survei tentang pembagian kartu pilih.

Tahapan pelaksanaan hari pemilihan SIS membantu masyarakat memberikan informasi sementara dengan melakukan *quick count*. Hasil *quick count* ini menjadi referensi pemberitaan beberapa media seperti Padang Ekspres, Posmetro, Padang-Today dan Padang TV, karena memang tidak

ada lembaga independen lain yang melakukan kegiatan ini. Untuk terlaksananya *quick count* ini SIS bekerjasama dengan lembaga-lembaga mahasiswa seperti BEM Unand, Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumbar, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Unand.

Pasca Pilkada SIS tetap melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dalam bentuk penyajian hasil survei. Walaupun secara penyajian datanya dengan metodologi yang sangat sederhana, tapi lembaga ini bisa memberikan masukan ke berbagai pihak. Salah satu catatan penting dari kelemahan Pilkada yang baru selesai ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak memilih atau golongan putih (golput).

Dari data yang pernah disampaikan SIS, bahwa golongan putih pada Pilkada kemaren sebanyak 41 persen. Ini masukan paling penting bagi KPU kota Padang, menghadapi Pemilu dan Pilkada Gubernur kedepan agar memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dengan lebih baik. Banyaknya masyarakat yang tidak memilih juga disebabkan karena kesalahan pendataan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh KPU Padang.

Survei kali ini SIS ingin melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Sebagaimana kita ketahui KPU Padang telah mengumumkan secara resmi hasil Pilkada beberapa waktu yang lalu. Pemenang Pilkada adalah pasangan Fauzi Bahar-Mahyeldi, mengalahkan 4 pasangan kandidat yang lain. Walaupun 4 pasangan yang kalah, yaitu Ibrahim-Murlis Muhammad, Mudrika-Dahnil Aswad, Jasrial-Mukhlis Sani dan Yusman Kasim-Yul Akhyari Sastra keberatan dengan hasil Pilkada, ini kita hargai sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus terus dikoreksi untuk kedepan diperbaiki.

Dari survei yang dilakukan terhadap 50 orang responden

terpilih secara acak via telepon, 34 orang menyatakan puas dengan hasil Pilkada, 16 orang menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan ini mencerminkan bahwa masyarakat peduli dengan proses yang dilakukan dalam memilih pemimpinnya. Ketidakpuasan merupakan cerminan bahwa dalam rangka menciptakan demokrasi yang ideal harus ada evaluasi dari berbagai pihak. Terutama terhadap penyelenggara Pilkada, termasuk juga terhadap pasangan terpilih untuk lebih bekerja keras dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Tidak sekedar janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye kemaren.

Pemilu Dekat, KPU Lambat

PEMILIHAN Umum (Pemilu 2009) semakin dekat. 9 April tinggal hitungan hari. Gendrang perang partai politik dan Caleg sudah tak terbendung arusnya. Sejak disahkan suara terbanyak sebagai mekanisme penempatan penghuni parlemen, dinamika politik terasa hidup. Banyaknya partai politik (multi partai) memberi kesempatan untuk warga negara ikut terjun ke politik praktis.

Para Caleg muncul dari latar belakang yang beragam. Seperti lowongan kerja yang apabila setiap orang diberi kesempatan maju, merasa berhak menang. Berpeluang dipilih. Para calon wakil kita itu dari yang paling kaya (konglomerat) sampai Caleg dhua'fa menebar janji dimana-mana. Mereka yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Daerah itu, berpendidikan dari paling tinggi hingga berijazah palsu pun merasa mampu memimpin rakyat. Katanya inilah negara demokrasi!

Banyak catatan muncul pada masa kampanye yang panjang dari 9 Juli 2008 lalu sampai sekarang. Tidak tertibnya sarana kampanye Caleg seperti baliho, spanduk, stiker, pamflet dan lain-lain. Cendrung merusak pemandangan kota, pohon-pohon menjadi korban demokrasi, *traffic light* tertutup bendera, membuat rawan kecelakaan. Pajak iklan yang tak dibayar. Tempat ibadah, instansi pemerintah dan sekolah-sekolah pun dimasuki kampanye meraih simpati rakyat. Tak terkecuali kampanye hitam *person to person* dilakukan (*black*

campaign). Banyak caleg yang latah. Sekedar ikut-ikutan “berjudi” politik. Mana tahu ada peruntungan katanya.

Sembilan bulan terasa singkat. Pemilu itupun semakin dekat. Para caleg sudah siap. Sebagian mengatakan siap menang siap kalah. Di baliho tertulis siap menjalankan amanah rakyat, kalau tidak mampu bersedia mundur. Yakinkah kita begitu? Atau sekedar pelaris dagangan saja? Sebagian yang lain siap-siap gila kalau tidak menang. *Cost* politik besar, harta digadai membuat amunisi kampanye. Dulunya begitu yakin menang karena berada di urutan satu. Beli nomor urutpun rela dilakukan dipartai politik. Tapi setelah suara terbanyak, si Caleg jadi terhenyak. Dilakukan survei ke masyarakat tak ada yang minat. Pemilu semakin dekat apalagi cara yang dilakukan? Entahlah.

Demokrasi kita belum terlalu dewasa. Demokrasi cengeng. Demokrasi prosedural belum substansi. Helatan limatahunan itu menghabiskan anggaran tak tanggung-tanggung. Kami rakyat kecil dapat apa? Kalian tambah kaya wahai wakil rakyat! Sebelum duduk kalian dekati kami, setelah duduk kalian lupakan. Begitu gerutu si rakyat kecil korban janji demokrasi elit. Budaya politik kita parokial (sekedar ikut), pemilihnya irrasional (asal-asalan). Coblos/contreng hari ini, sampai lima tahun kedepan tak mau tahu. Nasib tetap tak berubah, itu paradigmanya.

Parahnya lagi, rakyat semakin bingung. Kadang tak mau peduli. Penyelenggarapun, sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat sampai daerah bekerja lamban. Perubahan cara memilih dari coblos ke contreng banyak yang tak dimengerti rakyat. Orang Minangkabau saja sebagian besar tidak tahu dengan arti kata-kata contreng. Penentuan sahidaknya penandaan yang lebih dari satu kali hingga kini juga

belum ada kejelasan. "Ukuran kertas yang lebar, banyaknya pilihan partai ataupun calon anggota legislatif (caleg) akan menimbulkan kebingungan bagi pemilih," kata Andrinof Chaniago (Kompas 24/02/2009).

KPU selalu menjadi sorotan mendekati Pemilu dan Pilkada. Anggaran besar, kerja lamban begitu penilaiannya. Buktinya, Pemilu legislatif yang semakin dekat itu tak tersosialisasi dengan baik. Jadwalnya saja banyak yang belum tahu. Belum ada kita temukan spanduk, baliho, pamflet KPU tentang sosialisasi Pemilu tersebut dimana-mana. Yang ada hanyalah sosialisasi Caleg-Caleg. Mungkinkah Pemilu tanpa KPU?

Pemilu 2009, disinyalir rawan konflik. Konflik antara calon internal dalam satu partai. Suara terbanyak membuka ruang Caleg internal partai lebih individual. Caleg lintas partai dalam satu daerah pemilihan, hingga konflik partai antar partai dalam penentuan kursi bagi partai yang sama-sama minim meraih suara.

Pendistribusian logistik Pemilu ke daerah-daerah pedalaman juga butuh waktu. Indonesia bukanlah negara kecil. Lagi-lagi KPU harus bekerja cepat. Logistik sampai lokasi, masyarakat tak tahu cara memilih apa yang akan terjadi? Atau logistik Pemilu yang kacau balau. Bisa bayangkan kalau logistik untuk Kota Solo sampai ke Kota Solok. Memalukan sekali!

Harusnya Caleg juga membantu kerja KPU. Pendidikan politik yang baik pada rakyat. Untuk apa mereka memasang baliho besar dengan senyum yang indah, tapi rakyat tak tahu kapan akan memilih. Tapi Caleg-Caleg itu tak berpikir sampai kesana. Jangan sampai terjadi Pemilu tanpa KPU!

***E-Voting* Pilkada**

PILKADA menurut jadwal akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Bisa saja ada perubahan melihat kondisi perkembangan pandemi Covid-19. Sebagaimana sebelumnya yang direncanakan di bulan September 2020.

Perludem sebagai lembaga yang *concern* terhadap Pemilu mengusulkan Pilkada diundur tahun 2021. Namun Mendagri dalam rapat virtual dengan Komisi II DPR RI, Rabu (27/5/2020) menegaskan akan tetap melaksanakan Pilkada tahun ini. Karena tidak ada jaminan tahun depan kondisi pandemi Covid-19 akan berakhir.

Sadar bahwa Pilkada akan tetap digelar di tengah wabah dengan segala resiko kesehatan, KPU mengusulkan penambahan anggaran. Dalam rapat bersama Kemendagri, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi II DPR, Rabu (27/5/2020), Ketua KPU RI, Arief Budiman sebanyak Rp535,9 miliar.

Dana itu akan dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Usulan anggaran tersebut untuk membeli masker bagi para pemilih sebanyak 105 juta orang sebesar Rp263,4 miliar.

Rencana pembelian alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar. Pembelian alat kesehatan bagi para panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar

Rp2,1 miliar. Termasuk juga rencana mengganti alat coblos kertas suara sekali pakai guna menghindari penyebaran virus corona.

Baru sebatas usulan oleh KPU kepada pemerintah. Belum ada keputusan diterima, ditolak atau berapa dipenuhi. Tentu ada alasan yang kuat mengapa itu diusulkan KPU. Demi keselamatan kesehatan penyelenggara dan pemilih. Namun usulan itu menuai kritik yang tajam dari banyak pihak.

Bahkan di sosial media ada yang menuding KPU memanfaatkan situasi. KPU tidak peka, tidak rasional, lembaga negara berlomba menghabiskan dan lain sebagainya. Mengingat kondisi keuangan negara yang banyak hutang dan *ambyar*-nya APBN tahun ini untuk penanganan Covid-19.

Bicara keuangan di masa wabah ini memang sangat sensitif. Baik keuangan rumah tangga dalam keluarga, keuangan perusahaan oleh pengusaha apalagi anggaran negara pasti disoroti rakyat.

Bisa jadi ada trauma sendiri oleh KPU terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di bangsa kita. Pemilu kita tahun lalu memakan korban jiwa yang cukup banyak. Pada Pemilu 2019 sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Penyebab kematian adalah beban kerja penyelenggara yang sangat berat, karena pemilihan presiden dan legislatif dihelat serentak. Angka kematian yang tinggi ketika tidak ada wabah seperti sekarang. Wajar saja KPU cemas terhadap nyawa penyelenggaranya di situasai wabah ini.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di negara kita yang seluas ini memang sangat berat. Kondisi demografi dan sebaran penduduk ke berbagai daerah pedalaman membutuhkan sumberdaya yang sangat besar menjangkaunya. Belum lagi

soal kesadaran dan partisipasi memilih yang rendah. Kita berikan apresiasi yang tinggi atas kerja penyelenggara Pemilu dan *stakeholder* terkait yang sangat memperhatikan hak suara rakyat dalam memilih.

Menurut saya saatnya kita beralih sistem pemungutan suara Pemilu dan Pilkada dari tradisional ke *online. e-voting* sudah harus kita mulai dalam perhelatan demokrasi. Agar biaya politik lembaga penyelenggara kita bisa lebih ditekan/efisien. Termasuk juga meminimalisir kecurangan.

Menyiapkan *e-voting* tentu juga tidak mudah. Butuh waktu dan masa transisi. Kecanggihan teknologi sudah bisa dimanfaatkan. Harus ditopang dengan sistem proteksi dan pendataan pemilih yang valid. Tantangannya adalah sebaran penduduk. Daerah pedalaman yang belum terakses jaringan internet.

Jika beralih ke *e-voting* pasti juga belum semua bisa terjangkau. Menurut saya, bagi sebagian besar daerah yang sudah akses, *e-voting* sudah bisa dimulai. Pemerintah dengan program palapa ring juga sudah membangun fasilitas infrastruktur telekomunikasi berupa jalur serat optik di seluruh Indonesia. Jalur ini akan mendukung pelaksanaan *e-voting*.

Payung hukum *e-voting* juga sudah ada. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 merupakan landasan hukum *e-voting*. Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam Perppu dijelaskan, bahwa pemungutan suara bisa melalui peralatan suara secara elektronik, selain dengan memberi tanda. Juga ada putusan MK No 147/PUU-VII/2009 yang membahas soal *e-voting* dalam Pilkada.

Pendemi Covid-19 ini telah merubah cara masyarakat dalam membangun komunikasi. Masyarakat sangat melek teknologi. Budaya *online* sudah berakulturasi dalam diri. Beli sayur seikat dan bawang sekilo sudah via aplikasi. Hampir semua aktivitas dilakukan secara virtual. Orang sudah terbiasa. Internet juga bukan lagi sesuatu yang mahal.

Tentu saatnya memilih pemimpin di suatu daerah tidak perlu lagi datang ke bilik suara tradisional. Mengumpulkan orang, yang bisa jadi ancaman kluster baru penyebaran Covid-19. Dana tambahan yang diusulkan KPU RI sebesar Rp535,9 miliar untuk membeli APD habis pakai, bisa dialihkan membangun sistem *e-voting* Pemilu/Pilkada yang akan bisa dipakai terus ke depannya.

Pilkada Pandemi

TAHAPAN Pilkada 2020 sudah siap dimulai. Kemendagri, DPR dan KPU sepertinya sudah sepakat tidak akan ada penundaan tahap dua.

Penundaan tahap satu terjadi karena puncak wabah Covid-19 dari bulan April-Mei di Indonesia. Pilkada yang rencana awal bulan September ditunda ke Desember 2020.

Penundaan ini diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

KPU memastikan tahapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang.

Langkah pertama untuk memulai kembali tahapan tersebut, KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara *ad hoc*, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pilkada 2020 akan diikuti 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut saya Pilkada 2020 ini akan menjadi pemilihan langsung kepala daerah terberat, bahkan berpotensi menjadi pesta demokrasi yang hambar. "Pilkada Pandemi" saya istilahkan. Maksudnya pesta demokrasi di tengah wabah penyakit yang membahayakan. Covid-19 ini mengancam jiwa manusia. Banyak standar kesehatan yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai penyelenggara, KPU akan menghadapi berbagai tantangan. Terutama soal anggaran, baik oleh pemerintah

pusat maupun daerah yang akan menggelar Pilkada. APBN dan APBD kita menjadi terganggu karena dialihkan untuk penanganan Covi-19.

Bagi penyelenggara di TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi harus memastikan keamanan kesehatan yang ketat. Karena itu KPU RI mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp535,9 miliar ke pemerintah. Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada.

Bagi kandidat atau kontestan, Pilkada di tengah pandemi ini tidak mudah. Mengapa? Isu dan strategi kampanye akan berubah.

Salah satu dampak sosial akibat Covid-19 ini meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat kehilangan pekerjaan karena tsunami PHK. Sektor usaha semuanya *amblyar*, sehingga pertumbuhan ekonomi merosot.

Dampak ekonomi ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Apakah isu kampanye membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat relevan bagi kandidat? Tidak mudah mengejawantahkannya ke dalam program kerja. Kalaupun ada isu ini, saya yakin hanya “jualan kecap” semata.

Strategi kampanye juga akan berubah. Tidak boleh pengerahan masa. Orang juga takut berkumpul. Terancam menjadi klaster baru Covid-19. Kandidat akan berkampanye *door to door* ke rumah calon pemilih. Kampanye dengan menggunakan media luar ruangan tidak berpengaruh besar bagi calon pemilih.

Harga suara pemilih akan naik. Biaya politik kandidat meningkat. Dipastikan yang akan berani maju sebagai calon adalah pemilik modal yang memadai.

Karena masyarakat hidup dalam kesulitan. Pilkada adalah peluang rakyat bisa mendapatkan uang tanpa bekerja.

Menurut saya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara akan turun di Pilkada 2020 ini. Mengapa? Karena sistem pemilihan kita masih tradisional menggunakan bilik suara.

Pemilih harus datang ke TPS. Berinteraksi dengan orang dan berkumpul. Atau bahkan menyentuh benda yang sama secara bergiliran di lokasi pemungutan suara tersebut. Saat ini orang sangat proteksi soal kesehatan.

Variabel lain ancaman menurunnya partisipasi pemilih yaitu masyarakat jenuh politik. Terutama pasca Pilpres tahun lalu. Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat, korupsi dan nepotisme yang menjadi-jadi, harga kebutuhan pokok melonjak, tarif listrik naik, harga BBM yang tidak pernah turun, sulitnya lapangan pekerjaan, kriminalitas tinggi, utang negara membengkak, lambannya penanganan Covid-19 dan rencana kebijakan dana haji yang dialihkan penggunaannya sementara.

Akumulasi kekecewaan terhadap pengaturan negara yang tidak benar ini akan berdampak terhadap sikap politik rakyat. Muncul pemahaman baru di tengah masyarakat, Pemilu/Pilkada tidak memberikan pengaruh lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut saya peluang petahana untuk bisa memenangkan Pilkada kedua kali juga tidak akan mulus. Mengapa? Kepala daerah yang sedang berkuasa saat ini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang berat. Penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan masyarakat sangat luas.

Percikan konflik horizontal mudah tersulut jika program

bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Kapasitas kepala daerah dalam merumuskan kebijakan memutus mata rantai penyebaran virus juga akan menjadi sorotan.

Pun, waktu yang semakin sempit menyiapkan diri untuk bertarung pada periode kedua. Berkejaran dengan penyelesaian berbagai program penanganan Covid-19 yang belum tuntas. Mata masyarakat akan sangat tajam melihat kinerja calon petahana dan menilai layak atau tidak untuk dipilih kembali.

Sepertinya, kita harus tetap optimistis menatap Pilkada 2020. Tentu semua prasyarat pilkada berkualitas harus terpenuhi.

Akhirnya, kita hanya bisa berharap demokrasi kita tumbuh dengan sehat, bukan malah menjadi “pandemi” politik di tengah masyarakat. Semoga!

BABAK II

IDEAL POLITIK KEBANGSAAN

Politik Kerja Andre Rosiade

ANDRE Rosiade menjadi *role model* politisi Indonesia kekinian. Memilih politik sebagai pengabdian untuk negara dijalankannya dengan totalitas. Memperjuangkan nasib rakyat melalui legislatif dengan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Kesempatan pertama ini ia menjadi Anggota Dewan dari Dapil Sumatera Barat 1. Andre memperoleh suara tertinggi dari seluruh Caleg DPR RI di Dapil ini. Padahal ia adalah pemain baru dalam kontestasi politik ini.

Andre menjadi fenomenal karena ia lantang bersuara untuk kepentingan rakyat. Ia bak *singa parlemen* dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, ketika ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat dan negara, Andre tegas menolak.

Andre Rosiade keras menolak proses kerja sama Freeport dengan perusahaan asal China, Tsingshan Steel dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Andre menilai kerja sama tersebut belum tentu lebih baik daripada rencana pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur yang saat ini tengah dilakukan oleh Freeport.

Andre menilai bahwa kerjasama itu sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Di mana bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketika Covid-19 melanda tahun lalu dan adanya wacana

kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dari Kementerian Keuangan, ia juga keras menolak.

Andre menilai bahwa kebijakan itu sangat menyengsarakan rakyat kecil. Apalagi digulirkan pada situasi perekonomian rakyat yang sedang sulit. Banyak orang yang di-PHK sehingga beralih profesi menjadi pedagang mikro dan kecil. UMKM menjadi penggerak ekonomi yang lesu di tengah krisis.

Begitupun soal kebijakan Kementerian Investasi memberikan izin berdirinya pabrik semen baru di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ia menyorot tajam izin itu, di saat pemerintah sendiri memberlakukan moratorium pendirian pabrik semen baru di Indonesia.

Soal semen ini Andre juga melaporkan dugaan praktik *predatory pricing* (jual rugi) di industri semen nasional ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam kasus ini Andre melaporkan PT Conch South Kalimantan Cement, yang merupakan anak perusahaan semen China.

KPPU akhirnya memenangkan Andre Roaside. Ditandai dengan keluarnya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH) dalam kasus penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam perkara KPPU No. 03/KPPU-L/2020, CONCH terbukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Komisi pada Jumat 15 Januari 2021) lalu. Oleh sebab itu, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 22,35 miliar.

Selain lantang bersuara menolak berbagai wacana dan kebijakan pemerintah, Andre juga mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif untuk rakyat. Misalnya, ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022 untuk pemberlakuan larangan sementara ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* beserta turunannya seperti *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)*. Andre mengapresiasi keluarnya kebijakan tersebut.

Menurut Andre Permendag Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku sejak 28 April 2022 dengan harga minyak curah bisa dicapai Rp14 ribu per liter tentu memberikan manfaat kepada rakyat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.

Andre contohnya juga mengapresiasi kinerja Menteri Erick Thohir dalam menyelamatkan Krakatau Steel yang hampir bangkrut. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu, *pertama*, restrukturisasi utang yang telah dilakukan pada akhir 2019 hingga Januari 2020 sehingga mampu menurunkan jumlah utang yang dimiliki oleh Krakatau Steel.

Kedua, negosiasi untuk meningkatkan saham di Krakatau Posco sehingga di masa depan akan menimbulkan keuntungan bagi Krakatau Steel dan ketiga, mengundang SWF Indonesia yakni *Indonesia Investment Authority (INA)* untuk berinvestasi di Krakatau Steel sehingga nantinya profit yang didapat oleh Krakatau Steel tidak lari ke luar negeri.

Ketiga, mengundang investor masuk di proyek *blast furnace* yang diinisiasi sejak 2008 sehingga proyek ini nantinya tidak lagi mangkrak.

Soal Garuda Indonesia, Andre Rosiade juga memiliki

keberpihakan kepada pemerintah agar menyelamatkan perusahaan plat merah penerbangan tersebut. Ia mendukung pemerintah menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mitra Buana Koorporindo terhadap Garuda.

Soal vaksin Andre pun banyak bersuara dan memperjuangkannya untuk rakyat, diantaranya ia mengusulkan pelaku usaha prioritas mendapatkan vaksin, mendorong pemerintah agar bisa melaksanakan vaksin 1 orang per hari, mengusulkan vaksin untuk jamaah umroh, mendukung program vaksin gotong royong, meminta Kementerian BUMN untuk melaksanakan vaksin lansia dan pensiunan lembaga tersebut, serta mengusulkan pemerintah membangun *big data* vaksinasi.

Sebagai anggota Komisi IV di DPR RI yang *notabene*-nya adalah mitra Kementerian BUMN, Andre juga mengapresiasi kebijakan menggratiskan semua fasilitas umum milik BUMN. Ia terus mendukung eksistensi Kementerian BUMN disaat ada yang mengusulkan agar kementerian ini dibubarkan.

Andre meyakini bahwa sejarah lahirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tujuan utamanya adalah upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara yang cita-cita utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun belum dapat terwujud sebagaimana mestinya. Andre terus mendukung reformasi BUMN dari semua aspek.

Dengan kedekatannya dengan Kementerian BUMN Andre tidak sulit untuk membawa berbagai program pembangunan dan fasilitas BUMN ke daerah Sumatera Barat, diantaranya penambahan tower jaringan telekomunikasi di daerah yang tak bersinyal, revitalisasi jalur kereta api, menyalurkan berbagai program CSR BUMN ke daerah-daerah di Sumatera

Barat.

Ketika solar langka beberapa waktu lalu, Andre langsung turun sidak ke lapangan, kemudian melobi Pertamina untuk menambahkan kuota bagi wilayah Sumatera Barat. Bahkan ia juga membawa langsung petinggi Pertamina melihat beberapa SPBU dan antrian truk yang panjang hingga berhari-hari.

Baru-baru ini Andre juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencari solusi dalam pengalihan lahan pasca tambang di Kota Sawahlunto. Lahan pasca tambang milik PT. Bukit Asam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Lahannya cukup luas, yaitu 390 hektare.

Sebagai legislator Sumatera Barat di Senayan, Andre tak pernah berhenti berjuang untuk provinsi yang diwakilinya. Andre bukanlah tipe politisi yang hanya duduk manis di kursi anggota DPR, menerima gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas lainnya.

Andre terus melobi lintas Kementerian mendapatkan program dan anggaran untuk pembangunan di Sumatera Barat. Beberapa kali juga ia membawa dan mendampingi kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat menemui para Menteri.

Tanggal 12 April 2021 Andre membawa 7 orang kepala daerah dari Sumbar bertemu dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan Sumbar, terutama di sektor koperasi dan UMKM.

Pada 14 April 2021 Andre membawa 9 orang kepala daerah dari Sumatera Barat bertemu dengan Kementerian PUPR. Pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian itu membahas terkait

pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin yang tersambung ke Pekanbaru yang sedang terhenti karena persoalan pembebasan lahan, serta sejumlah program pembangunan strategis lain untuk di Sumbar.

Dihari yang sama 9 kepala daerah ini juga dibawa Andre bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra. Pertemuan itu membahas kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah untuk membangun sektor perekonomian pada bidang perdagangan di Sumatera Barat. Melalui Kemendag ini juga sudah dibangun beberapa pasar di Kota Padang dan Bukittinggi.

Selanjutnya tanggal 25 Mei 2021 Andre bisa membawa 11 orang Bupati/Walikota se-Sumatera Barat bertemu Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian. Pertemuan itu membahas kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan para kepala daerah. Khususnya untuk percepatan pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Sumatera Barat. Padahal Kementerian Pertanian ini bukanlah mitra Komisi VI dimana Andre ditugaskan. Kementerian Pertanian merupakan mitra Komisi IV DPR RI.

Perhatian Andre kepada rakyat kecil secara langsung sudah menjadi program rutin yang ia jalankan. Bahkan hampir setiap hari. Berbagai macam bantuan dan uluran tangan Andre dirasakan oleh rakyat. Bantuan dari pribadi Andre berupa sembako puluhan ribu paket setiap Ramadhan, pengobatan dan pendidikan warga miskin, bantuan kaki palsu, kursi roda, nasi bungkus Jumat berkah, membantu warga rumahnya yang terbakar, korban banjir, makanan tambahan balita dan ibu hamil, membantu modal usaha disabilitas, bantuan masker saat covid melanda, penyaluran sapi kurban dan lain

sebagainya.

Saat gempa Pasaman Barat dan Pasaman beberapa waktu lalu ia menyalurkan bantuan senilai Rp. 1,8 miliar. Bantuan tersebut bisa ia *collect* dari berbagai CSR BUMN. Termasuk juga melalui CSR BUMN ini sebelumnya secara reguler disalurkan Andre untuk berbagai program perbaikan dan pembangunan sarana rumah ibadah, sekolah, pembangunan jembatan, pengelolaan sampah, pengadaan *ambulance*, bedah rumah, rehab rumah tahfiz dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Andre sadar untuk mewujudkan kerja nyata di bidang politik ini butuh kerja keras, keberanian, komitmen, kolaborasi, inovasi dan keberlanjutan (*sustain*).

Sebagai Ketua Partai Gerindra di Sumatera Barat, tentu Andre memiliki tanggungjawab besar mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara partainya pada Pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2019 Partai Gerindra adalah pemenang di Sumatera Barat.

Kerja nyata Andre Rosiade harus berbanding lurus dengan kerja nyata seluruh kader Partai Gerindra baik distruktur partai, kader anggota legislatif maupun bupati/walikota di seluruh Sumatera Barat. Jika tidak nyata bekerja, tentu akan menjadi ancaman bagi Partai Gerindra di Pemilu mendatang.

***Reinventing Government* Otoda**

BIROKRASI sebagai lembaga pelayanan publik merupakan aplikasi dari kerja pemerintah. Berhasil atau tidak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tergantung bagaimana dengan kinerja lembaga birokrasinya. Sehingga banyak negara mencoba mencari format terbaik bagaimana birokrasi ini bisa berjalan dengan efektif dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sejak pertengahan tahun 1980-an di Eropa dan Amerika terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan *new public management*.

Model *public management* mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk perubahan, salah satunya *Entrepreneurial Government* (Osborne and Gaebler, 1992). Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau pipih (*flat*), efisien dan rasional serta desentralisasi dengan menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina keakraban dan keterbukaan pada dirinya. Perspektif baru pemerintah

menurut Osborne dan Gaebler dalam *reinventing government* : prinsip pemerintah wirausaha yaitu :

1. Pemerintah Katalis

Pemerintah katalis memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai pelaksana (fungsi penyampai jasa dan penegakan). Selain itu, kemudian mereka menggunakan berbagai metode (kontrak, voucher, hadiah, insentif pajak dan sebagainya) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggung jawaban dan fleksibilitas.

2. Pemerintah Milik Masyarakat

Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.

3. Pemerintah Kompetitif

Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah untuk dilakukan perbaikan.

4. Pemerintahan Berorientasi Misi

Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyerderhanakan sitem administratif, seperti anggaran, kepegawaian dan pengadaan. Mereka menyarankan

setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberi kebebasan kepada manajer untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut, dalam batas-batas legal.

5. Pemerintahan Berorientasi Pada Hasil

Pemerintahan yang *result-oriented* mengubah fokus dari input (kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Mereka mengukur kinerja badan publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada badan-badan yang mencapai atau melebihi target dan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran.

6. Pemerintahan Berorientasi Pelayanan

Pemerintah berorientasi pelayanan memperlakukan masyarakat yang dilayani—siswa, orang tua siswa, pembayar pajak, orang mengurus KTP, pelanggan telepon sebagai pelanggan mereka melakukan survey pelanggan, menetapkan standar pelayanan memberi jaminan dan sebagainya. Dengan masukan dan intensif ini, mereka mendesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.

7. Pemerintah Wirausaha

Pemerintahan wirausaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk membayar, menuntut *return of investment*. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha, dana inovasi, untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berfikir mendapatkan dana operasional.

8. Pemerintahan Antisipatif

Pemerintahan antisipatif adalah pemerintahan yang berfikir kedepan. Mereka mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan statistis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

9. Pemerintahan Desentralisasi

Pemerintahan desentralisasi adalah pemerintah yang mendorong wewenang lain dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem. Mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan, atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.

10. Pemerintahan Berorientasi Pasar

Pemerintah berorientasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan mereka menciptakan insentif keuangan–insentif pajak, pajak hijau, *affluentfees*. Dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial

Munculnya konsep *new management* (manajemen baru) telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, diantaranya birokrasi yang sulit ditembus, sentralistis, *top down*, hirarki yang sangat panjang serta tidak produktif karena cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Akibatnya adalah kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreatifitas diarahkan menjadi birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

Penataan ulang atau menemukan kembali (*reinventing*)

birokrasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika telah melihatkan hasil yang maksimal. Peran organisasi publik dan pegawai pemerintah yang dulunya hanya berfokus melayani masyarakat (*public service*) dan meninggalkan orientasi *input* (penghasilan). Namun, sekarang pemerintahannya telah memikirkan *input* dalam rangka memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan semua sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana studi David Osborne dan Ted Gaebler dalam *reinventing government how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, maka pemerintahan di era yang akan datang tentu dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan *public servicer* (pelayanan publik) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Pemerintahan yang pertama memberikan respon terhadap berbagai realitas baru ini di Amerika adalah pemerintah daerah, karena sebagian besar daerahlah yang menjalani jalan buntu dalam masalah finansial. Di bawah tekanan finansial yang hebat, para pemimpin daerah dan negara bagian tidak punya pilihan lain kecuali mengubah cara mereka menjalankan usaha-usahanya.. Negara bagian pertama yang merespon adalah California, dibawah pemerintahan Ronald Reagan tahun 1980. Kemudian para walikota dan gubernur menjalankan sistem kemitraan negeri swasta dan mengembangkan beberapa cara alternatif untuk memberikan pelayanan. Mereka mencoba menjalankan pemerintahan dengan manajemen perusahaan, organisasi pengetahuan dan kota swadaya, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai lembaga provit, untuk menutupi permasalahan-permasalahan

finansial daerah dan negara bagian.

Pemerintahan wirausaha yang merupakan salah satu dari 10 prinsip *reinventing government* yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler sejak tahun 1980-an telah dilaksanakan oleh kota dan negara bagian di Amerika Serikat. Walikota Indiana Polis, William Hudnut dalam pidatonya pada tahun 1986 mengatakan :

“pemerintah wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif dan kreatif serta berani mengambil resiko. Ia juga mengubah beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang penguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisonal yang hanya memberikan sistem penolong hidup. Ia bekerjasama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan terhadap jasa. Ia pun mengatakan, “mari kita selesaikan pekerjaan ini”, dan tidak takut mengimpikan hal-hal yang besar”.

Wajah Birokrasi Kita

Birokrasi di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang orde baru tetap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi mendapat pencitraan negatif dari masyarakat. Birokrasi adalah lembaga yang berbelit-belit, lamban, menghalangi kemajuan, prosedural dan mengenyampingkan substansi dan tidak efisien. Di zaman orde baru birokrasi merupakan lembaga representasi dan juga unsur terpenting dari keberadaan sistem politik otoriter yang dilestarikan oleh

Soeharto selama ± 32 tahun. Birokrasi, baik sipil maupun militer, menjadi instrumen terpenting dari format politik orde baru. Kondisi birokrasi yang bertahan cukup lama di Indonesia, ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan birokrasi itu bukan banyak berperan melayani kepentingan masyarakat tetapi justru untuk memperkuat dan melayani keputusan rezim.

Menyadari terjadi kebobrokan dalam birokrasi di Indonesia menjadi salah satu latar belakang munculnya reformasi politik yang kemudian melahirkan kebijakan desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, birokrasi yang netral dan profesional, transparan dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang mampu merespon tuntutan masyarakat lokal. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tema sentral reformasi total yang dibicarakan adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Selain itu reformasi juga diharapkan bisa memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan penting yang diharapkan masyarakat dalam paradigma baru pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah adalah tumbuhnya sebuah birokrasi daerah yang mampu menjadi salah satu pilar penunjang demokratisasi pada tingkat lokal. Momentum

otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian di ikuti *reinventing government* untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah akan bisa melaksanakan jalan pemerintahan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Masa transisi pemerintah dengan adanya peralihan dari orde baru ke orde reformasi, tentu saja ada harapan perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah karena ada kewenangan-kewenangan baru yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom, pemerintah propinsi dan kabupaten harus mencari format baru pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Membangkitkan Wawasan Kebangsaan

“Bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.

Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak” (Mohammad Hatta)

HARI Bela Negara semestinya mengingatkan kita akan perjuangan bangsa ini. Perjuangan yang mengorbankan semua potensi untuk mencapai kemerdekaan. Kini kita hidup dizaman yang tidak lagi dijajah asing dengan senjata. Kita adalah generasi yang menikmati perjuangan tersebut. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini untuk mencapai kemajuan dalam segala hal.

Membaca kembali sejarah para pejuang bangsa harus bisa membangkitkan semangat generasi hari ini. Betapa tidak, dengan segala keterbatasan fasilitas dulunya tak mengurangi semangat merdeka. Luas wilayah juga bukan penghalang untuk satu tujuan. Usia tua para pahlawan juga tidak mau kalah dengan semangat pemuda. Semua berjuang dengan sungguh-sungguh. Sadar bahwa dijajah itu sangat menyakitkan. Kini saatnya kita mengisi itu semua dengan yang lebih bermakna.

Sekilas tentang Indonesia itu sendiri kalau bukan atas

perjuangan mungkin ia bukan apa-apa. Betapa tidak kata 'indonesia' pertama kali muncul dengan huruf kecil pada catatan kaki tulisan James Richardson Logan (1850): *'The Ethnology of the Indian Archipelago'* dalam *'Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asian'* (1850). Kata ini digunakan oleh Logan untuk mengidentifikasi keseluruhan gugusan pulau, ragam penduduk dan kebudayaan yang majemuk yang terletak di antara (nesos yang mungkin berkembang dari kata mesos di antara, di tengah, lih. *Analytical Greek Lexicon*, 1967) 2 benua dan 2 samudera.

Adolf Bastian (1884) menulis buku *'Indonesien, oder die Insel des Malayschen Archipels'* yang diterbitkan di Leipzig antara tahun 1884-1889, yang kemudian beredar di kalangan ahli-ahli ilmu pengetahuan terutama para antropolog dan para ethnolog yang mempelajari penduduk dan kebudayaan di kawasan tanah air kita di sekitar pertengahan abad ke-19 perempat pertama abad ke-20. Mungkin istilah Indonesia inilah yang kemudian dipandang, diterima sebagai nama yang mengidentifikasi kepulauan dengan berbagai ragam penduduk dan aneka kebudayaan (terutama) oleh generasi muda Indonesia yang pada waktu itu belajar di Eropa. Pendapat Logan dan Bastian mengenai arti kata Indonesia ini mirip dengan istilah 'nusantara' (nusa di antara (2 benua, yaitu Asia dan Australia dan 2 samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik), yang juga digunakan untuk mengidentifikasi gugus pulau-pulau yang dihuni oleh kelompok-kelompok etnik yang masing-masing mempunyai kebudayaan sendiri.

Kemudian dengan perjuangan yang sangat panjang bangsa kita berjuang untuk punya martabat. Tidak lagi dijajah. Hingga kita merdeka setelah 3,5 abad lebih dijajah. Para

founding father's memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan umum adalah mengubah sistem feodalistik dan sistem kolonialis menjadi sistem modern dan sistem demokrasi. Kemerdekaan menurut Soekarno adalah “jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan *nation and character building* dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada suatu saat Soekarno menyatakan bahwa, “revolusi belum selesai,” maka dalam konteks *nation and character building* pernyataan demikian dapat dimengerti. Artinya, baik *nation* maupun *character* yang dikehendaki sebagai bangsa merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan. Maka dalam hubungan *nation and character building* ada beberapa hal yang terkandung dalam gagasan awalnya:

Pertama, Kemandirian (*self-reliance*), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah “Berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya.

Kedua, Demokrasi (*democracy*), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik. Masyarakat di mana setiap anggota ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Ketiga, Persatuan Nasional (*national unity*). Dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi selama ini. *Keempat*,

Martabat Internasional (*bargaining positions*). Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lainnya adalah sikap yang mendasari ide dasar *nation and character building*. Bung Karno menentang segala bentuk “penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain,” serta menentang segala bentuk *neokolonialisme* dan *neoimperialisme*. Indonesia harus berani mengatakan “tidak” terhadap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan rasa keadilan sebagai bangsa merdeka.

Kondisi Bangsa Hari Ini

Semakin menua umur bangsa ini ternyata menemukan kelangkaan wawasan berkebangsaan generasinya. Banyak anak muda tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak tahu nama-nama pahlawan, tidak mengerti sejarah bangsa, gaya hidup yang lebih mengakomodir bukan budaya bangsa sendiri. Keanekaragaman suku, agama, ras dan adat istiadat yang dulu terjalin kokoh kuat dalam bingkai kebangsaan Indonesia, kini terasa semakin longgar dan rentan terhadap masuknya pengaruh nilai-nilai universal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia merupakan dampak dari perubahan lingkungan yang tidak dapat dihindari.

Indonesia dengan posisi geostrategi yang unik dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, akan selalu menghadapi tantangan, gangguan dan bahkan ancaman. Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain untuk dieksploitasi secara damai maupun dikuasai secara paksa. Logika demokrasi yang

sempit di era reformasi juga mengakibatkan menajamnya rivalitas politik, menguatnya isu kedaerahan dan faham federal dalam sistem otonomi. Nasionalisme bangsa Indonesia yang dibangun diatas landasan konsensus pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, terfragmentasi oleh berbagai kepentingan sempit dan sesaat yang tidak searah dengan kepentingan nasional.

Liberalisme yang menyertai isu global yang diakomodasikan dalam penyelenggaraan reformasi nasional semakin meluas pengaruhnya. Apresiasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara semakin menipis dan formalitas belaka. Pancasila sebagai ideologi negara yang lahir dari ide-ide bangsa yang mengandung nilai-nilai hakiki semakin terkikis oleh ideologi asing. Inilah berbagai permasalahan yang kita hadapi dan menjadi tantangan kita bersama.

Kerawanan akibat tekanan global merupakan wujud dari keinginan negara-negara yang tergabung dalam koalisi untuk memperluas hegemoni dan upaya menyatukan negara-negara di dunia ke dalam suatu kutub atau “unipolar world” ditangan suatu bangsa yang berperan sebagai pemegang supremasi. Dengan isu demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Universalitas yang mewarnai reformasi nasional itu telah menimbulkan berbagai konflik di seluruh penjuru tanah air. Ide separatisme muncul kembali dan dianggap sebagai bagian dari praktek demokrasi yang diartikan dengan logika sempit sebagai kebebasan menentukan nasib sendiri. Upaya-upaya untuk mengatasi separatisme dan anarkisme dianggap sebagai tindakan anti demokrasi. Pemahaman kebebasan/demokrasi oleh sebagian masyarakat yang mengarah kepada keinginan melepaskan diri dari NKRI serta mengembangkan pandangan yang sempit

di kalangan masyarakat, telah menggejala dan dimunculkan sebagai wacana.

Globalisasi memberikan peluang bagi masyarakat bangsa untuk seluas-luasnya memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraannya secara lahir dan batin. Tetapi disisi lainnya, globalisasi dengan segala aspeknya patut diwaspadai dan diantisipasi, karena pengaruhnya berakibat pada fenomena *euphoria* kebebasan tanpa batas yang mengindikasikan pada gejala disintergrasi serta maraknya gerakan separatis. Globalisasi bukan semestinya menyerahkan setiap permasalahan internal bangsa atau dalam negeri kepada pihak-pihak asing, dengan asumsi bahwa hanya pihak asinglah yang dapat berlaku adil dan dapat menyelesaikan masalah.

Solusi Bangsa ke Depan

Pernah Presiden SBY dalam Peringatan Hari Pramuka ke-46, 14 Agustus 2006 menyampaikan: “generasi muda bangsa harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin, untuk tidak membeda-bedakan identitas, seperti, agama, etnis, suku, kedaerahan dengan tujuan negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara, dibandingkan dengan kepentingan diri dan golongan. Kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat untuk dapat membangun sistem pertahanan negara melalui pendekatan multi aspek”.

Menurut penulis sendiri, juga harus dilakukan pengenalan lebih dalam mengenai aneka ragam adat istiadat, flora fauna, kekayaan alam, kelebihan dan kekurangan masyarakat kita, lagu-lagu rakyat, nyanyian dan tarian daerah, sastra daerah, pemahaman humaniora dan historiografi peristiwa-peristiwa daerah dan nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi bangsa

di dalam abad 21 di bidang-bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan keluarga, riwayat hidup pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, peran serta rakyat Indonesia di dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian di dunia internasional, sumbangsih Indonesia di dunia olah raga dan kesenian merupakan upaya yang dapat dilaksanakan dengan pelbagai metode yang relevan untuk melaksanakan bimbingan di atas di sekolah maupun di keluarga.

Meningkatkan kadar kecintaan rakyat dengan bersama-sama membangun dan memajukan bangsa berdasarkan kesamaan kehendak untuk saling menyatu, membentuk jati diri berbagai ragam dan latar belakang perbedaan suku, agama, ras antar golongan dan budaya, demi tegaknya NKRI. Metode yang dilakukan dengan cara yang lebih menggugah dan partisipatif, antara lain dengan *Focus Group Discussion (FGD)*, *Out Bound Orientation (OBO)*, *Public Debate Simulation/Exercise*, atau melalui cara-cara yang lazim dikenal seperti lokakarya atau seminar yang sifatnya lebih dua arah.

Di samping itu, upaya sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media massa termasuk ide kreatif dari professional di bidangnya, dan melalui saluran-saluran pendidikan baik formal maupun informal, serta diseminasi melalui pamflet, liflet, brosur dan sebagainya. Dari segi substansi, sosialisasi dilaksanakan tidak secara langsung membahas dan mendiskusikan paham wawasan kebangsaan, tetapi lebih kepada isu-isu yang muncul terkait dengan proses demokratisasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, keselarasan sosial dan sebagainya yang pada akhirnya bermuara pada kesepahaman mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri.

Mencari Intelektual Profetik

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi, termasuk pula semut di dalam liangnya, termasuk pula ikan paus, benar-benar bershalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (Diriwayatkan At-Tirmidzi)

ISTILAH intelektual muncul pertama kali pada tahun 1898, ketika seorang perwira berpangkat kapten keturunan Yahudi bernama Albert Dreyfus dipecat dari Dinas Ketentaraan Perancis karena dicurigai bekerja sebagai mata-mata pihak asing. Dengan adanya kasus Dreyfus inilah kemudian menjadikan masyarakat Prancis terbagi dua; yang membela dan yang mengutuknya. Yang membela Dreyfus ini disebut sebagai *les intellectuels* dan yang mengutuk disebut *deracines*. Para pembelanya antara lain Emile Zola, Emile Durkheim, dan Anatole France. Dari kasus inilah kemudian sebutan intelektual lebih merupakan pemburukan daripada sanjungan, yang berlaku tidak hanya di Perancis, tapi juga di Inggris dan Amerika. Setelah kasus Dreyfus, kemudian, muncullah secara beruntun para sarjana yang mengembangkan istilah intelektual ini.

Beberapa ciri intelektual dari sarjana barat adalah *non-committal* (tak terikat dari segi ide), *independen* (tak terikat dari segi aksi), *non-sektarian*, *non-partisan*, tidak memihak; pantang menyerah, cenderung memberontak; menentang arus, berani berbeda, dan menunjukkan perlawanan. Dalam

Islam intelektual mempunyai dua tipe, mengikut sejarah dan konteks keislaman, yaitu intelektual *profetik* dan intelektual *diabolik*. Intelektual *profetik* adalah para nabi dan *waratsat al-ambiya*. Merekalah para pembela kebenaran, sebagaimana kebenaran yang terkonsepsi dalam Alquran. Sedangkan intelektual *diabolik* adalah iblis dan para pengikutnya. Pada dasarnya ada perbedaan makna intelektual antara Barat dan Islam. Contohnya istilah ‘menentang arus’ di dunia Kristen tidak akan sama dengan ‘menentang arus’ dalam konteks di dunia Islam. ‘Membela kebenaran’ dalam konteks dunia Barat tidak sama dengan ‘membela kebenaran’ dalam konteks dunia Islam.

Intelektual dalam Islam bercirikan; *Pertama*, ia tidak ada rasa takut menyuarkan kebenaran (*la khaufun alaihim wa la hum yahzanun*). *Kedua*, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok (*la yas alukum alaihi ajran wahum muhtadun*). Ia hanya ditunggangi kepentingan misi Tuhannya. *Ketiga*, ia adalah *agent of change* (agen perubahan), dan bukan *subject of change* (yang dirubah oleh lingkungannya).

Masyarakat dalam ilmu sosiologinya senantiasa akan mengalami perubahan. Sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman itu sendiri. perubahan sosial dalam teori sosial beragam ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ide berupa pandangan hidup, pandangan ide dan nilai-nilai. Tokoh yang banyak berbicara tentang ini adalah Max Weber. Tesis utama *weberianisme* adalah pengakuan besar terhadap peranan ideologi sebagai *variable independent* dalam perkembangan masyarakat. Perubahan kemudian juga dilakukan oleh orang kreatif yang berkumpul menjadi suatu gerakan sosial yang terlembagakan dalam bentuk lembaga

yang melakukan pemberdayaan masyarakat (*Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial*).

Transformasi/perubahan profetik merupakan derivasi dari etika profetik, dengan ilmu sosial profetik yang menjadikan alat untuk melakukan perubahan sosial, sehingga bentuk transformasinya pun dinamakan dengan transformasi/perubahan profetik. Transformasi ini diilhami bagaimana cara nabi melakukan transformasi/perubahan yang bukan sekedar membebaskan dari ketertindasan tetapi sekaligus mengarahkannya. Bentuk arahan yang dilakukan oleh nabi dengan membentuk sistem yang lebih berkeadilan serta iman yang melandasarinya.

Tantangan Hari Ini dan Solusi

Pada saat sekarang perubahan kehidupan manusia terbawa oleh arus global. Masyarakat atau bangsa yang kurang siap akan terbawa oleh arus global (*H.A.R.Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan*). Hampir setiap negara membicarakan globalisasi dengan serius seperti kata globalisasi dikenal oleh warga Prancis dengan *mondialisation*, sedangkan di Spanyol dan Amerika Latin menyebut dengan *globalizacion* dan untuk Jerman menyebutnya dengan *globalisierung* (*Anthony Giddens, Runaway World*). Globalisasi telah memberikan dampak yang sangat buruk kepada generasi hari ini hingga globalisasi dikambinghitamkan oleh pemuka agama yang mengeluhkan merosotnya moral kaum muda setelah mengenal internet dan gaya hidup barat (*B.Hari Juliawan, Keretaku Tak Berhenti Lama*).

Globalisasi telah menjadi candu bagi bagi kaum muda Islam. Sehingga harapan akan hadirnya generasi *rabbani* dan *qur'ani* sekarang menjadi langka. Penghancuran akidah dan akhlak menjadi sangat mudah melalui media baik cetak dan

elektronik. Bahkan ia jauh lebih berbahaya dibandingkan seribu meriam sekalipun. Inilah yang disebut dengan perang pemikiran (*ghazwul fikri*). Tampak dari *life style* yang bukan budaya orang Islam tapi kebaratan.

Karen Amstrong dalam buku "*A History of God*" yang melacak sejarah bagaimana manusia mempersepsikan Tuhan dari masa Nabi Ibrahim hingga sekarang.

Menyimpulkan bahwa *Human beings cannot endure emptiness and desolation; they will fill the vacuum by creating a new focus of meaning. The idols of fundamentalism are not good substitutes for God (1993: 399)*. Manusia tidak mungkin melepaskan diri sepenuhnya dari Tuhan. Sebab, ia bukan saja *homo sapiens* melainkan juga *homo religius*, dan agama dapat memenuhi kebutuhan itu. Karen Amstrong memprediksikan, agama akan mengemban peran lebih besar pada abad ke-21 ini karena dunia dan manusia secara serius menghadapi krisis moral, sosial, lingkungan, ekonomi, dan politik.

Dengan pergantian tahun 1428 ke 1429 H ini semestinya umat Islam terutama kaum muda harus berjuang sungguh-sungguh dalam meningkatkan kemampuan intelektual. Kecerdasan intelektual harus dibingkai dengan spritual yang matang. Keshalihan pribadi (*shalih linafsih*) kemudian harus melahirkan keshalihan sosial (*nafi'un lighairih*) sehingga akan menjadi penyeru kebenaran dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.

Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* pernah berkata, "Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah itu mencerminkan ketakutan, mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui adalah shadaqah, membelanjakannya untuk keluarga adalah

taqarrub. Ilmu adalah pendamping saat sendirian dan teman karib saat menyepi”.

Melalui proses pendidikan (*tarbiyah*) yang mengkolaborasikan potensi akal, jasad dan iman akan memberikan solusi terhadap masalah diatas. Betapa juga dulu Rasulullah melakukan perubahan yang sangat luar terhadap masyarakat *jahiliah* menuju peradaban akhlak dan iman. Metode yang dilakukan Rasul pun sangat efektif yaitu membina diri (*binaul rijal*), keluarga (*binaul ursy*), masyarakat (*binaul ijtimai*) dan negara (*binaul daulah*). Semoga dengan proses yang dijalani ini akan semakin menerangkan jalan menuju kebangkitan Islam.

Meneladani Buya HAMKA

DAHULUNYA Minangkabau dikenal sebagai mesin/pencipta intelektual, ulama, politisi/diplomat, pahlawan kemerdekaan, sastrawan dan lain-lain. Rentang tahun 1900-1910 lahirlah generasi-gerasi bernas, seperti Mohammad Hatta 1902, Sutan Syahrir 1909, Mohammad Natsir 1908 dan Buya Hamka 1908. Mereka adalah sosok-sosok terbaik ranah ini yang berkontribusi besar terhadap perjuangan bangsa.

Kelahiran mereka diperingati sebagai penghargaan. Dikenang dengan harapan ada pejuang baru pengganti mereka. Generasi intelektual baru di zamannya ini. Orang-orang tua *bilang* ke anaknya jadilah seperti Hatta, HAMKA, Natsir, Syahrir dan lain-lain. Bacalah sejarahnya, ketahuilah sosok/pribadinya dan pelajarilah karya-karyanya.

Februari diperingati se-abad kelahiran HAMKA, tepatnya pada tanggal 17. Kita mengenal HAMKA sebagai seorang *icon*. Karya-karyanya dibaca, ketokohnya diteladani, keintelektualitasannya dijadikan referensi. Siapa sebenarnya Buya Hamka?

Bernama Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA) teman-temannya dimasa kecil memanggilnya Maliak atau Malik, lahir pada 17 Februari 1908, di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amarullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Beliau akhirnya menjadi seorang ulama terkenal, sastrawan, penulis, guru/dosen dan juga aktivis politik. Hamka lebih akrab

dipanggil dengan Buya.

HAMKA menempuh pendidikan Sekolah Rakyat di Maninjau sampai kelas dua. Pada usia 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Kemudian HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan oleh ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

HAMKA aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai tahun 1925 di Padang Panjang. Tahun 1928 beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, HAMKA mendirikan pusat pelatihan dakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia Prof. Dr. Mukti Ali melantik HAMKA sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletakkan jabatannya pada tahun 1981 karena perbedaan prinsip dengan pemerintah pada waktu itu.

Kegiatan politik HAMKA bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945 beliau membantu menentang kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato-pidato yang

membakar semangat perjuangan dan juga ikut bergerilya. Pada tahun 1947 HAMKA diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Kemudian beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi juru kampanye utama dalam Pilihan Raya Umum 1955 hingga Masyumi dilarang oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966 HAMKA dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Setelah keluar dari penjara, HAMKA diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia.

Dalam hal pekerjaan/pengabdian HAMKA mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. HAMKA kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Universitas Profesor Mustopo Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Masyumi.

Kelebihan seorang HAMKA hingga ia menjadi besar adalah kemauan belajar secara mandiri dan otodidak/*istimroriyah* dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah

seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, HAMKA merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, HAMKA menjadi wartawan beberapa surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar. HAMKA juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. HAMKA telah menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Tidak kurang dari 119 karya yang telah beliau wariskan ke kita hari ini. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir al-Azhar (5 jilid) ditulis ketika dipenjara. Novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura diantaranya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Merantau ke Deli.

Beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh Buya sebagai penghormatan atas prestasi beliau baik nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan Doctor Honoris Causa Universitas al-Azhar tahun 1958, Doktor Honoris Causa

Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1974, gelar Datuk Indomo dari kaum adatnya dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Beliau meninggal di Jakarta 24 Juli 1981.

Jadilah Seperti Buya HAMKA!

Setelah kita mengenal secara lebih lengkap tentang Buya HAMKA atas ketokohan beliau baik sebagai seorang ulama besar, politisi, seorang guru/dosen, seorang penulis dan sastrawan yang telah melahirkan banyak karya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada “HAMKA” lagi setelah beliau? Artinya apakah ada orang Minangkabau atau bahkan Indonesia sekalipun yang sekaliber dengan HAMKA pada saat sekarang? Siapakah pengganti HAMKA hari ini? Pertanyaan ini bukanlah ditujukan pada orang, komunitas atau profesi tertentu. Pertanyaan ini juga untuk penulis dan anda yang membaca serta siapapun yang ingin melakukan perubahan.

Satu abad HAMKA tidaklah membuat kita terlena dengan nostalgia nama besar beliau saja. Tapi saatnya anak bangsa ini selalu berkarya dengan baik. HAMKA adalah guru terbuka untuk kita hari ini. Sangat banyak sisi ketauladan yang harus kita ambil dari beliau tanpa ada batas. Kearifan, kebijaksanaan, kecendikiaan dan kebesaran hati beliau sangat pantas untuk kita adopsi dalam kehidupan. Bukan bertujuan mengkultuskan HAMKA tapi sebagai pelajaran hidup untuk generasi yang berada di tubir juram atau ombak besar dizaman yang sangat mengkhawatirkan ini.

Agar lahir HAMKA-HAMKA baru kita harus melakukan beberapa hal; *pertama*, kemauan individu /*ibada' binnafsih*. HAMKA menjadi besar/tokoh karena kerja kerasnya ingin merubah diri. Walaupun orang tuanya juga seorang ulama besar tapi kalau bukan dari beliau sendiri yang ingin berubah

belum tentu ia akan menjadi besar. Belajar secara otodidak dengan membaca/mempelajari karya tokoh-tokoh besar Islam dan Barat membuktikan beliau berjuang mengembangkan diri. Kemauan mengembangkan diri juga beliau lakukan dengan banyak belajar dari tokoh/guru/ulama lain dengan bertanya dan berdiskusi. Bergaul dengan lintas generasi dan lintas ilmu. Ahli pada banyak bidang adalah hasil perjuangan itu.

Kedua, membaca, berdiskusi dan menulis. Intelektual dan kecendikiawan akan lahir dari budaya membaca, berdiskusi dan menulis. Ini mutlak harus dilakukan. Sejak kecil HAMKA adalah orang yang sangat gemar membaca banyak buku dan karya-karya besar. Beliau rajin berdiskusi dan sering melakukan perdebatan dengan teman-temannya seperti Djamil Jambek dan Natsir. Dari budaya membaca dan berdiskusi itu beliau lanjutkan dengan menulis. Termasuk juga kemampuan beliau menulis karya-karya sastra dalam bentuk novel dan cerpen. Saatnya generasi hari ini meninggalkan budaya menonton dan *ngrumpi* karena tidak banyak memberikan manfaat positif. Jadikan membaca, berdiskusi dan menulis bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ketiga, komitmen, tegas dan berjiwa besar. Proses HAMKA dalam banyak organisasi dan juga keterlibatan dalam aktivitas partai politik bukanlah karena ikut-ikutan tapi diikuti dengan militansi yang tinggi. Buktinya beliau mengembangkan Muhammadiyah sampai ke Makasar, Yogyakarta dan daerah lain. Ketegasan menjadi pelengkap kepribadian HAMKA apalagi itu menyangkut hal-hal sangat prinsip dalam pemahaman beliau, terbukti ketika beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua MUI karena tidak sependapat dengan pemerintah. Berjiwa besar membuat kelapangan dan kemurahan hati beliau. Pada tahun 1964-1966 HAMKA

pernah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dianggap pro-Malaysia. Tapi beliau tidak pernah dendam terhadap orang yang mendzholimi sekalipun. Buktinya HAMKA adalah imam sholat jenazah ketika Soekarno meninggal. Komitmen, ketegasan dan kebesaran jiwa harus selalu diasah oleh generasi sekarang agar menjadi orang besar.

Keempat; ibadah yang benar. Kekuatan terbesar yang dimiliki HAMKA dalam berkarya adalah ketaatan beliau kepada Sang Khalik. Ketika dipenjara dua tahun oleh pemerintah Soekarno beliau bisa melahirkan karya besar Tafsir Al azhar sebanyak lima jilid. Apa yang membuat beliau melakukan itu tidak lain adalah kekuatan hubungannya dengan Allah SWT, dengan tidak meninggalkan sholat tahajjud dan selalu mengkhawatirkan Al qur'an. Sama dengan seorang ulama besar Sayyid Quthb yang juga melahirkan Tafsir fi Dzilalil Qur'an dalam penjara pemerintah Mesir. Kelemahan generasi sekarang adalah sering melalaikan ibadah hingga juga tidak disiplin dalam banyak hal. Ketika ingin menjadi HAMKA baru maka kita harus membenarkan/memperbaiki hubungan dengan Allah SWT dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah.

Semoga kerinduan orang banyak akan kelahiran HAMKA baru bisa terwujud dengan kesadaran dan kebangkitan setelah kita mengenal beliau lebih dekat. lahirlah HAMKA-HAMKA baru! Robahlah dunia dengan tanganmu!

Menanti HAMKA Baru

TANGGAL 17 Februari 2008 kita memperingati seabad HAMKA. Kita mengenal HAMKA sebagai seorang *icon*. Karya-karyanya dibaca, ketokohnya diteladani, keintelektualitasannya dijadikan referensi. Siapa sebenarnya Hamka? Bernama Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA) teman-temannya dimasa kecil memanggilnya Maliak atau Malik, lahir pada 17 Februari 1908, di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amarullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul merupakan pelopor Gerakan tajdid (pembaharu) di Minangkabau. Hamka lebih akrab dipanggil dengan Buya. Hamka adalah ulama yang sangat dikenal dengan kearifan, kebijaksanaan, kecendikiaan dan kebesaran hati. Beliau wafat di Jakarta 24 Juli 1981 dengan mewariskan karya-karya besar tidak kurang dari 120 karya. Karya monumental beliau adalah Tafsir al Azhar yang ditulis semasa di penjara.

Dibalik kebesaran nama HAMKA, saya juga ingin menyampaikan otokritik terhadap beliau. Menurut saya HAMKA lebih cenderung *single fighter* dan tidak melakukan kaderisasi siapa penggantinya. Semestinya HAMKA melakukan proses pengkaderan sebagaimana yang dilakukan oleh Haji Rasul terhadap dirinya. Juga seperti ulama-ulama besar lain yang punya murid pelanjut pemikiran dan perjuangan, sebut saja Imam Syaf'i terhadap Ibnul Qayyim Aljauzi. Sangat banyak sisi ketauladan yang harus kita ambil dari beliau tanpa ada batas. Kearifan, kebijaksanaan, kecendikiaan dan kebesaran

hati beliau sangat pantas untuk kita adopsi dalam kehidupan. Bukan bertujuan mengkultuskan HAMKA tapi sebagai pelajaran hidup untuk generasi yang berada di tubir juram atau ombak besar dizaman yang sangat mengkhawatirkan ini.

Agar lahir HAMKA-HAMKA baru kita harus melakukan beberapa hal; *pertama*, kemauan individu /*ibada' binnafsih*. HAMKA menjadi besar/tokoh karena belajar secara otodidak dengan membaca/mempelajari karya tokoh-tokoh besar Islam dan Barat membuktikan beliau berjuang mengembangkan diri. Kemauan mengembangkan diri juga beliau lakukan dengan banyak belajar dari tokoh/guru/ulama lain dengan bertanya dan berdiskusi. Bergaul dengan lintas generasi dan lintas ilmu.

Kedua, membaca, berdiskusi dan menulis. Intelektual dan kecendikian akan lahir dari budaya membaca, berdiskusi dan menulis. Ini mutlak harus dilakukan. Sejak kecil HAMKA adalah orang yang sangat gemar membaca banyak buku dan karya-karya besar. Beliau rajin berdiskusi dan sering melakukan perdebatan dengan teman-temannya seperti Djamil Jambek dan Natsir. Dari budaya membaca dan berdiskusi itu beliau lanjutkan dengan menulis. *Ketiga*; memanfaatkan teknologi. HAMKA bukanlah orang yang dibesarkan karena kecanggihan teknologi tapi tingkat produktivitasnya sungguh sangat luar biasa. Semestinya kemajuan teknologi harus hari ini diarahkan pada hal-hal peningkatan/*up grade* diri generasi.

Keempat, komitmen, tegas dan berjiwa besar. Proses HAMKA dalam banyak organisasi dan juga keterlibatan dalam aktivitas partai politik bukanlah karena ikut-ikutan tapi diikuti dengan militansi yang tinggi. Ketegasan menjadi pelengkap kepribadian HAMKA apalagi itu menyangkut hal-hal sangat prinsip dalam pemahaman beliau, terbukti ketika beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua MUI

karena tidak sependapat dengan pemerintah. Berjiwa besar membuat kelapangan dan kemurahan hati beliau. Pada tahun 1964-1966 HAMKA pernah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dianggap pro-Malaysia. Tapi beliau tidak pernah dendam terhadap orang yang mendzholimi sekalipun. Buktinya HAMKA adalah imam sholat jenazah ketika Soekarno meninggal.

Kelima; ibadah yang benar. Kekuatan terbesar yang dimiliki HAMKA dalam berkarya adalah ketaatan beliau kepada Sang Khalik. Ketika dipenjara dua tahun oleh pemerintah Soekarno beliau bisa melahirkan karya besar Tafsir Al azhar sebanyak lima jilid. Apa yang membuat beliau melakukan itu tidak lain adalah kekuatan hubungannya dengan Allah SWT. Ketika ingin menjadi HAMKA baru maka kita harus membenarkan/memperbaiki hubungan dengan Allah SWT dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Selamat datang HAMKA baru!

Surat Politik Kartini

“Bagi saya hanya ada dua macam keningratan : keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang, yang membanggakan asal keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh, orang yang bergelar Graaf atau Baron? Tidak dapat mengerti oleh pikiranku yang picik ini. (Surat Kartini kepada Stella, 18 Agustus 1899)”

PADA tanggal 21 April tercatat dalam sejarah sebagai hari kelahiran seorang pahlawan wanita Indonesia. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Sebagai generasi bangsa yang hidup dizaman ini semestinya kita mengenal sosok kepribadian beliau. Menghargai kontribusinya dalam bentuk pemikiran dan perjuangan untuk kemerdekaan bangsa ini. Siapa Raden Ajeng Kartini?

Lahir di Jepara pada 21 April 1879, Raden Adjeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa. Beliau adalah bangsawan yang berpikiran maju dan sosoknya yang cekatan, lincah, pintar, suka belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Ayahnya, R.M.A.A Sosroningrat, pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur, Jepara. Peraturan Kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah

lagi dengan Raden Ajeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Beliau adalah keturunan keluarga yang cerdas. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa.

Saat usia 7 tahun, ia bersekolah di Sekolah Kelas Dua Belanda. Selain belajar di sekolah, ia juga kerap memperoleh pelajaran Bahasa Jawa, memasak, menjahit, mengurus Rumah Tangga dan pelajaran agama di rumahnya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di *ELS (Europese Lagere School)*. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Menurut Rob Nieuwenhuys dalam Buku *Oost Indische Spiegel* yang diterjemahkan Dick Hartoko (1986) dia adalah seorang puteri Jawa yang lincah, sangat perasa, cerdas, berani dan sadar diri.

Akhirnya Kartini berhadapan pada budaya yang tidak memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dan perlakuan setara dengan laki-laki. Cita-cita Kartini untuk meraih pendidikan Sekolah Guru di negeri Belanda melalui beasiswa yang telah diperolehnya, kandas oleh larangan orangtua yang malahan menikahkan Kartini dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat.

RA Kartini wafat pada usia 25 tahun ketika melahirkan putranya yang bernama RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal

17 September 1904 Kartini meninggal dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Pemikiran Kartini

Sebenarnya kontribusi Kartini hanyalah dalam bentuk pemikiran. Karena beliau meninggal dalam usia yang cukup muda sehingga aplikasi pemikiran itu belum terwujud. Pemikiran itupun lebih menggemakan sepeninggalnya, di antaranya didukung oleh kumpulan surat Kartini yang dikumpulkan dalam sebuah buku dengan judul *Door Duisternis tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku yang diterbitkan pada tahun 1911 tersebut memuat 87 buah surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya. Atas upaya Direktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Mr JH Abendanon menerbitkan surat-surat Kartini, hingga kini citra dan cita-cita Kartini kita kenal dan kenang.

Sebenarnya Kartini adalah seorang wanita visioner yang belajar secara otodidak dalam kondisi *pingitan* oleh keluarganya. Dalam surat Kartini kepada salah satu sahabat penanya yang bernama Stella, Kartini mengatakan “*Saya dimanjakan Romo dengan buku-buku. Saat ini, membaca dan menulis merupakan segala-galanya bagi saya. Tanpa kedua kegiatan itu, saya mungkin sudah mati*”. Di antara buku berbahasa Belanda yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul *Max Havelaar* dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu *De Stille Kraacht* (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner: *Die Waffen Nieder* (Letakkan Senjata).

Selain membaca surat kabar Semarang (*De Locomotief*)

yang diasuh Brooshoof, ia juga menerima *leestrommel* (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan majalah wanita Belanda: *De Hollandsche Lelie*. Karena banyak membaca dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat pada waktu sangat menggugah pemikiran beliau yang masih sangat muda untuk peduli terhadap banyak persoalan terutama masalah pendidikan dan perempuan.

Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: *Zelf-ontwikkeling* dan *Zelf-onderricht*, *Zelf-vertrouwen* dan *Zelf-werkzaamheid* dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar *Religieusiteit*, *Wijsheid en Schoonheid* (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan *Humanitarianisme* (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle “Stella” Zeehandelaar, Kartini mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Perempuan yang memiliki potensi besar, dan harus diberikan ruang yang lebih untuk berkarya terutama dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini, kita berada di zaman reformasi perempuan diberikan hak yang relatif sama dengan laki-laki. Dalam bidang politik, seperti yang diatur dalam Undang-undang ada 30 persen kuota perempuan di parlemen itu mesti diakomodir dengan baik. Termasuk juga perempuan Indonesia sudah mengisi jabatan-jabatan strategis eksekutif dan yudikatif. Aktif di LSM, di dunia usaha dan lain-lainnya.

Kemudian pemikiran Kartini tentang emansipasi wanita tidak dimaknai kebebasan tanpa batas. Karena kaum ibu harus tetap dengan karakteristik tanggungjawabnya sebagai ibu. Melalui sentuhan kaum perempuan akan dapat memperoleh kesejukan dan kasih sayang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar Otoda dari Jembrana

“Saya akan melaksanakan program lima bebas; bebas pendidikan, bebas kesehatan, bebas kemiskinan, bebas pengangguran dan bebas korupsi” (I Gede Winasa, 2008)

OTONOMI penuh pasca reformasi tahun 1998 mengharuskan daerah-daerah mandiri dalam segala hal. Daerah yang selama era Orde Baru (Orba) lebih banyak berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat telah mengalami perubahan peran yang sangat signifikan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai pada era otonomi penuh oleh daerah otonom yaitu kesejahteraan dan demokratisasi.

Diharapkan keberhasilan otonomi daerah secara kumulatif akan menyumbang pada tingkatan kesejahteraan dan demokratisasi secara nasional untuk mendukung terwujudnya *civil society*. Kemudian dengan otonomi daerah juga diharapkan akan tumbuh kearifan lokal (*local wisdom*), inovasi lokal (*local innovation*), dan kreativitas lokal (*local creativity*).

Dengan bekal ketiga *values* tersebut, daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan lokal dan menjadikan pemerintahan daerah tersebut sebagai instrumen pendidikan politik (*political education*) di tingkat lokal dalam menumbuhkan kemandirian lokal secara *financial* kepada pemerintah pusat. Inilah substansi/esensi dasar dari kebijakan desentralisasi sebagai akar otonomi pada unit pemerintahan

lokal (*sub national government*) untuk kesejahteraan dirinya, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sepuluh tahun perjalanan pelaksanaan otonomi penuh yang teraplikasi dalam sistem sistem desentralisasi telah melihatkan hasil. Propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sudah dapat dipilah mana yang berhasil, mana yang jalan ditempat dan mana yang semakin terpuruk. Salah satu kabupaten yang menjadi *icon* dan referensi otonomi daerah adalah Kabupaten Jembrana sebuah kabupaten kecil yang terletak di propinsi Bali.

Kabupaten Jembrana merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali. Kabupaten ini terletak pada ujung barat Pulau Bali memiliki luas 841,80 KM² atau 14, 94% dari luas Pulau Bali. Apabila dilihat dari pemanfaatannya, 7.871 Ha lahan sawah, 25.525 Ha perkebunan, 5.458 Ha, 41.809 Ha hutan, 356 Ha tambak/kolam, 26 Ha waduk atau rawa serta pemanfaatan lain 3.135 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Jembrana dibagi menjadi 4 kecamatan, 42 desa, 9 kelurahan, 209 dusun dan 35 lingkungan. jumlah penduduk Jembrana pada tahun 2002 sebanyak 234.208 dengan kepadatan penduduk 276 jiwa/Km².

Dibandingkan dengan daerah-daerah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Bali, Kabupaten Jembrana bukanlah daerah kaya. Bahkan lebih tepat kalau digolongkan kedalam daerah miskin. Disebut miskin karena sebagai bagian dari Propinsi Bali yang lebih dikenal dengan gemerlap dunia pariwisata, keberadaan Jembrana Kabupaten Jembrana di ujung tanduk Pulau Bali benar-benar yang terpinggirkan

Kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Jembrana

memang tak ubahnya sebuah kutukan. Karena secara historikal, Kabupaten Jembrana yang lebih dikenal sebagai kawasan *Jimbarwana* (hutan yang lebat dan ganas), konon merupakan daerah buangan bagi para pembangkang dari Bali Timur (Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Mengwi-Badung). Dan sebagai daerah buangan maka segala bagi kabupaten dengan PAD dan APBD paling kecil di Propinsi Bali ini menjadi segala terbatas.

Sadar dengan kondisi sebagai daerah yang miskin, daerah buangan, dan tidak terkenal seperti daerah pariwisata lainnya di Bali, sejak tahun 2000 kabupaten Jembrana bangkit. Di bawah pimpinan bupati baru yang bernama Prof. Dr. DRG. I Gede Winasa mulai melakukan langkah-langkah inovasi untuk kemajuan untuk daerahnya. Bupati yang seorang dokter gigi dan sangat peduli dengan pendidikan ini telah menjadi *buah bibir* otonomi daerah di negeri ini. Tentu saja keberhasilannya mengangkat harkat martabat rakyatnya jauh lebih tinggi dari mitos bahwa Jembrana adalah tempat *pembuangan anak jin*.

Sejak tahun 2000 kabupaten Jembrana sudah menetapkan visi dan misi pembangunan Jembrana kedepan, dalam upaya menjawab setiap tantantangan guna menyongsong peradaban baru di abad milenium ini, yang dalam konteks kekenian global dikenal dengan istilah MDGs (*Millineum Development Goals*). Visi Kabupaten Jembrana adalah “Terwujudnya, Masyarakat Jembrana yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Berbudaya”. (*I Gede Winasa, 2007: Memasuki Peradaban Milenium Jembrana MDGs 2010*)

Sedangkan misi Kabupaten Jembrana adalah; *Pertama*, bagaimana meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan

daya beli masyarakat (perekonomian). *Kedua*, bagaimana pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public service*), lewat peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, yang meliputi sarana fisik seperti gedung, jalan, listrik dan jaringan air bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi, akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat serta peningkatan pelayanan sosial budaya. *Ketiga*, untuk tetap berada pada semangat dan bingkai NKRI, perlu senantiasa digelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta terjaganya harmonisasi hubungan antar seluruh lapisan dan komponen masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat dan golongan. *keempat*, mewujudkan penegakan supremasi hukum sebagai penopang terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, terbebas dari perilaku KKN.

Keberhasilan Jembrana

Tidak sia-sia apa yang telah dilakukan oleh I Gede Winasa sebagai bupati yang membawa Jembrana bangkit. Program yang menjadi percontohan bagi daerah lain adalah; Bidang Pendidikan. Diantaranya adalah, *Pertama*, pembebasan iuran wajib pada sekolah ini dilaksanakan sejak tahun Anggaran 2001. Program pembebasan iuran sekolah dilakukan terbatas hanya pada sekolah-sekolah negeri dari SD, SMP sampai SMU. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta program yang dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang dimulai sejak tahun 2003.

Kedua, Pembangunan/perbaikan gedung sekolah negeri baik berupa ruang kelas baru atau ruang penunjang lainnya dilaksanakan melalui pola *block grant* bukan proyek seperti yang selama ini biasa dilakukan di daerah-daerah lainnya. Pola ini dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat

melalui komite sekolah yang ada, sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. *Ketiga*; Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan memberikan pendidikan dan latihan tambahan serta pemberian motivasi agar interaksi antara anak didik dan guru benar-benar harmonis dan berkualitas. Pemberian pendidikan dan latihan tambahan bagi para guru dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para guru untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program D3, S1, dan S2 dengan tanggungan pembiayaan yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten sebesar 50%.

Keempat, Sekolahkajian adalah merupakan pengembangan model pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan yang lebih inovatif dan berorientasi ke depan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara memadukan pola pendidikan pada sejumlah sekolah, seperti SMU Taruna Nusantara, pola pendidikan di pondok pesantren, serta pola pendidikan sekolah-sekolah di Jepang.

Dalam bidang kesehatan Jembrana juga sangat berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Program inovasi yang digulirkan adalah Program "Jaminan Kesehatan Jembrana" (JKJ) yang mulai dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun 2002 melalui Keputusan Bupati Nomor 572 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Persiapan Jaminan Kesehatan Jembrana yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Subsidi Pelayanan Kesehatan dan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jembrana yang menandai dimulainya secara resmi Program JKJ. Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah untuk mengalihkan

subsidi yang semula diberikan untuk biaya obat-obatan RSUD dan Puskesmas menjadi diberikan kepada masyarakat melalui satu lembaga asuransi yang dibangun oleh Pemerintah yaitu Lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Subsidi ini diberikan kepada seluruh masyarakat Jembrana dalam bentuk premi untuk biaya rawat jalan tingkat pertama di unit pelayanan kesehatan yang mengikat kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara (Bapel) JKJ.

Dalam bidang perekonomian keberhasilannya adalah, memberikan dana bergulir kepada masyarakat, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat, terhadap tenaga kerja dengan melakukan program magang dan bursa tenaga kerja, pemberian dana talangan untuk pembelian gabah petani dan subsidi pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kunci keberhasilan itu semua ternyata terletak pada perubahan paradigma terhadap birokrasi dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh I Gede Winasa.

E-Government dari Sragen

Perbaikan sistem pelayan publik ini tercapai berkat komitmen bersama aparat Pemda Kabupaten Sragen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Untung Wiyono, Bupati Sragen: 2006)

LANGKAH-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Sejak ditetapkan ditetapkan dan direvisi kedua undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, sudah banyak langkah dan kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat segera terlaksana dengan lebih baik sesuai amanah undang-undang. Sesungguhnya, perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendidrikan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah telah

merubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah. Perubahan paradigma di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerinrah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah dan DPRD.

Ruang ini disambut antusias bagi daerah-daerah otonom baik propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Kunci tercapainya pelayanan publik yang lebih maju terletak ditangan manajemen kepala daerah. Kepala daerah di otonomi luas ini harus melakukan kompetisi secara positif dalam memunculkan kearifan lokal yang mulai mengacu pada konsep *new public management*. Sehingga dengan perubahan-perubahan paradigma pemerintahan oleh kepala daerah akan menjadikan daerah-daerah tertentu menjadi referensi, seperti Kabupaten Jembrana ditangan I Gede Winasa, Kabupaten Sragen ditangan Untung Wiyono, sebelumnya juga ada Kabupaten Tanah Datar di tangan H. Masriadi Martunus periode 2000-2005 dengan ide *reinventing government*-nya dan lain-lain sebagainya.

Saya sangat tertarik dengan pelaksanaan-pelaksanaan khas otonomi daerah dengan menggunakan konsep *new public management*. Sebelumnya saya sudah menulis tentang Tanah Datar dan Jembrana, sekarang saya ingin mengelaborasi tentang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sragen.

Ciri keberhasilan otonomi daerah di Kabupaten Sragen

adalah dengan menerapkan *e-government*. Yaitu menggunakan pelayanan terhadap masyarakat berbasis teknologi. Langkah awal yang dilakukan oleh Untung Wiyono adalah menyiapkan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Program pemerintahan elektronik atau *e-government* dimulai Bupati Sragen Untung Wiyono sejak tahun 2003 untuk tingkat kecamatan dan 2007 untuk tingkat desa. Pejabat di Sragen dikursuskan komputer dan bahasa Inggris. Itu menjadi syarat bagi pejabat Sragen untuk naik pangkat.

Untung Wiyono yang berlatar belakang pengusaha itu sejak awal mengutamakan efisiensi dalam menjalankan pemerintahannya. Teknologi informasi digunakan untuk memangkas biaya. Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa kerja sama dengan internet *service provider*. Aplikasinya dalam bentuk laporan monitoring setiap dinas, satuan kerja, dan kecamatan; sarana pengiriman data; informasi dan monitoring proyek secara *online* pada setiap satuan kerja; agenda kerja setiap satuan kerja; forum diskusi dan *chatting* antarpersonil dan satuan kerja; surat dinas atau undangan.

Dengan teknologi informasi itu, Untung Wiyono mengontrol kinerja birokrasinya yang didukung 12.000 PNS dari komputer di ruang kerjanya. Kalau membutuhkan pertemuan mendadak dengan camat atau kepala desa, Untung tak perlu memanggil bawahannya, cukup mengadakan *teleconferensi* dengan *webcam*. Laporan harian kegiatan pembangunan dan laporan keuangan cukup disampaikan lewat komputer.

Di Sragen juga tersedia sistem informasi pemerintahan

daerah, perizinan terpadu, sistem informasi perdagangan antar wilayah, kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan, pertanahan, sistem rumah sakit umum daerah, sistem informasi strategis, pendapatan daerah, pengelolaan barang daerah, sistem informasi geografis, kredit, dan pembayaran perusahaan daerah air minum.

Beberapa pelajaran dari kesuksesan implementasi *e-government* dari Sragen adalah; Pertama, kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas. Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan implementasi *e-government* (i.e. The Asia Foundation, 2007). Manajemen perubahan (*change management*) untuk mengatasi inersia organisasi dan kultur hanya dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan kepemimpinan yang kuat. Tantangan organisasi dan kultural sangat sering lebih sulit diselesaikan daripada tantangan dari sisi teknologi. Bupati menyatakan, "*Manajemen perubahan perlu untuk menjamin keberhasilan implementasi e-government*".

Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas ini telah memberikan hasil yang nyata, berupa dukungan dari para staf dan bahkan rival politiknya di DPRD. Latar belakang Bupati sebagai pengusaha sukses dalam bidang minyak bumi mungkin mempengaruhi gaya kepemimpinan politiknya. Kepemimpinan politik yang kuat ini sekaligus menjadi bukti komitmen pimpinan dalam implementasi *e-government*. Komitmen yang rendah dari pimpinan, karena ketakutan akan kehilangan kekuasaan, merupakan salah satu kendala dalam implementasi *e-government* (Allen et al., 2004).

Kedua, Pelibatan semua pihak. Awal dibukanya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) telah memunculkan sinisme

dari banyak pihak. Adopsi inovasi selama belum terbukti bermanfaat seringkali mendapatkan resistansi. Ketika inovasi sudah terbukti, maka dengan mudah untuk mendapatkan dukungan banyak pihak (Rogers, 1995). Pelibatan semua pihak akan mengurangi resistansi ini.

Pelibatan semua pihak dalam implementasi *e-government* dari berbagai tingkatan, mulai kabupaten sampai desa, merupakan modal awal keberhasilan. KPT telah mengubah paradigma pelayanan publik di Sragen. Hubungan antar lembaga pun menyesuaikan. KPT sebagai sebuah *one-stop service* telah berhasil menyatukan komitmen semua dinas terkait dalam memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Ketiga, penyiapan sumberdaya manusia. Dalam implementasi *e-government* di Sragen, salah satu kendala yang sangat nyata pada tahap awal adalah kapabilitas sumberdaya manusia. Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi *e-government*, terutama di negara berkembang (e.g. Heeks dan Davies, 1999). Masalah terbesar adalah mengubah pola pikir. Pelatihan, konsultasi, dan studi banding ke beberapa perusahaan swasta pun dilakukan. Untuk menyasiasi masalah kapabilitas individu, pelatihan teknologi informasi dilakukan secara teratur. Setiap Kepala Dinas bahkan harus didampingi oleh seorang operator yang terlatih.

Keempat, implementasi secara bertahap. Implementasi secara bertahap adalah pelajaran lain yang bisa diambil. KPT adalah sebuah pilihan baik untuk mengawali implementasi *e-government*. Pembangunan infrastruktur pun dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal sebanyak 52 kantor terkoneksi Internet sampai pada tingkat kecamatan. Pada

tahapan selanjutnya, sebanyak 208 desa juga disambungkan.

Selain dapat menyalahi keterbatasan sumberdaya, implementasi secara bertahap ini juga akan memudahkan proses difusi dengan mengurangi risiko dan menurunkan resistensi. Inisiatif Sragen untuk mendukung pengadaan infrastruktur dan fasilitas dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan memasok keperluan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau juga sangat menarik.

Kelima, Pembangunan kemitraan. Kemitraan dengan berbagai pihak contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan hasil kerjasama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Untuk memperbaiki cetak biru *e-government*, pihak perguruan tinggi pun dijadikan mitra. Kemitraan dengan beberapa lembaga internasional yang terkesan dengan kualitas layanan publik Sragen juga dilakukan. Kemitraan yang baik ini dengan berbagai pihak, selain akan memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya, juga akan meningkatkan kualitas.

Keenam, Melakukan evaluasi secara rutin. Salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi *e-government* adalah tidak adanya indikator keberhasilan (e.g. Janssen et al., 2004). Hal ini disadari betul oleh Sragen dan ditindaklanjuti dengan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Setiap tahun, KPT melakukan survei kepada pengguna layanan, untuk mengukur kualitas, dan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk perbaikan.

Buah Manis Perjuangan

Kunci keberhasilan pembangunan di Sragen, yaitu kompetensi, *networking*, konsistensi dan komitmen. Semua hal itu diramu dengan baik oleh Bupati Sragen Untung Wiyono dan jajaran PNS Sragen, sehingga ekonomi mikro dapat berjalan dengan baik tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Hasilnya, Pemda Sragen bisa memberikan pelayanan publik lebih baik, cepat, dan tentu saja murah. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berhasil menyelesaikan perizinan 30% lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Misalnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang membutuhkan waktu 12 hari kerja bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Selain itu, para staf KPT memberikan pelayanan yang lebih profesional mulai dari penampilan fisik dan pelayanan yang baik.

Dengan diberlakukannya sistem ini, Kabupaten Sragen berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2001 sebesar 12 milyar, tahun 2002 22,56 milyar, tahun 2003 menjadi 40,55 milyar, tahun 2004 43,5 milyar dan tahun 2007 melejit 54 milyar. Sebagian PAD ini diperoleh dari kenaikan pengurusan dokumen perizinan usaha. Prestasi yang sangat luar biasa untuk di contoh daerah lain.

Pentingnya Inovasi dalam Otoda

PADA prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktek-praktek kekuasaan yang menindas seperti yang

dialami dalam sistem lama yang tersentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di daerah dengan masyarakatnya. Bahkan kekhawatiran bahwa sistem otonomi pemerintahan daerah itu justru dapat menimbulkan otoritarianisme pemerintahan lokal di seluruh Indonesia. Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan dalam waktu singkat tiba-tiba mendapatkan kekuasaan dan kesempatan yang sangat besar yang dalam waktu singkat belum tentu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya.

Dalam keadaan demikian, maka sesuai dengan dalil Lord Acton *bahwa 'power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'*, timbul kekhawatiran bahwa iklim penindasan dan praktek-praktek kezaliman yang anti demokrasi serta praktek-praktek pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di tingkat pusat justru ikut beralih ke dalam praktek pemerintahan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah haruslah dipahami esensinya juga mencakup pengertian otonomi masyarakat di daerah-daerah dalam berhadapan dengan pemerintahan di daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal-hal yang mendasar dalam Otonomi Daerah adalah (kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD; serta membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya; pengaturan masalah pengelolaan keuangan

daerah dan anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama: *sharing of power, distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo; 2002).

Harus Ada Inovasi

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang ideal dengan begitu besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka kemandirian adalah kuncinya. kondisi satu daerah dengan daerah lain pasti berbeda baik terhadap sumber daya alam maupun juga sumber daya manusia. Otonomi daerah memberikan ruang kepada kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat dalam memajukan daerahnya masing-masing. Inovasi adalah sebuah keharusan!

Merubah paradigma birokrasi adalah *starting point* bagi kepala daerah dalam menciptakan otonomi yang ideal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pemilihan langsung kepala daerah memperkuat wacana ini. Perubahan paradigma terhadap birokrasi pada era otonomi mesti mengarah kepada *new public management*, dimana pemerintah tidak hanya berpikir tentang pelayanan publik (*public service*) saja tapi juga berpikir tentang *input financial*. Pemerintah daerah otonom mesti berprinsip 3 E (efisien, efektif dan ekonomis).

Beberapa daerah yang dipimpin oleh para pembaharu otonomi daerah telah memberikan contoh yang baik bagaimana ber-visi yang jelas dalam memajukan daerah. Saya telah menulis pada edisi lain tentang keberhasilan daerah. Diantaranya, Kabupaten Jembrana dibawah pimpinan I Gede Winasa, Jembrana yang merupakan daerah termiskin di Bali “disulap” oleh bupatinya menjadi daerah kaya. Pendidikan dan kesehatan gratis dapat dinikmati oleh masyarakat Jembrana.

Kabupaten Tanah Datar di bawah pimpinan H. Masriadi Martunus juga berhasil menjadikan daerah ini sebagai pelaksana terbaik otonomi daerah dengan menerapkan prinsip *reinventing government*, konsep memajukan daerah dimana birokrat memikirkan tentang *input financial*, merapikan struktur organisasi pemerintahan, membuat unit usaha dan deposito keuangan daerah dalam bentuk giro. Tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah. Kemudian juga ada Kabupaten Sragen dibawah pimpinan Untung Wiyono dengan inovasi yang terkenal yaitu e-government. Dengan menerapkan pemerintahan berbasis IT (Informasi Teknologi) Sragen berhasil merubah cara berpikir masyarakat dari birokrasi yang terkesan lamban menjadi jauh lebih efektif. Pelayanan terhadap masyarakat dengan menerapkan *one stop servise* mengajarkan untuk transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menciptakan otonomi yang benar-benar mandiri kedepan kepala daerah harus berpikir lebih keras. Kepala daerah yang terpilih secara langsung melalui mekanisme Pilkada langsung haruslah orang memiliki visi kedaerahan. Kalau seorang kepala daerah terpilih cenderung lebih banyak mencari simpati dengan melakukan *roadshow kosong* dan menghambur-hamburkan uang daerah tetapi taraf kehidupan rakyat tidak berubah maka ini adalah sebuah dosa

politik yang sangat besar.

Para pegawai pemerintahan harus ditingkatkan kapasitasnya tentang pemerintahan. Karena sebagian besar pegawai pemerintahan dijenjang pendidikannya tidak belajar tentang pemerintahan/adiministrasi. Untuk pegawai ini dilakukan pelatihan singkat bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan disiplin ilmu pemerintahan, ilmu politik dan juga administrasi negara. Pelatihan melibatkan para akademisi dan juga praktisi dengan muatan silabus yang aplikatif. Karena inovasi yang akan dillakukan oleh kepala daerah mesti didukung oleh sumber daya aparatur pemerintah yang memadai/kompetensi paradigma baru birokrasi.

Otoda, Sudahkah Rakyat Sejahtera?

“Otonomi masyarakat tak hanya melaksanakan demokrasi, tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa dalam bentuk pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat lokal” (Mohammad Hatta : 1957).

PERKEMBANGAN dinamika nasional pada akhir masa pemerintahan Orde Baru telah mendorong keputusan politik untuk segera dilaksanakannya proses desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi penuh dilakukan dengan harapan masyarakat akan lebih sejahtera, daerah lebih mandiri, kearifan lokal lebih terakomodir dan perubahan-perubahan secara signifikan bisa tercapai. Namun patut disayangkan , pada beberapa tahun belakangan ini berkembang berbagai permasalahan yang memiliki potensi sebagai penyebab dan pendorong terjadinya disintegrasi bangsa; baik dibidang politik, sosial dan keamanan dan muaranya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*Susilo Bambang Ydhoyono, M.A : 2003*).

Di bidang politik telah terjadi suatu ketidakstabilan politik, antara lain dalam bentuk konflik antara top elit politik, yang sangat disayangkan telah cenderung melibatkan massa pengikut pada tingkat *grass root*. Sehingga dapat menyebabkan teradinya konflik antar massa pengikut yang jelas dapat memicu terjadinya perpeceahan. Kasusnya banyak kita lihat pada pemilihan kepala daerah langsung dibeberapa

daerah, sebut saja Pilkada Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu, sekarang masih terjadi konflik besar-besaran di Maluku Utara. Dan hampir 44,7 persen pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2005 selalu menyisakan konflik dan sampai ke pengadilan (*Padang Ekspres, 19 juni 2008*).

Pada periode transisi dan proses perubahan dari suatu sistem yang *authorian* menuju ke suatu sistem negara demokratis, serta perubahan dari sistem pemerintahan yang terpusat menuju desentralisasi dan otonomi daerah, dapat dipahami terjadi suatu ketidakstabilan politik. Namun apabila hal ini dipelihara dan dibiarkan berlarut-larut, jelas akan membahayakan keberdaan Indonesia, baik sebagai bangsa maupun negara.

Dalam hal ini ada satu aspek yang sering terlupakan oleh kalangan politisi kita, bahwa kedewasaan dan kematangan berpolitik anantara lain di tandai oleh kemampuan kita bersedia dan senantiasa mengupayakan terjadinya kompromi dan konsensus, khususnya pada saat terjadinya *dispute* dan perbedaan pendapat antara para elit. Solusi terbaik dalam mencapai konsensus dan kompromi adalah melalui dialog dan jalan damai, bukan melalui pengerahan massa pengikut dengan eksploitasi loyalitas dan fanatisme buta.

Di bidang sosial, sistem lama telah ditinggalkan namun sistem dan nilai-nilai baru belum mampu terbentuk dan belum dipahami masyarakat. Akibatnya telah terjadi suatu *social disobedience* suatu pembangkangan sosial yang ditandai oleh berbagai kegiatan pelanggaran hukum seperti penjarahan-penjarahan, pencurian-pencurian, penggusuran-penggusuran, hukum massa, perusakan-perusakan fasilitas umum, sampai dengan terjadinya konflik komunal/horizontal di Maluku, Poso, Sampit, Banggai dan daerah-daeraha lain.

Di bidang keamanan paling tidak ada dua permasalahan yang memerlukan solusi karena memiliki potensi yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi nasional, yakni separatisme dan insurjensi (konflik vertikal) dan konflik komunal/horizontal sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Konflik vertikal yang terjadi di Irian Jaya dan Aceh beberapa waktu yang lalu berupa kegiatan separatisme juga diperdalam dengan terjadinya suatu *social discontent*, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah dimasa lalu yang juga perlu kita tangani secara seksama, arif dan penuh kehati-hatian.

Kita cukup dikejutkan dengan temuan dari Litbang Kompas yang dipublikasi pada pada 28 April 2008 lalu. Di jelaskan bahwa; hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 23-25 April 2008 terhadap 1.139 pemilik telepon di 33 ibu kota provinsi di Indonesia. Secara umum, 52,2 persen responden menyatakan belum merasakan ada perbaikan signifikan terkait kondisi perekonomian di daerah mereka selama tiga tahun terakhir. Sementara 45,7 persen responden lainnya berpendapat sebaliknya. Apresiasi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah tampak menonjol ditunjukkan oleh publik di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Penilaian terhadap kinerja di bidang ekonomi, misalnya, persentase publik yang memberikan apresiasi negatif paling tinggi adalah responden di Kota Medan. Sebanyak 83,8 persen responden di kota ini menyatakan tidak puas atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi perekonomian.

Disusul publik di Kota Semarang, sekitar delapan dari sepuluh responden juga menyatakan ketidakpuasan mereka.

Problem pengangguran dan kemiskinan adalah hal yang paling banyak disebut oleh responden sebagai masalah yang paling mendesak untuk diatasi oleh pemerintahan di daerah mereka. Sebanyak 30,6 responden menyatakan, persoalan pengangguran sebagai problem yang paling genting. Sementara 20,2 persen responden menyebutkan masalah kemiskinan sebagai problem utama.

Ini menandakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah penuh reformasi belum sampai pada cita-cita mulianya. Apalagi, Kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah belum memberi banyak perubahan bagi daerah, khususnya perekonomian masyarakat. Baik di daerah yang sudah pilkada maupun yang belum, perekonomian menjadi titik ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Substansi dari desentralisasi sesungguhnya berujung pada soal kedaulatan rakyat. Otonomi seharusnya menempatkan masyarakat sebagai jantung dari segala tujuan pembangunan.

Otonomi Diselewengkan?

Otonomi daerah yang sudah bergulir sejak awal tahun 2001, menurut Sultan Hamengku Buwono X malah meninggalkan kesejahteraan rakyat, sebab dalam pelaksanaannya arti otonomi daerah itu sudah menyimpang. Otonomi diartikan sebagai penguasaan atas daerah (*Sinar Harapan; 23 November 2001*). Fakta yang memprihatinkan berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang merosot, menunjukkan pada kita tentang fakta buruknya kinerja pemerintahan daerah, yang justru terjadi di era otonomi, era di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kita harus menyadari bahwa banyak oportunist yang tengah menggenggam otonomi daerah ini. Tidak mengherankan jika mereka abai pada kesejahteraan rakyat, sebab mereka lebih

banyak sibuk membangun kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam konteks ini, untuk menghentikan munculnya masalah merosotnya derajat kesejahteraan masyarakat, kita harus berani mengembalikan semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki pelayanan publik. Harus ada upaya yang serius menghentikan pelaksanaan otonomi yang di- jadikan lahan korupsi, dan mengembangkan raja-raja kecil yang lalim di daerah-daerah.

Merubah Paradigma

Desentralisasi menjadi jawaban yang bisa mengarahkan kepada sukses daerah mengelola dirinya sendiri. Di satu sisi, desentralisasi merupakan sebuah terobosan besar dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Dengan desentralisasi, daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. (baca: Kuncinya, Desentralisasi dan Transparansi).

Di sisi lain, desentralisasi menuntut kesiapan daerah untuk lebih mandiri, termasuk mengelola konflik-konflik yang berkembang, baik setelah proses desentralisasi ataupun selama ini dikelola pemerintah pusat. Desentralisasi yang diusung otonomi daerah memang menjadi sarana tersendiri bagi daerah untuk membuktikan potensi yang dimiliki (*Sindo, 22 Juni 2008*).

Kuncinya adalah kreativitas pejabat daerah setempat dalam memberdayakan potensi daerah merupakan kunci utama sukses tidaknya memajukan daerahnya. Begitu pula dengan kebijakan yang dikeluarkan, tak kalah pentingnya untuk menggali potensi yang tersedia. Sejak otonomi daerah bergulir, banyak daerah yang memunculkan konsep-konsep brilian demi kemakmuran rakyatnya.

Konsep *new management* (manajemen baru) telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, diantaranya birokrasi yang sulit ditembus, sentralistik, *top down* (perintah kebawah), hirarki yang sangat panjang serta tidak produktif karena cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Akibatnya adalah kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreatifitas diarahkan menjadi birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

Munculnya konsep *new public management* di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1980-an juga telah menginspirasi birokrasi Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru. Salah satunya *Entrepreneurial Government* (pemerintahan wirausaha) yang dikemukakan Osborne and Gaebler (1992). Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau pipih (*flat*), efisien dan rasional serta desentralisasi dengan menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina keakraban dan keterbukaan pada dirinya.

Sebagaimana studi David Osborne dan Ted Gaebler dalam *reinventing government how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, maka pemerintahan di era yang akan datang tentu dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan *public servicer* (pelayanan publik) yang memiliki jiwa entrepreneur, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Beberapa daerah telah membuktikan bahwa bisa bangkit dari paradigma lama pemerintahan. Termasuk juga merubah

pandangan bahwa hanya daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar akan maju. Buktinya daerah miskin sekalipun bisa menjadi proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah penuh dalam mensejahterakan rakyatnya. Sebut saja Kabupaten Jembrana yang memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis pada masyarakatnya.

Pemekaran Daerah Dampak Otonomi Penuh

“Hasil evaluasi, 76 persen daerah-daerah hasil pemekaran ternyata malah mundur, salah satu indikatornya ialah kemiskinan” (Priyo Budi Santoso; 2007)

OTONOMI daerah penuh yang diaplikasikan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, memberikan banyak ruang proses demokrasi untuk daerah otonom baik propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Dari lama rakyat memang mengharapkan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah dan bukan hanya pelimpahan urusan saja. Masa transisi dari sentralisasi ke desentralisasi terus berusaha mencari format yang terbaik terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Disini kepala daerah maupun komponen legislatif ditantang untuk menggali semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan daerah dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan.

Sasaran Otonomi daerah adalah *Pertama*, tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD. *Kedua*, meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah. *Ketiga*, Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif,

efisien, dan akuntabel. *Keempat* meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. *Kelima*, Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional dan *Keenam*, tertatanya daerah otonom baru.

Kemudian beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah *Pertama*, penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat. *Kedua*, kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah. *Ketiga*, adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia. *Keempat*, adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah

Salah satu wacana politik lokal yang cukup hangat sejak otonomi penuh ini adalah pemekaran wilayah. akhir-akhir ini merupakan salah satu tema politik yang menggelembung di masyarakat. Pergolakan seputar diskursus tentang pemekaran wilayah bahkan sudah sangat mengkristal dan mewacana dengan cepat, tajam, dan menimbulkan friksi politik yang keras. Maka tak heran isu ini menjadi bak bola salju, yang kian menggelinding. Landasan yuridis tentang pemekaran wilayah diperkuat dengan lahir satu kamar baru di legislatif kita yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tugas dan wewenang DPD : rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003.

Pemekaran daerah seharusnya bertujuan untuk bisa mengefisienkan pelayanan terhadap publik karena mungkin disebabkan terkendala masyarakat secara luas teritorial daerah. Pemekaran daerah bisa dilakukan setelah adanya konsensus yang baik antara *stakeholder* yang ada dalam wilayah tersebut. Sudah siapnya semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan baru di daerah tersebut ketika sudah dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sehingga pemekaran wilayah yang dilakukan bukanlah sebuah proses yang dimulai dengan konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal yang kemudian hari berdampak sangat buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah yang tidak menjadi *momok* yang menakutkan bagi masyarakat sebagai akibat dari kepentingan *segelintir* elit politik yang ingin memanfaatkan ruang besar dalam otonomi penuh ini. Daerah baru yang dimekarkan menjadi berdampak miskin, konflik anatara daerah lama dan baru terjadi secara berkelanjutan, sumber daya aparatur pemerintahan yang tidak berkualitas, pejabat legislatif dan eksekutif yang memperkaya diri, terjadinya privatisasi terhadap kekayaan daerah dan pemahaman-pemahaman salah lain yang terjadi.

Menurut Pakar Otonomi Daerah *Eko Prasajo (2007)* Pemekaran memang tidak boleh diharamkan, tetapi pemekaran yang tidak tepat menyebabkan *inefisiensi* penggunaan keuangan negara. Sebab bagaimanapun, kekuatan keuangan

negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah memiliki keterbatasan. Problem pemekaran terjadi karena kepentingan politik elite lebih menonjol daripada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Secara politis, pemekaran juga diartikan sebagai “pembukaan” lapangan pekerjaan politik menjadi anggota DPRD dan lapangan jabatan baru lain yang muncul sebagai konsekuensi terbentuknya daerah otonom.

Pemekaran juga sekaligus membuat konfigurasi baru kekuatan partai politik di daerah yang dimekarkan yang bisa saja berbeda dengan daerah induknya. Terkait dengan implementasi kebijakan PP 129/2000, bisa dikatakan bahwa persetujuan politik pemekaran daerah sering berada “dalam ruang gelap”. Ukuran persetujuan lebih sering dilakukan secara administratif oleh tim konsultan, sedangkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tidak berdaya untuk menolak pemekaran.

Persetujuan terhadap pemekaran juga sering tidak memberikan tempat yang luas untuk menganalisis apakah daerah benar-benar bisa dimekarkan atau tidak. Jika tidak terjadi komitmen politik untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) sampai dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang sudah dimekarkan, PP 78/2007 sebagai pengganti PP 129 Tahun 2000 tidak bisa efektif untuk mengerem laju tuntutan pemekaran daerah. Terkait dengan pemekaran daerah adalah pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung (pilkadasung). Tujuan pilkadasung ialah meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk memilih secara langsung kepala daerahnya.

Menurut *Laode Ida (2005)* ada beberapa alasan yang muncul ketika sebuah daerah dimekarkan; *Pertama*, dikaitkan dengan rentang kendali suatu wilayah daerah yang dianggap

terlalu luas, sehingga untuk mendekatkan pihak pengambil kebijakan (yang bertempat di ibu kota pemerintahan daerah) dengan masyarakat, dipandang perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah baru. Alasan ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Kedua, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan, karena kenyataannya konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan (ekonomi) selalu berada di ibu kota pemerintahan daerah dan wilayah sekitarnya. Sementara semakin jauh dari ibu kota daerah maka akan semakin tertinggal pula daerah itu, sehingga para elite dari masyarakat yang berada di daerah yang tertinggal itu berupaya untuk menghadirkan pemerintahan sendiri.

Ketiga, dan ini sering tidak diungkap sebagai alasan tertulis, adalah upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Perputaran elite di tingkat yang begitu lambat, bahkan sejumlah elite daerah yang sudah keenakan di kursi kekuasaan dan jabatan, terus mempertahankannya dengan berbagai cara, sehingga muncul kecemburuan dari para elite lain yang juga haus kekuasaan.

Alasan pertama dan kedua tentu saja dapat kita benarkan baik secara sosiologis maupun secara yuridis, sedangkan alasan ketiga yang mendominasi munculnya daerah-daerah pemekaran baru adalah sebuah dosa politik yang dilakukan oleh elit politik terhadap rakyatnya. Sebuah kesalahan memakai otonomi daerah. Konflik di antara para elite lokal itu dalam memperebutkan kekuasaan dan jabatan sering tak bisa dihindari, termasuk di dalamnya melibatkan rakyat (arus bawah) dalam wujud konflik horizontal (antara lain terbukti pada kasus Mamassa, Sulawesi Selatan, dan Morowali, Sulawesi

Tengah). Akibatnya, dengan berbagai cara pula berupaya memekarkan daerah sehingga bisa memperoleh jabatan atau kekuasaan di daerah baru itu. Apalagi bagi mereka yang sudah berjasa dalam memperjuangkan daerah pemekaran, sudah memposisikan diri sebagai pihak yang harus dapat bagian jatah kursi jabatan atau politik dan kekuasaan di daerah baru itu.

Pemekaran Daerah telah menguras energi Pemerintah Provinsi dan prosesnya sering menimbulkan ketidakstabilan daerah. Pemekaran sering kurang memperhatikan aspek kemampuan daerah (yang akan dimekarkan). Sebaiknya ketentuan tentang pemekaran harus lebih mengedepankan faktor-faktor yang dimiliki daerah yang berkaitan langsung dengan kemampuan daerah pemekaran untuk menyelenggarakan pelayanan publik lebih baik dibandingkan dengan daerah induknya. Pemekaran saat ini lebih tinggi bobot politiknya daripada aspek kondisi obyektif daerah. Harus ada *audit independent* yang komprehensif yang mengevaluasi kelayakan pemekaran dan ada masa transisi untuk pemekaran yang diawasi oleh daerah induk. Setelah menunjukkan kinerja yang baik baru dimekarkan.

Saya juga berpendapat bahwa tentu saja tidak semua daerah pemekaran baru yang menjadi masalah dalam otonomi penuh ini. Di beberapa daerah, otonomi daerah memberikan wajah yang menggembirakan. Kewenangan yang diserahkan ke daerah telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan indeks pembangunan manusia. Ada beberapa daerah pemekaran terus berjuang mensejahterakan rakyatnya oleh kepala daerah yang punya *good political will* seperti Propinsi Gorontalo, Bangka Belitung, termasuk juga dilokal Sumatera Barat yaitu Kabupaten Darmasraya, Pasaman Timur

dan Solok Selatan.

Kedepannya tetap pemerintah mesti memperhatikan beberapa aspek dalam hal pemekaran daerah ini, diantaranya; *Pertama*, usulan pemekaran daerah berasal dari satu pintu. Dengan ketersediaan parameter yang obyektif, inisiatif rancangan undang-undang atau RUU pembentukan daerah sebaiknya lewat pemerintah saja. Selama ini, pengajuan usul pemekaran lewat berbagai jalur berisiko memunculkan masalah, termasuk inefisiensi anggaran dan terjadinya tumpang tindih pembahasan. *Kedua*, diperlukan pengkajian ulang terhadap semua daerah yang sudah dimekarkan. Dengan pengkajian ulang, setidaknya bisa diperoleh potret obyektif terhadap kondisi dan dampak daerah-daerah yang sudah dimekarkan itu.

Kedua, diperlukan payung hukum yang lebih objektif-rasional yang bisa dijadikan dasar untuk memproses, menyetujui atau menolak usul pemekaran, termasuk di dalamnya upaya penggabungan daerah. Ketiga, diperlukan suatu bentuk inovasi pengelolaan pemerintahan lokal di mana tanpa pemekaran tujuan desentralisasi-otonomi daerah bisa dicapai.

Berjalannya kedepan otonomi daerah ini dengan baik tentu saja dengan kesadaran berpolitik yang baik. Tidak lagi memanfaatkan, menafsirkan dan bahkan menyelewengkan makna sesungguhnya!

Mengubah Paradigma Birokrasi

BIROKRASI sebagai lembaga pelayanan publik merupakan aplikasi dari kerja pemerintah. Berhasil atau tidak pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tergantung bagaimana dengan kinerja lembaga birokralinya. Sehingga banyak negara mencoba mencari format terbaik bagaimana birokrasi ini bisa berjalan dengan efektif dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sejak pertengahan tahun 1980-an di Eropa dan Amerika terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan *new public management*.

Model *public management* mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk perubahan, salah satunya *Entrepreneurial Government* (pemerintahan wirausaha) (Osborne and Gaebler, 1992). Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau pipih (*flat*), efisien dan rasional serta desentralisasi dengan menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan

tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina keakraban dan keterbukaan pada dirinya.

Munculnya konsep *new management* (manajemen baru) telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, diantaranya birokrasi yang sulit ditembus, sentralistis, *top down* (perintah kebawah), hirarki yang sangat panjang serta tidak produktif karena cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Akibatnya adalah kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreatifitas diarahkan menjadi birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

Penataan ulang atau menemukan kembali (*reinventing*) birokrasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika telah melihatkan hasil yang maksimal. Peran organisasi publik dan pegawai pemerintah yang dulunya hanya berfokus melayani masyarakat (*public service*) dan meninggalkan orientasi *input* (penghasilan). Namun, sekarang pemerintahannya telah memikirkan *input* dalam rangka memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan semua sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana studi David Osborne dan Ted Gaebler dalam *reinventing government how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, maka pemerintahan di era yang akan datang tentu dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan *public servicer* (pelayanan publik) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Pemerintahan yang pertama memberikan respon terhadap berbagai realitas baru ini di Amerika adalah pemerintah daerah, karena sebagian besar daerahlah yang

menjalani jalan buntu dalam masalah finansial. Di bawah tekanan finansial yang hebat, para pemimpin daerah dan negara bagian tidak punya pilihan lain kecuali mengubah cara mereka menjalankan usaha-usahanya.. Negara bagian pertama yang merespon adalah California, dibawah pemerintahan Ronald Reagen tahun 1980. Kemudian para walikota dan gubernur menjalankan sistem kemitraan negeri swasta dan mengembangkan beberapa cara alternatif untuk memberikan pelayanan. Mereka mencoba menjalankan pemerintahan dengan manajemen perusahaan, organisasi pengetahuan dan kota swadaya, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai lembaga provit, untuk menutupi permasalahan-permasalahan finansial daerah dan negara bagian.

Pemerintahan wirausaha yang merupakan salah satu dari 10 prinsip *reinventing government* yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler sejak tahun 1980-an telah dilaksanakan oleh kota dan negara bagian di Amerika Serikat. Walikota Indiana Polis, William Hudnut dalam pidatonya pada tahun 1986 mengatakan :

“Pemerintah wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif dan kreatif serta berani mengambil resiko. Ia juga mengubah beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang penguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatiftradisonal yang hanya memberikan sistem penolong hidup. Ia bekerjasama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan dan mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan terhadap jasa. Ia pun mengatakan, “mari kita selesaikan pekerjaan ini”, dan tidak takut mengimpikan hal-hal

yang besar”.

Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sepanjang orde baru tetap mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi mendapat pencitraan negatif dari masyarakat. Birokrasi adalah lembaga yang berbelit-belit, lamban, menghalangi kemajuan, prosedural dan mengenyampingkan substansi dan tidak efisien. Di zaman orde baru birokrasi merupakan lembaga representasi dan juga unsur terpenting dari keberadaan sistem politik otoriter yang dilestarikan oleh Soeharto selama ± 32 tahun. Birokrasi, baik sipil maupun militer, menjadi instrumen terpenting dari format politik orde baru. Kondisi birokrasi yang bertahan cukup lama di Indonesia, ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan birokrasi itu bukan banyak berperan melayani kepentingan masyarakat tetapi justru untuk memperkuat dan melayani keputusan rezim.

Menyadari terjadi kebobrokan dalam birokrasi di Indonesia menjadi salah satu latar belakang munculnya reformasi politik yang kemudian melahirkan kebijakan desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, birokrasi yang netral dan profesional, transparan dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang mampu merespon tuntutan masyarakat lokal. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tema sentral reformasi total yang dibicarakan adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Selain itu reformasi juga diharapkan bisa memunculkan sikap keterbukaan dan

fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan penting yang diharapkan masyarakat dalam paradigma baru pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah adalah tumbuhnya sebuah birokrasi daerah yang mampu menjadi salah satu pilar penunjang demokratisasi pada tingkat lokal. Momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian di ikuti *reinventing government* untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah akan bisa melaksanakan jalan pemerintahan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Masa transisi pemerintah dengan adanya peralihan dari orde baru ke orde reformasi, tentu saja ada perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah karena ada kewenangan-kewenangan baru yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom, pemerintah propinsi dan kabupaten mencari format baru pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Menggagas Hari Partai Politik

BEBERAPA bulan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta (sebut Bung Hatta) sebagai Wakil Presiden memiliki gagasan cemerlang untuk kemajuan negara ini. Tepat pada tanggal 3 November 1945, Bung Hatta mengeluarkan Maklumat X yang berisi anjuran pemerintah untuk mendirikan partai politik. Sebuah gagasan kebangsaan sebagai tonggak demokrasi bangsa Indonesia yang baru saja berhasil mengusir penjajah.

Berikut bunyi mahklumat tersebut; “ *Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partai-partai politik, dengan retriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknja memperkuat perdjuaan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan Masjarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa: 1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itulah dapat dipimpin ke djalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946*”. (Djakarta, 3 November 1945, Wakil Presiden, MOHAMMAD HATTA).

Walaupun lahirnya maklumat ini dipertanyakan kenapa

Bung Hatta yang mengeluarkan? Tapi secara substansi sangat jelas bahwa tujuan maklumat pendirian partai politik itu adalah untuk mengakomodir ideologi dan paham yang berkembang dalam masyarakat. Paham dan ideologi yang terlembaga tersebut diarahkan untuk tertatanya dengan baik perpolitikan bangsa dan keamanan masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik adalah instrumen yang sangat penting.

Partai politik adalah syarat untuk terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan untuk mengakomodir kehendak rakyat yang dalam pengelolaan pemerintahan. Walaupun partai politik bukan satu-satunya wadah yang meng-agregasikan kepentingan rakyat tapi partai politiklah yang melakukan rekrutmen kepemimpinan negara dari pusat sampai daerah.

Sebenarnya dalam sejarah bangsa, jauh sebelum Maklumat X 3 November 1945 itu, sejak tahun 1912 juga sudah ada partai politik di Indonesia, sebut saja Partai Syarikat Islam (PSI). Tapi lahirnya partai politik tersebut belum menjadi bagian instrumen negara demokrasi karena kita masih dijajah. Walaupun partai tersebut juga berjuang mencapai kemerdekaan bangsa.

Sejak dikeluarkannya Maklumat X oleh Bung Hatta, untuk pertama kalinya sebagai negara berdaulat partai politik diberikan ruang menuju pentas kekuasaan. Dalam teori politik, lahirnya sebuah partai politik bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Banyak partai politik yang muncul setelah dikeluarkan Maklumat X tersebut oleh Bung Hatta, ada sekitar 77 partai politik. Partai-partai politik yang lahir ini diisi oleh orang-orang terbaik yang memiliki niat membentuk negara bangsa.

Perkembangan partai politik di Indonesia terus bergulir, beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) telah dilakukan. Walaupun selama pemerintahan Orde Baru tercipta pengkebirian terhadap politik oleh Soeharto, namun Pemilu tetap dilaksanakan. Selama 32 tahun partai yang boleh “hidup” hanya ada tiga, Golongan Karya (tidak disebut partai), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan.

Pasca tumbang rezim orde baru tahun 1998, partai politik kembali muncul dalam jumlah yang lebih banyak (multi partai). Tapi kemunculan multi partai tersebut semakin meningkatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik. Rakyat memberikan citra yang sangat buruk terhadap partai politik. Partai diisi oleh orang-orang yang tidak memihak kepada rakyat, tapi mencari keuntungan sendiri ketika meraih kekuasaan. Partai tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik kepada rakyat. Partai politik diurus oleh yang tidak berkapasitas tapi oleh sembarangan orang karena pengkaderan tidak jalan.

Untuk memikirkan ter-arahnya partai politik kedepan yang lebih baik, ada gagasan yang muncul untuk menjadikan tanggal 3 November sebagai Hari Partai Politik. Dengan argumentasi, setiap 3 November dijadikan hari evaluasi bersama perjalanan partai politik bangsa ini dan dijadikan sebagai momen pencerahan tata kelola partai politik kedepan. Agar tidak semakin jauh menyimpang perjalanan partai politik, gagasan ini semestinya terus digelindingkan. Sudah harus ada sejarah yang mencatat dengan baik perjalanan partai politik bangsa ini. Kalau ada Hari Ibu, Hari Pendidikan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartani dan hari-hari yang lain. Kenapa tidak ada Hari Partai Politik.

Fungsi Partai Politik

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, partai politik harus lebih berbenah diri. Partai politik harus mengembalikan *marwah*-nya sebagaimana tujuan dikeluarkan Maklumat X 3 November 1945 oleh Bung Hatta. Partai politik diharapkan menjalankan semua fungsinya dengan baik, agar rakyat kembali percaya.

Menurut Miriam Budiarmo, fungsi partai politik adalah *Pertama*, sarana komunikasi politik. Maksudnya partai memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau '*political interest*' yang terdapat dalam masyarakat.

Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*) maksudnya partai politik berfungsi dalam hal pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara atau *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat/warga negara.

Ketiga, sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*). Maksudnya partai politik dibentuk dengan tujuan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin bangsa pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader pemimpin ini dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan oleh legislatif atau melalui cara pemilihan langsung lainnya.

Keempat, pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*). Nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama

lain. Sehingga partai politik dapat mengakomodir berbagai kepentingan tersebut dan menyalurkannya sesuai dengan ideologi, program dan alternatif kebijakan yang berbeda satu sama lain. Sebagai pengatur konflik (*conflict management*) partai politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan (*agregation of interest*) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik.

Dengan masuknya beberapa kaum intelektual muda dan aktivis kedalam struktur partai politik belakangan ini, bahkan banyak yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) pusat dan daerah diharapkan mereka melakukan perubahan. Kalau memang melakukan perubahan itu *ruh*-nya ada pada kekuasaan, buktikan anda semua komitmen dengan idealisme anda ketika nanti berkuasa!

Dari Otonomi ke Federal

TANTANGAN bagi penguatan demokrasi atau konsolidasi demokrasi adalah bagaimana memberikan akses demokrasi kepada masyarakat dan pembentukan serta penguatan institusi-institusi demokrasi. Di titik inilah desentralisasi dengan perwujudan otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam konsolidasi demokrasi. Peran desentralisasi dalam konsolidasi demokrasi tersebut berasal dari adanya proses demokrasi yang memotivasi otoritas lokal dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan konstituennya. Otonomi daerah diyakini sebagai sebuah sistem yang paling tepat dalam mengakomodir kepentingan daerah. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan sentralisasi dianggap gagal.

Bahkan sejak tahun 1960 sudah disadari bahwa perencanaan terpusat itu tidak mendatangkan manfaat banyak bagi daerah, malah menimbulkan konsekuensi yang disfungsi. Beberapa dampak dari disfungsi tersebut adalah; *pertama*, terjadi disparitas perkembangan ekonomi. *Kedua*, kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. *Ketiga*, pusat membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhannya. *Empat*, pusat membuat kebijakan untuk konsumsi internasional dan kelima, penyedotan aset daerah oleh pusat.

Para ahli kemudian tidak percaya dengan sentralisasi yang telah dijalankan diberbagai negara dan mengusulkan alternatif

otonomi daerah. Riswandha Imawan (2002) mengatakan bila kita percaya bahwa sistem demokratis merupakan ciri masyarakat modern, maka kitapun harus percaya bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang harus diterapkan. Otonomi daerah bukanlah tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari otonomi daerah adalah efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Otonomi daerah diharapkan tidak hanya membicarakan persoalan pemerintahan, melainkan juga persoalan pelayanan umum dan pembangunan. Pembangunan daerah adalah sesuatu yang kompleks sehingga tidak bisa direncanakan dari pusat. Dalam pelayanan umum, otonomi daerah memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat lebih baik. Akan tercipta pengelolaan pelayanan umum yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Daerah yang tidak kreatif dan inovatif akan tertinggal dalam banyak hal.

Dampak otonomi daerah adalah pertama, akses orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan yang dulunya diabaikan terhadap sumber-sumber pemerintahan pusat semakin meningkat. Kedua, kekuatan tawar pemerintah lokal terhadap pemerintah pusat meningkat, sehingga mereka mampu mendapat jumlah sumberdaya pusat yang lebih besar bagi pembangunan lokal. Ketiga, organisasi-organisasi baru untuk merencanakan dan mengelola pembangunan menjadi hidup dan berkembang. Empat, kemampuan administratif dan teknis pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan membaik.

Untuk terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan dapat mengukur kinerja pemerintahnya, ada 4 faktor menurut Rondenelli dan Cheema. *Pertama*, kemampuan institusi pelaksana (internal birokrasi). Harus

ada pola manajemen yang baru dalam sistem pemerintahan birokrasi. Bahwa otonomi daerah tidak menghendaki lagi birokrat dilayani oleh rakyat. Tapi birokrat bertugas memberikan pelayanan yang penuh kepada rakyat. *Kedua*, hubungan-hubungan antar institusi pelaksana (koordinasi). Koordinasi menjadi sangat penting antar insitusi dalam tubuh pemerintahan. Sehingga tercipta sinergisitas pelayanan publik yang memadai terhadap masyarakat.

Ego antara satu dinas dengan lainnya harus dieleminir, karena akan bisa mengganggu stabilitas pelayanan publik. *Ketiga*, ketersediaan sumberdaya yang memadai. Persolaan terbesar yang dihadapi dalam menciptakan otonomi yang ideal adalah sumberdaya aparatur birokrasi yang tidak memadai.

Dalam berbagai aspek ini terus dievaluasi, para penyelenggara pemerintahan yang gagap teknologi, cara berpikir yang tradisional, tidak memahami tata manajemen organisasi yang baik, dan lain sebagainya. *Keempat*, lingkungan institusi pelaksana (situasi masyarakat sipil). Pada tingkat masyarakat yang tidak mau menerima kemajuan juga akan sulit untuk mengukur kinerja otonomi daerah. Artinya masyarakat juga mesti siap mengiringi perubahan yang dilakukukan pemerintah.

Federalisme Larry Diamond dalam buku *Developing Democracy Toward Consolidation* mengemukakan tiga keuntungan federalisme. *Pertama*, federalisme menawarkan desentralisasi politik yang komprehensif dengan adanya pemerintah tingkat menengah (middle tier of government). Pemerintah penghubung antara kepentingan pusat dan daerah ini sangat penting di negara dengan wilayah yang amat luas. Sebab, jumlah pemerintah daerah terlalu banyak sehingga

gagal menjalankan tiga fungsi pokoknya: sebagai pengimbang kekuatan pusat, penyediaan arena bagi perkembangan demokrasi, serta untuk menjalankan fungsi lain dalam menekan konflik etnis.

Menurut Diamond, hanya pemerintah level menengahlah yang mampu menjalankan tiga fungsi tersebut. Namun dalam konteks Indonesia, karena ketakutan terhadap kemungkinan berkembangnya federalisme, maka otonomi tidak ditempatkan pada level provinsi, namun langsung kepada kabupaten/kota yang relatif lemah secara politis dan ekonomis sehingga dapat dikendalikan oleh pusat. *Kedua*, federalisme mendorong kompetisi dan inovasi antar wilayah (propinsi) dan mencegah perilaku korup aparat pusat, meskipun ada kecenderungan korup juga dikalangan aparat daerah. *Ketiga*, federalisme menyediakan kerangka kerja yang lebih mapan dalam mengelola perpecahan etnik dan problem kebangsaan lainnya.

Dua hal harus diperhitungkan sebelum sampai kepada keputusan untuk menerapkan federalisme; *pertama*, perlu upaya konsisten untuk membangun rasa kebangsaan dan karakter nasional (nation and character building). Tanpa hal ini, federalisme akan merusak sendi-sendi persatuan yang terpatrit dalam jargon satu nusa satu bangsa, satu nasib satu saudara. *Kedua*, dibutuhkan adanya kedewasaan berpolitik dan sikap kenegarawanan diantara politisi lokal. Ketika desentralisasi secara luas diberlakukan, banyak sekali muncul konflik antara legislatif-eksekutif, pusat-daerah, propinsi-kabupaten, serta antara pemerintah-kelompok masyarakat. Maka, tanpa adanya kedewasaan dan kenegarawanan, federalisme hanya akan memperburuk konflik-konflik tersebut.

Dampak buruk federalisme adalah menjurus kearah pemisahan, atau dalam bahasa Diamond disebutkan, *federalism*

is a slippery slope to secession. Mengingat banyaknya kerugian yang mungkin timbul, maka gagasan untuk mengubah secara tergesa-gesa bentuk negara kesatuan menjadi federal juga bukan langkah yang bijak.

Merangkai Konsolidasi Demokrasi

FRANCIS Fukuyama pernah meyakini dengan begitu fanatik bahwa Amerika Serikat adalah negara paling demokratis di dunia. Francis menuliskan bahwa semua praktek-praktek pemerintahan dan kehidupan rakyat di Amerika Serikat paling ideal dibandingkan negara-negara lain. Tapi, Francis Fukuyama menjadi 'terpukul' atas tesis-nya sendiri ketika terjadi peledakan terhadap WTC dan Gedung Pentagon 11 September 2001 yang silam.

Pasca kejadian yang menghebohkan dunia itu Amerika Serikat diragukan kedemokrasiannya. Apalagi kebijakan Presiden G.W Bush memerangi negara Afganistan yang dianggap menyembunyikan pelaku peledakan 2 gedung raksasa tersebut, Osama bin Laden. Osama bin Laden menjadi misteri.

Amerika Serikat melihatkan semakin tidak demokratis dengan mengirimkan pasukan ke Irak untuk menghancurkan pemerintahan Saddam Husen. Saddam Husen di tangkap dan dihukum mati. Rakyat Irak diadu domba oleh tentara Amerika serikat. Tiga tahun belakangan Bush terus menambah jumlah pasukannya ke Irak. Bahkan APBN negara adikuasa itu terkuras juga untuk membiayai pasukannya yang sedang menjajah di belahan dunia, terutama di Timur Tengah.

Tidak hanya itu, di dalam negeri Amerika sendiri kata demokrasi tak lain sebagai hiasan saja. Tidak ada kebebasan pada rakyatnya secara utuh, terutama terhadap memilih

agama. Orang Amerika yang masuk Islam atau orang asing beragama Islam dan menetap disana diperlakukan secara diskriminatif. Orang Islam dituduh teroris. Pria berjenggot dan memakai jubah ditangkap. Wanita berjilbab dipermalukan di tempat-tempat umum.

Keangkuhan Amerika Serikat mendapat perlawanan dari negara-negara seperti Iran, Bolivia, Kuba termasuk juga China. Bahkan Ahmadinejad dalam beberapa surat dengan tulisan tangannya mengatakan tidak takut dengan G.W Bush. Iran juga siap berperang dengan negara Paman Sam itu, bahkan Ahmadinejad terus mengkampanyekan anti Amerika Serikat.

Kini Amerika Serikat diagungkan kembali sebagai negara yang demokratis sejak pemilihan presiden-nya tanggal 4 November 2008. Pertama dalam sejarah Amerika Serikat warga kulit hitam menjadi presiden. Terpilihnya Barrack Husein Obama sebagai presiden ke-44 dari Partai Demokrat. Obama dilantik, dengan harapan perubahan di negara yang sedang dilanda krisis itu. Mampukah Obama merangkai kembali konsolidasi demokrasi di Amerika Serikat?

Konsolidasi Demokrasi

Demokrasi menurut Larry Diamond dalam bukunya *Developing Democracy Toward Consolidation* (1992) harus dipandang sebagai fenomena yang berkelanjutan sehingga masa depan demokrasi adalah tiada henti. Diamond berasumsi bahwa demokrasi diyakini sebagai pilihan terbaik dan tak ada pilihan sistem pemerintahan lain yang lebih baik.

Konsolidasi demokrasi diartikan sebagai *"stability and persistence of democracy"*. Konsolidasi diharapkan bisa merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi

yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Konsolidasi demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar, yakni *pertama*, kinerja atau *performance* ekonomi dan politik dari rezim demokratis. *Kedua*, institusionalisasi politik yaitu penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum. Dan *ketiga*, restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya *civil society* yang otonom di lain pihak.

Konsolidasi demokrasi sangat memerlukan keyakinan pada legitimasi sistem demokrasi dan komitmen untuk melakukannya. Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari sekadar komitmen pada demokrasi secara abstrak yang sering menjadi sekadar *lip service*—bahwa demokrasi pada prinsipnya merupakan sistem pemerintahan terbaik—tetapi sekaligus juga komitmen normatif itu dibatinkan dan dicerminkan (*habituation*) dalam perilaku politik, baik di lingkungan elite, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pada tahapan ini Barrack Obama punya tanggungjawab paling besar untuk membuktikan bahwa demokrasi Amerika Serikat bukan sekedar *lip service*. Adanya diskriminasi yang terjadi selama ini dinegaranya terhadap berbagai etnis kulit hitam mampukah dihilangkan? Keberagaman agama bisakah diakui?

Tiga tugas konsolidasi demokrasi yang harus diingat Barrack Obama adalah *pertama*, penguatan demokrasi yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, taat pada

hukum, akuntabilitas eksekutif terhadap publik, otonomi masyarakat sipil, dan penguatan partisipasi masyarakat. *Kedua*, pelembagaan politik; pergeseran ke arah pola-pola perilaku yang berulang dan bisa diprediksi. *Ketiga*, kinerja rezim; pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan efektifitas memerintah.

Persoalan Hak Azasi Manusia (HAM), Amerika Serikat adalah pelanggar nomor *wahid* di dunia. Konflik Israel-Palestina disponsori Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat menabuh gendrang perang terhadap Islam. Selesaikan masalah ini kalau ingin lebih demokratis!

Indonesia Kian Terpuruk!

Perubahan demokrasi juga bergerak menuju arah yang berbeda, bisa menjadi semakin demokratik dan bisa juga semakin tidak demokratik. Oleh karena itulah demokrasi harus selalu diperkuat baik dengan penguatan institusi maupun penguatan *civil society*. Di Indonesia, setelah diasumsikan berhasil meraih demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan orde baru, ternyata tidak diikuti oleh penguatan konsolidasi demokrasi. Akibatnya, bangsa ini kehilangan arah dan orientasi dalam menentukan masa depannya.

Persoalan legitimasi yang menjadi salah satu indikator dari keberhasilan konsolidasi demokrasi, juga belum mengakar secara kuat. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kali pergantian rezim pasca tumbanganya orde baru. Dan tidak menutup kemungkinan pemerintahan ke depan akan mengalami nasib yang sama, jikalau tidak mempercepat langkah-langkah menuju penguatan demokrasi.

Karena tidak berjalannya konsolidasi demokrasi yang mengakar dapat mengakibatkan krisis legitimasi yang kemudian melahirkan '*power-state deflation*' atau penurunan

kekuatan negara. Ada hipotesa; jika legitimasi demokrasi dan komitmen prosedural menjadi pondasi utama solidasi rezim, maka kinerja rezim merupakan sebuah variabel penting yang memengaruhi pengembangan dan internalisasi keyakinan tentang legitimasi demokrasi.

Pemilu mendatang menjadi pertarungan demokrasi Indonesia. Mampukah negara ini keluar dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansi. Kita tidak inginkan Pemilu mendatang hanya sebagai agenda rutin lima tahunan, tapi mampu membawa rakyat ini kepada arah yang jauh lebih baik. Pertanyaan yang harus dijawab oleh partai politik yang bertarung!!

Legislator *Pro Poor*

17 AGUSTUS 2014, 69 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan adalah momentum paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia setelah berabad-abad dijajah asing. Perjuangan penuh darah para pahlawan adalah penyemangat untuk generasi kini. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan. Menjaga keutuhan dan ketahanan nasional merupakan cara Merawat Indonesia.

Setelah 69 tahun merdeka, kemiskinan menjadi masalah krusial yang terus disoal. Dibanding negara lain di ASEAN yang baru merdeka, kini kita cukup tertinggal. Padahal kita negara paling kaya di kawasan ini. Ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara lain itu seharusnya menyadarkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pendekatan pembangunan dan pengelolaan negara ini.

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi utang luar negeri dan ideologi neoliberalisme dinilai gagal. Praktik ekonomi ini tidak mampu mengatasi kemiskinan. Malah mengakibatkan berkembangnya “ekonomi balon permen karet” yang menyuburkan konglomerasi kalangan jetset.

Ketimpangan kian kentara. BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2013 sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen). Diskursus angka terus terjadi, apalagi kemiskinan mengalami peningkatan.

Penyelenggaraan otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Tap MPR RI No. XV/1998 berisi tiga hal penting: *Pertama*, otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan prinsip demokratisasi dan keadilan. *Kedua*, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara proporsional, diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. *Ketiga*, dari aspek penguatan keuangan daerah, otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan daerah.

Bilamana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bisa diterjemahkan secara benar oleh kepala daerah dan DPRD maka penanggulangan kemiskinan di daerah akan berhasil dengan baik. Konsep otonomi daerah yang mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat seharusnya lebih berdaya guna dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan desentralisasi, daerah telah diberi hak untuk merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan di daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta aspirasi rakyat setempat.

Ironisnya, banyak kepala daerah yang gagal dalam menterjemahkan makna otonomi daerah. Otonomi daerah lebih dilihat sebagai otonomi untuk birokrat bukan untuk rakyat. Substansi otonomi daerah, diterjemahkan dengan membangun gedung perkantoran mewah dan membeli kendaraan dinas. Bukan bagaimana memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam berusaha.

Akibatnya yang berkembang adalah desentralisasi kemiskinan.

Momentum peringatan 69 tahun Indonesia merdeka bersamaan dengan pelantikan anggota legislatif periode 2014-2019. Khususnya di Sumatera Barat, sejumlah DPRD kabupaten/kota selesai dilantik. DPRD Sumbar dilantik 28 Agustus 2024. Menjadi anggota DPRD adalah kesempatan kehormatan. Konstituen menginginkan 5 tahun ke depan kepentingannya diwakili. Tentu tak lagi sekedar mewakili partai. Tugas pengawasan, regulasi dan penganggaran itu merupakan hak rakyat. Menjadi anggota dewan tentu bukan profesi tapi amanah. Jangan salah kaprah, salah arah apalagi sekedar gagah-gagahan.

Harapan kita legislator yang baru dilantik ini memihak kepada berbagai kepentingan rakyat miskin (legislator pro poor). Wahai anggota dewan... Jika anda bicara lantang tentang kesejahteraan rakyat, pastikan tetanggamu sedang tidak kelaparan. Jika anda bersuara merumuskan peraturan pendidikan, jangan sampai konstituen anda putus sekolah karena biaya. Naif jika anda bicara masyarakat sehat, sementara rakyat miskin ditolak rumah sakit pemerintah . Perjuangkanlah hak orang miskin dengan sungguh-sungguh, ketika menjelang Pemilu lalu mereka sempat anda jadikan komoditas politik!

Cerdas Mengelola Informasi

BERAWAL dari kicauan, berkembang menjadi pemberitaan di berbagai media cetak dan online. Padahal belum jelas kesahihannya, diterima sebagai bentuk pembenaran, menjadi bahan perdebatan hingga melebar ke berbagai persoalan. Orang begitu mudah terprovokasi, saling menjelekkkan, fitnah dan menghujat. Fenomena ini marak terjadi sekarang.

Sosial media berupa facebook, twitter atau sejenisnya dijadikan wadah. Padahal jejaring sosial itu dibangun pendirinya untuk kebaikan. Cuma saja kemudian kita gunakan untuk untuk menebar kebencian ke individu, komunitas atau lembaga.

Indonesia memiliki daerah yang sangat luas sehingga daerah perbatasan menjadi sangat rawan dan sulit terkontrol. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku kejahatan trans nasional yang memanfaatkan kondisi ini. Terorisme dan separatisme merupakan gerakan ancaman NKRI. TNI dan Polri kita walau jumlahnya terbatas, tapi cukup terlatih. Sehingga ancaman separatis dan teroris selama ini cepat diatasi.

Namun ancaman ketahanan nasional berupa permusuhan dan perselisihan sesama anak bangsa, kita tak mampu memproteksinya. Disebut ancaman dimensi sosial. Tergerusnya solidaritas berbangsa disebabkan oleh isu SARA dan euforia terhadap demokrasi yang sangat berlebihan.

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga tak mampu menganalisa isu yang berkembang. Bahkan kaum terdidik

pun latah dan mudah terprovokasi hanya soal perbedaan pendapat. Moralnya kian tergerus.

Misalnya, momentum politik sebagai penyebabnya. Pemilu 2014 lalu tak hanya membelah elit. Rakyat ikut terbelah. Demokrasi kita belum dewasa. Perhelatan politik selesai, keterbelahan tak kunjung padam. Utamanya pasca Pilpres.

KIH menjadi representasi partai pendukung pemerintah. KMP mengklaim diri sebagai oposisi. Penyeimbang eksekutif dan legislatif. Saya pikir itu tidak ada masalah, selagi untuk kepentingan rakyat. Namun niat dan etika politik elit harus benar. Presiden dan wakil presiden sah secara konstitusi. Wakil rakyat yang kita beri mandat juga sah secara konstitusi. Saatnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat.

Jika ada embrio perpecahan akhiri segera. Isu-isu sampah yang sengaja dihasut melalui sosial media harus dihentikan. Ini berbahaya bagi kedamaian anak bangsa. Cek dan ricek atas sebuah berita penting.

Media diharapkan tidak kebablasan. Sebagai konsumen berita kita harus rasional. Tak gampang merespon atau mem-follow berita yang belum tentu benar. Apalagi menyangkut soal pribadi.

Masyarakat lebih berani berkomentar di media sosial, namun tapi tidak berani mempertanggungjawabkan pendapatnya di dunia nyata.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk jejaring sosial, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat sanksi baik pidana maupun uang terhadap berbagai pelanggaran yang ditimbulkan dari penyalahgunaan

teknologi informasi ini.

Sudah terdapat beberapa tindak pidana yang ditujukan kepada pelanggar UU No. 18 Tahun 2008. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi batasan bagi masyarakat yang bebas memanfaatkan jejaring sosial ini.

Kita harus terus belajar menghargai perbedaan. Perbedaan tidak untuk dijadikan alat perusak ketahanan bangsa. Budaya saling menghargai harus dipertahankan sebagai entitas bangsa yang heterogen ini.

Politik Belum Jalan Saya

SAYA mundur sebelum penetapan pencalegan tahun 2019. Saya harus memilih yang paling prioritas, yaitu anak. Sebulan sebelum pengumuman pencalegan, puteri saya tercinta Hanna Rubiah Musfi (2,5 thn) didiagnosa sindrom turner.

Dalam dunia medis terjadi 1 dari kelahiran 2000 bayi perempuan. Solusinya Hanna harus dilakukan terapi hormon pertumbuhan dengan cara disuntik setiap hari. Hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tujuan terapi ini untuk mengejar pertumbuhannya.

Saya dan istri ikhlas apa yang telah Allah tetapkan untuk kami.

Ketika kelahirannya dulu kami bergabung dengan komunitas premi (orang tua dengan anak lahir prematur). Kini kami mulai berinteraksi dengan komunitas orang tua anak penderita sindrom turner. Agar saling menguatkan dan berbagi ilmu.

Setiap hari saya ingin lebih banyak waktu bersama Hanna. Saya juga berusaha untuk selalu ada disampingnya saat terapi dilakukan. Karena itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Hanna.

Sama ketika dulu Hanna pernah dirawat di ruang NICU waktu ia baru lahir. Tangki cinta yang selalu kami hadirkan untuknya sangat membantu Hanna melewati masa-masa sulit.

Apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Itu hikmah yang saya dapatkan. Niat saya untuk mengabdikan diri melalui jalur politik praktis belum diridhoi

Allah.

Saya yakin Allah masih inginkan saya tetap di dunia sekarang yang saya jalani. Kemanusiaan, filantropi dan pemberdayaan.

Sejak tahun 2011 hingga sekarang saya mengurus berbagai kasus anak-anak miskin. Puluhan hingga ratusan mungkin jumlahnya. Dari sakit biasa hingga yang paling parah. Banyak yang bertahan hidup dan ada yang tak bisa diselamatkan.

Dari mereka yang putus sekolah hingga mengantarkan jadi sarjana. Menghibur anak-anak korban bencana alam yang mengalami trauma.

Melalui Hanna saya di-alarm oleh Allah. Agar tetap ada di jalan ini. Filantropi adalah jalan sepi yang belum banyak ditempuhi orang. Berbeda dengan jalan politik yang sangat ramai diminati.

Namun saya juga bersyukur bahwa ilmu politik yang saya dapatkan saat kuliah S1 dan S2 masih bisa saya gunakan untuk mengajar calon-calon politisi di kampus.

Transformasi Pelayanan Publik

BULAN Mei 2020 bertepatan dengan 22 tahun perjalanan reformasi di Indonesia. Reformasi yang terjadi tahun 1998 lalu tidak hanya mengusung agenda politik, pergantian rezim orde baru, namun juga perbaikan dalam pelayanan publik.

Reformasi birokrasi adalah bagian penting dari suksesi kepemimpinan. Indikator keberhasilan kekuasaan politik terletak sejauhmana perbaikan kinerja birokrasi. Kerja utama birokrasi adalah melakukan pelayanan publik. Melayani kebutuhan rakyat.

Tujuan reformasi birokrasi menciptakan aparatur pemerintahan yang baik (*good governance*), profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Setidaknya ada 4 pendekatan reformasi birokrasi sebagai pisau evaluasi saat ini. Pertama, *retrospeksi* yaitu menilik ulang dan mengevaluasi semua kebijakan masa lalu secara jujur dan obyektif, sehingga faktor penyebab kegagalan dapat ditemukan, kemudian menciptakan sistem baru yang lebih baik.

Kedua, *reorientasi* sebagai upaya merubah paradigma, visi, misi dan strategi kebijakan masa lalu ke dalam suasana baru yang lebih aspiratif di mata publik.

Ketiga, *reposisi* merupakan kesadaran total atas

multifungsi pemerintah yang hegemonik untuk secara bijak menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks pelayanan publik.

Keempat, *reorganisasi* yaitu perubahan sikap bijak dari pemerintah untuk menerapkan profesionalisme dalam menyusun organisasi. Kuncinya adalah SDM mumpuni yang mampu merubah struktur organisasi dan tata kerja disusun atas dasar pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali, efektif, efisien dan disiplin.

Munculnya konsep *new public management* telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan yang tidak baik, seperti sulit ditembus, sentralistis, struktur gemuk, *top down*, prosedural yang panjang, tidak produktif, cenderung menghabiskan anggaran, aparatur tidak ramah, praktek pungli dan lain sebagainya. Biasa disebut sebagai penyakit (patologi) birokrasi.

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku *Reinventing Governmet*, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau *flat*, efisien dan rasional. Desentralisasi menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina harmonisasi serta keterbukaan pada masyarakat yang dilayani.

Salah satu fokus pemerintahan Jokowi periode kedua ini juga terkait reformasi birokrasi. Bahkan iya mendorong terjadinya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Selama ini reformasi birokrasi dan pelayanan publik dianggap baru hanya sampai kulitnya saja. Jokowi sendiri menginginkan reformasi birokrasi sampai langsung ke jantung. Itu istilah yang digunakan.

Tentu ini menjadi hal yang sangat esensi. Kita mendukung

pemangkasan jabatan eselonisasi sebagai upaya efektifitas dan efisien. Namun, di sisi lain kadang kebijakan pemerintah juga sering *trial and error*. Kritik tajam publik ke Jokowi sendiri seperti membentuk stafsus yang tugasnya dianggap tidak jelas.

Saat ini reformasi birokrasi dihadapkan dengan pelayanan publik yang harus profesional. Bersamaan dengan peringatan 22 tahun reformasi, kita juga menjalani hidup di tengah wabah Covid-19 yang mengancam nyawa publik. Virus ini berbahaya dan mematikan.

Setidaknya hingga awal Juni 2020 di Indonesia terdapat 28,233 warga positif dan 1,698 orang meninggal dunia. Seluruh dunia mengalami dampak yang buruk akibat virus ini.

Semua bidang kehidupan saat ini melakukan proses transformasi. Mengubah model aktivitas dari normal sebelumnya ke kondisi *new normal*. Bagaimana dengan perubahan pelayanan publik kita? Akankah lebih baik atau terancam mengalami penurunan.

Teknologi adalah syarat utama transformasi pelayanan publik ke depan. Baik teknologi sebagai sarana atau sistem, juga kemampuan masyarakat untuk bisa mengaksesnya. Saat ini pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota sedang gencar membangun sarana mal pelayanan publik. Pelayanan satu atap.

Pada masa normal sebelum pandemi Covid-19 mal pelayanan publik dianggap paling efektif dan efisien melayani masyarakat dalam berbagai urusan dokumen atau perizinan apapun. Pada kondisi wabah, dengan standar kesehatan yang sangat ketat, melarang orang berkumpul. Mal pelayanan publik berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus.

Selama pandemi dan penerapan PSBB di hampir semua

daerah di Indoensia, pelayan publik diarahkan secara online. Aparatur birokrasi (birokrat) pun menjalankan pekerjaan dari rumah. Namun Ombudsman RI menemukan potensi maladminstrasi pelayanan publik lewat online minim respon dari petugas layanan publiknya.

Mestinya dengan bantuan sistem secara online, dan berkurangnya interaksi fisik harusnya performa pelayanan publik meningkat. Bekerja tidak lagi harus mengantor. Inilah tantangan baru reformasi birokrasi kita selanjutnya.

Membangun sistem teknologi pelayanan (e-government) dan akses jaringan yang merata di seluruh pelosok daerah. Memperbaiki kapasitas, integritas dan mental aparatur yang penuh tanggungjawab dengan disiplin tinggi.

Selain itu juga melatih dan membiasakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi, sebagai bentuk kemudahan pelayanan. Sehingga semua stakeholder ke depannya *melek* teknologi.

Mencari Figur Kombinasi; *Preferensi* Pilkada Tanah Datar 2020

TANAH Datar ke depan harus dipimpin oleh kepala daerah yang multitalenta jika ingin keluar dari kondisi saat ini.

Kabupaten ini dinamai Tanah Datar. Sebuah daerah yang sebenarnya bukan terdiri dari tanah yang datar semata. Tidak seperti hamparan gurun. Perbukitan dan lembah menjadi kontur wilayahnya. *Luhak Nan Tuo* penamaan lain dari kabupaten yang memiliki 14 kecamatan ini.

Dalam sejarah suku bangsa Minangkabau, Tanah Datar menjadi icon. Kerajaan Pagaruyung berpusat di sini. Ditemukan berbagai peninggalan sejarah Raja Adityawarman, pendiri kerajaan Pagaruyung. Seperti prasasti. Sehingga Batusangkar sebagai ibukota kabupaten Tanah Datar disebut Kota Budaya.

Jika merunut sejarah kerajaan Pagaruyung, tidak lepas dari dinamika politik yang tinggi. Menjalankan kerajaan dengan sistem pemerintahan. Membangun hubungan antarkerajaan di nusantara. Perlawanan menghadapi penjajahan asing.

Perang Paderi

Pusat Minangkabau di Kerajaan Pagaruyung disebut sebagai bumi emas. Sehingga Belanda dan Inggris pada waktu itu berusaha untuk menguasai daerah ini. Walaupun mereka tidak pernah menemukan emas itu.

Perang Paderi menjadi catatan sejarah kelim politik penting di Kerajaan Pagaruyung. Perang saudara ini muncul karena pertentangan kelompok ulama yang dijuluki sebagai

kaum Paderi terhadap kebiasaan buruk yang marak dilakukan kalangan kaum Adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung. Kebiasaan itu adalah perjudian, penyabungan ayam dan minuman keras.

Kaum Agama dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Sedangkan kaum Adat dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar.

Kaum Adat kawalahan menghadapi kaum Agama, dan meminta bantuan ke Belanda waktu itu. Konflik horisontal ini bergolak dari tahun 1803 hingga 1838. Cukup panjang dan melelahkan karena meluas ke berbagai daerah. Akibat buruk dari perang ini merosotnya perekonomian masyarakat.

Sejarah politik panjang di Kerajaan Pagaruyung, mempengaruhi dinamika politik kekinian di Kabupaten Tanah Datar. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin di daerah ini. Memimpin dan mengurus masyarakat yang terbiasa berdialektika, tajam, kritis dan konstruktif.

Seperti nama Tanah Datar, yang daerah sesungguhnya bukanlah datar-datar saja. Politik pun begitu. Sensitifitas publik terhadap politik sangat tinggi. Isu apa saja terkait kebijakan kepala daerah jadi sorotan, apalagi yang dianggap tidak prorakyat.

Persaingan elite politik juga tajam. Walaupun tidak muncul ke permukaan. Tapi ibarat api dalam sekam. Politik memang begitu. Apalagi menjelang momentum Pemilu/Pilkada. Yang tidak siap, bisa saja tumbang atau tersingkir dari percaturan.

Kepemimpinan Tanah Datar

Menarik mengilas balik kepemimpinan Tanah Datar 35 tahun terakhir. Semua kepala daerah/bupati memiliki latar belakang, karakter dan pendekatan kememimpin yang berbeda.

Ikasuma Hamid 10 tahun (1985-1995), Masdar Saisa 5 tahun (1995-2000), Masriadi Martunus 5 tahun (2000-2005), Shadiq Pasadigoe 10 tahun (2005-2015) dan Irdinansyah Tarmizi 5 tahun (2015-2020).

Ikasuma Hamid dan Masdar Saisa, kepala daerah di era Orde Baru, keduanya latar belakang militer.

Ikasuma Hamid dikenal sebagai sosok yang pendiam, bersahaja dan merakyat. Putra Kubang Landai ini memiliki semangat pengabdian sangat tinggi membangun Tanah Datar yang terbelakang waktu itu. Ia mencanangkan program pertanian, industri kecil, dan pariwisata (Pertiwi). Kabupaten Pertiwi menjadi sebutan untuk Tanah Datar.

Di awal kepemimpinan Ikasuma Hamid, Tanah Datar menjadi daerah tingkat II paling berhasil pembangunannya di Sumatera Barat dan meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita IV waktu itu. Banyak lagi prestasi besar yang diukir bupati jenderal ini.

Wartawan senior, Hasril Chaniago dalam tulisan "*Inmemorium: Ikasuma Hamid*" (2011) menyebut, Ikasuma Hamid tipe orang yang tak banyak bicara, tapi lebih banyak bekerja. Sosok yang bisa melahirkan pemimpin dari stafnya.

Misalnya Sekda Muchtiar Muchtar jadi Walikota Payakumbuh, Ketua Bappeda Lukman Gindo jadi Walikota Padang Panjang dan bekas Sekda Nasrul Syahrudin menjadi Bupati Padang Pariaman.

Masdar Saisa, dikenal sosok yang tegas karena seorang tentara. Militer *banget*. Beliau memiliki pengalaman jadi Bupati di Pesisir Selatan tahun 1990-1995 sebelum ke Tanah Datar.

Dalam catatan wartawan senior, Eko Yanche Edrie, menjelang kepemimpinan Ikasuma Hamid berakhir sejumlah

tokoh Tanah Datar menemui Masdar Saisa yang waktu itu sedang menjabat Bupati Pesisir Selatan. Tujuannya untuk meminta beliau pulang kampung membangun Tanah Datar. Setelah dapat arahan dan dukungan dari Hasan Basri Durin yang waktu itu menjabat gubernur Sumbar.

“Saya mulai dengan *parseneling* dua”, kata Masdar Saisa ke Eko Yanche Edrie yang mewawancarainya di awal beliau menjadi Bupati Tanah Datar. Maksud *parseneling* dua, sudah berpengalaman sebelumnya jadi kepala daerah.

Putra Jaho ini melanjutkan beberapa program yang telah dibangun Ikasuma Hamid sebelumnya. Program Pertiwi tetap dijalankan dan menambahkan kalimat ‘Ekonomi Berlapis-lapis’, masyarakat harus punya pendapatan tambahan selain pendapatan utama.

Bupati Tanah Datar berikutnya Masriadi Martunus dari kalangan pengusaha. Ia juga merupakan cucu dari Bupati Tanah Datar kedua, Ibrahim Dt. Pamuncak periode tahun 1950-1958.

Masriadi bupati *out of the box*. Ia menguasai manajemen keuangan dan kebijakan fiskal sebagai keahlian di bidang usaha yang sangat relevan untuk mengatur keuangan daerah. Prinsip keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis untuk program yang tepat sasaran.

Ia juga orang yang sangat paham manajemen birokrasi dengan konsep *new public management*. Meninggalkan praktik birokrasi *weberian system* yang kaku. Ia terpilih di masa transisi Orde Baru ke reformasi dan otonomi daerah mulai dijalankan. Desentralisasi menjadi panggung bagi Masriadi membuat berbagai inovasi program di Tanah Datar.

Langkah yang dilakukan saat menjadi bupati adalah perampingan struktur organisasi, pola pikir penggunaan

dana, pembentukan usaha dinas, retribusi barang daerah, peningkatan pajak bumi dan bangunan, komputerisasi pembangunan jalan, *regrouping* sekolah, puskesmas swadana, transparansi dan pakta integritas.

Berbagai kebijakan *cash management* yang dilakukannya, mampu menaikkan PAD Tanah Datar dari Rp1,7 ke Rp19 miliar, meningkat di atas 1.000 persen. Pada tahun 2004/2005 menjadi pemegang saham terbesar Bank Nagari di antara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Masriadi Martunus digantikan oleh Shadiq Pasadigoe. Hingga dua periode berikutnya. Shadiq Pasadigoe adalah produk pertama pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia berlatar belakang seorang birokrat. Memulai karier birokrat dari Tanah Datar, hingga menjadi pejabat teras di Provinsi Sumatera Barat.

Shadiq dikenal sebagai sosok yang *low profile*, terbuka dan blak-blakan. Tugas bupati adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan harus sesuai aturan yang berlaku. Itu prinsip yang dipegangnya. Sesuai darah abdi negara yang mengalir dalam dirinya.

Berbagai prestasi diukir oleh Shadiq Pasadigoe, yaitu Tanah Datar sebagai kabupaten langganan penerima predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah, daerah tercepat menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, kabupaten terbaik dalam mengelola pendidikan di Sumatera Barat, kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi, meningkatnya program pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Di tataran nasional Shadiq Pasadigoe dikenal sebagai kepala daerah yang berpengaruh. Ia pernah menjabat sebagai

Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Sekarang Tanah Datar dipimpin Irdinansyah Tarmizi. Ia seorang politisi ternama tidak hanya di Tanah Datar tapi juga Sumatera Barat. Memulai karier sebagai PNS. Kemudian *resign* dan menjadi politisi. Pernah jadi anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Wakil Bupati dan kini Bupati Tanah Datar.

Ia dikenal sebagai sosok komunikatif dan religius. Irdinansyah merupakan aktivis Muhammadiyah Sumatera Barat. Selama hampir lima tahun ini menjadi bupati, program utamanya adalah di bidang agama. Belakangan Tanah Datar dikenal sebagai kabupaten tahfizh Quran.

Tahun lalu ia juga mampu mengantarkan Tanah Datar juara umum MTQ di tingkat Sumatera Barat. Prestasi yang selama ini tidak lepas dari Kota Padang. Selain itu juga berbagai program infrastruktur seperti pasar.

Irdinansyah adalah pemimpin tangguh, dengan kondisi kesehatannya yang kurang memadai, Tanah Datar bisa meraih berbagai prestasi dan penghargaan. Di antaranya kabupaten layak anak, penghargaan keberhasilan mengelola pasar, wahana tata usaha, piala Adipura dan predikat WTP kinerja keuangan, kabupaten perencanaan pembangunan terbaik dan lainnya.

Masa Depan Tanah Datar

Bagaimana kepemimpinan Tanah Datar ke depan? Desember 2020 Tanah Datar menggelar Pilkada. Berbagai tantangan ada di depan mata calon pemimpin di Luhak Nan Tuo ini.

Pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran tinggi, berbagai penyakit masyarakat terutama narkoba, sarana

infrastruktur terutama jalan dan irigasi banyak rusak, potensi ekonomi yang belum terkelola dengan maksimal dan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurut saya Tanah Datar ke depan harus dipimpin oleh kepala daerah yang multitalenta. Jika ingin keluar dari kondisi saat ini terutama menghadapi tantangan yang cukup berat ke depan.

Belajar dari pendahulu. Ikasuma Hamid yang sederhana dan visioner. Masdar Saisa yang tegas. Masriadi berjiwa *entrepreneur*. Shadiq bermental melayani. Irdinansyah politisi religius.

Politik Gagasan

POLITISI tanpa gagasan melahirkan kepemimpinan tanpa arah. Penguasa tanpa gagasan tidak mampu merubah keadaan ke arah lebih baik. Gagasan muncul dari mata batin, diungkapkan dan diperjuangkan untuk merubah keprihatinan. Gagasan kapasitas memahami masalah dan menawarkan solusi.

Gagasan bukan hanya argumentasi, tapi datang dari hati dan pikiran yang jernih. Politik gagasan bukanlah coretan di panggung debat kandidat tapi rencana strategis yang diimplementasi jadi program kerja.

Politik gagasan merupakan wujud ideologi bukan *gimik* penyampaian visi misi. Politik gagasan menjadi agenda utama perjuangan calon pemimpin, dalam konteks pilkada bagi calon gubernur, bupati dan walikota.

Tujuan politik adalah kekuasaan. Menuju kemaslahatan bagi orang banyak. Bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Kebijakan politik harus bisa mengakomodir kepentingan mensejahterakan rakyat. Rakyat diberikan ruang menyampaikan kritik dan pendapat kepada penguasa.

Demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan baik. Rakyat sadar bahwa kedaulatan mutlak di tangannya. Pendidikan dan kemajuan teknologi sebagai instrumen utama masyarakat memahami hak politiknya.

Keterbukaan informasi dan pers menjadi pilar demokrasi. Kita terbiasa dengan budaya kritis menyoroti dinamika kepemimpinan negara dan daerah.

Akhir tahun 2020 kita kembali menjalani pesta demokrasi. Tepatnya 9 Desember 2020 direncanakan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. KPU sebagai penyelenggara sudah bersiap memulai tahapannya. Semula Pilkada direncanakan September 2020. Akibat pandemi Covid-19 akhirnya diundur.

Kandidat yang akan mengikuti Pilkada sudah mulai muncul. Kampanye media luar ruang dan media massa kian marak. Ada yang tampil dengan pasangan, seperti bakal calon perseorangan, karena pendaftaran jalur ini sudah ditutup. Tinggal menunggu hasil verifikasi.

Bakal calon partai politik ada juga yang tampil dengan pasangan karena sudah memiliki partai. Walaupun pendaftaran belum dibuka. Ada yang muncul hanya sendiri belum jelas partai apa yang akan mengusungnya.

Baliho dan spanduk bertebaran, ada yang pada tempatnya, banyak yang asal pasang. Pohon, tiang listrik dan fasilitas umum jadi sasaran. Tampil memperkenalkan wajah, belum terlihat politik gagasan yang bernas untuk ditawarkan kepada rakyat. Baik petahana maupun wajah baru yang akan bersaing. Bisa jadi menunggu sampai penetapan oleh KPU.

Desentralisasi merupakan tantangan besar bagi kepala daerah. Kunci keberhasilan otonomi daerah adalah inovasi. Inovasi dalam menggali semua potensi yang ada di daerah otonom. Baik sumberdaya manusia maupun alam.

Kapasitas *me-management* birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengatur keuangan daerah, kemitraan dengan legislatif, hubungan dengan pemerintah pusat, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus penyakit moral serta pemanfaatan

teknologi di era revolusi 4.0 terhadap layanan public dan sektor usaha rakyat. Otonomi daerah juga diharapkan mampu menumbuhkan kearifan, inovasi, dan kreativitas lokal.

Satu periode kepemimpinan kepala daerah hanya lima tahun. Waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Bagi kepala daerah yang memiliki politik gagasan yang kuat, semangat perjuangan dan fokus bekerja untuk rakyat akan memberikan hasil yang baik.

Tugas utama kepala daerah menggerakkan mesin birokrasi memujudkan visi-misi sebagai rencana strategi. Membangun daerah harus didukung *political will* semua *stakeholder* untuk mencapainya.

Perjalanan awal otonomi daerah mampu mengantarkan daerah keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan. Kabupaten Jembrana di Bali contohnya. Sebuah kabupaten kecil, miskin dan terpinggir. Jembrana dari kata Jimbarwana, berarti hutan yang lebat dan ganas.

Tahun 2000 Jembrana dipimpin oleh seorang bupati berlatar belakang dokter gigi, tapi profesor, I Gede Winasa, namanya. Dengan visi yang kuat, ia mampu memajukan daerah tersebut. Sehingga Jembrana menjadi kiblat pelaksanaan otonomi daerah se-Indonesia pada waktu.

Empat pilar program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan reformasi birokrasi. I Gede Winasa memulai program pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga, membangun berbagai badan usaha milik daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan ia juga inisiator mal pelayanan publik di Indonesia. Ia menulis buku berjudul, Memasuki Peradaban Milenium Jembrana MDGs 2010.

Kabupaten Sragen menjadi pencetus *e-government* tahun 2001. Bupatinya seorang pengusaha bernama Untung

Wiyono. Ia menjalankan prinsip efisiensi dalam mengelola pemerintahan. Memangkas anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Contohnya biaya telepon dan belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen awal ia menjadi bupati mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Melalui teknologi informasi dipangkas jadi Rp. 250 juta per tahun, kerja sama dengan *internet service provider*.

Pengawasan kinerja pegawai semua berbasis teknologi, rapat sudah menggunakan *teleconference*, membuat KTP elektronik dan urusan perizinan berbasis online.

Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan *e-government*, kata Untung Wiyono. PAD Sragen naik dari Rp.12 M jadi Rp.54 dua periode kepemimpinan Untung Wiyono.

Kabupaten Tanah Datar juga menjadi daerah percontohan. Tahun 2000 Tanah Datar dipimpin oleh Masriadi Martunus, berlatar belakang pengusaha. Ia menguasai manajemen keuangan dan kebijakan fiskal. Menjalankan birokrasi dengan konsep *new public management*. Meninggalkan praktik birokrasi *weberian sistem* yang kaku dan boros anggaran.

Berbagai kebijakan *cash management* yang dilakukannya, mampu meningkatkan PAD Tanah Datar dari Rp1,7 ke Rp.19 miliar. Tahun 2005 Tanah Datar menjadi pemegang saham terbesar Bank Nagari di antara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Bedanya dengan I Gede Winasa dan Untung Wiyono, Masriadi Martunus hanya menjabat satu periode.

Gamawan Fauzi saat menjadi Bupati Kabupaten Solok juga fenomenal. Ia menjabat dari sejak zaman orde baru, tahun 1995-2005. Mengalami kepemimpinan pada masa transisi orde baru ke reformasi. Berlatar belakang birokrat, ia bupati

paling muda di zamannya. Program unggulannya adalah reformasi birokrasi, menerapkan konsep *good governance and clean government* yang sedang *booming* di awal otonomi daerah. Ia dikenal sebagai bupati yang berhasil memerangi korupsi di tubuh birokrasi.

Empat orang kepala daerah di awal otonomi daerah ini menjadi contoh bahwa dengan politik gagasan yang kuat. Mereka mampu memanfaatkan panggung desentralisasi sebagai ruang inovasi membangun daerah masing-masing.

Kini otonomi daerah sudah berjalan 22 tahun sejak 1998. Kepala daerah kekinian sebagai generasi ketiga dan keempat otonomi daerah membuat atau memodifikasi inovasi daerah sebelumnya. Muncul daerah baru sebagai referensi, Kabupaten Banyuwangi di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dianggap paling berhasil saat ini, Kota Bandung saat dipimpin Ridwan Kamil, Kota Padang dipimpin Mahyeldi, Kota Tangerang waktu dipimpin Arief R. Wismansyah, dan daerah lainnya.

Pilkada Desember 2020 masuk generasi kelima perjalanan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah langsung membuka kesempatan siapa saja bisa maju. Persyaratan administrasi pencalonan juga tidak begitu berat. Syarat bagi calon dari partai, minimal memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu.

Syarat calon perseorangan untuk pemilihan calon gubernur, di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta, syarat minimal dukungan sebesar 10 persen, DPT 2-6 juta, syarat minimal dukungan 8,5 persen, DPT 6-12 juta syarat minimal 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Sementara untuk calon bupati/walikota, jumlah DPT

0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen, DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen, DPT 500.000-1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen jumlah DPT lebih dari 1 juta.

Persyaratan lain yang tidak diatur dalam regulasi, tapi menjadi pertimbangan cukup berat untuk seseorang maju dalam kontestasi politik finansial. Pilkada membutuhkan logistik berupa *tools* kampanye, operasional tim, saksi di TPS dan sudah lazim adalah biaya membeli suara pemilih. Bahkan kemampuan finansial dianggap syarat utama untuk bisa maju Pilkada saat ini.

Politik uang mewarnai pesta demokrasi kita secara terbuka. Budaya politik parokial sangat kuat, pemilih tradisional menghitung berapa yang didapatkan menjelang masuk ke bilik suara. Setelah itu mereka tidak peduli lagi. Baru akan tersadar kembali ketika pemimpin yang dipilih tidak memihak kepada rakyat. Karena termakan politik pencitraan.

Kita berharap Pilkada 2020 mampu melahirkan calon kepala daerah (Cakada) yang membawa gagasan sebagai landasan politiknya. Inovasi dan strategi apa yang ditawarkan kepada rakyat untuk kemajuan sebuah daerah.

Ayah NA, Teruslah ke Surga

BAPAK H. Nasrul Abit, biasa kami anak muda yang dekat dengannya memanggil Ayah. Ayah NA.

Saya mengenal Ayah NA sejak beliau menjadi Bupati di Pessel. Interaksi saya dengan beliau banyak seputar kegiatan sosial. Pertama sekali tahun 2012 pengurus HIPMI Peduli Sumbar menyerahkan bantuan korban banjir di Kambang.

Beliau sosok yang sangat responsif, berani peduli dan ikhlas. Karena saya seorang pegiat sosial di Dompot Dhuafa Singgalang, Ayah NA adalah pejabat yang paling sering saya minta tolong. Terutama saat beliau menjabat Wakil Gubernur Sumbar.

Ketika ada warga miskin yang kami tangani tidak bisa diselesaikan sendiri oleh lembaga. Terutama menyangkut pembiayaan. Saya akan hubungi beliau. Setiap saya mengadu beliau pasti akan respon dan tindak lanjuti.

“Ayah, ada anak penderita jantung bocor keluarga miskin dari Lubung Alung masuk ICU, kami sudah bantu dan dampingi sejak awal, tapi statusnya pasien umum, anak ini meninggal dan tagihan rumah sakitnya Rp. 95 juta, kami tidak sanggup menyelesaikannya Ayah,” isi SMS saya sekitar tahun 2015 ke beliau.

“Besar sekali ya Fi, tentu orang tuanya tidak ada uang sebanyak itu. Nanti Ayah telpon Dirut rumah sakitnya, kita cari solusi dan selesaikan,” balas SMS beliau.

Seminggu setelah itu orang tua anak yang meninggal

ini menghubungi saya, mengabarkan bahwa tunggakan berobat anaknya sudah selesai. KTP sebagai jaminan sudah dikembalikan pihak rumah sakit.

“Pak Wagub Nasrul Abit yang bantu selesaikan, Pak,” kata orang tua anak itu.

Kasus orang miskin berobat paling banyak saya minta tolong beliau. Selain itu juga biaya pendidikan anak miskin.

Kami juga pernah mengadakan malam amal bersama beliau menghimpun donasi untuk warga Minang yang menjadi korban teroris di Papua tahun 2019.

Sebulan lalu komunikasi terakhir saya dengan almarhum. Sebelum beliau terpapar covid 19. Saja japri beliau.

“Ayah, kondisi covid daerah kita semakin tinggi, banyak warga Sumbar yang meninggal, penanganan pihak rumah sakit sudah berjuang sangat maksimal, tapi kebijakan kepala daerah sepertinya setengah-setengah. Saya rindu kepemimpinan yang responsif, tegas dan berani seperti Ayah pernah lakukan awal covid dulu,” kata saya.

“Fi, menjadi kepala daerah ini harus siap membuat kebijakan yang tidak populer, harus berani dan cepat orientasinya menyelamatkan nyawa masyarakat kita, jangan berpikir politik apalagi takut 2024 tidak dipilih lagi. Tapi Ayah yakin, semua kepala daerah kita baik gubernur, bupati/wako sedang berjuang menyelamatkan masyarakat,” jawab beliau.

Saya sempat pesan ke beliau. “Ayah jaga betul kesehatannya,” kata saya.

“Insyaa Allah Ayah sehat, Fi dan keluarga juga jaga kesehatan,” pesan beliau.

Pada 27 Agustus 2021 dini hari Ayah NA berpulang. Setelah berjuang melawan covid. Beliau meninggal di tengah wabah. Semoga Ayah berpulang dalam keadaan syahid.

Saya dan tentu saja banyak orang menjadi saksi Ayah NA orang yang sangat baik. Insyaa Allah husnul khotimah. Ayah teruslah ke syurga. Aamiin.

Jagalah Buya Mahyeldi

TOLONG catat! Tulisan ini bukan *opok-opok*. Angkat telur. Cari muka, atau semacamnya.

Saya blak-blakan saja! Kita diajarkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.

Saya bukan orang dekat Buya Mahyeldi dalam hal kekuasaan. Saya juga bukan tim suksesnya. Pilkada lalu saya tidak memilih Buya.

Saya termasuk kelompok warga Kota Padang yang menginginkan beliau menuntaskan amanahnya sebagai walikota. Sebagaimana pernah ia janjikan dihadapan publik.

Saya juga tidak memiliki tendensius apapun dengan Buya. Secara pribadi saya kenal baik, sejak ia menjabat Walikota Padang.

Tapi saya bukan ring piston kekuasaannya ya. He.. he..

Kini Buya sudah jadi gubernur. Gubernur kita warga Sumatera Barat. Perbedaan pilihan politik sudah selesai.

Di awal kepemimpinan ini Buya banyak dapat sorotan. Bertubi-tubi isu menerpanya.

Politik itu selalu gaduh. Pro kontra biasa saja. Makin gaduh makin asik. Goreng-menggoreng dimana-mana.

Masa jabatan Gubernur Buya masih panjang. Kalau gaduh terus, tentu juga tidak sehat. Sedikit banyak akan mengganggu konsentrasinya. Buya itu manusia yang punya rasa.

Buya itu orang baik. Karena kebajikannya ia dicintai banyak orang. Karena baik itu ia selalu menang dalam kontestasi politik. Sejak anggota DPRD Sumbar, Wakil Walikota dan

Walikota Padang, hingga kini jadi Gubernur.

Istri Buya, Umi Harneli juga orang baik. Iya bukan hanya ibu bagi anak-anaknya. Tapi umi bagi orang miskin. Kabarnya di rumah dinas, semua pembantu, sopir, tukang kebun, ajudan, sespri atau siapapun bisa makan dari periuk dan lauk yang sama dengan gubernur.

Jagalah kebaikan Buya agar memberikan kemaslahatan. Kedaulatan bagi rakyat yang dipimpinnya. Jabatan hanya sesaat, pertanggungjawabannya dunia akhirat.

Buya itu orang sholeh. Dengan kesholehan dan amalannya Allah berikan kemuliaan kepadanya. Dari anak orang biasa, diberi amanah memimpin jutaan rakyat di provinsi ini. Jagalah ia melakukan kesalahan yang disengaja. Apalagi sekedar memanfaatkan nama besar Buya untuk kepentingan pribadi.

Buya itu orang lurus. Tapi jangan sampai ia dikultus. Buya itu manusia biasa. Jangan sampai dianggap malaikat. Jangan sampai pula ia dibengkokkan demi kepentingan segelintir kelompok. Jika ia khilaf berikannya nasehat.

Buya itu orang taat. Jangan arahkan atau beri masukan yang menyesatkan. Terutama dalam merumuskan kebijakan. Jangan sampai melawan aturan.

Buya itu sosok yang sederhana. Tapi janganlah selalu mengekspos kesederhanannya untuk pencitraan. Jika sedang menghadapi masalah, berikan ia ruang untuk menyelesaikannya. Jika ia dikritik terimalah sebagai introspeksi. Bukan membalas dengan kebencian dan emosi. Apalagi menabuh genderang perang.

Buya itu orang yang santun. Maka sampaikanlah informasi kepadanya dengan baik dan benar. Jika ada kabar yang harus disampaikan, mulailah dengan tabayyun. Karena pernyataan seorang gubernur bisa menjadi kebijakan atau kebijaksanaan.

Buya itu bersahabat. Jangan buat jarak ia dengan masyarakat. Dengan insan media, sebagai penyampai berita. Bahkan dengan orang yang tidak mendukungnya. Berikan ia tempat untuk duduk bersama dengan pihak yang suka mengkritiknya.

Pilkada sudah usai. Saatnya merangkul semua stakeholder membangun daerah ini.

Buya itu gubernur, merangkap ketua partai. Tapi ingat ia bukan gubernur partai. Jangan suruh energinya dihabiskan mengurus partai. Apalagi kondisi rakyat sedang sulit menghadapi wabah. Kondisi ekonomi sedang terpuruk. Nyawa warga sedang terancam.

Politik ini penuh intrik. Jika tidak hati-hati tentu bisa membawa kemudaratan. Mudarat bagi Buya pribadi, keluarga, orang dekat maupun partainya.

Program kerja Buya sebagai gubernur itu banyak. Maka fokuslah mencapainya. Rakyat butuh bukti, bukan sekedar janji saat kampanye.

Menjadi penguasa adalah jalan mudah masuk syurga. Jika kekuasaan itu membawa kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan dan keberkahan bagi rakyat yang dipimpin.

Jika kekuasaan itu disalahgunakan, maka penguasa dianggap sebagai musuh Tuhan. Kata Imam Al Ghazali.

Tulisan ini untuk siapa? Untuk pribadi Buya, dan orang yang bekerja atau menjadi bagian dari Buya dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur.

Magnet Politik Sutan Riska

SUTAN Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Kabupaten Dharmasraya. Selain menjabat bupati sejak tahun 2015, ia juga diangkat menjadi raja Kerajaan Kotobesar Dharmasraya tahun 2012.

Saya tidak mengenalnya secara dekat. Saya lebih dulu kenal dengan orang tuanya. Bapak Wali Midi, panggilan akrab dari H. Rasul Hamidi, ayah Sutan Riska. Seorang tokoh dan Walinagari di Sungairumbai.

Beliau pernah saya datangi dan minta dukungan ketika menginisiasi program peternakan sapi di Kotobaru Dharmasraya akhir tahun 2014 silam. Sebuah program pemberdayaan ekonomi dari lembaga sosial yang saya pimpin waktu itu. Program itu hingga kini masih berjalan.

Sekali waktu bulan Ramadhan tahun 2015, saya diundang oleh Bapak Wali Midi ke rumahnya. Saya ditemani tokoh muda Dharmasraya, Cendra Fauzi. Saya dikenalkan dengan Sutan Riska. Ia bersiap maju Pilkada yang akan digelar bulan November tahun 2015. Saya diberi kesempatan bertukar pikiran dengan sosok yang masih berumur 26 tahun kala itu.

Dalam pertemuan itu saya lebih banyak mendengarkan Sutan Riska dengan gagasannya. “Kalau saya jadi bupati, saya akan fokus membenahi SDM generasi Dharmasraya ke depan. Kabupaten seluas ini baru ada dua orang profesor di daerah kami, Bang” katanya.

“Saya juga akan membangun berbagai infrastruktur jalan,

jembatan dan irigasi agar mempermudah akses dan fasilitas untuk menggali potensi daerah kami berupa pertanian dan perkebunan. Melanjutkan pembangunan rumah sakit yang terbengkalai dan juga mau membangun islamic centre,” katanya semangat.

Saya apresiasi ide-ide cemerlangnya. Saya sekedar berikan masukan ke beliau. Yaitu, tatakelola birokrasi juga harus terus dibenahi sebagai instrumen penting pembangunan daerah. Berikan beasiswa kepada putra-putri terbaik Dharmasraya di berbagai kampus di Indonesia. Jika perlu sampai pascasarjana. Urus orang miskin dengan benar agar ia sejahtera.

Pilkada serentak 2015 digelar. Sutan Riska berpasangan dengan Amrizal. Diusung koalisi PDI-P, PAN dan Hanura. Lawannya petahana, Adi Gunawan yang berpasangan dengan Jonson Putra. Diusung partai koalisi Nasdem, Demokrat dan Golkar. Pilkada itu dimenangi Sutan Riska-Amrizal dengan perolehan suara 63,75 persen.

Sebagai bupati termuda yang terpilih pada Pilkada tahun 2015, sosok Sutan Riska mulai dikenal secara nasional. Terutama sejak ia menjadi narasumber di sebuah *talkshow* televisi nasional. Ia bercerita tentang Ibunya, Puti Jawanis yang sakit, harus dibawa ke rumah sakit di luar Dharmasraya. Perjalanan hingga dua jam. Ia bertekad untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit terbengkalai di daerahnya, serta menyiapkan berbagai fasilitas berobat untuk rakyat Dharmasraya.

Secara politik Sutan Riska diuntungkan karena sebagai kader partai pemenang Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Yaitu PDI-P. Aksesnya ke pemerintah pusat lebih mulus. Bahkan Presiden Jokowi sudah datang dan bermalam di Dharmasraya. Tangan dingin Sutan Riska membangun

Dharmasraya periode pertama membawa banyak kemajuan. Terutama pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Sutan Riska meraih berbagai penghargaan dari Pemprov Sumbar dan nasional. Sejak tahun 2016 hingga kini Dharmasraya juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerahnya dari BPK RI. Ia juga berhasil menekan angka kemiskinan dari 7,16 persen ke 6,42 persen tahun 2016-2018.

Saya banyak mengikuti kiprah Sutan Riska melalui akun sosial medianya. Terutama *instagram*. Kadang ia juga gelar *instagram live* dengan *followers*-nya.

Beberapa kali saya sempat bertemu dengannya pada kegiatan organisasi HIPMI baik daerah maupun nasional. Di organisasi pengusaha muda itu saya aktif. Ia menjadi sosok kepala daerah muda yang sering diundang sebagai tamu kehormatan. Apalagi sejak HIPMI dipimpin Ketua Mardani H. Maming. Ia mantan Bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan, pernah menjadi Bupati termuda tahun 2010. Waktu itu usianya 29 tahun.

Periode kedua Mardani H. Maming terpilih lagi menjadi Bupati Tanahbumbu. Namun baru setahun menjabat ia mengundurkan diri. Ia fokus menjadi Ketua HIPMI. Mardani dan Sutan Riska dua bersahabat sesama kader PDI-P. Mardani merupakan Ketua PDI-P Provinsi Kalimantan Selatan.

Pilkada 2019 lalu Sutan Riska maju periode kedua berpasangan Dasril Panin Datuk Labuan. Wakilnya seorang politisi senior. Pasangan ini diusung koalisi PDI-P, Golkar, Demokrat, Hanura, PKB, PP, dan Partai Gelora.

Lawannya juga anak muda, Panji Mursyidan berpasangan dengan Yosrisal. Mereka diusung oleh partai koalisi Gerindra, PAN, NasDem, PKS, dan Partai Berkarya.

Pilkada periode kedua bagi Sutan Riska ia menangi dengan perolehan suara 64,8 persen. Sejak semula sudah diprediksi jalannya mulus untuk kembali memimpin Dharmasraya. Sutan Riska dinilai sebagai bupati yang dekat dengan rakyatnya. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang konsultatif dan partisipatif. Mau mendengar masukan dari berbagai *stakeholder*.

Kini Sutan Riska tidak hanya menjadi Bupati Dharmasraya. Ia dipercaya menjadi koordinator seluruh bupati di Indonesia. Terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2021-2026. Dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 26 Maret 2021 lalu.

Sebelum menjadi ketua umum, Sutan Riska sebelumnya sudah menjabat wakil ketua umum di APKASI. Ia sempat menggantikan posisi Emil Dardak, Bupati Trenggalek yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur.

Jabatan APKASI sebelumnya diemban oleh Mardani H. Maming Bupati Tanahbumbu, karena ia mundur dari jabatan bupati, kemudian digantikan oleh Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi.

Saat menjabat Ketua Umum APKASI ini usia Sutan Riska baru 32 tahun. Pada usia yang sangat muda, putra kebanggaan Dharmasraya itu sudah menjadi tokoh nasional. Tentu saja mengangkat nama baik Sumatera Barat dan Minangkabau di kancah politik nasional.

Orang tuanya tentu yang paling bahagia atas capaian prestasi politik Sutan Riska. H. Rasul Hamidi sang ayah, karir politiknya mentok sampai jabatan walinagari. Tahun 2016 lalu Bupati Sutan Riska melantik ayahnya sendiri menjadi Walinagari Sungairumbai periode ketiga. Karena aturan protokoler pelantikan sang ayah harus melakukan hormat

kepada anaknya yang menjabat bupati itu.

Magnet politik Sutan Riska terus menguat. Karir politiknya melejit melebihi usianya. Baru-baru ini namanya masuk ke dalam bursa capres 2024 dari partainya, PDI-P. Nama Sutan Riska bersama 11 orang kader terbaik diumumkan langsung oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, setelah melewati mekanisme kaderisasi internal partai sebagai bursa calon presiden. Dari 11 orang nama yang diumumkan itu, tentu Sutan Riska yang paling muda.

Walaupun masuk ke dalam 11 bursa calon presiden, menurut saya ia belum prioritas dicapreskan. Banyak seniornya di partai pemenang Pileg 2019 itu seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Prananda Prabowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Risma dan yang lainnya yang harus ia lewati.

Tahun 2024 nanti pilihan menu politik untuk Sutan Riska cukup bervariasi. Ia bisa memilih. Apalagi ia masih menjabat bupati hingga tahun itu. Sutan Riska berpeluang ke DPR atau DPD RI, mengikuti kontestasi Pilkada di Sumbar atau masuk kabinet. Jika perjalanan politiknya selalu *on the track*, bersih dan berprestasi.

Pertama, ia berpeluang maju sebagai wakil gubernur Sumbar jika berpasangan dengan petahana Mahyeldi atau Audy Joinaldi, sekiranya pasangan ini tidak lagi bersama tahun 2024 nanti. Sutan Riska bisa mengikuti langkah seniornya Emil Dardak yang menjadi Wagub di Jawa Timur.

Kedua, berpeluang mengikuti langkah pendahulunya Isran Noor, Bupati Kutai Timur, mantan Ketua Umum APKASI periode 2009-2015, yang berhasil menjadi Gubernur di Kalimantan Timur. Seandainya Pilpres 2024 Prabowo-Puan berpasangan dengan koalisi PDI-P dan Gerindra, dan Partai Gerindra masih pemenang Pilkada di Sumbar, tentu Sutan

Riska berpeluang mengadopsi koalisi yang sama pada Pilkada Sumatera Barat.

Ketiga, jalan ke Senayan menjadi anggota DPR RI bisa menjadi pilihan lain baginya. Hilangnya satu kursi PDI-P pada Pileg tahun 2019 lalu di DPR dari Dapil Sumbar 1 harus direbut kembali oleh kader terbaiknya. Pilihan lain ke Senayan juga bisa melalui DPD RI.

Keempat, sebagai kepala daerah muda berprestasi ia berpeluang diperhitungkan masuk kabinet. Apalagi jika partainya masih menjadi pemenang Pilpres tahun 2024 nanti.

Tahun 2024 usia Sutan Riska baru 35 tahun. Masih panjang karir politiknya ke depan. Asal bersih dan berprestasi. Mana tahu ia bisa seperti Jokowi, dari kepala daerah jadi presiden. Selamat berjuang, Tuanku Kerajaan!

BABAK III

**KURENAH
KEKUASAAN POLITIK**

Ring Piston Kekuasaan

SALAH satu komponen paling penting pada kompleksnya mesin sebuah mobil adalah ring piston. Banyak sekali fungsinya karena posisinya yang sangat vital. Pada kekuasaan juga ada ring piston.

Pada mesin fungsinya antara lain, menjaga kompresi mesin agar tetap optimal. Mesin pada mobil merupakan teknologi yang kompleks. Jika terdapat masalah pada ring piston maka mesin akan mengalami berbagai kerusakan.

Kemudian mampu mencegah kebocoran kompresi. Berikut menghalau oli masuk ke ruang bakar. Selanjutnya, mengurangi gesekan dinding silinder. Piston juga mampu mengirim panas pada dinding selinder.

Jika ring piston pada mobil ini bermasalah tentu akan sangat mengganggu performa bekerjanya mesin pada sebuah kendaraan. Tentu fatal akibatnya jika mengabaikan ini.

Bukan hanya rem mobil blong yang membahayakan. Ring piston rusak juga berbahaya.

Pada Kekuasaan

Pada sebuah kekuasaan juga selalu terdapat ring. Saya mengistilahkan ring piston kekuasaan.

Ring piston kekuasaan adalah orang dekat sang penguasa. Orang yang bisa dipercaya luar dalam. Jika diancam kepalanya ditembak sekalipun ia tidak akan membuka rahasia.

Orang dekat penguasa dalam konteks kepala daerah bisa juga diistilahkan 'gubernur malam', jika ia orang kepercayaan gubernur. 'Bupati malam', bagi orang dekatnya bupati, dan

'walikota malam', jika ia kepercayaan walikota.

Ia menjadi *shift* dua pemegang kekuasaan jika gubernur, bupati, dan walikota kota yang asli sudah habis jam resmi bekerjanya di sore hari.

Kepala daerah asli dipilih secara legitimasi oleh rakyat. Penguasa malam ini ditunjuk langsung oleh sang penguasa.

Orang dekat penguasa ini sering juga disebut, pembisik, ring 1, ring $\frac{1}{2}$ atau ring $\frac{1}{4}$. Faktanya orang-orang dekat penguasa ini ada yang menempel langsung dengan gubernur, bupati atau walikota, ada juga yang hampir jarang terlihat, tapi memiliki peran yang sangat kuat atau besar.

Orang dekat, gubernur malam, bupati malam, walikota malam, pembisik, ring 1, ring $\frac{1}{2}$, ring $\frac{1}{4}$ atau apapun istilahnya bukanlah jabatan formal struktural pada pemerintahan seperti sekda atau kepala dinas. Bukan yang itu ring piston kekuasaan. Itu namanya kepala SKPD.

Orang dekat ini asalnya dari partai sang penguasa, keluarga dekat atau kawan lama yang sudah teruji loyalitasnya. Saking kuatnya pengaruh ring piston kekuasaan itu, sampai sekda atau kepala dinas harus tunduk kepadanya.

Begitu benar hebatnya dia. Deras!

Sama dengan ring piston pada mesin sebuah mobil. Ring piston kekuasaan juga memiliki berbagai fungsi yang sangat vital.

Apa saja?

Mengatur Posisi Jabatan Strategis

Walaupun ada regulasi yang mengatur penempatan posisi strategis dalam sebuah birokrasi. Lelang jabatan, uji kompetensi, dan *fit and proper test*.

Namun peran ring piston kekuasaan sudah rahasia umum bisa juga menempatkan orangnya dengan mengabaikan

kapasitas atau kompetensi pejabat yang memadai. Sehingga sering terjadi pertentangan internal para birokrat jika ada proses mutasi. Ring piston kekuasaan menjadi aktor suburnya patalogi birokrasi.

Ring piston kekuasaan bisa mengatur jabatan eselon paling tinggi, jabatan pada perusahaan daerah, hingga sekedar jabatan kepala sekolah negeri sekalipun.

Mengatur Pemenang Tender Proyek

Walaupun tender proyek pemerintah sudah *online* menggunakan kanal LPSE dan data barang sudah *e-katalog*, tidak membuat semua itu menjadi *fair*.

Banyak celah yang dimainkan oleh ring piston kekuasaan untuk bisa mengatur siapa yang bisa memenangkan sebuah tender pekerjaan di instansi pemerintah. Tender saja bisa dia atur, apalagi kalau yang receh-receh proyek penunjukan langsung (PL).

Siapa prioritas mendapat proyek? Tim sukses, sponsor, kader partai atau orang dekat penguasa.

Fundraising Sang Penguasa dan Partai

Ini fungsi ring piston kekuasaan berikutnya. Menjadi kepala daerah ini berbiaya besar. Saat mencalonkan saja modalnya bisa puluhan miliar. Gaji kepala daerah itu tidak besar. Tuntutan kebutuhan dan gaya hidup akan semakin banyak. Belum lagi permintaan partai.

Ring piston kekuasaan akan bertugas menjadi perpanjangan tangan penguasa untuk bisa melakukan *fundraising* (penghimpunan uang).

Caranya; meminta upeti dari pejabat yang ditempatkan, *fee* proyek dari tender yang diatur atau *canvasing* (tanggung rapek) dengan menjalankan proposal secara resmi atau tidak resmi atas nama penguasa kepada pengusaha atau instansi

tertentu.

Setidaknya itu lah fungsi utama ring piston kekuasaan. Jika pada mesin mobil ring pistonnya sempat rusak maka membahayakan pada mesin mobil. Jika ring piston kekuasaan tugasnya bocor dan berurusan dengan hukum, bisa terancam lah masa depan sang penguasa dan juga partainya.

DPR di Mata Rakyat

TAK pernah henti mendapat sorotan dari rakyat. Tak pernah kesan baik pun yang didapatkan, selalu saja negatif. Bahkan yang jauh lebih buruk lagi berupa kutukan dan sumpah serapah. Tak bisa dipegang janji-janji indahinya dulu sebelum dapat kursi. Lupa diri setelah mendapatkan jabatan orang terhormat itu. Melupakan bahwa yang mengantarkannya disana adalah suara dari orang perorang yang memilihnya. Beginilah kesimpulan kita terhadap wakil rakyat kita hari ini. Walaupun mungkin ada sedikit orang diantara mereka yang masih punya nurani dan masih memikirkan rakyatnya.

Banyak fakta yang menyatakan ketidak berpihakan wakil rakyat kita, sebut DPR. Masih begitu bersih dalam ingatan kita tingkah-tingkah aneh mereka; minta gaji dan tunjangan dinaikan, pembelian laptop harga selangit, renovasi gedung Senayan yang masih bagus itu, dan setiap tahunnya sudah menjadi program rutin untuk mengadakan studi banding keluar negeri. Ada saja alasan yang dibuat agar dapat terbang keluar negeri. Parahnya lagi sampai membawa keluarga pun. Ini tugas legislatif atau jalan-jalan keluarga? Entahlah hanya Tuhan dan mereka yang tahu.

Contoh studi banding keluar negeri 30 anggota Panitia Khusus DPR RUU Bahan Kimia dan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata kimia ke Thailand dan Belanda pada 11-16 November 2008. Mereka membawa serta keluarga. Sorotan publik begitu besar terhadap rencana ini. Sempat dikeluhkan oleh koordinator kunjungan keluar negeri DPR Abdilla Thohah,

bahwa benar terjadinya kesemrawutan di DPR dan sulitnya diatur anggota dewan terhormat itu terhadap program ini. Apakah terlalu penting harus kunjungan kenegara lain, padahal dengan kecanggihan teknologi semua informasi dunia bisa diakses tanpa harus ada dinegara tersebut. Atau memang anggota dewan kita banyak yang gagap teknologi.

Memasuki tahun keempat masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009, wakil rakyat dinilai makin jauh meninggalkan kepentingan rakyat. Publik pun semakin keras menyuarakan memburuknya kinerja maupun moralitas anggota DPR. Padahal, dari segi kompetensi, keanggotaan DPR saat ini, konon, disebut-sebut lebih “unggul” daripada periode sebelumnya yang dinilai masih berbau Orde Baru. Paling tidak jika ukuran yang dipakai adalah komposisi usia sebagian anggota yang relatif muda, berlatar belakang pendidikan tinggi, dan dari kalangan swasta, akan memberikan tawaran sebuah lembaga wakil rakyat yang dinamis pada perubahan dan tuntutan rakyat. Semua itu masih didukung kebebasan mendirikan parpol sehingga representasi baik dari segi ideologi lebih mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat. Negara juga tak lagi terlalu mengedepankan seleksi, tetapi konstituenlah yang menyeleksi lewat mekanisme pemilihan langsung anggota DPR meskipun tak sepenuhnya terbuka.

Pada realitasnya kini, harapan yang digantungkan publik terhadap anggota DPR makin jauh dari pencapaian. Berbagai kelebihan itu di atas pada akhirnya menjadi percuma karena mentalitas politik lama dan perilaku elite parpol masih terlalu kuat mendominasi wacana di DPR. Permintaan kenaikan tunjangan ataupun ramai-ramai studi banding ke luar negeri minggu ini dan beberapa waktu lalu kembali terjadi di tengah beratnya beban ekonomi masyarakat.

Dalam jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh Litbang Kompas pada 13-14 Desember 2006. Sebanyak 831 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, pencuplikan penelitian 3,4 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini. Diantara hasil jajak pendapat tersebut sangat mengecewakan drastisnya ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya. Terhadap kiprah DPR dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, misalnya, menampakkan kecenderungan semakin tingginya ketidakpuasan responden, dari sekitar 73 persen pada awal tahun menjadi 82,8 persen. Kenaikan ketidakpuasan juga dinyatakan responden terhadap kemampuan DPR melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah dari 70,2 persen menjadi 79,2 persen. Sedangkan keraguan akan kemampuan DPR menelurkan undang-undang juga meningkat dari 66 menjadi 71,5 persen responden.

Sikap independensi DPR terhadap pemerintah kini mulai memunculkan pertanyaan. Sejauh ini, berbagai kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dianggap kurang mendapat kontrol memadai dari DPR, sebagaimana dalam kebijakan impor beras, pembelian panser TNI, semburan lumpur Lapindo, hingga rehabilitasi Aceh. Dalam soal impor beras, misalnya, sebagian besar responden (76,9 persen) menilai DPR kurang gigih mengontrol pemerintah.

Ditambah lagi dengan persolaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus ilegal seperti ilegal logging, pemasok senjata ilegal, korupsi disana-sini, berperilaku asusila, lobi-lobi haram untuk kepentingan partai dan terlibat tindak pidana. Hampir semua perilaku-perilaku menyimpang terakomodir dilembaga tersebut oleh personal orangnya.

Kedepan bagaimana seharusnya DPR dalam merubah citranya? *Pertama*, Anggota DPR RI harus mampu memberikan solusi nyata untuk membantu rakyat agar dapat keluar dari permasalahan hidup yang mereka hadapi. Untuk itu DPR RI harus mampu menemukan sistem penyerapan aspirasi yang tepat agar dapat memberikan jalan terbaik bagi rakyat. Jangan hanya sekedar menampung aspirasi. *Kedua*, ke depan wakil rakyat yang duduk di DPR adalah orang-orang yang benar-benar diberikan mandat secara langsung oleh rakyat dengan cara sistem pemilihan anggota DPR harus diubah dari sistem nomor urut menjadi suara terbanyak, sehingga anggota DPR akan lebih legitimate. *Ketiga*, untuk meningkatkan citra dewan dimasyarakat adalah anggota DPR harus mampu meningkatkan kepedulian mereka terhadap konstituennya.

Anggota DPR harus bersikap reaktif. Begitu mendengar ada permasalahan di daerah pemilihannya, mereka harus langsung terjun ke lapangan, menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Anggota DPR itu dipilih dan diberikan amanat oleh rakyat. Jadi dia juga harus mempertanggungjawabkan amanat tersebut kepada rakyat yang telah memilih mereka. Karena itu sistem pemilihan dengan mempergunakan mekanisme suara terbanyak sangat tepat untuk diberlakukan. Sebab sistem tersebut dapat meningkatkan rasa responsibility dari anggota DPR yang terpilih.

Menyoroti Citra DPR Kita

TAK pernah henti mendapat sorotan dari rakyat. Tak pernah kesan baik pun yang didapatkan, selalu saja negatif. Bahkan yang jauh lebih buruk lagi berupa kutukan dan sumpah serapah. Tak bisa dipegang janji-janji indahinya dulu sebelum dapat kursi. Lupa diri setelah mendapatkan jabatan orang terhormat itu. Melupakan bahwa yang mengantarkannya disana adalah suara dari orang perorang yang memilihnya. Beginilah kesimpulan kita terhadap wakil rakyat kita hari ini. Walaupun mungkin ada sedikit orang diantara mereka yang masih punya nurani dan masih memikirkan rakyatnya.

Banyak fakta yang menyatakan ketidak berpihakan wakil rakyat kita, sebut DPR. Masih begitu bersih dalam ingatan kita tingkah-tingkah aneh mereka; minta gaji dan tunjangan dinaikan, pembelian laptop harga selangit, renovasi gedung Senayan yang masih bagus itu, dan setiap tahunnya sudah menjadi program rutin untuk mengadakan studi banding keluar negeri. Ada saja alasan yang dibuat agar dapat terbang keluar negeri. Parahnya lagi sampai membawa keluarga pun. Ini tugas legislatif atau jalan-jalan keluarga? Entahlah hanya Tuhan dan mereka yang tahu.

Kenyataan apa yang di tulis Slank dalam lirik lagi *Gosip Jalanan; Mau tau gak, mafia di Senayan...! Kerjanya tukang bikin peraturan... Bikin UUD! Ujung-ujungnya duit...!* Kasus dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Sekda Kabupten Bintan Kepulauan Riau terhadap Al Amin Nasution anggota Komisi IV DPR-RI sebagai bukti nyata. Sosok Amin yang

berasal dari partai besar Islam PPP ini semakin menambah citra buruk lembaga legislatif kita.

Memasuki tahun keempat masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009, wakil rakyat dinilai makin jauh meninggalkan kepentingan rakyat. Publik pun semakin keras menyuarakan memburuknya kinerja maupun moralitas anggota DPR. Padahal, dari segi kompetensi, keanggotaan DPR saat ini, konon, disebut-sebut lebih “unggul” daripada periode sebelumnya yang dinilai masih berbau Orde Baru. Paling tidak jika ukuran yang dipakai adalah komposisi usia sebagian anggota yang relatif muda, berlatar belakang pendidikan tinggi, dan dari kalangan swasta, akan memberikan tawaran sebuah lembaga wakil rakyat yang dinamis pada perubahan dan tuntutan rakyat. Semua itu masih didukung kebebasan mendirikan parpol sehingga representasi baik dari segi ideologi lebih mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat. Negara juga tak lagi terlalu mengedepankan seleksi, tetapi konstituenlah yang menyeleksi lewat mekanisme pemilihan langsung anggota DPR meskipun tak sepenuhnya terbuka.

Pada realitasnya kini, harapan yang digantungkan publik terhadap anggota DPR makin jauh dari pencapaian. Berbagai kelebihan itu di atas pada akhirnya menjadi percuma karena mentalitas politik lama dan perilaku elite parpol masih terlalu kuat mendominasi wacana di DPR. Permintaan kenaikan tunjangan ataupun ramai-ramai studi banding ke luar negeri minggu ini dan beberapa waktu lalu kembali terjadi di tengah beratnya beban ekonomi masyarakat.

Dalam jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh Litbang Kompas pada 13-14 Desember 2006. Sebanyak 831 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku

telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Jumlah responden di setiap kota ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, pencuplikan penelitian 3,4 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini. Diantara hasil jajak pendapat tersebut sangat mengecewakan drastisnya ketidakpercayaan rakyat terhadap wakilnya. Terhadap kiprah DPR dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, misalnya, menampakkan kecenderungan semakin tingginya ketidakpuasan responden, dari sekitar 73 persen pada awal tahun menjadi 82,8 persen. Kenaikan ketidakpuasan juga dinyatakan responden terhadap kemampuan DPR melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah dari 70,2 persen menjadi 79,2 persen. Sedangkan keraguan akan kemampuan DPR menelurkan undang-undang juga meningkat dari 66 menjadi 71,5 persen responden.

Sikap independensi DPR terhadap pemerintah kini mulai memunculkan pertanyaan. Sejauh ini, berbagai kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dianggap kurang mendapat kontrol memadai dari DPR, sebagaimana dalam kebijakan impor beras, pembelian panser TNI, semburan lumpur Lapindo, hingga rehabilitasi Aceh. Dalam soal impor beras, misalnya, sebagian besar responden (76,9 persen) menilai DPR kurang gigih mengontrol pemerintah.

Ditambah lagi dengan persolaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus ilegal seperti ilegal logging, pemasok senjata ilegal, korupsi disana-sini, berperilaku asusila, lobi-lobi haram untuk kepentingan partai dan terlibat tindak pidana. Hampir

semua perilaku-perilaku menyimpang terakomodir dilembaga tersebut oleh personal orangnya.

Kedepan bagaimana seharusnya DPR dalam merubah citranya? *Pertama*, Anggota DPR RI harus mampu memberikan solusi nyata untuk membantu rakyat agar dapat keluar dari permasalahan hidup yang mereka hadapi. Untuk itu DPR RI harus mampu menemukan sistem penyerapan aspirasi yang tepat agar dapat memberikan jalan terbaik bagi rakyat. Jangan hanya sekedar menampung aspirasi. *Kedua*, ke depan wakil rakyat yang duduk di DPR adalah orang yang bermoral baik dan teruji di masyarakat. Partai harus melakukan penelusuran/ rekam jejak elit yang akan ditempatkan sebagai anggota dewan. *Ketiga*, untuk meningkatkan citra dewan dimasyarakat adalah anggota DPR harus mampu meningkatkan kepedulian mereka terhadap konstituennya.

Anggota DPR harus bersikap reaktif. Begitu mendengar ada permasalahan di daerah pemilihannya, mereka harus langsung terjun ke lapangan, menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Anggota DPR itu dipilih dan diberikan amanat oleh rakyat. Jadi dia juga harus mempertanggungjawabkan amanat tersebut kepada rakyat yang telah memilih mereka.

Konflik Internal Partai

PERKEMBANGAN kedewasaan berpolitik di negeri tercinta ini masih belum melihatkan peningkatan yang berarti. Betapa tidak, partai politik yang semestinya menjadi penyalur aspirasi masyarakat tidak bekerja dengan baik. Jangankan mengurus rakyat, untuk dirinya sendiri saja belum bisa. Konflik internal di partai masih menjadi *film* yang di pertontonkan kepada rakyat. Parahnya lagi bahkan *film* itu di mainkan hampir pada setiap episode kepemimpinan partai.

Sejarah konflik internal partai di negara kita sudah dimulai sejak awal munculnya partai politik di negara ini. Pada tahun 1921 Partai Sarekat Islam (PSI) sebagai partai besar yang ber-azaskan Islam saat itu dipimpin duet H. Agus Salim dan Abdoel Moeis, Presiden Partai Tjokroaminoto saat itu sedang ditahan karena tuduhan pemberontakan. PSI pada waktu dirongrong dari dalam oleh kekuatan orang-orang komunis yang dikomandoi oleh Semaoen dan Darsono yang kemudian juga melakukan penyusunan kembali asas Islam. Kemudian dilakukan Kongres Luar biasa (KLB) tentang disiplin partai untuk meyelesaikan persolaan internal partai. Dimana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berorasi yang disaksikan oleh Belanda. Semaoen memberikan penjelasan pentingnya paham sosialis dalam partai. Kubu Agus Salim menjelaskan tentang azas Islam. Tidak ada sepakat pada waktu itu hingga akhirnya dilakukan voting. Hasilnya, 23 :7 suara untuk kelompok Salim dan Moeis. KLB mengesahkan hasil voting ini dan semua pihak menerima. Semaoen dan Darsono akhirnya terkena *partij discipline* alias dikeluarkan

dari Sarekat Islam.

Tidak berapa lama Samaoen dan Darsono mendirikan Persyarikatan Komunis India dan belakangan diubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Samaoen menjadi Ketua Umum PKI pertama dan setahun berikutnya, 1922 kursi ketua umum itu diserahkan kepada Tan Malaka.

Kalau kita pelajari sejarah awal pertumbuhan partai-partai politik besar di Tanah Air, yang dimulai dengan berdirinya SI (1912), PKI (1921), dan PKI (1927) dan juga partai yang belakangan berdiri, semuanya dilanda konflik internal dengan berbagai sebab antara lain persaingan kepemimpinan, strategi perjuangan, dan ideologi. Konflik-konflik itu akhirnya melemahkan dan menghancurkan eksistensi partai.

Pada zaman orde baru kita juga saksikan bagaimana tradisi konflik internal partai terus *bergelinding* contohnya terjadi konflik antara HJ.Naro dan Ismael Hasan Metareum yang berebut kursi kekuasaan di PPP. Yang sangat mencekam adalah konflik berdarah di PDI antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi. Sejak kongres Medan tahun 1996 partai berlambang kepala banteng itu menggulingkan kepemimpinan Megawati, kita tidak pernah menyaksikan keduanya bertemu dan saling sapa. Keduanya membuat partai sendiri-sendiri yang mengklaim ideologi. Yang menjadi korban dalam konflik tidak tanggung-tanggung, nyawa, fasilitas umum, dan masyarakat sipil yang tidak mengerti apa-apa.

Pada era reformasi ini pun tak lepas dari konflik internal partai. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah yang pertama menghasilkan kepemimpinan kembar karena tidak ada penyelesaian yang diterima kedua pihak; kubu Yusril Ihza Mehendra dan kubu Hartono Mardjono. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang didirikan oleh KH. Zainuddin MZ

pecahan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Kesatuan Nahdatul Ulama (PKNU) yang dipimpin oleh Alwi Shihab pecahan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai akibat politik di pecatnya Alwi Shihab dan Matori Abdul Jalil oleh Gusdur. Anak-anak muda Muhammadiyah yang dulu bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN) membuat partai sendiri yaitu Partai Matahari Bangsa (PMB). Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai besar pun terjadi konflik internal dikalangan elitnya, tercampaknya Akbar Tanjung dari partai pohon beringin ini membuat ia berpikir mencari kendaraan lain untuk maju tahun 2009. Kabarnya Mantan Ketua DPR ini menjadi tokoh dibalik lahirnya Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan). Wiranto yang menang pada konvensi Golkar tahun 2004 dan ternyata tak didukung oleh partainya sendiri menjadi presiden mendirikan partai baru bernama Hati Nurani Rakyat (Hanura). Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis yang dibuang oleh Megawati pun tak mau ketinggalan hingga ia juga membuat partai baru.

Inilah wajah demokrasi yang dimainkan oleh elit partai di negeri ini dari dulu sampai sekarang. Partai yang terdaftar dan yang lulus sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) untuk 2009 sebagian besarnya adalah pecahan-pecahan dari satu partai. Mendirikan partai bermotifkan dendam politik. Semuanya hanyalah untuk penyaluran libido politik menuju kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat. Para politisi terlalu *ngotot* untuk tetap melibatkan diri secara penuh dalam proses pemilihan presiden langsung saat ini. Dan satu-satunya kendaraan adalah partai politik.

Akankah para elite partai terus bertikai dan memperlihatkan akrobat politik yang hanya bertumpu pada aspek kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa mau

berkorban dan memikirkan masa depan politik yang lebih demokratis? Memang sekarang adalah masa transisi, tapi transisi itu harus dipersiapkan dengan perangkat-perangkat kelembagaan politik yang demokratis dan budaya politik yang mengedepankan kepentingan bersama yakni kepentingan jangka panjang bangsa dan negara. Rakyat sudah sangat bosan dengan akrobat-akrobat yang dimainkan oleh para aktor politik di negeri ini.

Solusi

Harapan kita sebagai rakyat di tahun politik ini terhadap partai politik agar fokus memberikan pendidikan politik yang terbaik. Sehingga pada pemilu nanti sebagai momen pergantian kepemimpinan bangsa, rakyat kita adalah pemilih yang cerdas. Diantara solusi yang mesti dilakukan dalam agar tidak lagi terjadi konflik internal partai adalah;

Pertama, melakukan komunikasi antar elit-elit parpol. Menurut Habermas dalam mahakarya-nya, *The Theory of Communicative Action Vol. I: Reason and the Rationalization of Society* (1984) dan *The Theory of Communicative Action Vol II: Lifeworld and System* (1989), tujuan komunikasi adalah saling pengertian. Habermas mengungkapkan bahwa dalam komunikasi, situasi subyek-obyek bisa dihindarkan. Sebab, komunikasi mengandaikan dua hal yaitu manusia berhadapan satu sama lain sebagai dua pihak yang sejajar dan berdaulat dan adanya ruang kebebasan dalam menangkap maksud orang dalam suatu komunikasi yang tidak dipaksakan.

Kedua, menekan/mengeliminir bipolaritas kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara pragmatisme yang menjangkiti kader/elite partai akan berhadapan dengan idealisme yang dipegang oleh kader/elite partai yang teguh mempertahankan jiwa ideologi

dan garis konstitusional partai. *Ketiga*, melakukan percepatan pengkaderan kepemimpinan kader partai. Kemudian melakukan generasi kepemimpinan, sehingga dalam sebuah partai tidak ada lagi tokoh kharismatis yang otoriter ditampuk kekuasaan partai dalam kurun waktu yang sangat lama.

Keempat, menghabiskan intervensi modal oleh kekuatan bisnis dan intervensi kekuasaan politik yang mendorong lahirnya budaya *money politics*, *intrik* politik, politik dagang sapi dalam arena kongres atau muktamar partai.

Menyoal Moral dan Etika Politik

“Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil” (*Paul Ricoeur, 1990*).

ETIKA dan moral dalam politik menjadi aspek yang sangat penting. Baik secara individual elit politik maupun secara institusi/lembaga. Secara individual, moral dan etika pelakunya akan menjadi cerminan bagi rakyat. Secara lembaga moral dan etika akan melibatnkan wibabawa. Walaupun pada akhirnya moral dan etika individual juga akan memberikan pengaruh terhadap institusi/lembaga politik. Juga sebaliknya.

Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, *Pertama*, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. *Kedua*, upaya memperluas lingkup kebebasan. *Ketiga*, membangun institusi-institusi yang adil.

“Hidup baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-

cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebasan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan.

Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. “*Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur*”. Dari sudut koherensi, pernyataan ini sah, tidak terbantahkan.

Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (*hipotetis irealis*).

Pada ranah *real* politik kita saat sekarang tuntutan elit bermoral terasa kering kerontang. Adapun sedikit yang jujur di perlemen kita itu pun belum merdeka. Ada usaha pembunuhan karakter. Cenderungnya elit politik sebagian besar di negeri ini bergaya hidup parlente, suka berfoya-foya dan jauh dari budaya malu.

Beberapa kasus asusila anggota dewan dari pusat sampai daerah terkuak ke publik. Kasus video mesum anggota dewan dari Partai Golkar Yahya Zaini dengan Maria Eva beberapa tahun lalu. Dengan begitu bangga Maria Eva membeberkan perselingkuhannya dengan Yahya Zaini. Karir Yahya Zaini berakhir dan takluk ditangan Maria Eva. Kasus terbaru yang pernah diusut Badan Kehormatan DPR-RI, foto syur dan kekerasan seksual Max Moein dengan seorang wanita yang juga seorang mantan sekretaris pribadinya. Max Moein yang berasal partai PDI-Perjuangan itu pun tak bisa mengelak bahwa yang beredar di internet itu adalah fotonya. Ia mengakui itu dirinya. Itu contoh kasus yang terungkap, Permadi rekan Max dari PDI-Perjuangan juga pernah mengatakan di koran Rakyat Merdeka Jum'at 30 Mei 2008, bahwa di ruang-ruang kantor DPR-RI itu sering terjadi kemaksiatan. Buktinya banyak di temukan kondom-kondom bekas disaluran pembuangan air gedung terhormat itu. Belum lagi ketidakjujuran anggota DPR yang memakan uang yang tidak haknya (korupsi).

Pada skala daerah juga banyak kasus asusila yang dilakukan anggota dewan. Di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu juga ditemukan beberapa kasus, sebut saja skandal seorang pimpinan DPRD Sumatera Barat dengan pegawainya. Kasus selingkuh anggota dewan lima puluh Kota yang

tertangkap disebuah hotel. Kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain.

Kadang, para elit politik negeri ini juga banyak yang bermuka dua/munafik. Kalau ditelusuri lebih jauh, secara teoretis simbol kemenangan politik riil atas moral sering kali merujuk pada seorang tokoh, patriotis Italia, Nicolo Machievelli. Seorang politikus, seperti yang difatwakan oleh Machievelli akan menapaki puncak kariernya ketika mengabaikan moral. Dalam buku, *Il Principe* (1513), buku yang menjadi pegangan utama bagi politikus machievillian dirumuskan bahwa seorang politikus harus memberikan kesan di depan rakyat bahwa ia seorang yang lembut, pemurah, bahkan agamais. Namun ia pun dapat berbuat jahat dan mengabaikan rasa sayang dan moralitas jika diperlukan. Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

Agama Sebagai Solusi

Penyelesain persoalan moral dan etika dalam politik harus mengajak agama untuk berperan dalam menyikapinya. Mempertegas harapan ini dalam buku Douglas Johnston dan Cythia Sympson, *Religion: The Missing Dimension of Statecraft* dijelaskan bahwa mengapa sering kali setiap tindakan politik negara harus dibayar dengan ongkos mahal dari ribuan korban jiwa manusia, karena nilai moral agama telah dikesampingkan dan tidak lagi menjadi ruh dalam pengambilan kebijakan negara.

Paradigma yang muncul ketika mengusulkan peran agama

dalam kancah politik adalah paradigma agama politik. Setelah sekian lama agama berada di pinggir kehidupan manusia maka muncullah 'kebangkitan agama' yang dirumuskan dengan bangkitnya simbol, isu, dan jargon agama dalam ranah politik. Kegagalan dunia modern yang disanjung akan menyelesaikan problem kemanusiaan menjadi modal untuk mengusung kembali politik agama. Politik orang saleh, dalam Islam ialah politik kemanusiaan yang dalam ajaran Islam bisa dikenali dari risalah kenabian Muhammad Saw. Idealitas kekuasaan yang ingin dicapai dan diwujudkan ialah kekuasaan yang diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat warga negara.

Para elit politik mesti menjadikan agama sebagai mekanisme kontrol dalam semua aspek kehidupan. Karena agama apapun akan mengajarkan bagaimana bermoral dan etika yang baik. Karena jabatan politik tidak hanya pertanggungjawaban untuk manusia, tapi juga pada Tuhan.

Esensi Kekuasaan

“Persoalan fundamental dari setiap revolusi adalah persoalan kekuasaan negara. Tanpa memahami persoalan ini orang bahkan tak usah berbicara tentang ikut serta secara sadar bagaimanapun dalam revolusi, apalagi tentang memimpinya” (Lenin; 1917)

SETELAH ditetapkan partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tentu saja perhatian elit parpol sudah mulai fokus menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi masa kampanye partai diberikan waktu yang relatif cukup panjang. Kampanye yang dipercepat tersebut dengan tujuan masyarakat bisa lebih mengenal partai politik peserta pemilu dengan lebih baik. Sehingga diharapkan adanya kecerdasan baru berpolitik masyarakat Indonesia dari partisipasi politik irrasioanal menjadi rasioanal, dari budaya politik parokial menjadi budaya politik partisipan.

Tujuan partai politik adalah kekuasaan. Bersaing/kompetisi harapannya adalah kemenangan dengan adanya pengakuan dari rakyat. Partai yang memperoleh suara lebih banyak/mendominasi akan berpeluang besar mengajukan presiden secara tunggal tanpa koalisi. Para kandidat presiden yang sudah mulai menggapung ke publik dengan kendaraan partai yang dimiliki tentu berjuang keras agar partainya menang pada pemilu legislatif.

Tahun ini disebut tahun politik dalam rangka menghadapi Pemilu, jelas tahun politik pembicaraan yang paling hangat

adalah kekuasaan. Mengatasnamakan rakyat semua partai politik akan menjadi *hero* ditengah kesulitan yang dihadapi masyarakat. Isu kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja baru, harga kebutuhan pokok yang stabil, ketertiban dan keamanan, dan isu-isu populer lain yang dijadikan jualan kepada rakyat.

Pengertian Kekuasaan

Beberapa pengertian dari kekuasaan yang diungkapkan para ahli politik, sebagaimana diinventarisir oleh Budiardjo (1994 : 92-94) antara lain sebagai berikut :

Pertama, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemauan ini (*Max Weber, Wirtschaft und Gessellschaft, 1992*).

Kedua, kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama (van Doorn, *Sociologische Begrippen en Problemen rond het Verschijnsel Macht, 1957*). *Ketiga*, Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku untuk menetapkan

secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif-alternatif bertindak atau memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain (*Mokken, Power and Influence as Political Phenomena, 1976*).

Keempat, Kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat. Kewajiban dianggap sah sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif, dan jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar -- terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu (*Talcott Parsons, The*

Distribution of Power in America Society, 1957).

Adapun cara-cara memperoleh kekuasaan, seperti dikemukakan oleh Syafiie (1996 : 54-58), terdiri dari 7 (tujuh) macam cara. *Pertama, legitimate power* adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan dan atau pemilihan. *Kedua, coercive power* adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan kekuasaan yang bersifat inkonstitusional.

Ketiga, expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang dalam memangku jabatan tertentu. *Keempat, reward power* adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian, dimana orang atau kelompok yang taat kepada orang atau kelompok lain mengharapkan atau termotivasi oleh sejumlah uang pembayaran (misalnya gaji). *Kelima, reverent power* adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang, baik aspek wajah, postur tubuh, penampilan atau sikap seseorang. *Keenam, information power* adalah perolehan kekuasaan melalui penguasaan terhadap akses informasi, terutama dalam era teknologi komunikasi yang sangat modern seperti sekarang. *ketujuh, connection power* adalah cara memperoleh kekuasaan melalui hubungan (relation) yang luas, baik dalam bidang politik maupun perekonomian.

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kedepan tentu semua sumber kekuasaan ini akan dimanfaatkan oleh elit politik politik baik secara personal maupun juga secara struktural partai dari pusat sampai struktur terendah. Beberapa saat kemaren rakyat terlupakan karena berada di kursi kekuasaan, mendekati Pemilu berarti kembali mendekati rakyat dengan segala cara. Inilah fenomena pemahaman menuju tampuk kekuasaan dinegeri ini oleh para elitnya. Terjadinya

pemahaman yang salah oleh elit partai terhadap kekuasaan. Banyak indikator yang menandakan itu, mendirikan partai baru sebagai bentuk kekecewaan terhadap kendaraan lama maka terbentuklah partai-partai pecahan, konflik internal partai karena hegemoni kaum tua yang takut di ambil alih oleh kaum muda, lari kepartai lain karena sepertinya partai lama tidak mumpuni lagi memberi ruang kekuasaan, melakukan koalisi sesaat sampai jabatan ditangan setelah itu bubar tidak menentu, *black campaign* rival politik dan lain-lain sebagainya. Sehingga terjadinya pengabaian-pengabaian terhadap hak rakyat. Rakyat semakin sengsara, kemiskinan meningkat, sementara pejabat dan elit politik semakin makmur kaya raya.

Kekuasaan Dalam Islam

Penguasa adalah seseorang yang mempunyai rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki penguasa *Ibn Khaldun (1332-1406)*. Memandang penting kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurutnya ada penguasa adalah ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di alam semesta. Setiap masyarakat manusia sudah pasti memerlukan penguasa karena dalam diri manusia itu masih tersisa sifat-sifat kebinatangan dan cenderung untuk menganiaya orang lain.

Seandainya penguasa itu tidak ada, kehidupan masyarakat manusia akan berada dalam keadaan kacau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi bagi Ibn Khaldun, penguasa bukan orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain akan tetapi seseorang yang melakukan tugas sosial yang penting tujuannya berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri (*Zainuddin, 1992 : 190*).

Ibn Khaldun menegaskan bahwa baik buruknya seorang

penguasa sangat bergantung pada bagaimana caranya ia mengurus kepentingan rakyat itu. Apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan lemah lembut, semua pihak termasuk penguasa dan rakyat akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan keras, penuh dengan hukuman dan penindasan, serta selalu mencari kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, maka rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas (*Zainuddin: 1992:191*).

Seorang penguasa yang baik itu adalah seorang yang berada ditengah rakyat, serta berlaku baik dan lemah lembut terhadap mereka. Dengan demikian, rakyat akan menyayanginya serta akan mempertahankannya sampai tetesan darah penghabisan dalam memerangi musuh-musuhnya dan penguasa itu akan terlindung dari segala pihak.

Mungkinkah Kampanye Damai?

MASA kampanye partai politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dimulai sejak 9 April 2008. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2011 yang di Ketua Hafidz Ansyary ini berbeda dengan periode sebelumnya, terutama dalam hal masa kampanye yang sampai 9 bulan. Masa kampanye yang panjang ini bertujuan partai dan elitnya bisa lebih lama memperkenalkan diri dengan masyarakat, menghindari benturan-benturan dan konflik-konflik horizontal masa pendukung.

Kampanye damai partai politik peserta pemilu 2009 pun dideklarasikan bersama-sama oleh parpol di Kantor KPU hari Sabtu 12 Juli 2008. Dihadiri oleh petinggi-petinggi partai politik, budayawan, anggota KPU, ormas-ormas dan LSM. Satu niat, satu tujuan, satu harapan bahwa pemilu kedepan damai. Ini harapan normatif dan terkesan dipaksakan. Sepertinya cukup sulit diwujudkan, tapi kita coba optimis.

Damai adalah kata yang begitu indah diucapkan secara formalistis oleh elit partai dinegeri ini. Rakyat pun berharap kenyataan, bukan lagi gombalan sesaat. Bisakah partai baru yang terlahir dari akumulasi kekecewaan partai lama untuk berdamai? Benarkah tidak ada dendam politik? Sudahkah termaafkan khilaf-khilaf pada tataran elit? Benarkah Megawati sudah “berdamai” dengan SBY pasca kekalahannya pada pilpres tahun 2004 lalu? Akankah terciptanya perdamaian antara PKB kubu Gusdur dan kubu Muhaimin? Sebulan yang

lalu kita masih menyaksikan masing-masing kubu pendukung partai *nahdliyin* ini bentrok. Bahkan dalam mengambil nomor urut partai peserta pemilu saja beberapa hari yang lalu tidak terlihat sikap damai antara Yenni Wahid dengan Muhaimin.

Khawatirnya damai hanyalah dendangan sesaat, untuk mengambil simpati rakyat kemudian setelah itu bersaing lagi secara tidak sehat. Siapa yang akan bisa menjamin damai selama kampanye kedepan kalau elit politiknya tidak berjiwa besar, sportif dan mau berkomunikasi politik dengan baik.

Tentu di negeri ini juga ada partai dan elitnya yang serius mengurus rakyatnya. Kadernya yang tertib membawa kedamaian, elitnya yang jauh dari konflik internal apalagi dengan eksternal. Partai anak muda yang belum ternoda dosa politik. Pilihannya yang loyalitasnya masih tinggi. Belajarlah darinya! Ciptakan terus suasana nyaman bagi rakyat.

Mungkinkah kampanye damai? Ketika kampanye partai politik dilakukan di daerah yang sedang Pilkada, dan pada waktu masa tenang bisakah dijamin tidak akan muncul masalah-masalah baru? Apalagi calon kepala daerah yang diusung adalah kader partai yang sedang kampanye. Bagaimana pengaturannya? Karena pilkada sampai menjelang pemilu tahun depan akan tetap digelar di sejumlah daerah.

Semoga damai di negeri ini benar-benar bisa tercipta. Kasihan rakyat yang semakin melarat karena pelaku elitnya untuk kepentingan sesaat. Rakyat negeri ini banyak yang kelaparan, memakan makananan yang kadaluarsa, merampok untuk beli sembako, menipu untuk beli susu, membunuh tetangga karena dendam hutang dan kejahatan moral merajalela dimana-mana.

Akankah elit parpol kedepan menari-nari lagi diatas penderitaan rakyat? Berpura-pura menjadi pahlawan

ditengah-tengah kemiskinan? Mengaku-ngaku membela rakyat bawah (*wong cilik*)? Akankah gerakan *back to rakyat* oleh elit politik menjelang pemilu ini membawa damai? Tanyakan pada nurani mereka!

Kepemimpinan Dua Periode

“**TERBUKTI** Membuat Perubahan” adalah slogan yang paling tepat digunakan oleh pasangan calon Wali Kota Padang Fauzi Bahar-Mahyeldi dalam Pilkada Kota Binguang. Fauzi Bahar sebagai calon *incumbent* adalah orang yang telah banyak melakukan perubahan sangat signifikan dalam kepemimpinannya. Ketegasan mantan seorang prajurit ini dalam kepemimpinannya menyentuh wilayah-wilayah substansial manusiawi yaitu reformasi moral generasi muda.

Persoalan terbesar keterpurukan bangsa ini sesungguhnya adalah terletak pada moral orang-orangnya, baik yang berfungsi sebagai pemimpin maupun rakyat. Diantara kebijakan yang telah dilakukan dan berjalan dengan efektif adalah pemberantasan togel, pesantren ramadhan, menutup aurat bagi pelajar dengan kebijakan berjilbab, pengaplikasian zakat dan subuh mubarakah yang terus disosialisasikan.

Dulu saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Fauzi Bahar semata kebijakan populer yang mendompleng posisi politik dan mengamankan nama baik. Tapi pikiran itu saya jauhkan setelah melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Fauzi Bahar. Togel *enyah* dari kota Padang, perilaku anak-anak berubah setelah ikut pesantren ramadhan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh *Sumatera Barat Intellectual Society (SIS)* sebuah lembaga kajian intelektual muda Sumatera Barat, 79 persen peserta pesantren perilakunya berubah setelah ikut acara tersebut di bulan Ramadhan.

Ditambah lagi dengan bergemanya asmaul husnah setiap saat oleh pelajar. Zakat teraplikasi dengan baik, sehingga ada pengakuan dari salah seorang pegawai Pemko Padang sejak adanya kebijakan zakat ini penghasilan terasa semakin berkah karena hak orang lain sudah dikeluarkan.

Sebenarnya tidak mudah merubah perilaku masyarakat kepada arah yang lebih baik berlandaskan norma-norma yang berlaku. Menurut saya butuh waktu 25 tahun melihat reformasi berhasil atau tidak. Apalagi mereformasi moral anak bangsa ini. Tapi dalam waktu lima tahun kepemimpinan Fauzi Bahar sudah melihatkan hasil yang lebih baik. Inovasi moral yang dilakukan pun tiap tahunnya dengan program yang berbeda tanpa meninggalkan program sebelumnya.

Refomasi moral dengan penekanan aqidah adalah bagian penting dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tugas para ulama dalam mendidik dan mengarahkan umat kepada jalan yang benar diperkuat oleh peran umara' yang tegas merupakan kolaborasi yang sangat ideal. Filosofi dakwah inilah yang selalu dilakukan oleh Fauzi Bahar sebagai pendekatan dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Terbukti membuat perubahan terhadap moral generasi ini mesti kita akui sebagai warga kota ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah terhadap perubahan sektor ekonomi masyarakat. Agak sulit kita menemukan data karena tidak ada ekspos yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Langkah pemerintah dalam membangun sarana perdagangan yang lebih baik seperti Sentral Pasar Raya (SPR) dan Plaza Andalas sudahkah memberikan korelasi yang seimbang terhadap ekonomi masyarakat. Menurut saya pertumbuhan ekonomi adalah bagian yang tidak kalah penting dari pembenahan moral yang sudah dilakukan.

Karena pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan.

Dengan terpilihnya kembali Fauzi Bahar sebagai Wali Kota Padang masalah ekonomi adalah tugas yang harus diprioritaskan. Dengan visi “ Terwujudnya Kota Padang yang Religius, Aman, dan Sejahtera”, kesejahteraan akan terletak pada amannya ekonomi rakyat. Pekerjaan ini mesti dilanjutkan oleh Fauzi Bahar lima tahun kedepan. Rakyat kota Padang dengan legowo telah memberikan kesempatan kedua kali kepada beliau untuk menjadi walikota. Rakyat tahu kalau tidak Fauzi Bahar, maka harus memulai lagi dari nol untuk calon lain.

Pengalaman pemerintahan membuktikan bahwa kepemimpinan dua periode untuk seseorang kepala daerah akan memberikan dampak yang sangat baik. Sebut saja Sragen sebagai kabupaten yang menjadi icon di otonomi daerah ini dipimpin oleh Untung Wiyono dua periode. Periode pertama Sang Bupati melakukan perubahan mental birokrat dari weberian system ke arah new public management dalam bentuk pembenahan sumber daya manusia. Periode kedua kepemimpinan adalah aplikasi dari pembenahan birokrat, sehingga sumber daya yang berkualitas tersebut bisa menerpakan e-government dalam pemerintahan.

Pengalaman lain adalah di Kabupaten Jembrana di Bali, kabupaten miskin ini di ubah oleh tangan I Gede Winasa sebagai bupati selama dua periode. Sehingga Jembrana juga menjadi kabupaten referensi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Kabupaten yang pernah disebut Gusdur sebagai *tempat pembuangan anak jin* ini menjelma menjadi kabupaten yang dikenal dengan pendidikan dan kesehatan gratis. Usaha I Gede

Winasa adalah melakukan efisiensi anggaran.

Menurut analisa saya Padang akan bisa menjadi seperti dua kabupaten diatas dengan komitmen yang dilakukan oleh Fauzi Bahar untuk periode kedua sebagai walikota. Peletakan dasar tata pemerintahan yang dilakukan selama ini sangat sesuai dengan kearifan lokal budaya Minangkabau, adat basandi sayarak, syarak basandi kitabullah. Ketika mental masyarakat sudah di-ubah ke arah paradigma yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama, menjadi modal besar untuk melakukan perubahan di bidang lain. Ketika pelaku ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan dan bidang lainnya bermoral dan bermental baik maka sektor-sektor ini akan lebih mudah diarahkan oleh kepala daerah.

Fauzi-Mahyeldi Sama Menguntungkan

Mahyeldi Ansyarullah dikenal sebagai seorang ulama yang kharismatik, wakil rakyat yang aspiratif, beliau berasal dari partai politik yang dinenal memiliki massa yang sangat loyal yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh PKS adalah mesin politiknya bergerak sampai tataran grass root dengan baik. Kader PKS adalah anak-anak muda militan yang bergerak dengan tanggungjawab yang besar tanpa mengharapkan materi dari setiap pekerjaan.

Bagi kader PKS perjuangan politik dipahami sebagai jihad dalam rangka melakukan perubahan terhadap masyarakat. Majunya Mahyeldi Sebagai wakil wali kota, bukanlah atas kemauan personal dirinya tapi keputusan jamaah PKS. Ketika seorang kader PKS dimajukan baik di eksekutif maupun legislatif maka semua kader bertanggungjawab mengantarkan sampai pada tujuan.

Kolaborasi Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansyarullah adalah langkah paling tepat dilakukan. Seorang prajurit yang tegas

didampingi oleh ulama kharismatis akan terjadi mekanisme kontrol yang baik dalam kepemimpinan. Seorang tokoh populer seperti Fauzi Bahar didukung dan berkoalisi dengan partai politik yang solid seperti PKS akan memberikan kerja sama yang baik.

Semoga harapan saya yang tidak ada kepentingan apapun disana akan bisa terwujud, saya hanyalah seorang pendatang yang menumpang belajar dan mencari hidup di kota ini. Untuk memilih tanggal 23 Oktober 2008 pun saya tidak terdaftar.

Iklan Politik PKS

IKLAN politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 menuai kontroversi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berbagai tanggapan muncul tidak hanya dari partai politik sebagai rival PKS dalam Pemilu 2009. Ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama pun merasa terpancing untuk menanggapi. Dua ormas ini mengklaim bahwa mereka keberatan tokohnya di catut PKS, yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Tak tanggung-tanggung, Gusdur tokoh NU dan Din Syamsuddin tokoh Muhammadiyah angkat bicara tentang keberatan terhadap iklan tersebut.

Dalam iklan tersebut beberapa tokoh ditampilkan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa mereka memajukan bangsa. PKS menyebut mereka sebagai guru bangsa. Satu dari sekian banyak tokoh iklan politik tampilan PKS yang menuai kritik juga adalah mantan presiden Soeharto. PKS diplesetkan menjadi Partai Kepincut Soeharto.

Para aktivis yang pernah menjadi korban politik Soeharto apalagi yang berafiliasi dengan partai politik menuding PKS sebagai partai yang tidak komitmen dalam mengusung reformasi. Tapi Keluarga Cendana memberi apresiasi besar kepada partai dakwah ini.

Selain kritik terhadap Soeharto dalam iklan politik PKS. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga “marah” besar PKS menampilkan mantan presiden Soekarno. PDIP mengklaim bahwa Sang Proklamator ini adalah “milik” mereka

kaum/partai nasionalis. Pertanyaan tajam pun muncul PKS apakah masih religius? Plesetan selanjutnya terhadap PKS Partai Kepincut Soekarno. PKS menjadi partai yang *sok* nasionalis dengan membawa-membawa Soekarno.

Iklan kreatif yang dibuat PKS ini menjadi tema-tema yang banyak dibahas di media elektronik dan cetak termasuk juga forum-forum seminar dan diskusi oleh PKS sendiri dan lembaga lain. Iklan itu memang hanya tayang tiga hari saja, tapi gaungnya lebih dari pada. Secara materi tentu saja tidak terlalu menguntungkan media yang mempublikasikannya. Dibandingkan dengan iklan politik lain seperti iklan Probowo, iklan Soetrisno Bachir maupun iklan politik SBY. Diakui PKS memang tidak punya modal yang banyak untuk mengiklan diri dengan media elektronik provit.

Sebagai partai yang sedang berkembang ternyata PKS punya cara-cara yang sedikit berbeda dalam mengenalkan partainya kepada masyarakat. Pernah Tifatul Sembiring sebagai presiden partai berkonflik dengan Megawati Ketua Umum PDIP. Pernyataan Tifatul yang mengatakan bahwa calon presiden RI kedepan adalah “balita” (dibawah lima puluh tahun) membuat Megawati marah. Perang opini antara kedua petinggi partai ini menjadi isu sangat menarik untuk dibahas oleh berbagai media dan forum-forum ilmiah. Isu ini menjadi penguatan akan pentingnya kepemimpinan kaum muda untuk Indonesia. Yang diuntungkan dari “perang” Mega-Tif adalah PKS, karena isu regenerasi kepemimpinan mengingatkan orang kepada kegagalan Megawati ketika menjadi presiden. Masyarakat semakin mengenal PKS sebagai partai yang reformis, komitmen mengusung perubahan.

Menajemen konflik adalah cara efektif sosialisasi PKS untuk lebih mudah

diingat oleh orang lain. Isu-isu yang diangkatpun tepat dengan momen. Sebagai partai baru yang ingin merebut kekuasaan cara pendidikan politik yang dilakukan terhadap masyarakatpun cukup mengena. Dengan membuat konflik seperti itu PKS tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang fantastis untuk meng-iklan diri. PKS yang pada Pemilu 2004 lalu meraih 7,34% suara, tampaknya harus bekerja keras dan memutar otak untuk mencapai target 20%. Apalagi dalam survei LSI terbaru, PKS pada September lalu hanya meraih 6,3%.

Iklan peringatan hari pahlawan yang kontroversi itu menurut Pengamat Politik Eep Saefullah Fatah materinya sudah tepat, "Semua kalangan juga dapat melakukan hal yang sama dengan menampilkan tokoh-tokoh nasional dalam iklan politiknya," (*Inilah.com 30 november 2008*). Dengan maksud bahwa semua pahlawan atau tokoh nasional adalah milik semua anak bangsa, tanpa harus mengklaim satu sama lain sebagai milik organisasi atau komunitas tertentu.

Tapi yang harus diingat oleh partai ini, bahwa manajemen konflik yang dibuat juga akan menjadi *bumerang* simpati dari masyarakat. PKS mesti lebih berhati-hati dalam membuat manuver-menuver politik melalui iklan dan statement.

Kurban Politik

IBADAH Kurban adalah kewajiban bagi personal/*nafsiah* umat Islam yang mampu secara materi. Jatuhnya pada tanggal 10 Zulhijjah tiap tahun. Ibadah Kurban ini diawali ketika Allah SWT memberi perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tercinta bernama Ismail. Ismail adalah anak yang begitu diharapkan kelahirannya oleh Nabi Ibrahim dan istrinya yang sudah beranjak tua.

Doa dan usaha Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan dikabulkan oleh Allah. Ketika Ismail lahir, nabi Ibrahim begitu mencintai dan menyayangi anaknya ini. Hingga Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim bermimpi Allah memberi perintah untuk menyembelih putranya. Mimpi itu sampai terjadi tiga kali. Dan benar ternyata mimpi itu sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Sebagai nabi, Ibrahim paham betul semua perintah dari Sang Khalik wajib dilaksanakan. Tapi sebagai manusia, Ibrahim punya perasaan yang mendalam atas perintah ini. Perintah menyembelih anak, sesuatu yang tidak masuk akal.

Ibrahim adalah manusia pilihan. Manusia terbaik yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Teladan Umat. Karena ketaatan yang dimiliki oleh Ibrahim maka perintah menyembelih anak itu akan dilakukan olehnya. Walaupun amat berat untuk menyampaikan ke Ismail. Ismail adalah anak yang sholeh sebagaimana bapaknya. Ketika lisan Ibrahim menyampaikan perintah ini ke Ismail, jawabannya adalah 'kalau itu perintah Allah harus dilaksanakan ya bapak'. *Subhanallah!*

Perintah penyembelihan itu segera dilaksanakan. Mata Ismail ditutup dengan kain, supaya dia tidak melihat bapaknya. Ibrahim juga tidak berani melihat anaknya karena sedih. Keduanya ikhlas. Keikhlasan itu di ganti Allah dengan seekor domba. Yang disembelih Ibrahim bukanlah Ismail putra tercintanya, tapi domba yang Allah datangkan. Maha Besar Allah! Ismail juga menjadi Nabi dan Rasul setelah Ibrahim meninggal.

Hikmah dari kisah diatas bahwa berkorban itu harus dilaksanakan penuh keikhlasan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Keikhlasan Ibrahim menjadi contoh bagi kita, bahwa berkorban itu bukan karena faktor *riya'*. Kurban bertujuan untuk menjauhkan kita dari sifat ego kebinatangan yang selalu melekat dalam diri manusia. Kerakusan dan ketamakan yang tak terkontrol terhadap dunia. Dalam diri manusia terdapat berhala-berhala duniawi luar biasa yang bergentayangan, yang secara tak sadar telah menjerumuskan kehidupan mereka.

Perintah sembelihlah anakmu kepada Ibrahim. Artinya, sembelihlah segala ego, kerakusan, dan nafsu yang ada di hatimu, yang itu semua dapat menutupi kedekatan dan hubunganmu terhadap Tuhan dan sesama manusia. Tetapi bila itu semua kamu lakukan, maka dapat mendekatkan kamu dengan Tuhan dan dengan rakyatmu.

Kurban; Agenda Politik

Desember akhir tahun 2008, disebut tahun politik. Sejak ditabuh gendrang perang partai politik 9 Juli 2008, semua moment dijadikan ajang kampanye. Kampanye partai politik, kampanye Calon Legislatif (Caleg) dan kampanye Calon Presiden (Capres). Tidak hanya moment tapi semua ruang yang ada dimanfaatkan oleh pemburu kekuasaan (*power of*

hunter) itu.

Sepanjang jalan dari kota-kampung pemandangan mata kita dirusak oleh baliho/bilboard/spanduk/stiker orang-orang yang minta belas kasih untuk dipilih. Taman kota berubah menjadi taman bendera. Rumah-rumah dikampung di cat berdasarkan warna partai. Bahkan parahnya ada kubah masjid dikampung penulis yang diganti catnya sesuai selera pengurus yang *notabene* adalah Caleg dan pengurus partai tertentu. Setelah kubahnya berganti warna, disepanjang jalan ke mesjid itu dipasang pula bendera-bendera partainya. Harus beginikah membodohi rakyat?

Tujuan partai politik adalah mencapai puncak kekuasaan. Untuk sampai pada tujuan itu partai politik dan elitnya harus mendekati rakyat. Moment kurban yang jatuh tanggal 8 Desember 2008 juga menjadi sarana mencari simpati terhadap rakyat oleh partai dan elit politik. Apalagi Pemilihan Umum (Pemilu) semakin dekat. Maka tidak heran elit-elit politik yang *sok* paham agama memanfaatkan kurban sebagai sarana kampanye.

Jumlah peserta kurban tahun seperti ini meningkat, karena ada sapi kurban atas nama partai A, partai B, partai P, partai G dan lain sebagainya. Kemudian ada Si Fulan dari Caleg partai ini berkorban 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Si Fulanah Caleg perempuan dari partai itu berkorban 1 ekor sapi. Juga ada Si Badu dari Calon DPD daerah ini berkorban dibeberapa kabupaten/kota. Begitulah cara kampanye kurban politik itu.

Makna lain dari berkorban adalah sebagai bentuk solidaritas sosial keumatan. Tujuan kurban adalah agar orang miskin jangan merasa rendah dari kelas orang kaya. Agar jangan terjadi pemisah atau *gap* yang besar. Sehingga untuk

mendekatkan antara yang kaya dengan yang miskin dilakukan dengan ibadah kurban.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh partai politik dan elitnya, untuk mengambil simpati rakyat. Atas nama *wong cilik*, buruh, pemulung dan lain sebagainya kita harus berkorban kata mereka. Cara membagikan daging kurbannya juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Dalam kantong plastik yang berisi daging kurban itu juga terdapat kartu nama Caleg tertentu, Si Fulan Caleg nomor urut ini dan Si Fulanah nomor urut itu.

Ketika moment Hari Raya Kurban ini sudah dimasuki kepentingan politik masihkah ia bertujuan menyembelih ego, kerakusan, ketamakan dan berhala yang ada dalam diri manusia? Masihkah ada keikhlasan ketika daging kurban yang dibagikan itu disertai dengan kartu nama orang-orang yang ingin berkuasa? Sampaiakah ketaatannya kepada Tuhan atau habis seiring daging itu menjadi kotoran manusia yang memakannya? Atau inikah cara pendidikan politik negara kita yang multi partai ini? *entalah* hanya Tuhan saja yang tahu!

Kesombongan politik dan ekonomi, kecongkakan intelektual atau spiritual, menjadi tak punya arti di hadapan Sang Maha Perkasa, *Allahu Akbar!* Kurban bukanlah sebuah ritual belaka, apalagi menjadi agenda politik atas nama membantu rakyat miskin. Ibadah kurban yang diperintahkan Allah kepada kita merupakan manifestasi salah satu sunatullah, yaitu *the law of detachment* (hukum kemerdekaan dan melepaskan kemelekatan). Kemelekatan diri dari urusan dunia dan berhala-berhala duniawi. Kemudian juga kemerdekaan diri, jiwa, hati, dan roh untuk mentauhidkan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa orang dan kelompok yang berkorban karena kepentingan duniawi semata.

Sepatu Al Zeidi dan Demokrasi

SEPASANG sepatu Muntader Al Zeidi menjadi perhatian dunia, hampir seluruh media memberitakannya. Sepatu tentu hal biasa saja bagi setiap orang. Tapi sepasang sepatu jika melayang kepada orang yang paling ditakuti dunia tentu akan menjadi luar biasa. Sepatu itulah milik Muntader Al Zeidi, seorang koresponden televisi lokal Irak bernama Al-Bagdadia. Sepasang sepatunya dilemparkan ke Presiden Amerika Serikat George W Bush sebagai sebuah bentuk kebencian dan kemuakkan.

Peristiwa ini terjadi ketika Bush mengadakan kunjungan terakhirnya sebagai presiden Amerika Serikat ke Irak. Kejadian memalukan itu terjadi saat jumpa pers Bush dengan wartawan Minggu (14/12). Dalam jumpa pers tersebut seorang wartawan bertanya apakah Bush datang ke Irak untuk merayakan kemenangan? Bush pun mengatakan, *“Tidak, saya mempertimbangkan itu sebagai satu langkah penting menuju Iraq yang mendukung dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri, dan mempertahankan dirinya sendiri. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Perang belum usai,”* ujar presiden yang 37 hari lagi lengser dan digantikan Barack Obama pada 20 Januari 2009 (Jawa Pos, 16 Desember 2008).

Kata-kata perang belum usai membuat Muntader Al Zeidi berang. Bentuk kemarahannya disampaikan dengan cara melemparkan kedua sepatunya kepada Bush sambil meneriakkan *“ini hadiah dari rakyat Irak. Ini ciuman*

perpisahan, kamu anjing,”. Sepatu pertama tidak mengenai Bush. Al Zeidi melemparkan sepatu kedua dengan teriakan, “ini untuk para janda, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang tewas terbunuh di Irak,”.

Bagi orang Arab, sepatu adalah bentuk penghinaan paling buruk. Kata-kata yang diteriakkan oleh Al Zeidi ketika melemparkan sepatu punya makna yang paling dalam. Bahwa penggulingan Saddam Husein oleh Amerika Serikat tidak membuat rakyat Irak keluar dari krisis. Pasca dihukum matinya Saddam Husein rakyat Irak semakin sengsara. Apalagi 3 tahun terakhir Bush terus menambah jumlahnya ke Irak.

Robert Fisk juga dalam bukunya *Pity the Nation: Lebanon at War* dan *The Great War for Civilization: the Conquest of the Middle East (2005)*, mengatakan bahwa perang sipil yang terjadi berkepanjangan di Irak antara Sunni dan Syiah diskenarionakan oleh Amerika Serikat. Akibat perang ini terjadi kelaparan di negeri “seribu satu malam” itu, pembunuhan massal, krisis listrik, fasilitas pendidikan hancur, wanita-wanita Irak diperkosa oleh tentara Amerika Serikat, para tokoh Islam ditangkap dan disiksa tidak manusiawi dalam penjara, anak-anak tumbuh dalam kondisi yang mencekam.

Ben Griffin seorang anggota tim anti terorisme dari pasukan elit Inggris *Special Air Service (SAS)*, mundur dari dinas kemiliteran Juni 2005 dengan alasan bahwa perang Irak adalah ilegal dan tidak bermoral. Dalam wawancara singkatnya dengan surat kabar Inggris *Telegraph*, Griffin menegaskan bahwa dirinya bergabung dengan kemiliteran Inggris bukan untuk melakukan kebijakan luar negeri AS. Griffin juga mengatakan, perang di Irak adalah sebuah agresi dan secara moral adalah sebuah kesalahan. Perang Irak membuat situasi

di Timur Tengah menjadi tidak stabil. Griffin meyakini bahwa cara tentara AS memandang rakyat Irak sama dengan cara pandang Nazi terhadap orang Rusia, Yahudi dan orang-orang Eropa Timur pada Perang Dunia II.

Peristiwa melayangnya sepatu Al Zeidi kepada George W Bush tentu tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukannya terhadap rakyat Irak. Dalam negara demokrasi aksi protes adalah sebuah proses yang mesti di hargai. Sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan Al Zeidi tersebut. Kalau dengan kejadian itu Bush akan melakukan tindakan yang lebih brutal setelahnya, maka terlalu kerdil jiwanya. Amerika Serikat yang mengagungkan demokrasi, menjadi tidak berarti.

Wajar selain sebagai wartawan Al zeidi begitu muak dengan Bush karena ia dikenal sebagai orang Irak yang memiliki kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah airnya dan dikenal keras mengkritik invasi yang kemudian menjadi penjajahan negara Amerika Serikat di Irak. Pantas rakyat Irak menyebut Al Zeidi sebagai pahlawan karena ia berani melawan langsung otak yang membuat rakyatnya sengsara. Saya pikir orang-orang yang ada dibelahan dunia ini akan banyak memberikan apresiasi kepada Al Zeidi. Salut!

Demokrasi menurut Larry Diamond dalam bukunya *Developing Democracy Toward Consolidation (1992)* harus dipandang sebagai fenomena yang berkelanjutan sehingga masa depan demokrasi adalah tiada henti. Diamond berasumsi bahwa demokrasi diyakini sebagai pilihan terbaik dan tak ada pilihan sistem pemerintahan lain yang lebih baik.

Konsolidasi demokrasi diartikan sebagai *"stability and persistence of democracy"*.

Konsolidasi diharapkan bisa merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan

pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Kalau demokrasi ingin dipertahankan sebagai sebuah sistem terbaik Bush tidak boleh dendam. Bush tidak boleh memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Al Zeidi dan semakin menyengsarakan rakyat Irak. Saya pikir perang Irak sudah harus diakhiri. Bisakah sepatu Al Zeidi mengusir tentara Irak?

Caleg-caleg Latah

NGAKU-NYA politisi tapi tak tahu aturan. *Ngaku*-nya Caleg tapi rusak lingkungan. *Ngaku*-nya orang hebat tapi mengganggu kenyamanan orang lain. *Ngaku*-nya perjuangankan rakyat tapi rusak pemandangan kota dan kampung. Merekalah Caleg-Caleg latah yang muncul entah dari mana. Berharap simpati, tapi di dapat antipati. Tak peduli.

Pemilu semakin dekat. Rakyat semakin tak simpati. Bahkan tak mau tahu. Munculnya politisi-politisi karbitan tak lebih dari sekedar perusak pemandangan. Betapa tidak, di kota dan di kampung hampir tak ada pohon yang tak “dipanjat” oleh foto-foto Caleg. Hampir tak ada pohon yang tak dipaku untuk mengibarkan bendera partai. Kalau pohon bisa bicara, tentu *iya* akan menangis kesakitan. Si Caleg latah begitu kejam.

Di persimpangan jalan di kota-kota, baliho-baliho liar berdiri. Banyak tidak pada tempatnya, ilegal tanpa bayar pajak. Caleg-Caleg latah sengaja membuatkan wadah baru untuk memajang fotonya di sana. Hampir setiap hari ada saja wajah baru yang muncul. Alam juga muak melihatnya, hujan badai datang menumbangkan baliho Si Caleg latah tersebut. Belum bertempur baliho sudah *roboh*.

Para Caleg semakin latah. Pergantian tahun dijadikan momen mencetak kalender sebanyak-banyaknya. Penyebarannya pun tak tahu aturan. Kelender Caleg latah itupun ditemukan di mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, kampus-kampus dan bahkan instansi-instansi pemerintah. Belum jadi anggota dewan sudah kampanye dengan segala cara, apalagi

nanti kalau duduk *entah* apa jadinya.

Semua kesempatan dipolitisir Si Caleg latah. Kalau dia *buya*, ceramah dan khutbah di mesjid ajang kampanyenya. Kalau dia guru swasta, anak murid digarapnya, sering titip salam untuk orang tua Si murid. Kalau dia mantan lurah, dia sebut-sebut pula keberhasilannya dulu waktu menjabat. Kalau dia *datuak*, kaum *sapasukuan* di intimidasinya. Kalau dia *urang sumando*, berjanji bangun kampung si istrinya. Yang mau maju kedua kali, mengklaim pembangunan selama ini karena perjuangannya. Yang banyak uang pasang iklan di koran dan televisi. Yang pengusaha, baliho besar sudah *dibooking* diseluruh penjuru kota.

Pertarungan politik Si Caleg latah akan semakin *gila* pasca di tetapkan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Lima bulan yang lalu Si Caleg latah agak malas-malasan kampanye, karena kecil harapan berdasar nomor urut. Tapi pasca ditetapkan suara terbanyak peluang menuju kursi terhormat semua Caleg menjadi sama. Nomor satu dan nomor sepatu aura parlemen semakin terasa. *Angok mereka pun badampung-dampung.*

Dikabulkannya *judicial review* Mohammad Sholeh seorang Caleg dari Jawa Timur oleh MK dengan tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 bisa lebih demokratis. Harapannya kedepan penghuni parlemen tidak hanya pengurus inti dan segolongan elit partai saja. Tapi yakinkankah kita sistem suara terbanyak akan menjadi solusi politik kedepan? Kalau seorang *datuak* yang tidak tahu menahu tentang fungsi lembaga legislatif dipilih oleh kaumnya yang banyak dan menang, bisakah dia menjadi legislator? Kalau seorang preman berpengaruh di kawasan tertentu dipinang partai menjadi Caleg dan menang, yakinkah kita ia berkapasitas? Mampukah seorang artis yang

berbekal popularitas dan ketenaran semata menjadi politisi sesungguhnya di parlemen kita kedepan? Sistem multi partai Pemilu, nyaris tidak memperhatikan rekrutmen dan kaderisasi di tubuh partai politik. Siapa yang mau jadi Caleg diakomodir tanpa pertimbangan berarti. Posisi partai politik sebagai wadah pendidikan politik semakin melemah. Rakyat dibuat bingung olehnya.

Sistem suara terbanyak menjadi ruang terbuka politik uang (*money politic*). Selama proses kampanye para kandidat Si Caleg latah akan dipaksa mengurus uangnya untuk berbagai keperluan. Betapa tidak budaya politik parokial masih dominan di negara ini. Rakyat akan mau memilih Caleg yang banyak memberikan uang untuk diri dan kelompoknya. Wajar setelah Pemilu usai korupsi merajalela di gedung terhormat itu. Praktik korupsi muncul akibat biaya kandidasi yang lebih mahal saat proses menuju kursi parlemen. Dalam berbagai kasus di Amerika Latin misalnya, penetapan sistem suara terbanyak berbanding lurus dengan peningkatan korupsi anggota parlemen akibat persaingan antar partai politik dan internal partai politik yang tidak sehat.

Masihkah ada ruang perbaikan tatanan politik kita kedepan? Secara sistem sudah tidak ada yang salah. Ruang demokrasi telah dibuka selebar-lebarnya. Persoalannya ada pada politisi-politisi atau Caleg-Caleg latah merusak suasana. Politik tidaklah salah, tapi pergeseran nilai-nilainya dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Merasa mampu mengurus negara padahal tidak kalau dipercaya. Janji-janji mungkir layaknya orang munafik.

Politik Kangkung Darat

MUSTAHIL kangkung darat berbuah sawit. Atau sayur bayam berbuah coklat. Bahkan amat tidak mungkin toge bergetah karet. Mana mungkin bercocok tanam hari ini besok langsung panen.

Konsekuensi diterapkannya sistem multi partai adalah munculnya politisi dadakan. Orang dengat latar belakang, kapasitas, kapabilitas dan pendidikan tidak memadai ramai-ramai menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Pemilu dijadikan pertarungan mengubah nasib ke arah yang lebih baik.

Banyaknya partai peserta Pemilu, tidak lagi memperhatikan aspek kualitas orang-orang yang diproyeksikan menjadi wakil rakyat. Sebagian besar partai politik menempatkan orang sembarangan sebagai Caleg-nya. Apalagi Caleg perempuan yang mereka usung, benar-benar hanya memenuhi syarat 30 persen kouta. Caleg perempuan masih tetap dijadikan pelengkap politik dominasi kaum pria. Apalagi setelah keputusan suara terbanyak, ruang perempuan menuju parlemen juga semakin sempit.

Gagalnya kaderisasi partai politik, menambah suram wajah perpolitikan di Indonesia. Padahal ini era reformasi. Harapan untuk lebih baik sepertinya jauh panggang daripada api. Cita-cita reformasi yang diusung sejak tumbangnya rezim orde baru, tak banyak yang peduli. Orang asyik dengan kebebasan berdemokrasi untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Betapa tidak lahirnya banyak partai politik (multi partai) dan ramai-ramai ikut Pemilu tidak lain

adalah untuk mencari kepuasan sesat. Mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal banyak bohongnya!

Kangkung darat tak mungkin berbuah sawit. Ini sebuah analagi pertanian politik untuk mengkritik gejala caleg latah ditengah drama demokrasi prosedural yang kita tonton hari ini. Jika petani menanam sawit maka ia harus menunggu 4-5 tahun untuk panen. Sawit adalah tanaman tua dengan harga mahal. Sama dengan karet dan kakau.

Sebagai komoditi ekspor sawit butuh perawatan dengan berbagai macam pupuk. Sehingga petani sawit menanamkan banyak modal untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari tanaman tersebut. Sawit tidak hanya sekali panen. Kalau sudah panen, petani sawit akan hidup dengan taraf ekonomi yang amat memadai.

Menanam investasi politik ibarat berkebun sawit. Apabila seorang elit politik lokal maupun nasional ingin mendapat dukungan politik dari rakyat, mestinya berbuat riil terhadap rakyat dalam kurun waktu yang lama. Rakyat kita sekarang sudah mulai meleak politik. Tingkat kepedulian dan kekritisian politik berkembang sejak era reformasi beberapa tahun yang lalu.

Sumatera Barat Intellectual Society (SIS) sebuah lembaga kajian intelektual, mengungkap fakta tentang pendapat masyarakat kota Padang terhadap banyaknya Caleg yang bertarung pada Pemilu 2009. Poling dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 55 orang secara acak dan tersebar di berbagai wilayah. Poling ini dilakukan secara spontan.

Salah satu pertanyaannya, banyaknya gambar Caleg yang muncul dalam berbagai versi disepanjang fasilitas umum, apakah dikenal oleh masyarakat? Sebanyak 7 persen

responden mengenal sebagian besar, 35 persen mengenal sebagian kecil dan 38 persen tidak kenal sama sekali.

Bahkan banyak responden yang mengatakan, “*untuak apo inyo pampang-pampang bana gambar, inyo ndak amuah tahu jo awak, awak pun ndak akan amuah tahu jo inyo*” (untuk apa mereka memajang gambar, mereka tidak mau tahu dengan kita, kitapun tidak akan mau tahu dengan mereka).

Invesatasi politik prematur ibarat menanam kangkung darat. Para Caleg latah yang ikut mengundi nasib dalam “judi politik” ini muncul secara tiba-tiba. Dalam waktu lima bulan melakukan pengenalan diri terhadap masyarakat. Tak tanggung-tanggung pula *cost* politik yang dihabiskan untuk membuat baliho. Layaknya seorang pahlawan rakyat yang siap membela kepentingannya. Jargon-jargon murahanpun dijual. Tapi rakyat tidak butuh gambar dengan rekayasa *photoshop* yang menipu. Janji-janji manis ibarat menjual kecap.

Bahkan untuk menanam kangkungpun harus dengan ilmu. Fenomena munculnya politisi dadakan menjelang Pemilu ini, benar-benar banyak yang tak punya ilmu. Untuk aturan memasang baliho saja mereka tak mengerti. Berharap simpati yang didapat hanyalah antipati. Betapa banyak media kampanye Caleg yang akhirnya merusak pemandangan kota.

Rakyat tidak akan memilih Caleg prematur, karbitan atau dadakan. Tapi akan memilih siapa yang telah berbuat untuk mereka. Invetasi politik harus ditanam dalam jangka waktu yang lama terhadap konstituen. Tak akan mungkin kangkung darat berbuah sawit. Bagi Caleg yang menanam kangkung jangan kecewa atau gila setelah pemilu. Silahkan introspeksi diri anda!

Arogansi Oknum Pejabat

(Surat Terbuka untuk Menteri Pemuda dan Olahraga)

TULISAN ini agar menjadi pelajaran dalam kehidupan berbangsa. Tentang etika dan sikap seseorang yang pada dirinya melekat jabatan negara. Kejadiannya di kampus yang *notabene*-nya adalah tempat pembentukan kompetensi dan karakter generasi.

Bukan tanpa alasan saya diundang menghadiri acara pembukaan Musyawarah Forum Silaturahmi Dakwah Kampus Daerah (FSLDKD) se-Sumatera Barat di Politeknik Pertanian Universitas Andalas di Tanjung Pati Payakumbuh, Kamis, 4 September 2014.

Bersama pengurus FSLDKD Sumbar ini saya dari Dompot Dhuafa Singgalang menggagas sebuah edukasi yang kami sebut ‘Gerakan Sedekah Mingguan’. Ide ini lahir dari kondisi banyaknya mahasiswa kurang mampu selama ini mengajukan bantuan pendidikan ke Dompot Dhuafa Singgalang. Selain itu menyikapi keterbatasan pendanaan kegiatan keislaman di kampus yang dijalankan oleh mahasiswa.

Gerakan ‘Sedekah Mingguan’ ini dilakukan dalam bentuk mahasiswa bersedekah Rp5000 setiap hari Jumat secara bersama. Ada pengelola yang mereka sepakati di masing-masing kampus. Untuk tahap awal gerakan ini menargetkan diikuti oleh 1000 orang mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat. Sehingga sebulan bisa mengumpulkan dana Rp20.000.000. Setahunnya jika gerakan ini konsisten mencapai Rp240.000.000. Begini kami mengajarkan

mahasiswa, agar mampu peduli sesama mereka. 'Gerakan Sedekah Mingguan' ini di-launching pada hari itu bersama dengan Asisten III Pemko Payakumbuh, Kabag Kesra Pemko Payakumbuh, Pembina LDK dan Direktur Politani Unand. Mereka men-support gerakan sederhana ini.

Setelah rangkaian acara pembukaan selesai sekitar jam 10.45 Wib datang ulama dan sesepuh Sumatera Barat, Buya Masoed Abidin. Beliau akan mengisi seminar untuk mahasiswa. Siapa yang tak kenal Buya. Dalam usia memasuki 80 tahun beliau sangat bersemangat datang dari Padang untuk memberikan ilmu dan nasehat kepada mahasiswa. Sejumlah pejabat yang menghadiri acara pembukaan kegiatan pamitan kepada Buya. Sehingga tinggallah saya dan istri, Buya, panitia dan seratusan peserta dalam ruangan itu. Saya menunggu giliran presentasi sekitar 15 menit tentang 'Gerakan Sedekah Mingguan' sekaligus mendampingi Buya. Buya Masoed Abidin merupakan penasehat di Dompot Dhuafa Singgalang. Karena terjadi kemoloran waktu, panitia mengklarifikasi ke saya presentasi diundur setelah zuhur.

Sekitar jam 11.00 wib acara seminar langsung dimulai. Harusnya pembicara ada dua orang; Buya Masoed abidin dan Adib Alfikri (Ketua KNPI Sumbar). Namun Adib Alfikri tidak hadir. Buya Masoed memberikan materi seminar sekitar 30 menit. Beliau menjelaskan hubungan antara wahyu Allah, iman, ibadah dan karakter umat kepada mahasiswa. Ada 14 poin nasehat yang akan disampaikan beliau. Namun baru dipoin keempat, panitia menyampaikan waktu bicara Buya sudah habis. Moderator seminar melanjutkan untuk panitia bertanya. Satu orang bertanya kepada Buya.

Namun sebelum menanggapi, moderator menunda Buya menjawab pertanyaan tersebut. Si moderator menyebutkan

telah hadir pembicara dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namanya "IH". Langsung dari Jakarta. Agak lama menunggu, kemudian pembicara ini masuk.

Ketika microphone diberikan kepada beliau, ia langsung marah-marah kepada panitia di hadapan peserta, saya dan Buya Masoed Abidin. *"Panitia kurang ajar, kalau angkatkan acara dengan benar dong. Saya ini pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Datang ke sini. Saya diminta bicara dari jam 10, baru dikasih waktu sekarang. Sudah jam setengah dua belas ini. Saya ini harus bicara dua jam dalam seminar ini. Hari ini saya harusnya ditemui sejumlah gubernur, termasuk Irwan Prayitno, gubernur Sumbar. Anda pikir baru sekali ini saya ke Sumbar. Kurang ajar...."* Ia tampak begitu emosi. Di depan peserta saat bicara, dua kali telponnya berbunyi dan ia pun mengangkatnya dengan cara yang kurang baik menurut saya.

Buya yang masih duduk di kursi pembicara, senyum-senyum ke saya. Moderator sudah mulai cemas. Peserta terdiam. Entah apa yang mereka pikirkan. Saya merasa tak nyaman, tapi tetap duduk di kursi tamu paling depan peserta. Saya meng-*google* di gadget, siapa sebenarnya orang ini. Saya temukan jawaban, ia adalah Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Kemenegpora. (<http://bantenraya.com/banten-raya/serang/5885-kemenepora-gelar-sosialisasi-iptek->. 24 Mei 2014)

Saya kian tak nyaman, tapi juga tak keluar dari ruangan itu. Walau ingin meninggalkan seminar, tapi saya segan sama Buya dan panitia. Si pejabat itu tetap memaki-maki panitia. Beberapa kalimat dari lisannya yang saya ingat. *"Saya ini pernah dibina oleh Yahudi. Saya waktu mahasiswa pernah dipenjara sembilan kali. Sekarang saya masih aktif di sebuah organisasi dunia, pengurusnya hanya 4 orang. Tiga orang dari*

Yahudi dan tambah saya. Kami bisa menggulingkan presiden di negara lain.... Sekarang saya sedang memfitnah ketuanya, agar saya bisa jadi ketua. Ha ha ha... Katanya kalian mau hadirkan gubernur ke sini, tapi nyatanya tak ada... Saya bisa telpon gubernur kalian sekarang. Saya telpon si Adib Ketua KNPI, katanya tak tahu dia acara ini...Maaf Pak saya marah sama mereka". Kalimat terakhir ia tujukan ke Buya Masoed. Hampir 30 menit ia bicara. Buya Masoed masih tetap di kursi pembicara.

Ia menghadap ke Buya Masoed, dan bicara *"kalau Bapak mau duluan silahkan saja. Saya mau bicara di sini sampai jam 1. Ini baru jatah saya 15 menit. Bicara apa saya waktu segitu".* Padahal ia sudah bicara sekitar 30 menit. Tak tahan akhirnya saya mengangkat tangan minta izin bicara pada moderator. Saya mengingatkan, bahwa sebaiknya sebelum diskusi dengan Ibnu Hasan, dituntaskan dulu pertanyaan ke Buya Masoed. Saya bilang juga ke "IH", tolong hargai Buya. *"Beliau ini sesepuh dan ulama kami di Sumatera Barat, datang ke sini untuk memberikan ilmu. Beliau datang dari Padang untuk menemui mahasiswa. Tadi sebelum bapak masuk, ada pertanyaan kepada Buya dan belum beliau jawab. Tergantung karena bapak langsung bicara. Tolong dituntaskan dulu ini, mungkin Buya juga ada agenda lain".*

Ketika saya sampaikan begitu, dia emosi kepada saya dan menjawab, *"Bapak mau juga bicara, silahkan ini mic-nya..."* sambil ia berikan ke tangan saya. Ia langsung keluar, kemudian masuk lagi sambil menggerutu. Moderator memberikan kesempatan kepada Buya sesaat untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Terakhir Buya berpesan kepada panitia. *"Sebagai ilmu untuk ananda semua, tolong diprint makalah Buya sejumlah 14 halaman dan dibagikan kepada peserta. Buya*

buatkan itu dua hari lamanya, Buya datang menemui ananda juga baru pulang dari Malaysia". Setelah itu saya, istri dan Buya pamit meninggalkan ruangan seminar.

Di luar ruangan saya bertanya pada panitia apa yang terjadi. Dari penjelasan panitia, sejak jam 10.00 wib pejabat kementerian itu sudah memarah-marahi panitia karena terjadi kemoloran waktu di acara pembukaan. Pengakuan panitia mereka sudah maksimal menyiapkan kegiatan. Namun pejabat dari pihak Pemko juga terlambat datang membuka acara tersebut. Ke saya dan Buya mahasiswa berjanji akan belajar dari masalah itu. Mereka minta maaf ke saya dan Buya.

Saya mengingatkan para pejabat negara agar jangan arogan kepada rakyat. Kalau ada sesuatu yang salah dengan orang lain sampaikanlah dengan cara yang baik. Anda harus tahu sedang dimana bicara dan bersama siapa. Anda oknum pejabat tapi berkata-kata layaknya orang tak terdidik. Pantas banyak generasi kita kurang ajar, karena anda memakinya dengan kata 'kurang ajar'.

Apa pentingnya anda menyebut diri sebagai mantan binaan Yahudi? Kemudian mempertontonkan tentang sebuah kewenangan dan kekuasaan saat emosi. Apa yang disampaikan saudara "IH" mungkin saja tujuannya baik. Ada pesan yang ia sampaikan, tapi caranya tak sesuai norma dan kearifan lokal.

Atas nama masyarakat Sumatera Barat saya meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo untuk memberikan sanksi lisan maupun tertulis kepada anak buahnya "IH". Kemudian meminta saudara "IH" agar mengklarifikasi maksud ucapan-ucapan dan makian yang disampaikannya dengan sangat emosional di acara itu. Juga meminta yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Minangkabau, atas perkataan yang tidak pantas

kepada anak kemenakan kita di kampus tersebut.

Ini menjadi catatan juga bagi presiden terpilih agar memperhatikan penempatan pejabat di berbagai kementerian ke depan. Pelajaran bagi semua kepala daerah. Mari kita sudahi kebiasaan buruk. Kompetensi saja tak cukup sebagai dasar penempatan pejabat. Karakter juga penting agar tak semena-mena kepada rakyat.

Membaca Baliho Gubernur

“Ayo! Generasi Muda Lakukan Kegiatan Positif” Raih Prestasi Jauhi Narkoba! Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc, Gubernur Sumbar/Pembina Granat Sumbar (Gerakan Anti Narkoba). IPe Community.

TERTULIS pesan di baliho dengan *endorser*-nya Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Foto Irwan Prayitno lebih dominan di baliho itu. Ia berpose sambil memegang *stick drum*, beladiri dan dengan baju serta helm *motocross*. Pose berbeda itu timbal balik. Beberapa hari ini baliho bando itu terpampang di sejumlah daerah kota Padang.

Secara zahir pesan itu sangat bermakna buat kita, khususnya generasi muda. Gubernur mengimbau agar generasi mengukir prestasi, bukan terjebak narkoba. Ajakan seorang pemimpin, layaknya seperti nasehat seorang ayah pada anaknya. Narkotik dan obat/bahan berbahaya (narkoba) kian hari mengancam kita. Sasaran utamanya adalah generasi muda.

Kantor PBB untuk masalah kriminal dan obatan-obatan terlarang tahun 2012 meluncurkan laporan tahunan konsumsi narkoba. Lembaga itu mencatat 5 persen dari total populasi dunia pernah mencoba narkoba. Saat ini ada sekitar 27 juta orang yang kecanduan dan mengalami masalah soal penggunaan narkoba.

Indonesia juga tak lepas dari incaran sindikat narkoba internasional. Penedar narkoba lomba masuk ke tanah

air, karena dinilai sebagai lahan subur barang haram itu. Dulu sebagai negara transit bagi sindikat jaringan narkoba internasional sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Namun belakangan status Indonesia naik menjadi negara produsen narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kerugian yang ditimbulkan akibat peredaran narkoba pada 2008 mencapai Rp32,5 triliun, 2009 Rp37 triliun, 2010 Rp41,24 triliun, 2011 Rp46 triliun, 2012 Rp51,29 triliun dan 2013 Rp57 triliun. Angka itu termasuk kerugian biaya individual dan biaya sosial. Melihat *trend* angka, tiap tahunnya terjadi peningkatan. Uang Rp57 triliun itu setara 15 kali APBD Sumbar 2014. APBD Sumbar 2014 hanya Rp3,7 triliun.

Mengejutkan lagi, berdasarkan data BNN tahun 2013 sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan!

Dalam rapat koordinasi BNN Pusat dengan BNN Payakumbuh tahun 2012 lalu juga terungkap data. Sumatera Barat menduduki tingkat 21 penyalahgunaan narkoba nasional. Tidak kurang dari 63 ribu warga Sumatera Barat tercatat sebagai pecandu narkoba. Sejak 2012, BNNP Sumbar telah mengirim sekitar 50 orang untuk menjalani rehabilitasi ke Panti Rehab Narkoba di Lido, Jawa Barat.

Bisa saja kondisi ini yang melatarbelakangi *campaign* "Jauhi Narkoba!" harus disampaikan oleh Gubernur Sumbar. Pilihan kalimat yang sangat tepat. Visual foto memegang *stick drum*, beladiri dan baju *motocross* juga penuh makna. Prestasi bisa diukir di bidang seni atau olah raga. Kita bangga punya gubernur yang multitalenta. *Ninik mamak, alim ulama* dan

cadiak pandai melekat pada sosoknya. Mahir main *drum*, jago beladiri dan ganas *trabas* dengan *motocross* adalah kemampuan bersamaan yang dimilikinya. Belum lagi pintar bernyanyi, hingga keluaran album dan sudah diputar di berbagai pengajian dinas. Prestasi seperti itu pantas ditiru generasi muda.

Efektifkah imbauan melalui baliho tersebut? Tergantung sudut pandang kita masing-masing. Bisa ia atau tidak. Tujuan imbauannya jelas. Fotonya juga jelas. Apalagi tampilan Pak Gubernur juga berbeda. Gaul seperti anak muda. Selama ini siapa yang tak kenal Irwan Prayitno. Tentu saja dengan *style* seperti itu ia semakin terkenal.

Namun efisienkah baliho itu? Kalau imbauan itu dibayar, dari sisi anggaran tentu tidak efisien. Saya *iseng* mencari tahu berapa harga sewa baliho ke beberapa orang yang biasa “bergelut” dengan itu. Harganya bervariasi, tergantung lokasi dan momentum. Informasi yang saya dapat satu titik timbal balik paling murah per bulan bisa dibandrol Rp20 juta, ada juga yang Rp30 juta, Rp60 juta bahkan sampai Rp80 juta. Harga pasarannya betul tak ada. Tergantung kesepakatan antara *vendor* dan konsumen saja.

Beberapa hari ini saya memutari kota Padang, sudah lebih lima lokasi baliho itu terlihat. Kabarnya di luar Padang juga bertebaran. Kalau memang itu dibayar tentu banyak uangnya. Tergantung titiknya dimana.

Maaf, sekali lagi kalau memang baliho itu dibayar, terlalu menghamburkan uang. Kita tak tahu siapa yang bayar. Membayar sendiri, biaya negara atau dibayarkan sponsor tetap saja mahal. Sekarang mau *campaign* apapun bisa murah melalui sosial media. Hanya beli paket internetnya seratus ribuan perbulan. Ada *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram* dan

lain-lain. Contohnya Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Transfer ide atau menjaring aspirasi warga ia lakukan di *twitter*. Kini era teknologi via *gadget*, orang *melek* di sana. Apalagi imbauan Pak Gubernur tadi untuk generasi muda.

Anggaran yang dikeluarkan untuk itu harusnya bisa melaksanakan berbagai program edukasi anti narkoba. Mau seminar, *workshop* atau *outbond*. Men-*support* even kreatif anak muda agar mereka bisa produktif. Bisa juga membina pemusik jalanan yang rentan narkoba. Membuat pustaka remaja atau lainnya. Kalau digunakan untuk kegiatan sosial, sudah bisa membantu banyak orang miskin, yatim dan piatu.

Mengapa Gubernur Sumbar akhir-akhir ini banyak di-*endors* melalui baliho? Belum lagi baliho atas nama program pemerintah. Berfoto dengan ikan, terong, sayur, anak sekolah, bersama istri, menerima penghargaan dan lain sebagainya. Menjelang Pileg lalu Irwan Prayitno juga disoroti terkait baliho politik yang tersebar hampir di seluruh daerah Sumatera Barat. Pesan tersirat apa yang hendak disampaikan?

Semoga saja fasilitas baliho-baliho itu bayarnya murah atau gratis. Tetap diisi daripada kosong. Apalagi berisi imbauan dan info layanan masyarakat. Kita berpikir positif sajalah. Namun ke depan perlu dipikirkan aturan tentang informasi layanan masyarakat yang menjadikan kepala daerah sebagai bintang iklannya.

Generasi Bersumbu Pendek

ISTILAH “sumbu pendek” saya kutip dari seorang sahabat, Ikhwan Wahyudi, wartawan Kantor Berita Antara. Ia menyebut muncul kaum bersumbu pendek menyikapi kedatangan Presiden Turkey, Erdogan, saat berkunjung ke Indonesia tahun 2015. Sejumlah orang melalui sosial media facebook memuji setinggi-tingginya Erdogan.

Ia dianggap pemimpin yang berhasil dan berkharismatik. Lantas dengan asumsi itu, ada orang membully serendah-rendahnya Presiden Indonesia, Jokowi. Bahkan ada di antara mereka yang meminta Erdogan bersedia memimpin Indonesia.

Ikhwan menyebut bahwa salah satu karakter mental terjajah adalah minder dengan bangsa sendiri dan memuja muji sesuatu yang berasal dari luar/asing. Kata Ikhwan dari populasi penduduk, Erdogan baru mampu memimpin 74 juta rakyat Turkey, setara dengan dua propinsi di Indonesia. Jawa Barat dan Jawa Tengah, jika digabung berpenduduk 75 juta jiwa. Padahal menjadi presiden di Indonesia harus mampu memimpin 235 juta penduduk.

Status Ikhwan di wall facebooknya menjadi diskusi yang hangat. Ada juga yang berdebat. Bertahan dengan pendapatnya. Tak ada salahnya. Komentar sahut bersahut. Saya hanya sekali saja berkomentar. Sedap Bang Ikhwan Wahyudi. Itu saja!

“Sumbu pendek” adalah istilah bagi orang mudah emosi atau marah. Hal kecil saja bisa jadi pemicu marah. Bila dia salah penerimaan terhadap apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Padahal belum tentu apa yang dipahaminya itu

sesuai dengan kejadian dan makna sebenarnya.

Menurut Choiron dalam sebuah tulisan di Kompasiana, sebenarnya istilah sumbu biasa digunakan pada petasan atau dinamit. Berapa lama sebuah petasan atau dinamit akan meledak setelah ujung sumbunya disulut, tergantung dari seberapa panjang sumbu petasan hingga mencapai tengah petasan yang akan terbakar dengan cepat dan meledak.

Semakin panjang sumbu, semakin banyak waktu bagi orang untuk berfikir, apakah rambatan api pada sumbu akan dipadamkan atau dibiarkan saja mencapai petasan. Bila sumbu terlalu pendek, tidak ada waktu untuk berfikir dan menyelamatkan diri. Langsung meledak.

Suasana batin kita sebagai warga negara belakangan ini memang sedikit terganggu. Terasa betul dua tahun belakangan ini. Terutama pasca Pilpres tahun 2019. Head to head antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat rakyat terbelah.

Kondisi ini berawal dari mengkristalnya dua kubu elit politik. Pilpres usai, pemerintahan baru sah secara konstitusi. Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden hingga 2024. Waktu berjalan, drama perpecahan elit mencair seiring pragmatisme politik. Dulu berlawan kini berkawan. Dulu tak mendukung, kini berkoalisi. Kapal lewat kiambang bertaut. Begitu istilah melayunya.

Namun tak demikian dengan rakyat. Rakyat masih agak larut dengan keterbelahan. Setidaknya bisa kita lihat di sosial media. Walaupun itu tidak juga bisa menggambarkan keseluruhan kondisi kekinian kita. Tapi representasi anak bangsa Indonesia yang menjadi "penghuni" facebook, twitter, path dan sosmed lainnya, menurut saya masih menyisakan bara politik. Bagi sebagian orang, saya sebut sebagai "generasi

bersumbu pendek”, begitu mudah terpancing terhadap informasi, yang belum tentu kebenarannya.

Terutama isu yang berkaitan dengan kebijakan, statement, atau wacana yang digulirkan pemerintah. Jika ada yang tak setuju maka akan menghujat sejadi-jadinya. Bahkan menghina pribadi pemimpin. Seolah tak ada satupun kebaikan pada diri pemimpin. Semua dianggap salah. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah sikap kritis konstruktif.

Apakah dengan saling membully, fitnah dan menghujat masalah bangsa ini selesai? Tentu tidak. Saat ini yang harus kita lakukan dalam merawat Indonesia dalah berbuat nyata. Bukan berwacana atau menghina. Berusaha untuk cek dan ricek terhadap isu, berpikir positif dan dewasa.

Pemerintah pun diharapkan melahirkan kebijakan yang pro dengan rakyat. Diakui memang, bahwa kurun waktu belakangan ini begitu komplek persoalan yang dihadapi bangsa kita. kehidupan rakyat tidak lebih baik. Sehingga diharapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Responsibilitas penguasa terhadap keadaan rakyat juga harus ditingkatkan. Tidak lagi sibuk dengan kebijakan populer yang bertujuan pencitraan semata.

Korupsi dan Kemiskinan

“**KORUPSI** adalah musuh pertama kemiskinan. Ananda teruslah berjuang di jalan yang lurus”. Demikian pesan pendek dari Parni Hadi (PH) kepada saya. PH adalah pendiri Dompot Dhuafa, dimana saya mengabdikan diri hingga saat ini. Saya memanggilnya Ayahanda.

Setiap momen penting dalam tugas saya atas nama Dompot Dhuafa, saya selalu meminta arahannya. Suatu waktu saya diundang kampus Unand bicara tentang korupsi dan kemiskinan. Saya, aktivis anti korupsi dan seorang profesor ilmu hukum diminta jadi narasumber.

Korupsi menjadi momok mengkhawatirkan bangsa Indonesia sejak zaman orde baru hingga sekarang. Zaman orde baru praktik korupsi berada dipusaran pemerintah pusat saja. Era reformasi yang dianggap menjadi momentum perubahan, korupsi menjadi-jadi. Merata dari pemerintah pusat hingga daerah. Bahkan di tingkat pemerintahan terendah sekalipun; desa, kelurahan atau nagari.

Angka penduduk miskin kita juga cukup tinggi. Per Maret 2021 terhitung 27 juta orang miskin di bangsa yang kaya raya ini. Kemiskinan tersebar di kota dan pedesaan. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Siklusnya adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, agama dan moral.

Bagaimana hubungan antara korupsi dan kemiskinan? Studi literatur oleh Eric Chetwynd, Frances Chetwynd dan Bertram Spector, 2003, dengan judul “Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature”. Korupsi tidak bisa

langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tatakelola pemerintahan dan perekonomian, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan.

Praktik korupsi dalam perekonomian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengakibatkan berkurangnya investasi dari dalam dan luar negeri, berbagai pungutan yang melemahkan usaha, menurunkan kualitas infrastruktur, distorsi harga pasar dan mengurangi pendapatan pajak. Kondisi ini menjadi pelumas kemiskinan.

Lemahnya tatakelola pemerintahan menjadi sarang praktik korupsi. Bobroknya mental birokrat makin memperparah keadaan. Kerugian negara akibat korupsi paling besar di jalur birokrasi. Angkanya mencapai Rp. 26,9 triliun.

Data ICW menyebutkan pada tahun 2015 terdapat 225 terdakwa korupsi dari lingkungan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah. Tingginya angka korupsi di pemerintahan dan lemahnya serapan anggaran berkontribusi meningkatkan kemiskinan. Anggaran yang harusnya beredar di masyarakat, masuk ke rekening oknum pejabat.

Mengapa korupsi tidak lagi menjadi hal yang tabu? Menurut saya ada kekeliruan dalam sistem pendidikan kita yang hanya berorientasi pada kompetensi. Karena menjunjung tinggi kecerdasan intelegensi, kita lupa mendidik moral dan karakter generasi. Faktanya yang terjerat kasus korupsi adalah kaum-kaum terdidik. Pendidikan kompetensi ada batasnya, namun kesempatan paling baik mendidik karakter adalah sepanjang usia yang telah dilalui.

Koalisi Basa-basi

SEPANJANG sejarah koalisi partai politik pada Pemilu-Pilkada di Indonesia hampir dipastikan bersifat pragmatis sesaat. Koalisi untuk sekedar kepentingan memenuhi kelengkapan administrasi. Pada Pilkada, koalisi basa-basi (tidak sungguh-sungguh, red) hanya dipaksakan karena persyaratan ambang batas 20 persen kursi di legislatif dan 25 persen suara sah Pemilu legislatif di suatu daerah.

Lebih parah lagi praktek koalisi kartel. Koalisi kartel merupakan penggabungan beberapa partai politik menjadi pelanggan sesaat karena transaksional atau kebijakan yang menguntungkan. Pemodal mampu memborong partai politik membuat koalisi obesitas, dan menyisakan satu atau dua partai saja untuk lawan.

Kadang, partai politik cenderung jadi komoditas kepentingan individu atau kelompok yang ingin meraih kekuasaan. Sewa kereta atau perahu istilahnya.

Di antara fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen (*political recruitment*). Partai dibentuk dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah menyeleksi calon pemimpin pada jenjang atau posisi tertentu. Kandidat akan dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak.

Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik. Jabatan profesional di bidang birokrasi yang bukan bersifat politik tidak boleh melibatkan partai politik. Partai hanya terlibat dalam pengisian jabatan yang bersifat politik, karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui

prosedur politik juga.

Peran *staffing government*, partai politik mengajukan orang terpilih yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama. Jabatan eksekutif dianggap paling mentereng dalam politik praktis; presiden, gubernur, bupati dan walikota.

Seiring dalam menyiapkan kader untuk jabatan eksekutif ini partai politik menghadapi tantangan. Keterbatasan kader di internal partai yang bisa diajukan sebagai kandidat untuk layak diterima pasar pemilih. Persoalan kapasitas, kapabilitas, elektabilitas dan “isi tas” kandidat dari partai politik itu sendiri.

Partai politik akan melakukan rekrutmen terbuka kepada publik. Siapa saja memiliki peluang yang sama untuk diusung sebagai calon. Mekanisme *fit and proper test*, penyampaian visi misi dan survei menjadi instrumen formalitas yang dijalankan.

Kandidat Pilkada bisa mendaftar di beberapa atau bahkan semua partai politik yang membuka rekrutmen. Seperti pelamar kerja memasukkan lamaran di setiap lowongan pekerjaan.

Bagaimana penentuan akhirnya? Bisa saja yang dipilih kandidat yang mengikuti prosedur, kadang ditetapkan saja calon yang tidak mengikuti mekanisme rekrutmen terbuka. *Ambyar* semua proses rekrutmen yang dibuka sebelumnya.

Partai politik cenderung menjadi organisasi yang bersifat oligarki. Bertindak lantang atas dan untuk kepentingan rakyat, tetap kenyataannya di lapangan justru berjuang hanya untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung menurun.

Tidak banyak partai politik yang bisa maju Pilkada tanpa koalisi di suatu daerah. Persyaratan ambang batas harus

dipenuhi jika mau mengusung calon. Maka koalisi partai politik mulai diinisiasi hingga dideklarasikan. Apa yang menjadi landasan koalisi? Tergantung kepentingan yang bisa diakomodir pada saat itu saja. Terutama kepentingan transaksional, berupa materi jangka pendek, maupun pembagian kue kuasa jangka panjang.

Rekonsiliasi politik tidak matang menciptakan bangunan koalisi yang rapuh. Karena pondasinya bukan narasi dan ideologi yang sama. Tidak juga berdasarkan pertimbangan basis masa atau koalisi vertikal pada Pilpres. Berseberangan pada koalisi Pilpres, berkawan saat pilkada itu hal lazim saja. Tidak ada koalisi permanen dalam tatanan politik kita.

Pada Pilpres sendiri koalisi partai politik sudah dimulai sejak Pemilu 1999. Tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mampu mengalahkan Partai Golkar (PG) yang berkuasa sepanjang Orde Baru. Megawati Ketua PDIP mencalonkan diri sebagai presiden. Muncul koalisi Poros Tengah berlandaskan ideologi agama, terdiri Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gus Dur sebagai kandidat melawan Megawati. Pemilihan oleh anggota MPR yang dipimpin Amien Rais memenangkan Gus Dur.

Kekalahan Megawati diiringi kegaduhan basis konstituennya diberbagai daerah. Untuk meredakan situasi dan menengahi konflik, Megawati dipilih menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur.

Pemilu 2004 Poros Tengah sudah bubar. Pada pemilihan presiden di putaran pertama terdapat lima calon pasangan. Partai Golkar (PG) berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Wiranto-Salahudin Wahid. PDIP bersama Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusung Megawati-

Hasyim Muzadi. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Sarikat Indonesia (PSI) mengusung Amien Rais-Siswono Yudo Husodo. Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pemilu putaran pertama dimenangkan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla. Partai-partai Islam yang tadinya pecah kongsi namun bergabung di kubu capres di putaran kedua. PPP dan PKB merapat ke pasangan Megawati-Hasyim sedangkan PAN dan PKS ke SBY-JK. SBY-JK menjadi pemenang Pemilu 2004.

Pemilu 2009, partai-partai Islam masih berkoalisi mendukung SBY. SBY berpasangan dengan Boediono, partai koalisi berisikan PD, PKS, PAN, PPP dan PKB. Megawati-Prabowo didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Jusuf Kalla-Wiranto didukung oleh PG dan Partai Hanura.

Pemilu dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono. Ia membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Setelah kandidatnya kalah, Partai Golkar merapat ke Presiden SBY. Bahkan tiga kadernya bisa menjadi menteri waktu itu. Sementara PDIP, Gerindra, Hanura memilih di luar pemerintahan.

Pemilu 2014 diikuti dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PG, PPP, PBB, disusul Partai Demokrat sebagai pendukung. Disebut Koalisi Merah Putih. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh koalisi PDIP, Hanura, Partai Nasdem, PKB dan didukung oleh PKPI, disebut

Koalisi Indonesia Hebat.

Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Politik sakti Jokowi mampu membubarkan KMP, hingga PAN, PG dan PPP bergabung ke pemerintahan. Tersisa Gerindra, PKS dan PBB berada di luar.

Pemilu 2019 tahun lalu, Joko Widodo berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo-Ma'ruf Amin diusung oleh PDIP, PG, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PKPI dan didukung oleh PSI, PBB, Perindo, Partai Nanggroe Aceh (PNA). Menamai gabungan partai ini Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, PD dan didukung oleh Partai Berkarya, Partai Idaman dan Partai Aceh (PA). Menyebut koalisinya Adil Makmur.

Pemilu 2019 dimenangkan oleh Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50 %. Setelah kalah, Prabowo Subianto bukan menjadi oposisi, tapi ia dan partainya mendukung pemerintahan Jokowi. Prabowo menjadi pembantu Jokowi di kabinet periode kedua. Prabowo mendapat jatah Menteri Pertahanan, Edy Prabowo kader Gerindra menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan.

PKS yang sangat setia dengan Gerindra dua kali Pemilu ikhlas melepas. PKS *istiqomah* di luar pemerintahan, berani menyebut sebagai oposisi. Prabowo yang membanggakan PKS sebagai sekutu, lebih dari sekedar koalisi, kini ikut menikmati kue kekuasaan. PAN dan PD berada di luar pemerintahan, karena tidak dapat jatah menteri, tapi mendukung kinerja pemerintah.

Perjalanan koalisi partai politik dari Pemilu ke Pemilu, menggambarkan lemahnya sistem *check and balance* tatanan politik Indonesia. Salah satu tujuan politik amandemen UUD 1945 yaitu memperkuat sistem presidensial. Memperkuat

posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar tidak mudah di-*impeach* oleh parlemen, juga tidak harus berkoalisi.

Namun Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan ambang batas dalam mencalonkan presiden (*presidential threshold*), dan memaksa partai untuk berkoalisi. Partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

Syarat *presidential threshold* sudah harus ditinjau kembali, dikurangi ke 5 persen atau dihapus, karena dianggap merusak tatanan demokrasi. Tidak memberikan ruang lebih banyak munculnya kandidat untuk bisa mengikuti Pilpres.

KPU menggelar Pilkada serentak 2020, tepatnya 9 Desember.

kita saksikan seperti apa narasi koalisi partai politik pada Pilkada 2020. Apakah sebagai turunan dari koalisi Pilpres 2019? Atau membangun koalisi baru untuk pemanasan Pilpres 2024? Ataupun hanya koalisi *acakadul* transaksional untuk kepentingan sesaat Pilkada seperti yang sudah-sudah?

Candu Politik

CANDU sejenis tumbuhan berbunga dari jenis *papaveraceae*. Nama biologinya, *papaver somniferum*, artinya “mendorong tidur”. Atau lebih dikenal dengan *opium*. *Opium* merupakan tanaman semusim yang mudah tumbuh di daerah subtropis. Tingginya kira-kira satu meter.

Buahnya mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah dikeringkan, menjadi *opium* mentah, dan siap dikonsumsi. *Opium* menghasilkan berbagai jenis obat, namun berkembang jadi narkotika seperti *heroin* dan *morfin*.

Zaman VOC masuk ke Indonesia, candu adalah komoditas utama yang ingin mereka kuasai. Candu sudah dikenal di daerah Jawa. Barang rebutan oleh Inggris, Denmark dan Belanda. Akhirnya dimonopoli oleh Belanda.

Dikutip dari Wikipedia, pakar candu Henri Louis Charles Te Mechelen tahun 1882, dalam buku *Opium To Java* karya James R.Rush, menerangkan kebiasaan mengisap candu bukan hanya terjadi di tanah Jawa, tetapi juga di sejumlah wilayah koloni Eropa di Asia. Di dalam buku itu disebutkan juga bahwa candu ini didatangkan dari Turki dan Persia.

Dalam ilmu kesehatan *opium* dengan kadar tertentu digunakan sebagai obat. Karena bisa menghilangkan sakit, menjadi bius sesaat sebelum dilakukan operasi. Seorang dokter Inggris, Thomas Sydenham tahun 1680 menulis, “Di antara semua obat-obatan yang disediakan bagi manusia atas perkenan Tuhan, tidak ada yang semanjur dan *seuniversal opium* untuk meringankan penderitaan.”

Dalam pemakaian berlebihan (over dosis) *opium* atau candu akan memabukkan. Bahkan menjadi obat-obatan yang berbahaya. Menyebabkan penggunaanya menjadi ketergantungan. Itulah yang diistilahkan dengan kecanduan atau ketagihan.

Candu istilah yang sering digunakan dalam dunia politik. Candu dalam tanda kutip. Kecenderungan atau ketagihan terhadap dunia politik. Ketagihan bicara politik. Dimana saja orang bicara tentang politik. Di pasar, kampus, *coffee shop*, bahkan tempat ibadah sekalipun.

Perdebatan tentang politik berseliweran di televisi, sosial media dan berita media cetak diwarnai konten politik. Grup-grup WhatsApp isinya tentang politik. Tulisan, artikel dan buku dengan tema politik sangat mudah kita dapatkan.

Semua orang bicara politik, dari elit sampai rakyat biasa. Dari kaum terdidik hingga tidak sekolah. Suami istri di tempat tidur membahas politik. Lintas profesi melek politik. Dokter, insinyur, pilot, guru, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, seniman, buruh, petani, nelayan, pedagang sampai pendeta dan mubaligh di mimbar juga bicara politik.

Pro kontra, dukung mendukung, hingga perdebatan tajam. Beda pendapat soal pilihan politik bisa berdampak buruk terhadap tatanan sosial; perceraian, putusnya pertemanan dan tawuran. Lebih ngeri lagi kalap politik memicu terjadi pembunuhan. Konflik horizontal masyarakat selalu mengancam jika selesai kontestasi Pemilu atau Pilkada.

Orientasi politik adalah kekuasaan. Mempengaruhi dan menguasai kebijakan hajat hidup orang banyak. Di balik kekuasaan terdapat banyak sumberdaya. Keuntungan secara ekonomi, mengendalikan birokrasi, mengatur regulasi, meraih status sosial dan menjunjung nama baik/popularitas.

Kekuasaan menghadapi berbagai tantangan; keadilan dan kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, pelayanan, perumusan aturan yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan dan pertahanan negara dari gangguan.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiarjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sehingga kekuasaan jadi rebutan elit dan partai politik. Seperti VOC yang berlomba memonopoli tumbuhan candu awal menjajah.

Substansi demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang ideal di dunia. Demokrasi harus bekerja untuk rakyat, bukan sebagai artifisial atau prosedural lima tahunan belaka. Pemilu dan Pilkada sebagai saluran untuk mendapatkan legitimasi rakyat.

Pecandu politik selalu menunggu agenda tahunan, baik Pilpres, Pileg atau Pilkada. Pemilihan legislatif paling menarik kita saksikan. Orang berlomba mencalegkan diri merebut kursi dewan. Mabuk politik meluas karena memang peluangnya cukup banyak untuk posisi yang dapat diisi. Dari level dewan kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Persyaratan menjadi calon legislatif juga tidak sulit secara administrasi. Tidak terkait dengan latar belakang profesi atau pendidikan bidang tertentu. Bahkan orang keluar penjara sekalipun masih bisa mencalonkan diri. Pindah partai (lompat pagar) dapat dilakukan dengan mudah. Karena partai harus bisa merekrut kandidat untuk mengisi daftar caleg di semua level.

Bagi pecandu politik yang pernah merasakan nikmatnya kekuasaan legislatif, dibuat mabuk kepayang. Sehingga

akan mengulanginya untuk kesempatan kedua, ketiga atau selanjutnya. Bagi pecandu politik yang belum pernah merasakan kekuasaan ia berharap Pileg ini tiap tahun. Karena akan mencoba lagi peruntungan hingga berhasil. Bagi yang kapok, hanya sekali ikut. Bagi yang punya kesempatan tapi tak berani mencoba, hanya menjadi *halu* saja.

Alasan paling sederhana mengikuti kontestasi Pileg adalah memperjuangkan konstituen. Membantu percepatan pembangunan di sebuah daerah. Bahkan *saking* semangatnya, ada caleg kampanye dengan membuat visi, misi dan program kerja segala. Mungkin belum mengerti bahwa fungsi legislatif itu hanya terbatas pada legislasi, pengawasan dan penganggaran. Bukan mengeksekusi program karena, itu wewenang eksekutif.

Pecandu politik eksekutif; presiden, gubernur, bupati dan walikota pun begitu. Apalagi yang sudah menjabat/petahana, dipastikan akan maju periode kedua. Kecuali meninggal, sakit parah atau ditangkap KPK. Jika kalah periode kedua, Pilkada yang akan datang bertarung lagi.

Bagi yang sudah selesai dua periode, candu politik belum berakhir. Lahirlah politik trah atau dinasti. Pilkada selanjutnya diusung istri, anak atau adik untuk melanjutkan dinasti.

Pada ajang Pilpres di republik ini ada elit yang kecanduan politik. Karena punya partai dan finansial yang memadai. Pertama mencoba gagal, maju lagi yang kedua gagal juga. Bertarung yang ketiga gagal lagi. Akhirnya bergabung saja ke presiden yang menang. Menjadi pembantu tidak apa, asal punya kekuasaan. Pemilu ke depan mungkin akan maju lagi.

Karena politik seperti candu yang nikmat dan memabukkan, sering membuat pelakunya lupa diri. Praktek menghalalkan segala cara biasa dimainkan. Nicollo

Machiavelli, seorang filsuf kontroversial dari Italia melalui karyanya *Il Principe* (Sang Pangeran), mengatakan kekuasaan harus direbut dengan cara apapun. Bahkan memakai trik yang paling kotor sekalipun.

Jika kekuasaan sudah diraih, harus dipertahankan dengan kekuatan. Machiavelli membantah tesis sebelumnya yang menyandingkan politik dengan etika. Memang faktanya begitu di depan mata kita politik kekinian. Kecurangan, intervensi, manipulasi atau politik uang dipertontonkan secara terbuka.

Sejatinya politik memiliki tujuan mulia untuk kemaslahatan dan kebaikan. Menurut Aristoteles, politik harus dilandasi dengan moral dan tujuannya mengantarkan rakyat dalam sebuah negara pada kebaikan dan kesejahteraan.

Agama juga mengatur politik. Tujuan politik menurut Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat (*ri'asah syu'un al-ummah*). Imam Ghazali, menyebut orang yang berkuasa paling beruntung. Apabila kekuasaan dijalankan dengan syariat Allah dan membawa kemaslahatan umat, jalan ke surga bagi penguasa ini begitu mudah. Namun jika sebaliknya, kekuasaan disalahgunakan, maka akan menjadi musuh Tuhan.

Politik, Jangan *Baper!*

MARDANI Ali Sera dicecar Refly Harun di *channel* youtube-nya, 13 Juni 2020. Talkshow online itu berjudul Mardani Ali Sera: Buah #GantiPresiden2019. Refly Harun melempar pertanyaan menohok kepada politik PKS itu.

“Setelah dua kali dikhianati Prabowo Subianto, pertama soal masuk kabinet, kedua dijanjikan kursi wakil gubernur DKI Jakarta untuk PKS, apakah Mardani sebagai individu dan kader PKS masih menginginkan Prabowo sebagai orang yang dijagokan untuk Pemilu 2024 atau sudah patah arang?, tanya Refly.

Mardani menjawab dengan santai. “Politik itu *nggak* boleh *baper*, yang *baper* kalah,” katanya. “Sampai sekarang kami dengan Gerindra tetap bersahabat, kami tidak bisa mengintervensi keputusan Gerindra yang bergabung dengan Jokowi,” pungkasnya.

Tanggapannya tegas. Berkelas. Sportif. Tanpa emosi. Politisi berkualitas.

Harusnya begitulah politisi. Berlapang dada, berjiwa besar jika suatu pilihan tidak sesuai harapan. Politik bukan sekedar ekspektasi apalagi utopis, tapi tentang dinamika. Kadang tajam. *Das sollen* (keinginan) kesepakatan dua partai atau lebih dalam berkoalisi. Namun *das sein* (kenyataan) tidak sampai pada tujuan yang diperjuangkan. Apa yang diungkapkan tidak sesuai kenyataan.

Seperti Partai Gerindra yang mengklaim PKS sebagai sekutu, tingkatannya jauh diatas koalisi. Ketika koalisi ini

kalah dalam Pilpres, kemudian Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan, itu hal yang biasa saja dalam politik.

Kekalahan dalam berpolitik tidak harus berlarut ke suasana sedih mendalam. Apalagi terbawa perasaan. *Baper* istilah anak muda sekarang. Sportif dalam politik. Siap menang dan siap kalah. Mengakui kehebatan lawan, dan menghargai pilihan kawan.

Perseteruan politik tajam terjadi antara Hillary Rodham Clinton dan Barack Obama menjelang Pilpres Amerika Serikat tahun 2008 silam. Hillary politisi senior berkulit putih. Suaminya Bill Clinton merupakan Presiden Amerika Serikat dua periode sebelumnya. Melawan Obama politisi berkulit hitam. Obama seorang senator yang masih muda, 44 tahun.

Keduanya berebut tiket Partai Demokrat untuk diusung menjadi calon presiden. Partai Demokrat harus memilih di antara kedua kadernya yang hebat itu untuk menantang John Mc Cain yang sudah ditetapkan Partai Republik sebagai calon presiden.

Pemilu internal dilakukan Partai Demokrat selama 6 bulan, dengan sistem roadshow kandidat ke seluruh negara bagian. Hingga *primary* terakhir Hillary di Kota Montana dan South Dakota, ia harus mengakui kemenangan Barack Obama.

Apakah Hillary kecewa? Ternyata tidak. Setelah Obama menang ia langsung berpidato politik.

"Saya akan bekerja dengan sepenuh hati siapa pun yang akan dinominasikan, sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, tentu saja saya masih berharap bahwa sayalah yang akan dinominasikan. Tetapi saya akan melakukan apa saja untuk meyakinkan pendukung saya, bahwa adalah sebuah kesalahan yang luar biasa bila mereka tidak mendukung Senator Obama", katanya lantang.

Pernyataan itu dibuktikan Hillary dan mengantar Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam sejarah politik Amerika Serikat, Obama merupakan orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden. Hingga menjabat dua periode. Sebagai apresiasi atas sikap sportif dan dukungan Hillary, Obama menunjuknya menjadi menteri luar negeri.

Saat Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, Hillary kembali maju dan menantang Donald Trump dari Partai Republik. Hillary mendapat dukungan penuh dari Obama.

“Saya ingin mereka yang bersama saya sejak awal mengetahui bahwa saya mendukung Hillary. Saya tak sabar untuk berkampanye bagi Hillary,” kata Obama dalam sebuah video yang dirilis 10 Juni 2016.

Kemudian ditanggapi Hillary. “Saya sangat senang dan merasa mendapatkan kehormatan. Kami pernah bersaing ketat tapi kami adalah sahabat sejati,” kata Hillary.

Hillary yang diprediksi menang, akhirnya kalah dari Trump. Ia pun dengan sportif mengakui kemenangan Trump. Kemudian Kamis dini hari, 10 November 2016 di New York, ia berpidato, menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf, kemudian mengharapkan Trump bisa menjadi presiden yang baik. Hillary juga mengajak pendukungnya menerima hasil pemilu dan menatap ke masa depan.

Politik sportif masih sikap langka di Indonesia. Politik kita didominasi mental *baper*. Baik dari elit hingga pendukung. Dua Pilpres belakangan ini masyarakat kita terbelah. Jokowi dan Prabowo sudah dua kali berhadapan. Keduanya dimenangkan Jokowi.

Berbagai pendekatan dan rekonsiliasi dilakukan antara kubu Jokowi dan Prabowo. Penuh drama. Walau akhirnya Prabowo di periode kedua mengakui kemenangan Jokowi.

Hingga akhirnya bergabung ke pemerintahan. Prabowo terkesan kesatria atas pilihan politiknya.

Ketika elit kembali bersatu dan bersekutu, pendukungnya masih larut terbawa perasaan. Hingga sekarang istilah kampret (pendukung Prabowo) dan cebong (pendukung Jokowi) masih kental di tengah masyarakat kita. Masih ada yang belum *move on*.

Mengurus negara juga tidak boleh dengan mental *baperan*. Sedikit dikritik oleh rakyat, penguasa langsung tersinggung. Tidak mau menerima perbedaan. Dengan mudah menggebuk rakyat sendiri atas nama hukum.

Penguasa paranoid!

Paranoid merupakan gangguan mental yang diderita seseorang, ia meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Sehingga stres, khawatir dan ketakutan berlebihan, kemudian membalas balik. Bahkan dengan cara lebih buruk.

Dalam kehidupan bernegara jelas undang-undang melindungi hak untuk rakyat menyampaikan pendapat. Hoaks belum tentu muncul dari publik. Pemerintah sendiri diduga mendanai *influencer* atau *buzzer* untuk melawan siapa saja yang mengkritik kebijakan. Mereka memancing rakyat yang kritis untuk emosi dan *kepleset* bicara, kemudian diseret ke ranah hukum.

Ada pihak yang merasa paling pancasilais, orang bicara khilafah dituduh akan mengganti sistem negara. Mengaku paling toleran, orang kritis terhadap kebudayaan dicap intoleran. Penghinaan terhadap agama akhirnya merajalela.

Sekarang pro kontra RUU HIP. Pemerintah ingin menjadikan dasar negara Pancasila sebagai UU. Pancasila sebagai pedoman menyusun, merencanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Ormas Islam dan sejumlah elemen

keras menolak. Kita lihat kemana ujungnya.

Indonesia ini negara besar. Budaya kita beragam. Masyarakatnya heterogen. Sehingga negara ini akan damai, maju dan sejahtera, jika pemimpinnya seorang yang berjiwa besar. Rakyat juga harus berjiwa besar, menyampaikan pendapat dan dikritik dengan cara yang benar. Dilarang makar!

Berjiwa besar adalah sikap selalu berusaha melepaskan ikatan yang melingkupi jiwanya. Bersedia dikritik, dan mendengar saran. Tidak melihat semua dengan ukuran hawa nafsu.

Kegagalan *Satire* Gubernur

VIDEO *satire* Gubernur Sumbar, Mahyeldi dengan Ajo Buset tentang mobil dinas dikira *oto* travel viral. Bagi saya yang berselera humor tinggi konten video itu tidak lucu. Entah bagi Gubernur dan tim *ring piston*-nya. Apa menariknya video itu?

Pejabat sekelas Gubernur pakai mobil Innova Venturer biasanya aja. Itu juga termasuk mobil mewah. Harganya hampir Rp. 500 juta. Bahkan Sandiaga Uno yang Menteri saja juga pakai mobil yang sama saat kunjungan ke daerah.

Mengapa drama mobil dinas Gubernur ini jadi berlarut-larut? Kemarin sudah kembalikan. Gubernur dan wakilnya dianggap kurang peka. Kondisi Covid-19 Gubernur dan Wakil Gubernur beli mobil dinas baru harga ratusan juta.

Mengembalikan disertai minta maaf. Saya pikir dengan begitu selesai masalah. Pakai dulu mobil dinas Kadis atau punya pribadi. Atau mengapa Gubernur tidak pakai saja dulu BA 17? Mobil Fortuner yang biasa dipakai Ketua PKK Sumbar. Mobil dinas istrinya itu kan bisa diganti BA 1. Itu pendapat saya.

Tiba-tiba tim Gubernur pasang plat BA 1 di mobil *balak-balak*. Tujuannya apa? *Satire* pertama itu viral. Tapi *blunder*, kan Gubernur masih punya mobil dinas jenis sedan. Sehari setelah kembalikan mobil dinas baru, ia pakai mobil pribadi jenis Fortuner kunjungan ke daerah.

Wakil Gubernur, Audy Joinaldi buat video *satire* mobil dinas Avanza. Dipasang pula BA 2 ke mobil sejuta umat itu. Semua orang di mobil itu tidak memakai sabuk pengaman.

Sopir dan ajudannya memakai masker didagu.

Biasanya Wagub pakai mobil pribadi untuk berdinan. Mobil mewah harga di atas Rp.1 miliar. Sesuai kelasnya sebagai konglomerat.

Tidak mau kalah akhirnya Gubernur buat lagi video *satire*. Ajo Buset sedikit lucu. Tapi isi videonya tidak. Gubernur juga tidak lucu. Sangat disayangkan ia tidak pula memakai masker.

Video *satire* yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kontennya itu gagal mengedukasi publik. Minus *value* di dalamnya. Mau dijadikan hiburan juga tak menghibur. Dari viral soal mobil dinas ini saja banyak pesan kegagalan yang bisa ditangkap.

Pertama, gagal menjalankan aturan. Tidak memakai masker dan tidak memakai masker dengan benar dalam kedua video itu cerminan gagal menjalankan aturan. Tegas aturan tentang prokes, wajib memakai masker. Bagi Gubernur *sepele* saja tidak memakainya untuk sebuah konten video yang akan diviralkan. Gubernur tidak memakai masker ini sudah sering jadi sorotan.

Jika terbiasa melanggar aturan ini sangat berbahaya. Cobalah tetap jalan saat lampu merah!

Mulai abai dari aturan untuk diri pribadi. Lanjut langgar aturan sebagai pemimpin. Bisa jadi posisikan orang pada jabatan tidak sesuai kompetensi. Berikan kewenangan birokrasi kepada non birokrat. Bukan tupoksinya. Memakai fasilitas negara untuk kepentingan partai. Bisa jadi akan dianggap biasa.

Kedua, gagal menjalankan akuntabilitas moral. Membeli mobil dinas baru tidak menyalahi aturan penganggaran. Memang sudah melalui prosedur pengusulan dan persetujuan. Tapi membeli mobil dinas baru saat wabah Covid-19 ini, moral

dan etika dipertanyakan. Rakyat hidupnya susah.

Akuntabilitas moral tidak diatur dalam regulasi negara. Tidak ada juga sanksi hukum positifnya. Hanya sanksi sosial dari publik. Ini soal *sense of crisis*. Rasa dan kepekaan dituntutnya.

Mengapa mobil dinas baru tetap dibeli? Alasannya sudah dianggarkan sejak tahun 2020. Harusnya bisa menolak atau menunda dulu. Bukan mengembalikan saat sudah dibeli, karena disoroti.

Ketiga, gagal menjaga wibawa pemimpin. Menjadi Gubernur ini bukan jabatan sembarangan. Di negara Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa ini hanya 34 orang punya jabatan itu.

Menjadi Gubernur di Sumbar memimpin 5,5 juta penduduk. Gubernur harus mampu menjaga wibawa dihadapan rakyat. Membuat parodi murahan, sama menjatuhkan wibawa sendiri. Seolah begitu mudah mengolok jabatan sebagai Gubernur hanya karena memakai fasilitas sekelas Innova.

Kalau mau juga membuat parodi, buatlah yang lebih edukatif berisi gagasan. Kalau mau juga menghibur rakyat, hiburilah dengan kegembiraan.

Keempat, gagal menjaga marwah daerah dan rakyat. Malu kita sebagai warga Sumbar saat ada mobil tua dipasangkan BA 1 beberapa waktu lalu. Provinsi Sumatera Barat dan Minangkabau dibincang orang. "Apa orang Sumbar tidak mampu pinjamkan saja dulu mobil lebih layak kepada Gubernurnya?" WA seorang kawan kepada saya.

Karena aksi *satire* tidak cerdas itu, daerah dan rakyat rusak harga dirinya. Harusnya Gubernur selain menjaga wibawa pribadi, juga menjaga marwah daerah dan rakyatnya.

Kelima, gagal menjadikan kesederhanaan sebagai pakaian.

Jika Gubernur hidup sederhana kita bangga. Itu teladan yang pantas dicontoh. Nabi dan sahabat juga hidup sederhana. Padahal banyak yang kaya raya.

Tapi kalau kesederhanaan Gubernur selalu dijadikan komoditas politik, itulah pencitraan. Sekarang bukan lagi masa kampanye Pilkada. Ini periode menjalankan program kerja.

Sudahilah memproduksi *satire* murahan dan isu kontroversi. Gantilah dengan gagasan dan aksi nyata untuk sejahterakan rakyat. Jika Gubernur dan wakilnya tidak ingin gagal mengemban jabatan ini hingga 2024.

BABAK IV

SOSIAL BUDAYA POLITIK

Kepemimpinan Kaum Muda

Di sini, di antara buruh dan tani, kami generasi yang kalah menemukan kebenaran dan kekuatannya kembali. Inilah satu-satunya rumah kami.

ISU tentang kepemimpinan kaum muda sangat pas diusung seiring dengan terjadinya degradasi kepemimpinan bangsa pada hampir sewindu reformasi berjalan. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang ke 79 tahun 2008, gagasan kepemimpinan kaum muda semakin menguat. Moment yang akan dihadapi adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2009.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kedua (1995) kata pemuda disatukan pengertiannya dengan remaja yang berarti sudah mulai dewasa dan sudah sampai umur untuk kawin. Dalam UU Perkawinan Usia kawin adalah 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (laki-laki), dan dalam penjelasan UU tersebut di katakan bahwa usia cakap atau dewasa adalah 21 tahun. Menurut antropolog James Siegel (1986), dalam definisi budaya Orde Baru, seseorang tidak serta merta menjadi remaja karena berusia muda, tapi karena memiliki selera dan aspirasi yang menandakan bahwa dirinya seorang remaja. Selera dan aspirasi para remaja tersebut tercermin dalam kegemarannya pada musik pop dan mode pakaian yang terbaru, yang sedang *ngetrend*, yang pada umumnya mengacu pada perkembangan di negeri Barat. Dengan kata lain menjadi remaja adalah sebuah gaya hidup. Namun Bagi Pramoedya;

pemuda bukan hanya umur tetapi gagasan, yakni progressif, radikal dan militant. Hal ini senada dengan pandangan Cak Nur, yang mengatakan bahwa Usia 30 tahun membuat orang sudah berpikir mapan, tidak progressif, dan status Quo

Dari beberapa pengertian tentang pemuda di atas, pendapat Pramoedya dan Cak Nur sangat tepat untuk membicarakan tentang kepemimpinan kaum muda. Karena di dalam diri kaum muda tersebut tersapat unsur; gagasan yang progresif, radikal dan militan juga berpikir mapan. Sedikit kita melihat kebelakang tentang gerakan kaum muda, khususnya gerakan kaum muda dalam mengusung reformasi bangsa.

Pada tahun 1998, ketika gerakan mahasiswa berhasil menjatuhkan rejim Orde Baru muncul polemik dalam pergerakan mahasiswa dan kaum Muda soal kepemimpinan politik paska Soeharto. Perdebatan ini adalah perdebatan lama yang kembali menguat pasca penjatuhan soeharto, dan sikap gerakan melihat proses transisi yang ada ketika soeharto digantikan Habibie dan sebahagian gerakan kemudian melihat sebagai proses transisi demokrasi. Mereka menganggap bahwa pemerintahan di bawah Habibie akan mampu melakukan perubahan –perubahan secara mendasar walaupun perlahan-lahan menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Ada dua pokok perdebatan kaum muda dan mahasiswa, soal tugas-tugas pokok dan bagaimana memposisikan gerakan mahasiswa dalam proses perubahan yang terjadi.

Pertama, kelompok mahasiswa yang menganggap bahwa tugas mahasiswa hanya membuka kemacetan politik, dalam hal ini, mereka berkesimpulan bahwa setelah menjatuhkan Soeharto maka tugas gerakan mahasiswa telah selesai. Proses selanjutnya diserahkan kepada ahlinya yakni para politisi dan

elit politik, mahasiswa tidak masuk dalam wilayah-wilayah yang sifatnya politis. Kelompok Ini kemudian di kenal sebagai Kelompok gerakan moral (moral Force), terdiri dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan kelompok mahasiswa Cipayung.

Kedua, kelompok mahasiswa yang menganggap bahwa proses penjatuhan Soeharto hanyalah awal dari perjuangan membuka ruang demokrasi, bahwa proses tersebut harus dimajukan dengan menciptakan tatanan baru yang lebih demokratis. Mereka menganggap bahwa pemerintahan Habibie masih kelanjutan dari Sistem politik Orde Baru, sehingga mereka pun menolak pelaksanaan Sidang Istimewa MPR tahun 1999. dalam hal konsep kelompok ini menyiapkan bentuk pemerintahan transisi menuju Indonesia demokratis sepenuh-penuhnya. Forkot (Forum Kota) memberikan konsep Komite Rakyat Indonesia (KRI), sedangkan LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) mengusulkan Pemerintahan Koalisi Oposisi Demokratik kaum Muda dan Rakyat Miskin, dan HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi) dengan tawaran Presidium Nasional.

Hingga pada proses perjalanannya kepemimpinan bangsa sampai saat ini cenderung mewarisi cara-cara lama Orde Baru. Bahkan lebih parahnya lagi rakyat semakin tidak puas dengan pemerintah walaupun sudah berada di alam terbuka berdemokrasi. Ada apa sebenarnya dengan kepemimpinan bangsa ini. Dari Habibie ke Gusdur, dari Gusdur ke Megawati, dari Megawati ke SBY sepertinya belum mampu memberikan yang sempurna terhadap rakyat Indonesia. Apalagi mendekati pemilu elit politik kita sudah mulai sibuk bergerilya mencari dukungan dengan harapan dipilih nantinya di pemilu. Kapan

memberikan yang terbaik buat rakyat, kalau sekiranya tetap saja seperti itu.

Percayakan pada orang muda saat ini, ketika bangsa dan negara Indonesia tengah membangun peradaban, peran pemuda dituntut tampil prima dalam mengisi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Ini terlebih ketika masyarakat dan bangsa Indonesia dilanda keterpurukan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tajam. Pemuda dituntut tampil memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsanya, seperti yang telah ditunjukkan para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928.

Reformasi tahun 1998 telah menjadi investasi baru bagi kebangkitan kembali gerakan kaum muda dan mahasiswa Indonesia. Kaum muda dan mahasiswa yang hanya bersenjatakan pena telah berhasil merobohkan sebuah rezim yang sangat kuat dan kokoh. Tapi juga ada dua kondisi yang menyebabkan belum maksimalnya peran kaum muda yakni; pertama problem ideologi, yakni lemahnya pemahaman akan orientasi perjuangan kedepan. Kebanyakan organisasi mahasiswa dan pemuda yang ada sekarang masih didominasi pendekatan emosional, bukan pendekatan ideologis.

Kedua problem organisasional, sampai saat ini belum ada organisasi pemuda mahasiswa secara nasional yang bisa menyatukan semua ormas pemuda dan mahasiswa. Di Indonesia, akibat pengaruh depolitisasi dan deorganisasi zaman Orde baru selama puluhan tahun, sekarang kita menyaksikan pemilahan yang kuat antara mahasiswa, pelajar (SMU), dan pemuda (non-SMU/mahasiswa). Tentunya, ini sangat menghambat pengorganisasian, proses kaderisasi, dan penguatan ideologi perjuangan karena variasi pengetahuan.

Saatnya kaum muda Indonesia bangkit memimpin bangsanya, mengambil alih kepemimpinan nasional dengan ikut bertarung pada pemilu kedepan. Saatnya juga kaum tua memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kaum muda.

Bangsa Instan

INSTAN ternyata telah menyebar ke segala lapisan masyarakat dan segala macam urusan. Sebetulnya tulisan ini kadarnya sedikit di atas menggerutu. Menggerutu atas keprihatinan nasib bangsa saat ini. Bangsa yang sedang sakit. Bangsa yang sedang sakit, kurus kering, kekurangan darah dan kerdil. Bangsa yang salah asuh dan salah urus oleh para *pengemongnya*. Bangsa yang melahirkan para politisi *rabun ayam* dan para pengusaha *rabun myopi* serta masyarakat yang sakit.

Para politisi *rabun ayam* ini membesarkan demokrasi bangsa menjadi bonsai dan *vampir*. Demokrasi seolah-olah. Para politisi ini memberikan pelajaran salah kepada para pengikutnya bagaimana cara berdemokrasi. Yakni jadikanlah rakyat sebagai alat untuk mengejar kepentingan partai, kelompok dan pribadi tentunya. Suara rakyat yang seharusnya sampai ke pucuk, hanya bergaung di akar rumput. Suara rakyat dijadikan komoditi yang bernilai jual. Setelah dapat kedudukan, maka para politisi ini berubah menjadi *vampir*. Menyedot darah bangsa, darah rakyat, sehingga menjadi kerdil dan kurus kering. Suara rakyat dan demokrasi menjadi kerdil dan sengaja dibonsaikan.

Para pengusaha yang *rabun myopi* kemudian berkolaborasi dengan para politisi *rabun ayam* untuk berkolusi. Berkolusi untuk mendapatkan proyek-proyek dan berbagai fasilitas. Baik fasilitas pembebasan pajak, fasilitas kemudahan impor, kemudahan menggarong bank, bahkan bank yang mereka

miliki sendiri. Para pengusaha *rabun myopi* ini melihat diri mereka besar, sedangkan melihat musuh-musuh mereka di luar negeri kelihatan kecil. Mereka hanya bisa melihat yang dekat, tidak bisa melihat di kejauhan. Para pengusaha ini merasa besar di kandang mereka sendiri. Ketika diadu bertanding dengan pengusaha-pengusaha dari luar mereka semua "*keok*". Karena mereka terbiasa dimanja.

Mungkin penyebab semuanya ini karena bangsa kita agaknya masih termasuk bangsa primitif. Bangsa yang tidak mau menanam tapi maunya hanya memanen. Benar seperti yang dikatakan oleh Profesor Koentjaraningrat, bahwa salah satu budaya yang membuat bangsa kita terpuruk adalah budaya instan. Budaya *kepingin* cepat jadi. Budaya *kepingin* cepat dapat untung. Budaya ingin segala permasalahan cepat selesai. Budaya yang pokoknya semuanya harus serba cepat, serba instan.

Bangsa yang masih primitif di zaman dahulu kala, tidak pernah berfikir untuk harus menanam terlebih dahulu. Karena semuanya serba ada. Kalau mereka lapar tinggal pergi ke hutan, bawa tombak dan pulang membawa hewan buruan. Atau tinggal tebang atau petik pohon buah-buahan. Kalau *kepingin* makan ikan, tinggal pergi ke sungai dan menombak beberapa ekor ikan dan membawa pulang beberapa ekor untuk dipanggang. Itulah kehidupan bangsa primitif. Masyarakat primitif tidak pernah berfikir kerja keras dan tidak perlu bersusah-susah berfikir mengenai kelangkaan sumberdaya. Segala serba ada dan tinggal ambil.

Sebagai bangsa yang sedikit maju, seharusnya mulai berpikir adanya kelangkaan dalam sumberdaya dan perlunya budaya bertani. Untuk itu kita harus menanam. Kita harus menggali, menanam dan harus memetik serta mengolah

sebelum dapat dimakan. Kita harus bersusah payah terlebih dahulu sebelum bisa memetik hasil. Harus dengan kesabaran untuk menunggu sebelum menikmatinya, bahkan kadang-kadang hasil panen yang harusnya jadi milik kita *keduluan* oleh hama atau binatang perusak, seperti monyet dan babi hutan.

Budaya instan yang turun dari masyarakat primitif ini agaknya sekarang masih jadi budaya kita pula. Makanya tak heranlah bila kita menyaksikan orang-orang mulai dari pensiunan, ibu-ibu rumah tangga sampai pejabat tinggi negara yang berbondong-bondong “menginvestasikan” uangnya di bisnis-bisnis yang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan dan dalam waktu yang singkat. Sungguh aneh, dimana logika mereka semua? Sektor pertanian yang hanya memiliki keuntungan sama dengan tingkat suku bunga Bank (menurut Prof. Didik Rachbini, di Republika) bisa memberikan keuntungan sampai 5 persen per bulan. Agaknya mereka semua tergiur ingin cepat kaya dalam waktu singkat.

Kemudian kita menyaksikan bagaimana para bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja, pejabat, artis pengusaha atau “orang-orang biasa” yang juga berbondong-bondong mendatangi para dukun, paranormal, atau “orang-orang pintar”. Para pejabat datang untuk mendapatkan *aji-ajian pengasih* agar tetap dapat bertahan di jabatannya atau agar bisa lebih naik lagi jabatannya. Para remaja mendatangi para dukun untuk mendapatkan aji pengasih agar memperoleh pasangan dengan cepat. Seperti juga artis-artis, dengan membeli susuk agar kelihatan cantik dan seksi. Para pengusaha butuh ajian agar usaha mereka lancar dan sebagainya. Terlihat budaya primitifnya. Ingin sukses tetapi tidak mau kerja keras!

Tidaklah mengherankan, bila kita terlambat keluar dari

krisis ekonomi yang menimpa bangsa kita. Kita berkeinginan untuk segera keluar dari krisis tetapi “*emoh*” untuk kerja keras. Malahan kita gantungkan nasib kita kepada lembaga asing yang tidak pernah peduli dengan bangsa kita. Uang yang mereka pinjamkan harus kita kembalikan, dan mereka hanya memastikan bahwa uang mereka itu aman. Kita hanya sibuk menyalahkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, meyelamatkan diri sendiri, walaupun inisiatif itu ada dengan cara yang aneh. Mencari harta karun dan menjual asset serta perusahaan-perusahaan vital milik bangsa! Ironis memang. Dan itu benar-benar budaya instan!

Cara berfikir para ahli keuangan negara ini untuk bisa mendapatkan uang bagi modal pembangunan dengan cara yang cepat. Untuk kas negara dengan cara yang instan, yakni obral BUMN dan aset-aset vital bangsa serta mengambil hak rakyat berupa subsidi. Mereka tidak mau bekerja keras, bahkan untuk sekedar berfikir bagaimana caranya untuk mengembalikan uang negara yang digarong melalui BLBI oleh para konglomerat hitam. Mereka enggan dan malas untuk memikirkan bagaimana cara-cara kreatif seperti yang dimiliki oleh tetangga kita Malaysia telah yang sukses.

Bagaimana dengan kehidupan perekonomian rakyat kecil dan koperasi? *Sami mawon* alias *samo sajo*. Masyarakat koperasi masih ada imbas masyarakat primitif. Ingin cepat besar, ingin cepat kaya tetapi enggan bekerja keras. Koperasi menjadi sekumpulan masyarakat yang hanya menjadi *broker* dan *rent seeking society*. KUD-KUD lebih aktif mengurus rekening listrik daripada mengurus pertanian. Karena dari rekening listrik telah kelihatan berapa keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang cepat lagi instan. Hal ini boleh-boleh saja, asalkan *core business* KUD tidak terlupakan. Akan

tetapi yang banyak terjadi adalah KUD meninggalkan *core business* nya sebagai koperasi pertanian di tingkat perdesaan.

Bangsa kita adalah bangsa yang telah mendapatkan pendidikan selama orde baru dengan pendidikan yang penuh dengan isi materialistis. Bangsa kita berhasil terbebas dari buta huruf tetapi belum bebas buta nurani, belum bebas buta mata hati. Sehingga budaya lama, budaya instan masih belum terhapuskan.

Harus dengan kerja keras pula untuk menghilangkan budaya ini. Butuh kerja keras kita bersama. Konon katanya, butuh waktu 100 tahun untuk merubah suatu budaya. Butuh dua generasi untuk merubah budaya. Kita, minimal harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa bangsa kita adalah bangsa agraris. Masyarakat yang harus menanam dulu, baru kemudian memetik hasilnya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mulai menanam. Menanam pohon di rumah, di sekolah dan di jalan-jalan. Menanam kebaikan dan kebajikan untuk masa depan. Mengajarkan kepada mereka pola hidup kerja keras, dengan tidak terlalu memanjakan mereka dengan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya belum mereka butuhkan.

Gerakan Mahasiswa di Tahun Politik

“no nation wanted the war, just as no nation wanted the fourteen hour day, the housing shortage, or the high of infant mortality. And it is only through our insight and our will, that a change can come about” (Hermann Hesse)

TAK ada perubahan di dunia tanpa gerakan orang muda. Perubahan /reformasi/revolusi sebuah negara diusung oleh kaum intelektual yang diperankan oleh mahasiswa. *Agent of change* adalah tugas mulia gerakan mahasiswa. Gerakan moral adalah ciri perjuangan untuk rakyat.

Menurut Jo Grimmond Mantan Anggota Parlemen Inggris, mahasiswa harus berontak terhadap birokrasi dalam semua bentuk dan sikapnya, terhadap birokrasi dalam pemerintahan, birokrasi dalam *big business*, birokrasi dalam aparatatur partai-partai politik, birokrasi diantara mahasiswa sendiri dan birokrasi dalam pekerjaan-pekerjaan. Mereka harus berontak terhadap pikiran yang hanya dapat berpikir dalam rangka organisasi yang dianutnya atau terhadap kelaziman-kelaziman yang telah diindoktrinasikannya. Terhadap determinisme ekonomi dan teknik, terhadap penggunaan pendidikan yang menghasilkan budak-budak bagi suatu teknokrasi yang digerakkan oleh mesin, terhadap para profesor yang memberikan sedikit waktu di universitas-universitas di mana katanya mereka harus mengajar.

Jo Grimmond mengharapkan, bahwa para mahasiswa

membela demokrasi terhadap birokrasi, membela manusia terhadap mesin, membela pengambilan keputusan secara terbuka terhadap pengambilan secara rahasia, membela kemanusiaan terhadap gengsi dan membela kehidupan terhadap kematian.

Reformasi

Sejarah reformasi atau pembaharuan telah berlangsung di berbagai belahan dunia sejak zaman renaissance abad ke-15 Masehi. Bermula di Jerman dengan pemikiran Martin Luther King, yang menggugat penyimpangan ajaran Kristiani, berlanjut pada pemikiran Thomas Hobbes tentang *State of Nature*-nya di Inggris, John Locke, Rousseau hingga pemikiran demokrasi modern-nya Robert A Dahl, berintikan pentingnya moralitas pemimpin untuk menjalankan demokrasi. Demokrasi tidak saja berarti kekuasaan ditangan rakyat, namun juga desakralisasi pemimpin yang dibatasi aturan konstitusi dan diawasi oleh lembaga lain dimana rakyat memiliki hak atas mandat pemimpinnya.

Gerakan reformasi dilakukan oleh para mahasiswa dan komponen reformis dalam sebuah negara apabila terjadi hegemoni kekuasaan yang korup, sentralistik, otoriter dan nepotisme. Memberikan keterpasungan hak kebebasan oleh pemerintah terhadap rakyat. Kondisi seperti ini yang membuat rakyat jenuh dan melakukan gerakan pemberontakan. Seperti kasus *Up-rising in Kwangju* tahun 1986, di Cina dengan tragedi Tiananmen 1989. Penumbangan rezim orde dibawa kepemimpinan diktator Soeharto di Indonesia tahun 1998. Rezim Soeharto memanipulasi demokrasi dan membangun imperium kekuasaan ekonomi yang korup.

Kilas Balik Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Gerakan mahasiswa yang tertua yang tercatat dalam

sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang didirikan pada 1922 oleh Mohammad Hatta, yang saat itu sedang belajar di Netherland Handelshogeschool di Rotterdam. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional.

Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970). Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang mengusir banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974 yang memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada tahun itu. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

Berlanjut pada gerakan mahasiswa Indonesia 1978 gerakan ini mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional pada 1977-1978 yang mengakibatkan untuk pertama kalinya kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia.

Gerakan mahasiswa yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu

demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah gerakan yang paling besar dalam sepanjang sejarah perjuangan. Gerakan ini menuntut reformasi dan dihapuskannya “KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada tahun itu mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Soeharto pun lengser.

Tahun Politik

Tahun 2008 dicatat sebagai peringatan satu dasawarwa reformasi. Berarti sepuluh tahun sudah reformasi bergulir sejak dijatuhkannya rezim orde baru oleh gerakan mahasiswa. Bangsa ini sudah bernafas lega di alam kebebasan keterpasungan segala macam hak. Tapi apa yang terjadi reformasi pun belum memberikan hasil se-indah yang dicita-citakan.

Pada sisi lain reformasi seolah-olah tanpa pengawal. Reformasi menjadi indah hanya untuk diperbincangkan dan dijadikan retorika politik penguasa, tapi tidak indah untuk diimplementasikan. Dalam kacamata politik ini disebabkan beberapa faktor; *pertama*, kepemimpinan nasional yang tidak memiliki tanggung jawab atas agenda-agenda reformasi. *Kedua*, kekuatan masyarakat sipil yang tidak berfungsi dalam mengawal agenda-agenda reformasi. *Ketiga*, tidak tersedia perangkat perundang-undangan yang menjamin keterlaksanaan agenda tersebut. *Nothing is ever certain in politics.*

Satudasawarsa reformasi hanya menjadi isu yang tidak begitu menarik dibicarakan. Momen itu akan terkalahkan oleh perhatian para elit politik negeri ini untuk menyongsong pemilu 2009. SBY menyebut 2008 sebagai tahun politik.

Tahun menyiapkan strategi pertarungan merebut kekuasaan. Dan sebagian besar partai politik dan tokoh telah memulai pertarungan itu. Jurus-jurus politik tidak sehat pun berjalan.

Di tahun politik semestinya gerakan mahasiswa benar-benar diharapkan bisa melakukan/memperlihatkan kekuatannya. Kehidupan rakyat yang semakin melarat tidak lagi menjadi fokus kerja para elit. Kondisi ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang sampai pada pemilu. Eksekutif terutama presiden dan legislatif semuanya dari pusat sampai kabupaten/kota adalah posisi yang akan diperebutkan oleh para elit.

Gerakan mahasiswa harus bisa mengarahkan fokus pemerintah (legislatif dan eksekutif) untuk menyelesaikan pencapaian kesejahteraan rakyat dan bidang-bidang lain. Baik dengan gerakan secara intelektual maupun gerakan massa. Gerakan mahasiswa harus bangkit dari kelesuan dan kemandulan gerakan yang terjadi sepuluh tahun belakangan pasca reformasi.

Patologi Birokrasi VS New Public Management

“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, Kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi, kekuasaan yang absolut berkorupsi secara absolut pula”. (Lord Acton, 1972)

BIROKRASI di Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, sepanjang orde baru mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi mendapat pencitraan negatif dari masyarakat. Birokrasi adalah lembaga yang berbelit-belit, lamban, menghalangi kemajuan, prosedural dan mengenyampingkan substansi dan tidak efisien. Di zaman orde baru birokrasi merupakan lembaga representasi dan juga unsur terpenting dari keberadaan sistem politik otoriter yang dilestarikan oleh Soeharto selama ± 32 tahun.

Birokrasi, baik sipil maupun militer, menjadi instrumen terpenting dari format politik orde baru. Kondisi birokrasi yang bertahan cukup lama di Indonesia, ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan birokrasi itu bukan banyak berperan melayani kepentingan masyarakat tetapi justru untuk memperkuat dan melayani keputusan rezim.

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (*bureau*

patology), seperti Parkinsonian (*big bureaucracy*), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (*bureaucratic polity*), ketimbang citra yang baik atau rasional (*bureau rationality*), seperti yang dikandung misalnya, dalam birokrasi *Hegelian dan Weberian*.

Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari "jalan pintas" dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari "kesempatan" dalam "kesempitan" agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.

Patologi Birokrasi

Patologi dalam ilmu kedokteran artinya penyakit. Jadi patologi birokrasi dimaknai sebagai penyakit-penyakit yang ada dalam birokrasi. Menurut Sondang P. Siagian dalam buku *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya* (1994), bahwa penyakit birokrasi bersumber pada lima masalah pokok. *Pertama*, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme.

Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. *Ketiga*, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan "penggemukan" pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.

Keempat, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif. *Kelima*, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih.

New Public Management

Menyadari terjadi kebobrokan dalam birokrasi di Indonesia menjadi salah satu latar belakang munculnya reformasi politik yang kemudian melahirkan kebijakan desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah, birokrasi yang netral dan profesional, transparan dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang mampu merespon tuntutan masyarakat lokal. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka.

Birokrasi yang profesional masih menjadi isu aktual sampai saat ini. Hal ini tidak lain karena banyak kalangan yang masih mempunyai harapan agar birokrasi mampu menampilkan *performance* yang baik, mau tampil profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berada di bawah tekanan

kelompok politik tertentu.

Munculnya konsep *new public management* di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1980-an juga telah menginspirasi birokrasi Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru. Salah satunya *Enterpreneurial Government* (pemerintahan wirausaha) yang dikemukakan Osborne and Gaebler (1992). Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, pelayanan publik perlu membenahi organisasi yang terbuka dan fleksibel, ramping atau pipih (*flat*), efisien dan rasional serta desentralisasi dengan menjadikan pelanggan sebagai pengemudi yang bebas menentukan kebutuhan dan tujuannya. Sehingga akan tercipta dan terbina keakraban dan keterbukaan pada dirinya.

Konsep *new management* (manajemen baru) telah menggeser paradigma birokrasi yang sebelumnya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, diantaranya birokrasi yang sulit ditembus, sentralistik, *top down* (perintah kebawah), hirarki yang sangat panjang serta tidak produktif karena cenderung hanya menghabiskan anggaran saja. Akibatnya adalah kelambanan, bertele-tele dan mematikan kreatifitas diarahkan menjadi birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

Peran organisasi publik dan pegawai pemerintah yang dulunya hanya berfokus melayani masyarakat (*public service*) dan meninggalkan orientasi *input* (penghasilan). Namun, sekarang pemerintahannya telah memikirkan input dalam rangka memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan semua sumber daya alam, lingkungan, teknologi dan sumber daya manusia yang ada.

Sebagaimana studi David Osborne dan Ted Gaebler dalam *reinventing government how the enterpreneurial spirit*

is transforming the public sector , maka pemerintahan di era yang akan datang tentu dituntut untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode kerja dan cara kerja yang efisien sekaligus memerlukan *public servicer* (pelayanan publik) yang memiliki jiwa enterpreneur, bukan hanya menghabiskan anggaran fiskal yang ada.

Pemerintahan wirausaha juga telah menjadi praktek baru di daerah otonomi daerah ini. Daerah otonom sudah mulai berbenah untuk lebih baik. Salah satu contoh daerah yang lebih awal menerapkan konsep *new public management* ini di Sumatera Barat di awal otonomi daerah adalah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan H. Masriadi Martunus. Dua langkah besar yang dilakukan H. Masriadi Martunus dalam melakukan reformasi birokrasi dan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar adalah; *Pertama*, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan reformasi pada birokrasi. *Kedua*, rekayasa keuangan daerah. Sehingga Tanah Datar pada waktu itu termasuk *icon* otonomi daerah di Indonesia, dengan peningkatan PAD sampai angka 1000 persen selama 5 tahun.

Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik

MEMBICARAKAN kepemimpinan perempuan di ranah politik menjadi sesuatu yang cukup menarik. Perempuan dalam paradigma gender tradisional hanya bertugas *dapur, sumur dan kasar* tidak lagi berlaku mutlak seiring dengan tuntutan. Kepemimpinan sekarang berbicara tentang kapasitas dan kompetensi.

Walaupun ruang itu belum terakomodir dengan baik. Tidak dipenuhinya kuota 30 persen perempuan di parlemen sebagaimana yang diatur undang-undang ada bukti. Persoalannya ada di partai yang belum punya *political will* untuk itu. Petinggi partai pun di dominasi oleh kaum adam. Di eskutif pun jumlah perempuan masih sangat sedikit.

Evaluasi hasil Pemilu 2004 juga menunjukkan bahwa dari 14 partai peserta Pemilu yang mencalonkan perempuan belum mencapai target 30 persen. Partai politik peraih suara terbanyak pun seperti Partai GOLKAR dan PDIP dalam menominasikan minimal 30 persen perempuan masih belum ada. Kedua partai politik ini hanya mencalonkan perempuan untuk DPR sebanyak 28 persen saja, sementara 7 partai politik yang lolos Electoral Treshold hanya tiga Parpol yang mencalonkan perempuan melebihi 30 persen yaitu PKS, PKB dan PAN.

Data saat memperlihatkan, semakin tinggi dan semakin penting suatu posisi di ruang publik, semakin sedikit jumlah perempuan yang menempati posisi tersebut. Indonesia yang

memiliki populasi perempuan 51 persen. Saat ini di DPR hanya ada 61 perempuan atau 11 persen dari 550 anggota DPR, 9 persen dari 1.849 orang di DPRD provinsi, 21 persen dari 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung hanya 13 persen. Jumlah PNS perempuan 36,9 persen, dan dari jumlah tersebut hanya 15 persen yang menduduki jabatan struktural, 7 persen pejabat di eselon satu sampai tiga di pemerintahan, 2 hakim agung di Mahkamah Agung, tidak ada satu pun perempuan di unsur kejaksaan, di kepolisian hanya ada satu orang perempuan menjadi kepala polda, dan sepanjang sejarah kepolisian Indonesia hanya ada 2 jenderal perempuan. Tahun 2008 untuk gubernur hanya Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) yang berhasil memenangkan pertarungan pilkada propinsi untuk memperebutkan jabatan gubernur. Ia menjadi satu satunya gubernur perempuan di Indonesia.

Sejak Juni 2005 hingga November 2006, dari 250 pemilihan bupati/wali kota dan 13 pemilihan gubernur telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, jumlah kandidat perempuan yang lolos sebagai calon bupati/wali kota jumlahnya hanya 24 orang, dan 57 orang menjadi kandidat wakil bupati/wali kota. Dari jumlah tersebut, hanya 6 perempuan (3 persen) yang terpilih menjadi bupati/wali kota serta 13 perempuan terpilih menjadi wakil bupati/wakil wali kota (6 persen) dari total 430 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lembaga Survey Indonesia (LSI) juga menemukan ; bahwa hingga akhir desember 2006, dari 296 kali pilkada yang diluncurkan, hanya ada 61 (20,6 persen) daerah yang tercatat ada kandidat perempuan. Dari 38 Pilkada yang berlangsung tahun 2007, hampir tidak ada calon perempuan yang menang.

Perempuan di Parlemen Dunia

Sementara di hampir seluruh belahan dunia perempuan juga tidak terwakili secara proporsional dalam politik. Untuk keanggotaan di parlemen saja misalnya, Perempuan hanya menduduki 14,3 persen dari keseluruhan anggota parlemen. Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu mencapai 40 persen, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab, sekitar 4,6 persen. Di Maroko belum lama ini terjadi perdebatan tentang perwakilan politik perempuan ke arena politik. Hanya 34 perempuan yang memenangkan majelis rendah parlemen (DPR), dibandingkan dengan 35 perempuan pada pemilihan sebelumnya, hanya sekitar 5 persen dari semua wakil.

Di Turki, pernah perempuan memenangkan 50 dari 550 kursi di parlemen. Walaupun baru mencakup 9 persen dari keseluruhan, ini pertanda yang membesarkan hati, karena jumlah perempuan yang terpilih berlipat ganda dibandingkan dengan pemilihan parlemen terakhir. Sementara itu di Irak, memiliki 70 wakil perempuan dalam parlemennya yang beranggotakan 275 orang. Di Asia Tenggara, representasi kaum perempuan di parlemen meningkat dari 10,2 persen di tahun 1990 menjadi 12,7 persen dua dasawarsa kemudian.

Peningkatan jumlah perempuan di parlemen ini ternyata tidak merata untuk seluruh kawasan tersebut. Ada beberapa kemajuan yang mengesankan, terutama di Filipina yang jumlah anggota parlemen perempuannya mencapai 17 persen, namun pada umumnya untuk kawasan Asia Tenggara jumlah perempuan di parlemen berada pada posisi stagnan, atau bahkan sebenarnya menurun.

Perempuan dalam Sejarah Politik Indonesia

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia di beberapa daerah juga tidak lepas dari peranan kepemimpinan perempuan. Perempuan ikut berperang angkat senjata melawan kaum penjajah. Tidak hanya mendampingi suami tapi menggantikan posisi suami ketika gugur dalam peperangan tersebut. Diantara nama-nama perempuan yang tercatat dalam sejarah adalah; Ratu Niharsyah Rawangsa Khadiyu, memerintah kerajaan Samudra Pasai (1400-1427). Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), anak Sultan Iskandar Muda dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani. Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), anak angkat Ratu Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1688). Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699).

Laksamana Keumalahayati, Panglima perempuan yang memimpin laskar Inong Bale (laskar janda) di zaman Sultan Riayat Alaudin Sjah IV (1589-1604) untuk mengusir angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (1506-1599). Laksamana Meurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen, Pemimpin "Suke Kaway Istana" (Resimen Pengawal Istana) yang terdiri dari Si Pai' Inong (prajurit perempuan). *Uleebalang* (kepala pemerintahan daerah), seperti Cut Asiah, Pocut Meuligo dan Cut Nya' Keureuto. Teungku Fakinah (1856), panglima perang perempuan sekaligus alim ulama yang memimpin Aceh berperang melawan Belanda. Tjut Nyak Dhien, Panglima Perang Aceh. Pocut Baren, Panglima Perang Aceh. Cut Nyak Meutia, Panglima Perang Aceh. Pocut Biheu, Panglima Perang Aceh. Cutpo Fatimah, Panglima Perang Aceh.

Ratu Tuan Gadih Reno Sumpur, Ratu Minangkabau

yang memerintah setelah era Sultan Sembahyang III, dan sebelum pemerintahan Raja Sultan Ibrahim. Siti Manggopoh, pemimpin perang *belasting* di Manggopoh. Ia dilahirkan pada bulan Mei 1880. Pada tahun 1908 Siti Manggopoh melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang (*belasting*). Gerakan rakyat untuk menolak kebijakan belasting di Manggopoh disebut dengan Perang Belasting. Tokoh pergerakan seperti Rasuna Said, Rahmah El Yunusiah dan lain-lain.

Pemilu 2024

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kita berharap partai bisa lebih serius mengakomodir ruang 30 persen kouta untuk perempuan. Karena begitu banyak isu-isu bangsa yang penyelesaiannya ada di tangan perempuan. Seperti; kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan (*trafficking*), porno aksi dan pornografi, dan lain-lain. Bagi perempuan pun harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk mengisi ruang tersebut. Agar perempuan tidak hanya jadi aksesoris di parlemen.

Kebangkitan, Reformasi dan Kemiskinan

BULAN Mei 2008 diperingati sebagai satu abad kebangkitan nasional dan reformasi di Indonesia. Tidak ada kaitan histori antara keduanya. Tapi secara kebetulan saja momentnya terjadi dibulan Mei. Kemiskinan adalah persoalan yang sangat krusial pada bangsa kita saat ini. Peringatan reformasi dan kebangkitan nasional dapat kita jadikan sebagai moment bangkit dari kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyat Indonesia.

Tentu saja perjuangan seratus tahunan yang lalu sebagai bentuk penyadaran akan pentingnya bersatu melawan penjajah punya visi yang sangat besar. Pergantian rezim dari Orde Lama (orba) ke era reformasi juga bukan hanya kepentingan sesaat pada waktu itu. Kedua gerakan/perubahan ini pasti tidak menginginkan masyarakat Indonesia terpuruk pada lembah hitam kemiskinan. Sebelum Indonesia terperosok ke dalam krisis ekonomi 1997, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan “hanya” 22,5 juta. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2007 mencapai 37,17 juta. Ada apa?

Sejarah Kebangkitan Nasional

Penggagasnya adalah Dr Wahidin Sudirohusodo. Bersama sejumlah mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*-Sekolah Kedokteran Bumiputra), ia mengajukan usul untuk membentuk perhimpunan demi tujuan mengusahakan persatuan kaum bumiputra yang sedapat mungkin bersifat umum. Walau digagas oleh orang-

orang Jawa (penghuni Pulau Jawa) dan bersifat lebih kejawaan (Jawa, Sunda dan Madura), tetapi perhimpunan ini bersifat terbuka untuk semua orang pribumi, berbeda dengan perhimpunan pribumi sebelumnya yang bersifat eksklusif dan tertutup. Lalu sejumlah nama seperti Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh dan Soeleman dikaitkan dengan proses berdirinya perhimpunan Budi Utomo ini.

Berdirinya Budi Utomo, ternyata langsung mendapat sambutan oleh sejumlah mahasiswa dan orang-orang pribumi lain. Dukungan mengalir dari beberapa sekolah pribumi seperti Sekolah Pertanian (*landbouwschool*) di *Buitenzorg* (sekarang Bogor), Sekolah Dokter Hewan (*Veeartsenijschool*) di tempat yang sama, menyusul Sekolah Kepala Negeri (*Hoofdenschool*) di Magelang dan Probolinggo, Sekolah Malam untuk Penduduk (*Burgeravonschool*) di Surabaya, Sekolah Pendidikan Guru Bumiputra di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo. Dilatarbelakangi dengan adanya perasaan senasib sebagai anak bangsa. Dijajah oleh Belanda karena kebodohan dan kemiskinan bangsa kita pada waktu.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sejarah berdirinya Budi Utomo kemudian tetap dikenang sebagai tonggak kebangkitan nasional. Dan tanggal 20 Mei—sebagai hari berdirinya Budi Utomo—dijadikan sebagai tanggal Peringatan Kebangkitan Nasional hingga ini hari.

Sejarah Reformasi

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Kondisi ini dilatar belakangi karena semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto saat itu.

Pada mulanya, agenda yang diusung cukup beragam, dari tuntutan untuk mengakhiri praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Soeharto harus lengser; re-demokratisasi dari sistem otoriter, pencabutan dwifungsi ABRI, pemulihan krisis politik-ekonomi, serta sejumlah agenda politik lainnya.

Tujuan utama gerakan menggulingkan Soeharto dan Orde Baru itu bukan hanya sekadar hanya menggulingkan kepemimpinan nasional, tapi yang paling penting adalah melakukan perubahan struktural. Dalam hal itu adalah mencoba merombak relasi sosial-politik dan sosial-ekonomi (yang kapitalistik) yang hampir selama 32 tahun hanya melahirkan ketimpangan sosial-ekonomi juga merombak kebudayaannya yang masih feodalistik (Indonesia Posta 1998, Rezim Rekondisi : Fajrul Rahman).

Fakta Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2007, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar

74,38 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan mie instan. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen). Pada periode Maret 2006-Maret 2007, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Peringatan satu dasawarsa reformasi dan se-abad kebangkitan nasional jangan diarahkan kepada agenda-agenda seremonial semata oleh rakyat. Tapi semestinya benar-benar me-reformasi dan bangkit secara nasional dari kemiskinan yang melilit rakyat kita.

Potensi bertambah meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2008 ini juga akan terbuka peluang. Ada beberapa faktor yang selalu menghantui 'tamu yang tak di undang' ini. *Pertama*, kenaikan harga minyak dunia yang terus melonjak akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Solusi terakhir menaikkan BBM bisa jadi akan menjadi kebijakan utama.

Kedua, persoalan lapangan kerja. Meroketnya angka pengangguran tiap saat, baik terdidik maupun tidak terdidik disebabkan tidak sanggupnya pemerintah membuka lapangan kerja baru. Jumlah pengangguran Februari 2007 adalah

10,55 juta orang. *Ketiga*, tahun politik 2008 mengurangi fokus pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Dari presiden sampai menteri serta anggota legislatif berbenah diri dan berbenah partai untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memulai kampanye pada 8 Juli 2008 di sisi lain akan memberikan efek yang cukup negatif kepada rakyat.

Sekali berarti sudah itu mati kata Chairil Anwar itu mudah-mudahan tidak berlaku dalam mengentaskan kemiskinan di negeri ini.

FPI, Kronolis Monas dan Sejarah

*“Tapi Kepala Polres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Winarko, menyesalkan massa AKKBB. Pasalnya mereka mulanya hanya berencana berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. “Ternyata mereka menuju Monas juga,”sesalnya.
(Republika, 2 Juni 2008)*

MARAKNYA pemberitaan tentang kasus kekerasan Monas antara masa FPI dan AKKBB pada tanggal 1 Juni 2008 memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Ada yang melihatnya persoalannya sejarah jernih, sehingga bisa netral. Ada yang membela FPI dengan alasan yang memulai penghinaan kelompok adalah AKKBB. Ada yang membela AKKBB dengan alasan Indonesia adalah negara hukum positif anti dengan kekerasan.

Beragam tanggapan menimbulkan simpati dan solidaritas yang luar biasa dari tokoh-tokoh non Islam dan sekuler liberal. Goenawan Mohammad, Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, Asmara Nababan, Adnan Buyung, Hendardi dan lain-lain, segera menyatu mengecam habis FPI. Mereka juga mendesak agar FPI dibubarkan dan tokoh-tokohnya ditangkap. Dan lobi mereka pun sampai ke istana, sehingga Presiden dan Wapres segera mengeluarkan pernyataan mengecam habis FPI. Media massa besar pun, seperti Kompas.com, Tempo, SCTV, ANTV, RCTI menista habis FPI. Seolah-olah FPI tidak ada kebaikannya sama sekali dan seperti *virus ganas* yang harus dibasmi sampai akar-akarnya.

Kronologi Monas

Di *website* resmi HTI, Perwakilan Serikat Kerja PLN, HTI, FPI, dan sebagainya melakukan demo menolak kenaikan BBM ke Istana Negara. Demo ini sudah mendapatkan izin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawasan yang rapih dan ketat. Dengan kata lain demo ini adalah kegiatan yang resmi dan legal berdasarkan UU yang berlaku di republik ini. Pada saat yang bersamaan muncul lah kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang *nota bene* adalah pro Ahmadiyah.

Seperti yang dilansir dalam siaran TV mengenai kegiatan AKK-BB ini sebelumnya tidak diperkenankan oleh pihak kepolisian terkait untuk melakukan aksi di wilayah Monas, Karena akan berbenturan dengan pihak yang tidak mendukung acara mereka. dengan kata lain, kegiatan AKK-BB ini tidak mendapat izin untuk melakukan kegiatan di wilayah Monas.

Melihat gelagat negatif ini, Pihak FPI menginstruksikan beberapa personilnya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh AKK-BB ini di wilayah aksi demonstrasi FPI dan lembaga lainnya. Ternyata mereka melakukan orasi yang menjelekkan salah satu Ormas peserta demo yaitu FPI dengan mengatakan "*Laskar Setan*" dan sebagainya. Mendengar hal itu, personil FPI segera melaporkan kepada Laskar FPI mengenai temuan orasi tersebut.

Beberapa laskar FPI segera meminta klarifikasi kepada pihak AKK-BB mengenai hal ini. Pihak AKK-BB berusaha mengelak dan menjawab dengan sikap yang arogan sehingga membuat Laskar FPI kesal. Arogansi AKK-BB ini semakin menjadi dengan mengeluarkan sepucuk senjata api dan

menembakkan ke udara 1 kali. Mendengar letusan ini, Laskar FPI mencegah perbuatan tersebut tapi ditanggapi dengan tembakan ke udara hingga 4 kali.

Melihat aksi yang arogan Laskar FPI makin kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap provokator. Tidak ada pihak anak-anak dan wanita yang menjadi sasaran amarah pihak FPI. Hanya oknum yang telah mengejek dan menghina kafir kepada laskar FPI yang menjadi sasaran empuk di kerumunan massa aksi demonstrasi BBM ini. Beruntung tidak semua elemen massa demo ini ikut memukuli pihak AKK-BB. Diduga dipihak AKK-BB ada kelompok bersenjata yang sengaja disusupkan di dalam kegiatan demo BBM minggu 1 Juni 2008 di Monas dengan menyertakan anak kecil dan wanita dengan itikad menjatuhkan opini BBM menjadi opini pembubaran FPI dengan melakukan provokasi sebutan *Laskar Kafir* dan tembakan senjata api.

Aksi FPI ini sebenarnya bisa dipahami. Memang situasi di lapangan ketika demo atau aksi, sering timbul hal-hal yang tidak terduga. Dalam pergerakan massa, seringkali emosi lebih memimpin daripada rasio. Apalagi bila kelompok yang selama ini menghina Islam, kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir melakukan provokasi di lapangan. Melakukan jebakan.

Begitulah mereka yang di lapangan tentu merasakan pahit getirnya perjuangan. Bahkan kadang-kadang mereka salah dalam tindakan. Kita tentu maklum hal itu. Orang-orang yang berjuang dan melakukan kesalahan, tentu jauh lebih baik daripada orang yang hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa dan mengecam-kecam. Tokoh-tokoh FPI kemungkinan akan dihukum agak berat, setelah presiden SBY marah-marah dalam konferensi pers mendadak di istana. SBY memang lagi

panik, menghadapi demo tiap hari soal BBM, ekonomi rakyat yang kacau dan tekanan negara-negara Barat agar mengakui eksistensi Ahmadiyah.

Tuntutan pembubaran FPI adalah keberhasilan AKK-BB dalam mengalihkan tuntutan masyarakat terhadap pembubaran Ahmadiyah. Dengan dukungan media yang luar biasa ditambah penunggangannya oleh pemerintah menyebabkan skenario AKK-BB untuk melindungi eksistensi Ahmadiyah menuai sukses besar. Banyak kepentingan terhadap kejadian monas. AKK-BB berkepentingan untuk mengaburkan tuntutan ummat Islam terhadap pembubaran Ahmadiyah dengan menuntut pembubaran FPI lebih dulu, sementara pada saat yang sama pemerintah mungkin menunggangi kejadian ini untuk mengalihkan isu BBM.

Aksi yang berakhir rusuh di Monas telah membawa tiga keberhasilan bagi AKK-BB. *Pertama* AKK-BB berhasil membuat FPI tersudut secara opini. Dalam hal ini AKK-BB berhasil mendeskreditkan FPI. *Kedua*, AKK-BB berhasil menenggelamkan tuntutan masyarakat terhadap pembubaran Ahmadiyah. *Ketiga*, AKK-BB juga berhasil mengadu domba ummat Islam. Buktinya sebagian warga NU menyerang FPI merupakan contoh keberhasilan AKK-BB dalam memecah ummat Islam.

Sejarah FPI

Front Pembela Islam dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Makruf dan Nahi

Munkar di setiap aspek kehidupan. Deklarator: Al Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Almarhum KH Cecep Bustomi dan KH Idrus Jamalulil. Alamat markas di Jalan Petamburan III No 83, Jakarta Pusat. Syarat keanggotaan: Ahlul Sunnah Wal Jamaah

FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak tahun 1998. Terutama yang dilakukan oleh laskar paramiliternya yakni Laskar Pembela Islam. Rangkaian aksi penutupan *club* malam dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, ancaman terhadap warga negara tertentu, penangkapan (*sweeping*) terhadap warga negara tertentu, konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering diperlihatkan dalam media massa.

Dinamika Politik Lokal dan Otonomi Daerah

*“Politik lokal sebagai suatu sense dalam pembagunan dan penghargaan secara sosial yang berupa keputusan-keputusan dalam sistem interaksi berdasarkan fisik dan ruang sosial”
(Heinelt dan Wollmann, 1991)*

POLITIK dapat dipandang dalam beberapa konteks sebagaimana diungkapkan Ramlan Surbakti (1992) yaitu: *Pertama*, usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan kebaikan bersama. *Kedua*, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber yang dianggap penting.

Dinamika politik lokal pasca diterapkannya otonomi daerah penuh menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Otonomi sebagai sebagai sebuah harapan besar bagi rakyat daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan karakteristik dan kearifan budaya lokal, adat istiadat, dan penggalian potensi masing-masing daerah. Hampir 32 tahun daerah tidak diberikan wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya secara penuh dan bebas. Dengan sistem sentralisasi pemerintah

daerah pada waktu itu cenderung tidak kreatif, dan lebih banyak tergantung dalam banyak kepada pemerintah pusat.

Salah satu buah dari reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa sepuluh tahu yang lalu adalah otonomi daerah, dengan desentralisasi kewenangan dari pusat kepada daerah secara penuh. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menjadi payung hukum otonomi daerah. Seiring dengan perjalanan dan berbagai evaluasi yang dilakukan kemudian undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, termasuk penambahan aturan yang membolehkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pasca revisi undang-undang ini dinamika politik lokal semakin terasa, diantaranya pasca perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swiss yang memperlakukan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian juga otonomi khusus untuk Papua yang kemudian dikembalikan lagi pada pemerintah pusat, dilakukannya pemekaran daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Otonomi daerah secara penuh dalam tataran aplikasi memberikan berbagai dampak terhadap daerah, baik positif maupun negatif. Dampak Positif ditandai dengan adanya berbagai percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk keluar dari berbagai aspek buruk kesejahteraan/kemiskinan pada masa transisi rezim orde baru ke era reformasi. Masa transisi ini sebenarnya memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap daerah dan rakyat, betapa tidak daerah yang sebelumnya selalu “menyusu” pada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak teralu dipusingkan dengan potensi daerah yang terbatas. Kemudian tiba-tiba

“disapah” karena tuntutan perubahan yang mengharuskan rezim yang berkuasa tumbang, daerah yang sebelumnya “save” dari subsidi pusat diharuskan mandiri dalam berbagai aspek terutama finansial. Tentu saja banyak daerah yang tidak siap dengan kondisi ini. Tapi sebagian kepala daerah yang punya visi daerah yang jelas tidak mau terpuruk dalam kondisi ini. Menemukan format baru pemerintahan yang diawali dengan merubah paradigma sistem manajemen yang lebih baik seperti prinsip efisiensi dan ekonomis, merampingkan struktur pemerintahan, wirausaha birokrasi, kompetensi para birokrat dan melibatkan pihak swasta dalam memajukan daerah dan masyarakat. Kepala daerah dari dituntut menciptakan inovasi.

Hal lain yang memberikan dampak positif adalah ruang demokrasi yang semakin lebih maju dan terbuka, dimana rakyat sudah bisa menentuka sendiri kepala daerahnya dengan pemelihan langsung. Sebagian besar daerah propinsi, kabupaten/kota telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pada rezim orde baru pemilihan kepala daerah hanya dilakukan secara formalitas oleh lembaga legislatif, padahal sebenarnya siapa yang akan menjadi gubernur, bupati/walikota telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hegemoni pemerintah pusat dan lembaga legislatif tidak lagi lembaga *super power* pasca otonomi penuh ini.

Hegemoni negara yang dipraktikkan selama Orde Baru yang memarginalkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek perlu direvitalisasi (diberi penguatan kembali) sehingga dapat diakomodasi dan diakses dalam pelaksanaan pembangunan. Penguatan politik lokal atau identitas lokal harus dipahami sebagai salah satu kekuatan perekat integrasi nasional dan kekuatan yang memperlancar pembangunan. Revitalisasi

identitas lokal dilakukan dalam tataran institusi, status, dan peran seperti krama adat, lembaga adat yang ditopang *awig-awig* (aturan-aturan) adat secara arif dapat dihidupkan, dirancang dan didisain kembali.

Tapi otonomi daerah penuh juga terdapat banyak kelemahan, sebenarnya bukan pada konsep/teori tapi lebih pada pemahaman yang salah oleh elit lokal. Menurut *M. Alfian M (2007)*, pasca Orde Baru, kondisi dan dinamika politik lokal tampak lebih sering menggejolak. Ini bisa dijelaskan, setidaknya lewat tiga hal. *Pertama*, konflik politik lokal berpeluang lebar muncul sebagai konflik terbuka, dan tak bisa ditutup-tutupi lagi, misalnya oleh kekuatan politik tingkat pusat. Pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun “tidak sampai ke permukaan”. Itu disebabkan kuatnya “negara” dalam mengontrol segala hal (tetek bengek) urusan politik dari tingkat lokal hingga nasional, dengan pola kebijakan yang amat sentralistik.

Kedua, bisa dijelaskan dengan teori “desentralisasi korupsi”. Meminjam sinyalemen Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, itu bisa dipilah ke lingkup “istana” (Cendana), kini polanya menyebar dan merata dari tingkat pusat dan daerah. Setidaknya lebih ekspresif.

Ketiga, akibat ledakan politik yang belum bisa lepas sepenuhnya dari fenomena *euforia*. Hakikat berpolitik pun rata-rata belum bisa dipahami secara benar. Menjadi politisi masih dianggap sama dengan profesi lain. Mochamad Basuki, misalnya, bahkan terang-terangan mengatakan, kalau mau kaya jadilah politisi. Tentu saja ungkapan ini agak aneh,

mengingat profesi politisi, berbeda dibanding pengusaha.

Faktor pemahaman yang salah terhadap otonomi daerah juga sering mengancam integrasi bangsa Indonesia, dengan banyaknya muncul gerakan-gerakan separatisme di beberapa daerah. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik dari dalam Indonesia sendiri maupun dari pihak asing terhadap daerah otonom untuk merongrong kesatuan negara Republik Indonesia. Wacana melepaskan diri dari negara Indonesia, walaupun ini cepat diatasi oleh pemerintah pusat. Konflik horizontal belakangan juga sering muncul dengan memanfaatkan kepolosan hati rakyat oleh elit politik lokal, terutama dalam menyikapi kekalahan bagi calon kepala daerah yang tidak terpilih. Sehingga Pilkada dibanyak daerah selalu menyisakan konflik yang berdampak buruk terhadap ekonomi, sosial dan politik bagi masyarakat lokal daerah tersebut.

Tentu saja bila mau ditelusuri lebih jauh, masih ada beberapa hipotesis awal menyangkut mengapa hal-hal itu terjadi. Yang jelas, hal-hal seperti itu mengganggu makna demokrasi. Tetapi, kalau demokrasi dipandang sebagai proses, di mana *trial and error* yang ada disikapi dengan perbaikan nyata dan tidak akan mengulang-ulang lagi kesalahan dan kefatalan di masa lampau dan kini, maka jelas peristiwa politik yang tidak mengenakkan itu, merupakan satu bagian dari sebuah proses demokrasi. Kemudian persoalan-persolaan yang terjadi pada tataran lokal harus diselesaikan dengan kearifan lokal yang ada. Hal itu sejalan dengan pandangan kaum lokalis yang dimotori Jones dan Stewart. Keduanya beranggapan, hanya orang lokal yang dapat memahami kondisi dan nilai-nilai lokal, karena itu merekalah yang lebih berkompeten untuk membuat kebijakan publik dan keputusan

politik lainnya. Mereka juga sangat anti-sentralisasi, sehingga menghendaki pengurangan, bahkan bila perlu penghapusan, peran pemerintah pusat.

Ketika terjadi konflik antara masyarakat dan aparatur politik/negara, solusi yang paling efektif adalah memanfaatkan secara optimal pendekatan etika dan budaya politik setempat, bukan justru jalur hukum modern yang belum mengakar dalam memori kolektif masyarakat daerah. Setiap kelompok masyarakat atau daerah niscaya mempunyai mekanisme resolusi konflik yang khas karena tidak ada kelompok masyarakat atau daerah yang tidak menghendaki perdamaian. Dalam konteks ini, budaya politik daerah mesti dikembangkan dalam rangka pemberdayaan politik dan demokrasi di tingkat daerah, dan tidak sekadar media yang efektif bagi resolusi konflik.

Harapan kedepan adalah demokrasi lokal secara bertahap dan pelan-pelan harus mendorong tumbuhnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka. Fenomena pergeseran dari pemerintahan birokratis (*bureaucratic government*) ke pemerintahan partai (*party government*) merupakan sebuah contoh hadirnya pemerintahan yang semakin terbuka. Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan politik dalam pemerintahan harus diorganisir melalui arena masyarakat politik, yakni “kompetisi” secara terbuka di antara aktor politik dan “partisipasi politik” masyarakat sebagai basisnya. Pemerintahan partai yang dibangun dari kompetisi dalam arena masyarakat politik, secara teoritis akan membuat *linkage* antara masyarakat dengan sistem politik, memperkuat akuntabilitas penguasa lokal kepada konstituen yang telah memberikan mandatnya, membuat partai politik lebih berakar (berbasis) pada masyarakat, membuka akses yang lebih luas

bagi pemain-pemain baru, dan seterusnya.

Kerusuhan di berbagai daerah merupakan *warning* bagi partai politik untuk melakukan introspeksi diri. Partai politik harus menjalankan undang-undang, melaksanakan pendidikan politik rakyat pada tingkat lokal, dan menjamin iklim politik yang kondusif. Selain itu, partai juga harus melakukan rekrutmen dengan baik. Selama ini perannya lebih terlihat sebagai calo bagi individu yang ingin berlaga di Pilkada. Kadang momen Pilkada benar-benar dijadikan meraup keuntungan besar bagi partai-partai politik, dan bahkan ada yang memasang *bandrol* dengan harga mahal bagi seseorang yang ingin maju menjadi kepala daerah.

Mulai saat ini rekrutmen politik harus dilakukan dengan benar. Partai politik jangan lagi mengusung pihak yang bayar, tetapi harus mencari calon pemimpin daerah yang sebenarnya. Penilaian harus didasarkan pada kredibilitas, kemampuan memimpin, dan nilai diri di mata masyarakat. Proses seleksinya dapat dilakukan dengan konvensi. Jadikan politik lokal di era otonomi ini jauh lebih baik dan *fair*.

NKRI dan Gerakan Separatis

GERAKAN separatis menghantui keutuhan NKRI menjelang 63 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2008. Insiden pengibaran bendera Bintang Kejora kembali terjadi pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat di Papua hari 9 Agustus 2008. Pengusungan bendera Bintang kejora dalam tarian sudah terjadi beberapa kali, tragisnya pada kali ini terjadi kerusuhan antara aparat dan masyarakat hingga memakan korban. Ini membuktikan pemerintah belum tuntas memberantas separatisme sampai ke akar-akarnya. Isu separatisme telah terlalu sering di bahas oleh para pengamat politik, akademisi, aktivis LSM dan juga para mahasiswa sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap keutuhan kesatuan NKRI di era otonomi daerah ini.

Secara istilah Separatisme Politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok *separatis* sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti *determinasi diri*. Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Gerakan separatis

biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.

Gerakan separatisme dalam sejarah politik Indonesia adalah gerakan yang tak pernah surut, bahkan bisa dikatakan sebagai momok utama politik Indonesia. Gerakan separatisme itu juga meninggalkan trauma yang mendalam di kalangan rakyat. Juga masing-masing daerah di samping menyisakan beragam persoalan sosial-politik bagi pemerintah pusat. Separatisme muncul sebagai akumulasi ketidak puasaan terhadap kebijakan dan perlakuan pemerintah berdaulat terhadap daerah-daerah yang ada diwilayahnya. Persoalan yang berkepanjangan di Aceh sejak orde baru atas penguasaan kekayaan sumber daya alam yang kaya itu oleh pemerintah pusat. Persoalan ketimpangan perhatian dan penindasan oleh militer terhadap rakyat di Maluku dan Papua serta yang jelas sudah berhasil adalah gerakan separatis di Timor timur, yang sekarang menjadi negara Timor Leste.

Kita melihat bahwa separatisme muncul bukan lagi gerakan perebutan kekuasaan yang datang dari kalangan para perwira militer daerah melainkan datang dari para massa rakyat yang trauma setelah menjadi korban kebrutalan rezim militer. Pada peringatan 36 tahun OPM di pedalaman Papua Nugini tahun 2008 ditayangkan oleh salah satu TV swasta. Kita dapat saksikan bahwa OPM hanya terdiri dari masyarakat sipil saja. Jumlah yang sedikit dan sarana seadanya tapi mereka punya kebulatan tekad untuk merdeka dari Indonesia. Mengganggu pemerintah Indonesia adalah kolonialisme, dan tidak mau terlibat dengan sistem politik yang ada dalam negara ini. Sampai mereka berjuang mendesak organisasi Internasional PBB agar Papua Barat bisa menjadi negara

sendiri.

Termasuk juga di Maluku Selatan gerakan separatis yang dihidupkan lagi oleh segolongan kecil masyarakat sipil yang selama ini merasa selalu di tindas secara brutal oleh pemerintah pusat. Trauma ini menjadi sebuah klaim kebenaran terhadap gerakan mereka. Bagaimana dengan Aceh? Perjanjian Helsinki yang sudah dianggap begitu kuat ditataran Internasional ternyata masih saja bisa mulai digoyang angin separatis baru dalam bentuk partai lokal sebagai perlakuan istimewa terhadap Aceh oleh pemerintah pusat.

Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya sendiri, yang antara lain berpangkal pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah. *Pertama*; ketimpangan pembangunan di otonomi daerah sangat tampak jelas dirasakan, negara yang kaya sumber daya alamnya dan PADnya tinggi akan bisa meningkatkan pembangunan daerah. Walaupun adanya Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tetap tidak memenuhi kebutuhan daerah miskin, sehingga pembangunan menjadi sangat lambat. Kondisi keterbelakangan pembangunan di wilayah timur sangat kentara di bandingkan daerah lain. Ini akan sangat berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, sosial dan budaya.

Kedua; penyelesaian konflik dalam negara yang cenderung dengan pendekatan militeristik, sehingga pendekatan ini selalu saja menyisakan korban nyawa yang membuat trauma berlarut-larut bagi masyarakat. Seolah membangkit luka lama yang menganga kembali. Sebagai contoh, kita saksikan setelah bendera Bintang Kejora yang dikibarkan pada pembukaan

Kongres masyarakat Papua beberapa waktu yang lalu. Di jalan-jalan ibu kota Papua terlihat kondisi siap mau perang dengan operasi yang dilakukan oleh Polisi dan TNI . Tanpa dilakukan komunikasi yang baik antara pihak yang terkait pada acara tersebut. Masyarakat Papua menganggap itu bagian dari budaya sementara pihak keamanan menafsirkan itu bentuk makar terhadap negara. Pendekatan militer ini selalu dilakukan terhadap daerah-daerah yang dianggap 'nakal' terhadap NKRI, berapa banyak korban dalam penumpasan GAM di Aceh sebelumnya. Sipil dan juga militer sendiri. Sehingga memunculkan anggapan bahwa cara seperti ini merupakan bentuk penjajahan negara terhadap masyarakat.

Ketiga; masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh separatis Indonesia yang berada diluar negeri dan juga ada konspirasi internasional. Gerakan separatis GAM yang sebelumnya tetap *disetting* oleh Hasan Tiro yang tinggal di Swedia. Gerakan separatis RMS yang diindikasikan tetap digerakkan oleh Alex Manuputty yang tinggal di Amerika. Dan juga gerakan separatis OPM yang didukung oleh Australia, bahkan sampai adanya pasokan senjata. Lepasnya Timor-timor dari Indonesia salah satu bukti bahwa gerakan separatis juga di dibantu oleh pihak luar pada saat sekarang. Ini menandakan bahwa gerakan separatis digerakkan secara teroganisir oleh pihak-pihak tertentu.

Menguatnya wacana melepaskan diri dari pemerintah pusat atas klaim kebenaran oleh etnis tertentu dalam negara merupakan sebagai sebuah bukti bahwa bangunan bangsa yang sudah dianggap kokoh dalam kesatuan ini tergugat kembali secara substansial walaupun pemerintah telah menerapkan sistem otonomi daerah selama lebih tujuh tahun. Atau otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yang diberikan

wewenang mengurus daerah sendiri yang salah ditafsirkan oleh beberapa daerah atau etnis lokal yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Akibatnya ikatan yang mendasari bangsa dan negara yang hanya bersandar pada kesamaan kesejarahan dan geografis tak memadai lagi untuk memelihara keutuhan sebuah bangsa.

Ada beberapa solusi yang harus dilakukan agar gerakan separatistis tidak lagi berkembang di NKRI ini : *Pertama*; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal. Peningkatan sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh sebab itu pemerintah pusat tetap harus memperhatikan perhatian yang sama terhadap semua daerah, terutama daerah yang masih terbelakang dan miskin. Otonomi daerah harus dilaksanakan secara benar dan lebih baik oleh pemerintah daerah.

Kedua; melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya dan menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. Pendidikan politik dan komunikasi politik dalam rangka menjaga keutuhan negara harus selalu dilakukan. Tidak hanya tugas pemerintah pusat dan daerah tapi juga partai politik. Partai politik jangan hanya melakukan pendekatan pada masyarakat pada momen-momen tertentu saja seperti menjelang pilkada atau pemilu. Peran aktif anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga dipilih langsung oleh langsung oleh masyarakat. Masing-masing propinsi memiliki 4 orang anggota DPD, ini

sangat representatif melakukan pendidikan dan komunikasi politik kepada masyarakat. Juga diharapkan kedepan wakil rakyat lebih loyal kepada konstituennya di daerah. Kemudian peran media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan lebih baik, objektif dan rasional.

Ketiga; mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme serta pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Terhadap daerah yang rawan konflik aparat keamanan bisa melakukan pendekatan yang lebih baik, menjadi pengayom dan *problem solver* bagi masyarakat. Cara-cara militeristik dilakukan apabila kondisi benar-benar sudah dalam keadaan darurat, mengancam dan merugikan masyarakat sipil. Aparat berperan melindungi masyarakat bukan membuat persoalan baru dalam daerah rawan konflik.

Keempat; meningkatkan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka kontra diplomasi permasalahan sosial-politik, keamanan-ketertiban dan HAM terkait gerakan OPM. Pemerintah pusat berusaha melakukan diplomasi maksimal dengan luar negeri dalam hal keamanan bangsa. Terutama gerakan OPM yang sudah lama berjuang menjadi negara sendiri kepada dewan keamanan PBB. Termasuk juga gerakan-gerakan separatis dalam negeri yang minta bantuan dalam hal pendanaan dan persenjataan kepada negara lain.

Agar keutuhan NKRI ini berumur panjang diharapkan kepada seluruh masyarakat agar memaknai kemerdekaan bangsa secara lebih utuh. Perjuangan demi perjuangan oleh pahlawan-pahlawan bangsa ini bukan sesuatu yang dihadapi dengan mudah. Puluhan tahun dijajah oleh bangsa kolonialis bukan waktu yang singkat. Sampai mereka menghantarkan

kita kepada kemerdekaan seutuhnya Hari ini tinggal kita mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik. Menyambut tahun kemerdekaan seluruh anak bangsa diharapkan memberikan penghargaan yang terbaik kepada pahlawan-pahlawan kita. Semangat nasionalisme harus tetap dijaga dan dipupuk dengan melakukan hal-hal positif dalam mengisi kemerdekaan.

Politisi Jalanan

BULU kuduk saya merinding mengikuti acara Kick Andy di layar Metro TV pada Jum'at 26 September 2008 jam 22.00-23.00 wib. Pada acara tersebut Andy F Noya menghadirkan para calon legislatif untuk Pemilu 2009 dari latar belakang yang sangat berbeda. Latar belakang mereka dengan visi yang menyegarkan dalam politik kita menurut saya. Acara itu menghadirkan diantaranya Danial Fransisco Lolo dan Edi Bonetsky.

Lolo adalah seorang agen dan penjual teh botol kaki lima di kawasan Kuningan Jakarta. Berbekal 3.000-an tanda tangan pendukungnya dari kalangan pedagang kaki lima se-Jabodetabek, Lolo memberanikan diri mendaftar sebagai calon anggota DPD DKI Jakarta. Tekadnya sudah bulat dan opitmis bisa menang pada Pemilu tahun depan. Layaknya seorang orator ulung dia menyampaikan visi dan misinya ingin merubah nasib pedagang kaki lima metropolitan.

Ada kata yang diucapkan dari naluri yang paling dalam dari seorang Lolo membuat saya sangat terharu. *"Pedagang kaki lima sesungguhnya adalah bagian paling ujung terpenting dari rantai industri nasional. Tapi seringkali peran keberadaannya itu dilupakan oleh pemerintah. Masalah inilah yang akan saya perjuangkan di Dewan Perwakilan Daerah nantinya"* tutur Lolo dengan serius.

Saya sangat sependapat dengan Lolo, kalau produksi yang dikakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa campur tangan pedagang kaki lima dalam pemasarannya, maka

saluran produksi tidak berjalan baik. Contohnya Teh Botol yang diproduksi oleh Sosro tersebut menjadi dikonsumsi seluruh masyarakat karena dilakukan oleh pedagang-pedagang kaki lima tersebut seperti teman-teman Lolo.

Majunya seorang Danial Fransisco Lolo juga di-*back up* penuh oleh musisi terkenal yaitu Franky Sahilatua, sebagai *Public Relation Manager*. Kita tahu selama ini Franky adalah orang yang juga sangat lantang menyuarakan kebenaran, menentang politik otoriter, penguasa zalim, koruptor penghisap rakyat dan isu lain dalam karyanya. Pengakuan Franky mau menjadi PR karena menganggap Lolo akan bisa memperjuangkan nasib teman-temannya yang termarginalkan selama ini di ibu kota.

Kemudian Edi Bonetsky termasuk juga teman-temannya yang berlatar belakang pengamen jalanan, setiap hari mencari sesuap nasi dengan mengumpulkan uang receh. Tokoh ini sangat akrab dengan anak-anak jalanan/pengemis/gepeng. Pengamen bernama asli Herdi Aswarudi ini, merupakan calon anggota legislatif DPR RI mewakili daerah pemilihan Banten dari Partai Bulan Bintang. Bahkan selain Edi, masih ada tujuh orang rekannya sesama musisi jalanan yang juga dicalonkan PBB sebagai bakal anggota legislatif untuk tingkat DPR dan DPRD.

Walapun dituduh oleh pengamat kepada mereka sebagai pelengkap dan pengumpul suara (*vote getter*) saja, tapi nampak dari wajah-wajah polos politik itu niat yang amat dalam. Tujuan mereka ikut menjadi calon anggota dewan terhormat itu adalah dalam rangka merubah nasib kaumnya. Anak jalanan/pengemis/gepeng harus dicarikan jalan keluarnya oleh penguasa dengan baik. Pengakuan Edi Bonetsky dan kawan-kawannya selama ini mereka sudah berbuat untuk anak

jalan. Mereka sudah mendirikan komunitas Rumah Belajar Kaki Anak Langit, disebut RBK. Komunitas ini melakukan banyak kegiatan belajar dengan penuh kreatif dan mandiri bagi anak-anak jalan.

Dengan masuknya Edi Bonetsky dan kawan-kawannya sebagai caleg, ada harapan kekuatan yang lebih untuk merubah nasib anak jalan. Pengakuan mereka kalau terpilih nantinya menjadi anggota dewan terhormat, akan jauh dari hidup mewah sebagaimana perilaku kebanyakan elit politik kita. Tidak akan lupa kacang dengan kulitnya, kata mereka. Benar atau tidak, entahlah besok-besok kita lihat!

Munculnya berbagai macam bentuk politisi dalam demokrasi sekarang memang bukanlah hal yang luar biasa. Selagi orang Indonesia cukup umur memiliki hak untuk menjadi wakil rakyat dan pejabat. Maka lahirlah politisi jalan, politisi artis, politisi guru dan dosen, politisi penjahat HAM, politisi pengusaha, politisi mantan narapidana, politisi perempuan, politisi anak pejabat, politisi istri pejabat, politisi pengangguran, politisi mahasiswa, politisi preman, politisi murcikari, politisi judi, politisi ulama/da'i/kiyai, politisi pendeta, politisi paranormal, dan semua profesi apa saja sekarang ini semua ingin jadi politisi. Semua orang ingin menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan terhormat.

Semoga Danial Fransisco Lolo, Edi Bonetsky dan kawan-kawannya dan semua orang berasal dari kaum yang merasakan pahitnya hidup, menderitanya kemiskinan dan hari ini menjadi calon anggota dewan terhormat tetaplah luruskan niat. Jangan ketika hari ini anda didukung, tapi esoknya anda dikutuk karena lupa diri!

Dukun Politik

SUASANA Pemilu tanggal 9 April 2009 panas. Panas bahkan penuh asap, bak kemenyakan dibakar *mbah* dukun. Negeri ini benar-benar diisi oleh elit-elit politik *edan*. Betapa tidak, klenik masuk ke ranah politik. Para "*penjudi politik*" yang akan bertarung bulan depan itu menggunakan dukun sebagai pengasih. Pemilu semakin dekat, para dukun di negeri ini panen raya. Dukun menjadi penasehat politik para Caleg.

Di negeri Caleg-Caleg latah ini dukun ramai dikunjungi politisi. Ratusan Caleg di kota Padang datangi dukun bernama Ni Ita (www.padang-today.com 27/03/2009). Para elit politik syirik itu, menerawangkan peluangnya menuju parlemen. Ada pula yang meminta *sesajen* agar rakyat memilihnya. Berbagai bentuk saran dukun diikuti untuk sekedar memenuhi "libido liar" politik calon penghuni parlemen itu.

Mereka minta mantra-mantra pengasih untuk menjampijampi pemilih. Ada yang menanam benda keramat di sekitar TPS. Bahkan mengirimkan petaka kepada rival politiknya. Ada Caleg yang disuruh dukun menanam 50 batang paku usuk ukuran 12 cm di tiap desa di daerah pemilihannya di Banyuwangi (*Sabili no 18 tahun XVI 26 Maret 2009*). Sungguh perbuatan yang amat sulit diungkap Panwas.

Pengakuan Ki Joko Bodo dan Mama Lauren, dua paranormal terkenal, sejak Juli 2008 klien yang mereka terima kebanyakan dari Caleg. Caleg yang mendatangi mereka bukan saja dari partai-partai kecil tapi juga partai besar.

Betapa tidak ber-Tuhan-nya orang-orang yang akan

memimpin negeri ini. Politisi kita lebih mempercayai dukun daripada lembaga survei yang bersifat ilmiah untuk melihat popularitas politik. Inilah konsekuensi orang-orang lajah diberi kesempatan. Kegagalan kaderisasi partai semakin terlihat nyata. Para caleg menggunakan segala cara untuk merebut kekuasaan. Beginikah mereka memahami teori dan paham *Machiavelis*?

Secara teori tidak ada korelasi antara politik dan dukun. Tapi karena sudah *kalap* mata, inilah cara yang mereka anggap *jitu* menuju kekuasaan. Rakyat memilih atau tidak pada Pemilu mendatang adalah sebuah pilihan sadar. Kecuali orang-orang bodoh yang mau dibayar untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Caleg dan pemilih yang sama-sama kurang akal.

Dukun dan klenik bermain di wilayah politik. Mampukah dukun meningkatkan jumlah suara seorang Caleg? Logika politik yang amat sulit untuk dirasionalkan. Terlalu naif dukun bisa menerawang seseorang menjadi anggota legislatif atau tidak. Sulit mempercayai kekuatan dukun bisa mendukung nilai-nilai politiknya. Kenapa tidak dukun itu saja yang maju mewakili begitu banyak kebutuhan pencalegan partai politik saat verifikasi beberapa waktu yang lalu? Atau para dukun itu mendirikan partai politik.

Ini adalah salah satu gejala frustrasi politik bagi para Caleg. Caleg *kere* yang mencoba mengundi nasib mengandalkan kekuatan *majic* para dukun. Tentu saja menjadikan dukun sebagai penasihat politik tidak mengeluarkan dana yang begitu besar.

Begitu terkikisnya nilai-nilai keteladan dan ketuhanan bagi orang-orang yang menginginkan sebuah jabatan. Memandang jabatan sebagai sebuah kehormatan dan bahkan menuhkannya. Masihkah pantas orang-orang yang

bergelimang dosa politik; pembohongan, janji-janji sesaat, *money politic*, saling fitnah dan kampanye hitam itu dipilih? Masihkah kita akan memilih orang-orang penuh dosa dengan kesyirikan yang ada dalam dirinya? Kita adalah orang-orang cerdas yang tak mau dibodohi.

Kebangkitan Politik Anak Muda Minangkabau

PANTASKAH meragukan kiprah orang Minangkabau di pentas nasional? Hatta, Hamka, Syahrir, Tan Malaka, Natsir, Rasuna Said, Chairul Saleh dan lain-lain. Semua tahu bahwa nama-nama besar itu adalah aktor-aktor utama berdirinya negara Indonesia ini.

Kini adalah era kebangkitan anak muda Minangkabau. Mereka menempuh jalur politik sebagai penoreh sejarah pengganti nama besar sebelumnya. Sebuah kesadaran bahwa betapa beratnya menyebut diri sebagai orang Minangkabau, kalau tidak memberi arti terhadap perjuangan bangsa dan negara.

Tahun 2009 H. Sutan Zaili Asril (Wartawan Senior) menulis tentang kiprah Irman Gusman. Irman Gusman disebut sebagai tokoh sentral di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Irman adalah orang yang telah banyak berbuat untuk rakyat Sumatera Barat. Diantara 4 orang anggota DPD dari Sumbar periode 2004-2009, Irman dinilai memiliki kontribusi yang besar memajukan daerah. Tanpa mengecilkan arti yang lain. Irman Gusman juga orang yang diberi kepercayaan besar ditingkatkan nasional dan bahkan internasional. Kesuksesannya mendatangkan investor ke tanah air adalah bukti nyata untuk bangsa.

Selain Irman Gusman beberapa orang Menetri Kabinet SBY adalah putra Minangkabau. Mereka adalah generasi yang beranjak tua. MS Kaban Menteri Kehutanan, juga menjabat

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Bachtiar Chamsah Menteri Sosial, fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fahmi Indris Menteri Perindustrian, fungsionaris Partai Golkar. Meutia Hatta Menteri Peranan Perempuan, menjabat sebuah ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Hatta, Syahrir, Hamka, Chairul Saleh dan Natsir baru sepertinya telah lahir kembali. Pemilu 2009 sebagai bukti. Sebut Fadli Zon, Indra Jaya Piliang, Jefrie Geovanie, Adrian Maulana Jambek, Irwan Prayitno, Muhammad Ichlas El Qudsi (Michel), Halida Hatta, Wendra Yunaldi, Rosdinal Hasan, Iqbal Bachtiar, Ekos Akbar adalah nama-nama besar yang menjadi icon partai politik besar saat sekarang. Mereka terlahir dari rahim bundo kanduang.

Kiprah mereka secara nasional selama ini tak diragukan lagi. Fadli Zon adalah sahabat dekat Prabowo Subianto. Fadli Zon (FZ) salah seorang pendiri Partai Gerindra. Selain sebagai akademisi juga banyak menulis buku. Sejak mahasiswa sudah aktif mengembangkan diri dengan di berbagai organisasi. Pelajar Islam Indonesia (PII), Senat UI dan sampai hari ini juga aktif di media. Tak ada yang tahu kalau sebelumnya FZ adalah putra Minangkabau. Ia buktikan kepeduliannya terhadap Sumatera Barat dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 dari Partai Gerindra.

Indra Jaya Piliang (IJP), sebelumnya dikenal sebagai pengamat politik CSIS. IJP adalah sosok anak muda Minangkabau yang amat kritis. Tentu tidak mudah menjadi bagian dari lembaga CSIS. IJP dikagumi sebagai intelektual yang banyak menulis. Setiap berbicara selalu menjadikan sejarah sebagai referensi. Kisahnya menjadi orang muda terkenal cukup unik. Pernah berjualan sate Piaman di ibukota.

Merasakan kerasnya hidup di Jakarta ia lalui. Walaupun begitu ia suka melahap banyak pemikiran tokoh-tokoh dunia melalui kegemarannya membaca. IJP menjadi bagian penting dalam perumusan naskah akademik berbagai regulasi baru negara. Mengubah bangsa tak cukup berada diluar sistem, katanya disuatu kesempatan. “Makanya saya memilih menjadi caleg Partai Golkar dalam rangka mendisiplinkan demokrasi, “Ungkap IJP lagi.

Jefrie Geovanie (JG) adalah anak muda yang awalnya sukses dalam bisnis besar. Setelah matang dalam dunia bisnis (save financial) menerjunkan diri dalam dunia intelektual dan politik. Aktivitas intelektual sebenarnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa. Ia adalah Direktur Eksekutif Indonesian Institute, sebuah LSM intelektual. Aktivitas politik JG dimulai ketika dipercaya Amien Rais menjadi ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Propinsi Bali. Tahun 2005 JG “dipaksa” IJP pulang kampung ke Sumatera Barat untuk maju menjadi calon gubernur. IJP dan kawan-kawan mampu meyakinkan JG. Hingga ia maju menjadi calon gubernur termuda di Sumatera Barat waktu itu. Walaupun tak mendapat dukungan dari partainya PAN, tapi JG menempati urutan ketiga. Setelah itu JG berpindah ke Partai Golkar. Anak muda cerdas ini dipercaya sebagai Wakil Direktur Eksekutif Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Bahkan ia hampir saja maju menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2007. Komitmen JG membangun Sumatera Barat dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 dari Partai Golkar.

Irwan Prayitno (IP) membuktikan diri sebagai tokoh berpengaruh di DPR RI. Dua periode menjadi anggota legislatif selama itu pula beliau dipercaya menjadi ketua komisi. Pernah ditawarkan kursi menteri oleh SBY, tapi ditolak karena ingin

fokus di legislatif. IP adalah pendiri Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai dakwah ini tahun 2005 memutuskan IP maju sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Pada waktu itu IP juga menolak, tapi karena keputusan partai ia harus taat. Ini sistem yang diterapkan bagi kader PKS, tak boleh meminta amanah juga tak boleh menolak kalau sudah diputuskan. IP berada di urutan kedua setelah Gamawan Fauzi. Di Sumatera Barat IP adalah orang yang amat peduli dengan pendidikan. Adzkia adalah lembaga pendidikan yang ia dirikan. Sekolah berbasis Islam terpadu ini dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Salah seorang anggota dewan pusat dengan gelar profesor ini dipercaya kembali oleh PKS untuk maju sebagai caleg DPR RI Dapil Sumbar 1.

Muhammad Ichlas El Qudsi (Michel) adalah nama yang tak asing bagi masyarakat Sumatera Barat. Dalam analogi pertanian Michel adalah petani sawit bukan kangkung darat. Jauh sebelum Pemilu ini Michel sudah menanam investasi politik dalam kurun waktu yang lama. Kepedulianya terhadap kegiatan masyarakat seperti sosial, pertanian, pembinaan akhlak generasi, pendidikan dan usaha kecil menengah membuat namanya akrab bagi masyarakat. Setiap moment hari besar agama dan nasional ia memasang ucapan selamat dengan baliho dan spanduk dimana-mana. Memberikan penghargaan kepada guru, beasiswa, korban bencana dan pelatihan wirausaha adalah bagian aktivitasnya untuk masyarakat. Michel adalah anak muda Sumbar yang menjadi tokoh penting Partai Amanat Nasional (PAN) di pusat. Penulis pernah menyampaikan ke Michel baiknya beliau maju sebagai gubernur tahun 2010. Beliau menjawab, “jalani yang sekarang aja dulu Musfi, “ujarnya. 2009 Michel maju sebagai caleg DPR

RI Dapil Sumbar 1 dari PAN.

Selain nama diatas juga ada Wendra Yunaldi (WY) menempuh jalur politik untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mantan ketua Senat Universitas Bengkulu ini, sebelumnya pernah menjadi staf ahli DPD RI. Kemudian beliau mengundurkan diri dan pulang kampung mencalonkan diri menjadi ketua KNPI Payakumbuh. WY adalah ketua KNPI Payakumbuh dan calon anggota DPD RI utusan Sumatera Barat.

Beberapa anak muda Minangkabau yang terjun ke politik praktis di Pemilu ini juga merupakan anak tokoh tua. Sebut Rosdinal Salim caleg Partai Golkar, anak mendiang Emil Salim. Ikbal caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) anak Bachtiar Chamsah. Halida Hatta caleg Parta Gerindra anak mendiang Proklamator Bung Hatta. Halida memang tidak maju mewakili dari Sumbar. Adrian Maulana adalah cucu Djamil Djambek ulama terkenal Minangkabau.

Selain nama-nama diatas tentu masih banyak lagi anak muda Minangkabau yang tak bisa disebut satu-persatu yang bertarung pada Pemilu ini. Saya yakin mereka adalah anak nagari terbaik yang dimiliki di Minangkabau. Kemudian juga ada nama seperti Rizal Ramli, Tifatul Sembiring, Yusril Ihza Mahendra, yang disebut sebagai calon presiden pada Juli 2009 mendatang.

Minangkabau hari ini kurang apa? Kenapa selalu menanyakan kapan lahir generasi seperti Hatta Cs? Diluar bidang politik dan pemerintahan, seperti akademisi, pengamat dan pakar semua bidang, pengusaha, pimpinan BUMN, iplomat,sastrawan/budayawan, wartawan, peneliti, hampir diisi oleh anak-anak yang berdarah Minangkabau. Untuk tingkat lokal di Sumatera Barat sendiri, tokoh muda

terus berkiprah di berbagai bidang.

Persoalannya adalah mampukah mereka bersatu untuk membangun kampung halaman, dikala menasional? Mampukah mereka menjembatani antara rantau dan kampung? Bagi mereka yang menjadi caleg butuh pembuktian dari setiap janji yang mereka sampaikan selama kampanye kepada masyarakat. Jangan hanya menjadi caleg impor untuk kepentingan sesaat dari Jakarta. Walaupun anda keturunan nagari *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini. Sekiranya anda duduk menjadi anggota dewan karena dipilih orang kampung, tapi anda melupakan mereka dengan amanah itu, anda sama dengan Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya!

Mengenang Tragedi Simpang Kandih

SENIN, 19 Juli 2009 bertepatan dengan 63 tahun wafatnya Pahlawan Nasional Bagindo Azizchan. Sebuah peristiwa telah merenggut nyawa pejuang muda yang pada waktu itu masih berumur 37 tahun di Simpang Kandih, kecamatan Nanggalo Padang, 19 Juli 1947. Walau wafat dalam usia yang relatif muda, namun, perjuangan yang dilakukan oleh Bagindo Azizchan sangat berarti bagi Indonesia, khususnya Kota Padang.

Bagindo Azizchan lahir di Kampung Alang Laweh Padang pada tanggal 30 September 1910, dua tahun pasca pemberontakan *Blasteng* 1908. Sejak kecil Bagindo Azizchan sudah memperlihatkan watak berani. Ia memiliki rasa keingintahuan yang amat besar terhadap segala sesuatu tanpa memikirkan resikonya.

Di kalangan teman-teman sekolahnya, ia dikenal sebagai orang yang “penaik darah”, tetapi banyak akal. Ia memiliki wawasan yang luas untuk tampil sebagai pemimpin. Sifat relijius dan jujur tumbuh dengan kuat dalam dirinya, padahal ia bukan dari golongan santri atau surau seperti kebanyakan tokoh Minang lainnya. Sifat dasar inilah yang menjadi penyemangat bagi Bagindo Azizchan dalam mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

Pada 17 Agustus 1945, Kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Namun penjajah kolonial belum sesungguhnya hengkang dari republik ini. Masih banyak terjadi gejolak pada

waktu itu. Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1946 Bagindo Azizchan diangkat menjadi Walikota Padang pertama. Dalam memimpin Kota Padang ini ia selalu bersikap tegas, seperti menolak kontak langsung dengan tentara *NICA*. Sehingga binaan Muhammad Roem dan Haji Agus Salim ini menjadi sosok yang ditakuti oleh penjajah.

Berbagai upaya dilakukan oleh tentara Belanda untuk membunuh Bagindo Azizchan. Tragedi Simpang Kandih itulah menjadi momen yang tepat bagi Belanda untuk menghabisi beliau. 19 Juli 1947, bertepatan dengan hari Sabtu. Pada hari itu sehabis sholat ashar, Bagindo Azizchan beserta anak dan istrinya akan meninggalkan Kota Padang. Dengan menggunakan sebuah mobil sedan, Bagindo Azizchan akan menuju Kota Bukittinggi. Dalam perjalanannya, ketika melewati pos tentara Belanda di Jembatan Purus, mobil dibiarkan lewat. Saat sampai di Ulak Karang, mobil itu dicegat oleh dua orang serdadu Belanda. Salah seorang adalah Letkol Van Erp, Komandan Militer Belanda di Padang.

Saat itu, serdadu Belanda ini memberi tahu kepada Bagindo Azizchan bahwa di Lapai telah terjadi sebuah insiden penembakan oleh ekstrimis Indonesia di garis demarkasi. Serdadu Belanda kemudian membawa Bagindo Azizchan ke lokasi peristiwa dengan alasan bisa mengamankan kekacauan yang sedang terjadi. Tentu saja sebagai seorang walikota Bagindo Azizchan merasa bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut. Tanpa ada sedikitpun kecurigaan, beliau langsung menaiki mobil jeep militer Van Erp. Sementara keluarganya dibiarkan menunggu di pos penjagaan Belanda dekat jembatan Ulak Karang. Pada waktu itu keluarga sudah merasa curiga dan was-was atas sikap serdadu Belanda

tersebut.

Sesampai di Lapai serdadu Belanda meminta Bagindo Azizchan turun dari mobil. Alasannya untuk memeriksa tempat peristiwa penembakan di garis demarkasi. Tepatnya di Simpang Kandih, yang saat ini warga Kota Padang mengenalnya dengan sebutan Simpang Tinju. Baru saja turun dari mobil, serdadu Belanda ini langsung memukul kepala Bagindo Azizchan beberapa kali. Kemudian sebuah peluru juga ditembakkan ke pangkal telinganya. Ternyata, serdadu Belanda hanya berpura-pura menyebut ada tragedi penembakan di garis demarkasi. Tujuan sebenarnya adalah menghabisi Bagindo Azizchan.

Peristiwa ini disaksikan dengan mata kepala oleh seorang warga setempat yang bernama Djamaan Malin Batuah. Pada saat kejadian, ia sedang memanjat dan memetik buah kelapa di Simpang Kandih tersebut. Djamaan mengetahui kalau 6 meter dari Bagindo Azizchan ternyata juga ada serdadu Belanda yang bersembunyi di dalam semak. Tentara Belanda inilah yang memuntahkan peluru panas kepada Bagindo Azizchan. Setelah terdengar letusan, kata Djamaan, Bagindo Azizchan langsung tersungkur. Setelah itu Bagindo Azizchan dilarikan ke Rumah Sakit Tentara di Ganting. Beberapa saat setelah itu Letkol Shorborg memberi tahu berita kematian Bagindo Azizchan kepada Wakil Wali Kota Padang Said Rasad.

Kebencian Belanda terhadap Bagindo Azizchan tak berhenti dengan peristiwa pembunuhan itu saja. Belanda tidak mau mengakui telah membunuh Bagindo Azizchan. Ia beralasan, tewasnya Bagindo Azizchan disebabkan oleh peluru nyasar. Bahkan untuk proses pemakaman beliaupun sangat dipersulit. Hingga dengan berbagai jalur diplomasi yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang Said Rasad dan

Johnny Anwar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Polisi Padang. Pada tanggal 20 Juli 1947, jenazah almarhum bisa dibawa ke Bukittinggi. Bagindo Azizchan beristirahat dengan tenang di Makam Pahlawan Bahagia.

Kini, di lokasi pembunuhan Bagindo Azizchan ini berdiri sebuah tugu berbentuk kepala tinju orang dewasa, orang menyebutnya Simpang Tinju. Kalau sebelum tugu itu ada, daerah ini disebut Simpang Kandih. Saya yakin sebagian besar orang yang menetap di Kota Padang mengenal daerah Simpang Tinju ini. Tapi, apakah banyak orang yang tahu apa makna tugu itu? Saya yakin tidak. Lebih prihatin lagi tugu itu tak terawat dengan baik. Saat proses Pemilukada beberapa waktu lalu tugu itu menjadi sasaran tempelan stiker para kandidat gubernur. Saya sedih. Calon pemimpin saja tak menghargai makna sebuah sejarah.

Sebagai anak muda yang terus belajar dalam mengisi kemerdekaan bangsa yang diperingati 17 Agustus mendatang, saya menerima sebuah kepercayaan. Putri Bagindo Azizchan, Hj Ineke Azizchan Nafis memberikan penghargaan kepada saya menjadi “anak angkat”. Tentu saya bangga menjadi bagian keluarga besar Pahlawan Nasional Bagindo Azizchan. Tapi saya memiliki tanggungjawab yang besar memberikan informasi kepada para generasi tentang sosok beliau.

Banyak generasi muda sekarang yang tak mengerti sejarah perjuangan bangsa, bukan sesungguhnya kesalahan kita. Tapi saya menilai ada proses transformasi dari kaum tua yang juga terputus di tengah jalan. Menjelang 65 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia, saya menyebut bangsa ini “Bangsa tak Berkesudahan”.

Kita sangat jauh tertinggal dari vietnam dan Afrika Selatan yang baru beberapa tahun merdeka. Inilah tugas kita melakukan restorasi bangsa. Kita harus kembali kepada cita-cita luhur kemerdekaan.

KNPI Sumbar, Apa Kabar?

KNPI Sumbar tahun 2013 vakum. Tidak aktif. Menghilang dari suara yang lantang. Sudah tiga kali peringatan Sumpah Pemuda hanya upacara ke upacara saja. Banyak acara seremonial, minim karya intelektual. Pengurusnya “gemuk” tak berimbang dengan kerja di tengah masyarakat. Komite Nasional Pemuda Indonesia itu kini seperti tak lagi berkomite. Organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu antara ada dan tiada saja di Sumatera Barat. Bagaimana mentransformasi kepemimpinan daerah, mengurus KNPI saja masih belum selesai.

Berbagai isu berkembang di Sumatera Barat ini. Baik positif maupun negatif. Diantaranya isu tambang liar di Solok Selatan. Konflik warga antar nagari. Gelar adat yang “di jual beli” ke tokoh-tokoh politik nasional. Bantuan gempa yang disunat oknum. Perebutan tanah ulayat antara rakyat dan pengusaha. Termasuk juga berbagai kasus asusila di kalangan remaja dan orang tua. Korupsi yang merajalela di kalangan kepala daerah. Namun hal-hal seperti ini hampir tak tersentuh solusi dan kajian oleh KNPI Sumatera Barat. Sebenarnya besar harapan masyarakat agar pemuda memberi kontribusi. Pemuda dianggap masih objektif dan tak terkontaminasi. Tentu ada pemuda yang menjadi *problem solver* di tengah masyarakat. Tapi KNPI Sumbar sebagai organisasi pemuda nyaris tak terdengar perannya.

Sebagai anak baru di KNPI Sumbar, saya punya harapan

besar untuk belajar. *"Bangga benar kita bisa jadi pengurus KNPI Sumbar...,"* begitu ujar seorang mantan aktivis kampus di sidang pleno. Tak lama setelah itu dia memprotes sendiri ke saya. *"Kok di KNPI Sumbar ini saya tak menemukan apa yang saya harapkan Bang? Kecewa saya! Organisasi pemuda sebesar ini tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kapan berbuat untuk masyarakat?,"* katanya. *"Saya juga merasakan hal yang sama, tapi mari kita terus berkarya dengan diri dan organisasi lain. KNPI Sumbar sedang sakit,"* jawab saya sebagai pengurus yang masih tertera di SK. Belajar *leadership* dengan jenjang kaderisasi berbagai organisasi memang bukan jaminan mampu memimpin. Kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan elemen heterogen menjadi kunci kebersamaan. Itu benar yang terkikis dari pimpinan KNPI sekarang ini. Konflik di internal KNPI Sumbar yang bisa diselesaikan dengan kopi *sakarek* di lapau harus berlarut-larut hingga kepengurusan akan berakhir. APBD tetap diterima, karya nyata untuk masyarakat mana? Sebagai *junior* di KNPI saya telah sering sampaikan kritik konstruktif ini ke Ketua KNPI Sumbar. Itulah yang bisa saya lakukan. Tapi karena sering memberi masukan dan kritikan, sudah setahun ini saya tak pernah lagi dilibatkan kegiatan.

Dalam catatan sejarah Indonesia pemuda mengambil peran yang sangat signifikan. Setidaknya bisa dikategorikan dalam lima *fase* pergerakan. *Fase pertama* tahun 1928, merupakan perjuangan pemuda mempersatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda, tepatnya 28 Oktober 1928. Ini merupakan titik awal penyamaan visi berbangsa dan bernegara diatas kesadaran Bhineka Tunggal Ika. *Fase kedua* tahun 1945, merupakan perjuangan pemuda mendorong proklamasi kemerdekaan dan mempertahankannya. Inilah puncak perjuangan melawan

penjajahan asing. *Fase ketiga* tahun 1966, disebut angkatan '66. Pemuda berperan dalam memurnikan ideologi bangsa. Menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Fase keempat tahun 1973, ditandai dengan pembentukan KNPI. Sebagai wadah berhimpun elemen pemuda, KNPI dituntut mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. *Fase kelima* tahun 1998, dimana pemuda berperan penting menumbangkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Rezim yang dipimpin Soeharto ini membungkam nilai-nilai demokrasi Indonesia. Kelima *fase* gerakan pemuda ini terpisah menjadi tiga ruang waktu sejarah. Pra kemerdekaan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

Berjuang pada pra kemerdekaan dan merebut kemerdekaan, *memforsir* tenaga dan pikiran. Berperang dengan senjata adalah bentuk perlawanan fisik. Mengatur strategi dan berdiplomasi dituntut kemampuan berpikir yang matang. Darah dan nyawa menjadi saksi beratnya perjuangan melawan bangsa asing yang kuat. Penjajahan yang diawali Belanda 350 tahun dan diakhiri Jepang 3,5 tahun bukan waktu yang singkat bagi bangsa kita. Penderitaan berkepanjangan yang dihadapi nenek moyang kita jangan pernah kita lupakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.

Pasca kemerdekaan diraih, kitalah generasi yang harus mengisinya. Tentu tidak lagi dengan angkat senjata. Tapi kita harus mampu melahirkan karya dan prestasi. Mengembangkan semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan diharapkan mampu mem-*filter* hantaman budaya asing yang masuk ke negara kita. Kalau kita tak saring budaya asing, kitapun pelan-pelan akan terjajah. Perang pemikiran namanya. Televisi dan internet

menjadi senjata perang itu. Akibat kalah perang ini lebih bahaya. Kesudahannya kita yang merusak bangsa sendiri. Moral anak bangsa itu benar yang diserangnya.

Pemuda harapan bangsa harus mampu multi peran. Apapun peran yang kita lakoni tetaplah karakter menjadi pegangan. Kalau pemuda terjun ke dunia birokrasi, jangan sampai memupuk jiwa harus dilayani. Pemuda di jalur politik didiklah diri jadi negarawan. Pengusaha muda setelah berharta tetap jaga jiwa berderma. *Dai* muda milikilah sifat kenabian. Menjadi guru jangan hanya sekedar pengajar tapi jadilah pendidik. Menjadi aparatur hukum, jangan pasal-pasal diperdagangkan. Siapapun kita, wajah bangsa ini kitalah yang menentukannya ke depan.

Momen Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi refleksi bagi pemuda. Kita harus punya tekad yang kuat untuk memajukan bangsa. Sumpah Pemuda jadi penyemangat melahirkan karya nyata. Agar kita tidak lagi menjadi pemuda bermental kerupuk, *sontoloyo* dan pembuat masalah. Selamat Hari Sumpah Pemuda.

Membangun Negarawan Muda

HIRUK pikuk politik menjelang pesta demokrasi tahun pemilihan terasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan kontestan Pemilu. Masing-masing parpol mulai mencari calon legislatifnya di tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Bahkan bakal calon presiden yang akan diusung parpol pun beberapa orang sudah berani mendeklarasikan diri.

Sepanjang mata memandang dalam masa kampanye, kita akan lihat *nampang* wajah-wajah politisi yang akan bertarung. Tiang listrik, pepohonan, angkot, iklan di televisi, radio, koran, media online, kalender dan semua wadah yang memungkinkan menjadi tempat jualan politik. Semua mengatakan dirinya-lah yang terbaik. Tak ada yang salah dengan proses ini, selagi suasana ketenangan batin rakyat bisa tercipta. Namanya juga pentas politik. Asal niat dan tujuannya baik untuk masyarakat dan bangsa. Yang tak elok adalah jika satu sama lain, para politisi ini melakukan cara yang tak dibolehkan baik oleh aturan undang-undang, etika, adat istiadat, agama atau norma yang berlaku. Seperti yang sering dipertontonkan selama ini.

Pemilu ke Pemilu kita berharap tercipta kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada prinsipnya hanyalah cara, bukan tujuan, titik berat dari demokrasi adalah mencari kebersamaan dan persamaan, bukan perbedaan. Demokrasi di Indonesia secara formal sudah bagus, namun secara substansi belum tercapai yakni mensejahterakan rakyat. Demokrasi di Indonesia lebih banyak melanggar prinsip demokrasi, dimana

perbedaan lebih menonjol dari persamaan.

Selain itu demokrasi di Indonesia sangat tidak efisien sebab terlalu banyak melaksanakan Pemilu sehingga Indonesia merupakan negara penyelenggara Pemilu terbanyak di dunia. Dalam lima tahun kita bisa bolak balik ke bilik suara, pemilihan walikota/bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif dan presiden. Harusnya dibuat sistem atau regulasi dimana kita ke bilik suara hanya satu kali saja.

Lepas dari hikuk pikuk politik, Dompot Dhuafa sebagai lembaga non politik, lembaga independen yang tak berafiliasi ke parpol politik manapun ikut memikirkan masa depan bangsa. Melalui program Beastudi Indonesia (Etos, *red*) Dompot Dhuafa melahirkan konsep Negarawan Muda. Beasiswa ini concern dalam pengembangan sumberdaya manusia strategis di bidang kepemudaan, pelajar dan mahasiswa untuk membentuk sumber daya manusia pemimpin yang berkarakter unggul, mandiri dan kontributif. Program ini dimulai sejak 1993 hingga sekarang, terdapat di 22 perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Anak-anak cerdas tapi dari keluarga miskin diberikan beasiswa selama empat tahun.

Beastudi Indonesia ingin mencoba melakukan upaya konsolidasi dengan meningkatkan gagasan. Konsepnya dari hanya sekedar kuliah dan fokus prestasi akademik. Fase ini sudah dilewati dengan baik, sekarang sudah membangun negarawan muda dengan memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Terjun dalam berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan. Mengisi ruang kepemimpinan informal di masyarakat. Mereka dibekali dengan *character* dan *nation building*.

Negara kita terpuruk dalam banyak hal belakangan

ini. Makin lama usia kemerdekaan bangsa, malah makin kompleksitas persoalan bangsa. Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah semangat nasionalisme generasi muda yang kian tergerus. Bahkan kondisi ini berpengaruh terhadap output kepemimpinan nasional. Pemimpin sering menjadi *problem maker* bukan *problem solver*. Ironis. Inilah yang melatarbelakangi butuh dilahirkan negarawan muda dalam segala bidang. Dompot Dhuafa beberapa waktu lalu juga telah melakukan Kongres Negarawan Muda Indonesia.

Negarawan bukanlah bagi mereka yang menempuh jalur politik saja. Negarawan bukan juga hanya disematkan bagi mereka yang berusia tua. Negarawan adalah yang mampu menangkap suasana kebatinan rakyat-bangsanya dan berusaha keras –dengan pertaruhan yang besar bahkan jika itu termasuk dirinya, untuk mewujudkannya. Jadi bukan suasana kebatinan yang ada dari dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau partainya, tapi suasana kebatinan rakyat-bangsanya. Jelas, bahwa yang mengaku politisi belum tentu mampu menjadi negarawan, kalau hanya memikirkan diri dan kelompoknya saja.

Negara ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Tentukan peran kita masing-masing. Sederhana apa yang kami tanamkan kepada anak muda bangsa, mengajak dan mengajarkan mereka jadi negarawan muda. Setelah kesadaran dan pemahaman ini ada, bersama kita merawat Indonesia. Belajar adalah cara untuk menyadarkan kita semua bahwa kita tidak boleh merasa cukup, harus terus belajar meningkatkan kapabilitas untuk merawat negara tercinta ini.

Zakat Membangun Negara

INDONESIA negara paling besar di dunia penduduknya beragama Islam. Berbagai versi data menyebutkan angka penduduk muslim Indonesia di atas 80 persen. Tentu saja jumlah penduduk yang besar ini menjadi kekuatan besar dalam banyak hal. Di antaranya ekonomi. Tanpa maksud mengenyampingkan warga negara beragama lain.

Di sisi lain fakta menyebutkan, rakyat Indonesia masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2021 mencapai 27 juta orang (18,2 persen).

Diasumsikan besarnya jumlah rakyat miskin didominasi oleh muslim. Secara zahir kita bisa melihat bagaimana saudara kita yang berebut pembagian zakat fitrah, daging kurban, anak jalanan, peminta-minta, eksploitasi anak, pemutusan hubungan kerja, tenaga kerja ke luar negeri, pengangguran, anak putus sekolah, warga jompo, pemulung, yatim piatu dan lain sebagainya. Tak bisa kita tutupi mereka adalah muslim.

Mengapa ini terjadi? Miskin memiliki makna luas; miskin secara materi, mental, ilmu dan moral. Ketiganya bisa saling berhubungan. Orang yang meminta-minta padahal fisiknya kuat, mentalnya miskin.

Padahal ia bisa mencari pekerjaan lain. Wanita memilih bekerja tuna susila, ia diserang miskin moral. Bodoh karena malas, dihinggapi miskin ilmu. Miskin materi bisa disebabkan oleh keterbatasan ilmu, moral dan mental. Penanganan kemiskinanpun harus berbeda-beda.

Hanya miskin secara materi yang bisa diukur secara angka. Sebagaimana tiap tahun pemerintah merilisnya. Pemerintah sangat sensitif dengan angka kemiskinan. Ini masalah kinerja penguasa dari pusat hingga daerah. Penurunan angka tingkat kemiskinan adalah prestasi.

Sebaliknya jika meningkat, dianggap gagal. Sehingga angka kemiskinan yang dirilis pemerintah perlu diuji lagi tingkat validasinya. Indikator apa yang digunakan. Miskin kota dan desa berbeda cara mengukurnya. Tapi setidaknya angka kemiskinan per tahun versi BPS itu bisa menjadi acuan.

Berharap pada pemerintah saja tak cukup. APBN kita yang sebesar Rp2003,1 Triliun tahun sebiagannya habis untuk belanja rutin. Belum lagi dana yang bocor oleh koruptor. Dana serapan untuk program pemberantasan kemiskinan pada akhirnya tak banyak mempengaruhi pengurangan warga miskin. Warga miskin tetap miskin, pejabat korup bertambah kaya.

Rakyat miskin di negara muslim terbesar, apa solusinya? Zakat adalah potensi ekonomi umat yang belum terkelola secara baik. Hasil riset yang pernah dilakukan BAZNAS, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011 menyebutkan, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327 Triliun. Dari potensi yang ada, baru sekitar Rp5 Triliun terkelola oleh lembaga resmi. Kehadiran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum maksimal menggali potensi yang besar itu. Butuh waktu, komitmen, konsisten dan profesional mengelola dana umat.

Sejarah Islam mencatat, zakat menjadi instrumen ekonomi penyelesaian masalah kemiskinan. Beberapa fragmen membuktikan. Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang menunaikan zakat. Kekhalifahan Umar bin Khaththab dan

Umar bin Abdul Aziz membuktikan kejayaan ekonomi berbasis pengelolaan zakat.

Zakat akan mampu membangun Indonesia, jika pengelolaannya baik. LAZ bentukan masyarakat dan BAZ representasi pemerintah harus diberikan ruang yang sama oleh negara. Tanpa harus ada yang memonopoli. Apalagi kemudian negara mengebiri masyarakat yang ingin membangun negara. Gerakan civil society yang dibangun oleh LAZ harus dikuatkan oleh regulasi yang adil dan elegan oleh negara.

Sinergisitas adalah kunci menyelesaikan 27 juta orang saudara kita yang miskin. Masyarakat wajib zakat juga diimbau menyalurkan zakatnya kepada lembaga resmi, tidak lagi disalurkan sendiri yang pada akhirnya juga tak selesaikan masalah jangka panjang.

Merawat Indonesia

INDONESIA Milik Siapa? Pertanyaan ini tentu sedikit menggelitik kita. Emangnya siapa yang memiliki negara ini selain kita? Sebagai rakyat yang lahir di Tanah Air ini kita berdaulat atas kepemilikan Indonesia. Agustus 2022 ini 77 tahun Indonesia merdeka. Usia yang sudah cukup tua jika diibaratkan ke manusia. Masa perjuangan hingga mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 dilalui dengan onak dan duri. 350 tahun dijajah asing tentu bukan waktu yang singkat. Penjajahan adalah kemelaratan.

Kemerdekaan yang memasuki usia 77 tahun ini pun menghadapi tantangan. Indonesia melalui fase “penjajahan” selanjutnya. Penjajahan ini tentu tak angkat senjata semisal bambu runcing. Namun penguasaan asing akan aset bangsa kita. Kata Pratikno, Rektor UGM, aset negara sekitar 70-80 persen telah dikuasi asing. Perbankan lebih dari 50 persen. Migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi 70 persen. Pertambangan emas dan tembaga mencapai 80-85 persen tak lagi milik kita. Perkebunan dan pertanian pun sudah 40 persen. Sebarannya ada di depan mata kepala kita.

Budaya leluhur bangsa kita dicaplok pula oleh negara tetangga. Kita tak memroteksinya dengan baik. Perang pemikiran melalui media massa terus berkembang. Akibatnya terbangun imej negatif. Indonesia disebut sarang teroris, negara porno, negara korup dan lain sebagainya. Penjarahan generasi genius yang terlahir di Ibu Pertiwi tak bisa dielakkan. Diberi beasiswa dan pekerjaan mapan. Mereka tak mau pulang

mengabdikan untuk bangsanya.

Budaya hidup ketimuran berubah menjadi kebaratan. Semangat gotong royong terganti sindrom individual. Krisis finansial dan moneter membuat kita ketergantungan sangat tinggi ke negara donor. Rakyat kita menjadi konsumen terbesar produk luar. Perdagangan bebas ASEAN yang akan dihadapi tahun depan sebagai ancaman dan tantangan. Ini keniscayaan. Kita mau ambil peran apa? Menjadi pemain atau penikmat saja?

Keterjajahan juga berkembang dalam diri elemen bangsa. Semangat nasionalisme generasi bangsa kian luntur. Transformasi sejarah perjuangan bangsa tak tersampaikan dengan utuh. Nilai-nilai kebangsaan tersimpan saja sebagai flatform. Keteladanan terkikis seiring perbuatan amoral pemimpin. Kepentingan diri dan kelompok lebih utama dari mendahulukan orang banyak. Negarawan menjadi langka, tukang komentar kian ramai. Mengapa bangsa kita jadi begini?

Merawat Indonesia adalah tugas kita semua. Mengisi kemerdekaan itu mutlak. Hanya mengisinya saja, bukan merebutnya. Beruntung benar kita dibanding anak bangsa lain yang hidup di bawah desingan peluru. Tak terbayang bagi kita rasanya hidup di negara sedang perang.

Kita mulai dari yang paling mudah dan sederhana merawat bangsa ini. Peduli terhadap penderitaan orang lain, dan ikut berkontribusi meringankannya. Menghindarkan atau menahan diri dari hujat menghujat atau memfitnah orang lain. Kampanye hitam atau negatif saat masa kampanye Pilpres ini cukup mengganggu ketenangan kita. Menghindari itu adalah cara kita menjaga kedamaian. Berpikir positif dan selalu berprasangka baik terhadap orang lain.

Bekerja sungguh-sungguh dimanapun kita mengabdikan

diri. Mengajak orang lain berbuat baik. Jangan hanya sholeh pribadi saja tapi juga harus sholeh sosial. Menjadi *problem solver* di tengah masyarakat bukan *problem maker*. Menghargai orang yang berbeda etnis, agama dan suku bangsa. Teruslah belajar menjaga Indonesia agar lebih baik.

Kemiskinan di Antara Bencana dan Harga BBM

“Bagaimana lagi nasib kami ke depan, Pak. Rumah sudah hancur karena banjir. Suami hanya kerja serabutan. Anak-anak masih kecil. Sekarang kebutuhan pokok mahal karena BBM naik.”

BEGITU curhat seorang ibu di lokasi pengungsian korban *galodo* (bandang banjir, red) Jorong Lungguak Batu, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Pasaman saat saya mengunjungi dan menyerahkan bantuan Dompot Dhuafa Singgalang, Kamis, 20 Oktober 2014.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kondisi yang menggambarkan keadaan mereka saat ini. *Galodo* itu datang sore Kamis (13/11/2014) lalu sekitar jam 17.30 wib. Menjelang pergantian siang dan malam. *“Untung kejadiannya sore Pak, kalau tengah malam kami ndak tahu lah...,”* sahut ibu lain. Saya ikut larut atas kesedihan mereka.

Derita mereka tak hanya sampai di situ. Empat hari setelah banjir bandang itu menghadang, kabar buruk datang dari Istana. Pemerintah menyampaikan kebijakan baru. Senin (17/11/2014) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diumumkan Presiden Jokowi beserta kabinet. Harga baru premium Rp.8500 dan solar Rp.7.500. Berlaku mutlak Selasa (18/11/2014). Gonjang ganjing kenaikan BBM ini muncul sejak awal Jokowi-JK dilantik. Ibarat hujan lebat yang membawa *galodo* di Pasaman.

Bencana nasional telah tiba. “Galodo BBM” diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Hukum sebab akibat ekonomi pasar. Derita tak berkesudahan bagi masyarakat Indonesia. Keadaan paling berat akibat kenaikan BBM ini akan dirasakan masyarakat korban bencana alam. Bencana alam menyebabkan penurunan angka kemiskinan lambat. Bahkan muncul fakta kemiskinan baru.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Proopenas menyebutkan kemiskinan sementara (transient poverty) salah satunya disebabkan oleh bencana alam. Data Kemenko Kesra menyebutkan akibat bencana alam setidaknya ada tambahan 480 ribu jiwa penduduk miskin baru pada bulan Maret-September 2013. Idealnya setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia turun sekitar 1%. Tetapi saat ini rata-rata penurunan angka kemiskinan per tahun hanya 0,6%. Itu akibat bencana alam saja tanpa kenaikan BBM.

Muruarar Sirait, politisi PDI-P sebelum kenaikan BBM ini pernah menyebutkan bahwa setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp500 per liter menimbulkan inflasi 0,72 persen. Akibatnya masyarakat membutuhkan penghasilan tambahan Rp65 ribu per bulan. Dengan kenaikan Rp500 saja penambahan orang miskin bisa mencapai 1,5 orang.

Dompot Dhuafa pasca pengumuman kenaikan BBM merilis secara resmi hasil analisis. Hasil kajian lembaga zakat itu menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 dipastikan akan menambah jumlah rakyat miskin Indonesia sebesar 2,35 persen atau sekitar 6 juta jiwa. Data rakyat miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta orang. Jika dikalkulasi dengan jumlah tersebut maka rakyat miskin akan bertambah menjadi 34,28 juta jiwa. Pengangguran juga diperkirakan akan

bertambah 2 juta jiwa.

Keadaan semakin buruk jika bencana alam diikuti kenaikan BBM. Curhatan seorang ibu di posko pengungsian banjir bandang Pasaman itu mewakili ratapan sedih korban bencana alam lain di Indonesia. Indonesia supermarket bencana. Takdir Tuhan yang tak bisa kita lawan. Kerusakan alam ulah tangan manusia juga. Penebangan hutan secara liar contohnya. Kenaikan BBM juga keputusan mutlak sang penguasa negara. Subsidi untuk orang miskin malah dinikmati orang berada. *Miris!*

Faisal Basri, Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas beberapa hari lalu mengatakan, pendapatan orang miskin itu 32% dihabiskan untuk membeli beras. Sejak 2008 sampai sekarang, total kenaikan harga beras mencapai 70%. Ini yang buat orang miskin makin miskin, bukan BBM yang kenaikannya hanya 31%. Kebijakan subsidi terlalu memanjakan rakyat yang berada di golongan kelas menengah, bukan orang miskin. *Nah lo?*

Mengapa negara kita salah urus begini? Penguasa negara kurang peka terhadap rakyatnya. Sibuk dengan masalah internal saja, seperti opera di Senayan yang kita tonton. Ketimpangan kaya miskin kian kentara. Orang kaya makin kaya. Orang miskin makin miskin. Harapan perubahan menjadi samar. Rakyat cenderung diberikan harapan palsu, *di-PHP-in aja.*

Kenaikan BBM memang bukan akhir segalanya. Kalau pemerintah salah ambil kebijakan, tanggung sendiri dosanya karena zalim terhadap rakyat. Kalau benar dan tujuannya baik, semoga terselamatkan orang banyak. Kebijakan pemerintah juga tak mungkin akan dianulir. *Ya* kita belajar lebih hemat. Hindari kebiasaan konsumtif. Kerja lebih maksimal lagi karena

rejekinya Tuhan mengatur. Tingkatkan kepedulian terhadap sesama karena hak orang lain juga ada pada orang berpunya. Mungkin itu hikmah sederhananya untuk kita sikapi.

Alasan pemerintah terhadap kenaikan BBM bisa mengalihkan lebih Rp100 triliun dari konsumtif ke belanja produktif. Kita lihat dan kawal realisasinya seperti apa. Ada waktu lima tahun pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja untuk bekerja.

Saya berharap bahwa pemerintah juga membuat kebijakan khusus bagi pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana alam. Khususnya bencana skala besar dan berdampak fatal. Pembangunan infrastruktur dan fisik yang rusak itu mutlak. Jika infrastruktur pulih, persoalan tak berhenti sampai di situ. Masyarakat rentan miskin di daerah bencana jika tak diselamatkan, mereka akan miskin permanen. Pembiayaan ekonomi tanpa bunga (*trust fund*). Berupa hibah dan pendampingan bisa menjadi pilihan model.

Program seperti ini pernah dibuat Dompot Dhuafa di Padang Pariaman pasca gempa 2009 dan tsunami 2010 di Mentawai. Pemberian modal usaha bergulir tanpa bunga (*qardhul hasan*). Pendampingan dua tahun terhadap usaha masyarakat korban bencana.

Doa untuk Koruptor

PENJARA tidak lagi menjadi tempat petakut bagi koruptor. Penjara khusus yang disiapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk koruptor sudah penuh. Sehingga tersangka kasus korupsi baru terpaksa dititip di penjara lain. Di daerah-daerah tersangka kasus korupsi tak punya penjara khusus. Mereka digabung dengan narapidana lain.

Bagi koruptor masuk penjara seolah hanya tempat transit dan semedi sementara. Di antara mereka masih bisa menjalankan kekuasaan di “hotel prodeo” itu. Ada pemenang Pilkada berstatus tersangka korupsi dilantik di dalam penjara. Mendapat perlakuan khusus dengan fasilitas mewah. Bisa keluar pada waktu tertentu.

Persidangan-persidangan yang digelar di pengadilan seperti dagelan saja bagi mereka. Mengumbar kebohongan, mengaku tidak tahu dan berlagak tak bersalah. Jika disorot kamera televisi, melambai-lambai tangan kotornya tanpa dosa. Bak artis yang sedang dinanti banyak penggemar. Padahal rakyat mencibir kepadanya.

Oknum hakim, jaksa dan polisi pun bisa mereka beli. Jika si koruptor bagian penting dari pemegang kekuasaan, penegak hukum dia intervensi. Jika tak berhasil ditekan, disanksi pindah atau dicopot jabatan. Nyawapun taruhannya.

Bagi pelaku korupsi, pasal-pasal atau ayat-ayat ancaman hukuman korupsi dalam undang-undang sepertinya dianggap sampah. Semakin banyak aturan dibuat, pelaku korupsi terus bertambah. Koruptor baru muncul, termasuk mereka yang

terlibat membuat aturan itu. KPK sebagai lembaga punggawa pemberantas korupsi juga ingin mereka bubarkan. Anggota KPK dan penyidiknyanya turut diseret ke berbagai perkara. Segala macam cara dilakukan sebagai bentuk pelemahan.

Jangankan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang, ancaman neraka dan azab Tuhan bagi pelaku korupsi di dalam kitab suci saja dilangkahinya. Pengadaan kitab suci Al-Qur'an pun bisa dikorupsi. Haji sebagai rukun Islam, uang jamaah juga diembatnya. Tak satu agamapun yang membolehkan korupsi. Sudah pasti tidak satu pun ayat-ayat kitab suci membenarkan perbuatan haram itu. Tapi di depan terdapat agama tak luput dari praktik korupsi.

Teriakan, makian dan hujatan dari rakyat tak didengar lagi. Telinga disumbat sampai pekak. Mata dipicing tak melihat demonstrasi pegiat anti korupsi. Hati koruptor entah terbuat dari apa. Mental mereka kuat bak baja berkarat. Korupsi berawal dari personal oknum, kian berkembang ibarat jamur tumbuh setelah hujan. Ada pula istilah korupsi berjamaah. Korupsi merupakan dehumanisasi yang nyata merusak peradaban. Kini korupsi menjadi tragedi kemanusiaan mahadahsyat sistematis dan masif di bangsa ini. Bangsa kita betah miskin di antaranya ulah koruptor.

Transparency International merilis *Corruption Perceptions Index (CPI)* Desember 2014, menyebutkan indeks korupsi Indonesia naik dari 114 ke 107 dari 174 negara yang diperiksa. Peringkat 107 ini sama dengan Argentina dan Djibouti. Indonesia masih jauh di bawah negara serumpun seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Dari 28 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. 18 negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruh 100 skor. 0 berarti terkorup dan 100 berarti

paling bersih. Indonesia mendapat skor 34, naik dari skor 32 tahun 2013.

Jika penjara tak lagi mempan, undang-undang dianggap sampah, ayat-ayat Tuhan dilangkahi, hujatan dan makian tak didengar, penerapan hukuman mati tak kunjung direalisasi, apalagi cara untuk menghukumi koruptor? Berdoa untuk koruptor adalah cara lain yang bisa dilakukan. Berapa banyak rakyat miskin terzolimi oleh koruptor. Uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat disunatnya. Rakyat disuruh taat bayar pajak, tapi pungutan negara itu tak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan.

Doa orang terzolomi dimakbulkan Tuhan. Maka berdoalah wahi kaum miskin kota, dhuafa di desa, anak yatim, piatu dan terlantar, penyandang cacat, para pengemis, para penganggur, anak miskin putus sekolah dan orang jompo agar para koruptor itu bertaubat. Agar koruptor mendapat ganjaran setimpal di dunia dan akhirat. Berdoalah agar mereka sadar dan kembalikan uang negara yang dimalingnya. Berdoalah agar pejabat dan kroni-kroninya yang berniat korupsi mengurungkan rencana buruknya.

Berdoalah agar koruptor yang kabur ke luar negeri segera pulang. Berdoalah untuk keluarga koruptor agar mereka malu semalu-malunya. Doakan anak koruptor agar bisa menggugat orang tua-nya karena memberi makan dari uang haram. Doakan agar suami bisa memberi pelajaran kepada istri yang korup, istri kepada suami yang korup. Berdoalah koruptor yang telah mati diampuni dosanya. Berdoalah agar kita tidak menjadi embrio koruptor baru.

Berdoalah wahi rakyat Indonesia agar pemimpin dan wakil rakyat benar mengurus negara. Berdoalah agar penegak hukum diberikan kekuatan menegakkan kebenaran.

Tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tak dikempiskan. Berdoalah untuk kebaikan kita dan bangsa tercinta. Kemaslahatan anak cucu di masa depan. Teruslah berdoa di setiap waktu baik sendiri maupun berjamaah. Wahai anak bangsa berdoa dan berusaha-lah Merawat Indonesia dengan karya. Bukan membawa malapetaka!

“Ya Allah selamatkanlah bangsa kami dari segala macam bentuk praktik korupsi, musibah, kobodohan dan penguasa yang zolim...”

Nasihat untuk Pemimpin

BUKAN sekedar kebetulan, tapi sebuah skenario dari Allah. Saya diajak oleh Ustadz H. Ferry Nur, S.Si bersilaturahmi dengan Walikota Padang, Mahyeldi di rumah dinas nya, Selasa (19/5/2015). Ustadz H. Ferry Nur adalah Ketua Umum Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA). Beliau seorang ulama berasal dari Sariak, Sungai Pua, Agam, tapi berdomisili di Jakarta. Beliau adalah ulama yang disegani, karena sangat concern terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Tahun 2010 Ustadz Ferry Nur ditahan oleh Israel setelah penyerbuan terhadap Kapal Mavi Marmara, yang membawa bantuan untuk Palestina. Beliau terindikasi keracunan dari minuman yang diduga dilakukan oleh tentara Israel. Kadar arsen dalam tubuhnya mencapai 0,5071 padahal batas normalnya antara 0,1 sampai 0,25 miligram per liter. Racun arsenik itu sebenarnya bisa membunuh orang per lahan-lahan. Namun atas kehendak Allah beliau sehat hingga sekarang setelah proses pengobatan.

Seringkali saya menemui Walikota Padang dalam berbagai urusan, namun pertemuan ini berbeda. Mendampingi seorang ulama dan pejuang Islam internasional. Sepanjang perjalanan menuju rumah dinas itu saya ditanya banyak hal oleh Ustadz Ferry tentang perkembangan kota Padang selama kepemimpinan Mahyeldi-Emzalmi. Sebisanya saya menjawab. Sedikit banyak sebagai warga Padang saya tahu program-program Pemko Padang.

Awal pertemuan mereka menjadi sangat haru, saya melihat

mata Mahyeldi berkaca-kaca. Ternyata keduanya sahabat lama. Setelah kami datang, Ketua DPRD Padang, Erisman ikut bergabung. Saya berada di antara ulama (ahli agama) dan umara (pemimpin pemerintahan). Tujuan silaturahmi Ustadz Ferry adalah memberikan nasehat dan mendoakan kedua pemimpin itu.

Nasehat penuh hikmah dan pelajaran. Bagi Walikota Padang, Ketua DPRD dan pesan untuk semua kepala daerah serta wakil rakyat yang sedang mengemban amanah. Pelajaran bagi saya dan untuk anak muda lainnya. Pesan bagi siapa saja yang kelak akan jadi pemimpin.

Nasehat itu terkesan berani. Disampaikan dengan ruhiyah yang kuat. Tanpa beban dari hati yang tulus. Tak ada kepentingan politik apalagi mengharap materi. Semata hanya untuk kebaikan. Setidaknya ada tiga inti nasehat yang disampaikan; amalan khusus sebagai benteng diri, menjamin hak sesama muslim dan masa kepemimpinan berbatas waktu.

Pertama, seorang pemimpin harus memiliki amalan khusus. Di luar ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa Ramadhan. Pemimpin dituntut mengamalkan amalan khusus lainnya secara konsisten. Ibadah itu bisa berupa tahajud, sunat dhuha, membaca Al-Qur'an, bersedekah, puasa sunat, sholat berjamaah atau lainnya. Tujuan ibadah khusus itu adalah sebagai benteng diri bukan pencitraan politik. Kesibukan pekerjaan dan banyaknya aktivitas menjadi godaan orang lalai dalam beribadah. Sholat wajib bisa saja ditinggalkan.

Bagaimanapun hebatnya anak buah atau staf di pemerintahan belum tentu akan mampu menyelesaikan begitu beratnya tanggungjawab. Maka kedekatan seorang pemimpin kepada Allah dan hubungan baik dengan rakyat asbab mencari solusi berbagai persoalan. Ibadah memang urusan personal

orang dengan Tuhan-nya. Namun akan terimplikasi dalam sikap dan perbuatannya.

Kedua, perbedaan ideologi dan pilihan politik jangan sampai merusak pemenuhan hak sesama muslim. Di antara hak sesama itu adalah saling menghormati, menghargai menasehati, menjaga hubungan baik, tidak saling menghina, menghujat, membunuh karakter, mencaci maki hingga memutus silaturahmi bahkan berujung kepada konflik. Perbedaan pilihan politik bukanlah sebuah dosa, tapi hanya cara menentukan pemimpin.

Ideologi politik bisa saja berbeda tapi ukhuwah harus dijaga. Perbedaan adalah dinamika, jangan menjadi alibi merasa paling benar/kuat/hebat. Partai politik hanya wadah aspirasi. Bukan partai yang akan mengantarkan seseorang menuju syurga. Keimanan dan ketaqwaan, kualitas hubungan sesama manusia dan ketaatan kepada Allah menjadi jaminan mutlak.

Apalagi ini menjelang pemilu dan pilkada, baik kabupaten/kota maupun propinsi. Nuansa kompetisi kental terasa. Semua mengkalaim dirinya yang paling pantas. Tebar pesona dimana-mana. Baik petahana maupun yang sedang mencoba peruntungan. Rakyat biasanya menjadi komoditas utama drama politik. Jika calon kepala daerah punya niat baik melakukan perubahan, maka bersainglah secara sehat dan sportif. Jangan hanya siap menang tapi tak siap kalah. Kondisi tersebut bisa saja menjadi embrio perpecahan vertikal elit dan horizontal rakyat.

Ketiga, masa kepemimpinan politik memiliki batas waktu. Namun pertanggungjawaban bisa lebih lama dari masa jabatan itu. Lihat saja kondisi nyata, jabatan hanya lima tahun, tapi di penjara bisa belasan tahun karena korupsi. Tak usai di

situ saja, pertanggungjawaban akhirat pun kelak menanti. Di antara hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat yang dipimpin. Minimal kebutuhan dasar.

Jangan sampai ada rakyat kelaparan di saat kepala daerah dan wakil rakyat makan lahap kekenyangan. Celaka bagi pemimpin jika ia sibuk bergembira ria sementara rakyat menangis menderita. Rakyat mengerang kesakitan karena tak mampu membeli obat. Banyak anak putus sekolah hingga mengemis di jalanan ketika pejabat melewatinya dengan mobil patwal. Di tangan kepala daerah terenggam kekuasaan dan kewenangan, maka gunakanlah untuk mencegah kemungkar dan kemaksiatan. Gunakanlah anggaran dengan tepat untuk kesejahteraan rakyat.

Memimpin adalah menderita kata Haji Agus Salim. Jabatan merupakan amanah. Menginginkan sebuah jabatan, berarti menyiapkan diri menjalani penderitaan. Pemimpin adalah pelayan bukan untuk dilayani dalam teori birokrasi. Setiap kita adalah pemimpin sesuai hadits Nabi Muhammad. Pada akhirnya kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Jangankan memimpin ratusan ribu atau jutaan orang, termasuk bagaimana memimpin diri sendiri.

Saling menasehati seperti ini harus dibudayakan. Begitu indah ritme kehidupan bernegara, jika ulama dan umara saling bersinergi. Saling mendengarkan dan mau menerima masukan. Tugas *umara* adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Tugas *ulama* adalah penjaga gawang moralitas dalam segala aspek kehidupan umat. Termasuk moral para penguasa.

Perda Sampah, Apa Kabar?

LAMPU merah *traffyclight* di Jalan Sudirman Padang menyala. Saya menginjak rem. Di depan saya berhenti sebuah mobil mewah. Dari dalam mobil itu penumpangnya membuang sampah ke jalan. *Tissue*, kulit kacang dan puntung rokok.

Di *traffyclight* itu menempel papan layanan informasi masyarakat. *Running text*-nya menyala. Membuang sampah tidak pada tempatnya, didenda Rp.5.000.000 sesuai Perda No 21 Tahun 2012 Tentang Sampah. Bagi pemilik kendaraan roda empat wajib menyediakan tempat sampah di kendaraannya. Begitu kira-kira isi pesannya. Lampu hijau menyala. Mobil mewah itu *kisok* larinya. Sampahnya berserak begitu saja.

Padahal per 1 Januari 2015 secara resmi diberlakukan Perda Kota Padang No 21 tahun 2012 Tentang Sampah. Bulan Januari-Februari 2015 diberlakukan peringatan bagi yang melanggar Perda tersebut, tindakan bersifat persuasif. Mulai bulan Maret 2015 akan diberlakukan tindakan pidana ringan, untuk selanjutnya diberlakukan sanksi, bagi pelanggar yang tertangkap tangan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau membayar denda maksimal Rp5 Juta. Tegas dinyatakan dalam perda tersebut.

Perda ini sempat *booming* karena ada harapan kebersihan kota akan bisa lebih baik. Bagi kita yang menjunjung tinggi nilai kebersihan, menyambut antusias aturan ini. Terbayang oleh kita kota ini tak lagi *basilemak peak*. Senang mata memandangnya.

Untuk tahap awal Perda ini diberlakukan pelaksanaannya

di sepuluh titik. *Pertama*, mulai dari kawasan Jalan Bagindo Azis Chan, Sudirman, Rasuna Said hingga ke Khatib Sulaiman. *Kedua*, dari kawasan Jalan S Parman, Juanda, Veteran, Damar dan Pemuda. *Ketiga*, kawasan Jalan Ratulangi dan Belakang Olo dan *keempat*, Jalan A Yani. Lalu, *kelima*, Jalan Ujung Gurun, *keenam* Jalan Raden Saleh, *ketujuh* Pantai Padang, *kedelapan* Pantai Air Manis, *kesembilan* Pantai Pasir jambak dan terakhir di kawasan Jalan M Yamin.

Raso-raso ka lai, bahkan telah diluncurkan pula Tim Satuan Tugas (Satgas) Operasi Justisi Penertiban dan Pemeliharaan Kebersihan Kota oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, beberapa waktu lalu. Tim Justisi ini, personil pelaksanaannya, tergabung dari Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Polresta Padang, Sat Pol PP, Tim SK4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan juga sopir pratoli. Tujuannya adalah tindak lanjut dalam penegakan Perda tersebut.

Di sepuluh kawasan yang telah ditetapkan sebagai percontohan tadi tim ini akan mengintai/mengawasi orang yang buang sampah sembarangan. Dalam bekerja tim Justisi ini diatur patroli dua *shift*, yakni *shift* I dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan *shift* 2 dari pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Kemudian untuk persidangan, yaitu dilaksanakan satu sampai dua kali dalam seminggu. Hal itu terungkap dalam dialog Forum Editor di Padang TV, Selasa 9 Desember 2014 dengan tema “Padang Bersih”. Saya hadir juga sebagai salah seorang pembicara.

Aturan yang dibuat sudah sangat ideal. Pelaksanaannya? Belum berjalan sesuai harapan. Masih jauh panggang dari api. Seperti yang pernah saya saksikan di depan mata, Jalan Sudirman yang notebenanya sebagai kawasan percontohan.

Saya kira begitu juga dengan sembilan kawasan lainnya. Penasaran, saya coba observasi ke beberapa lokasi. Sama saja.

Di Jalan Juanda dekat kantor saya begitu juga. Sampah berserakan dari Pasar Pagi. Jalan M Yamin malam hari sampai Pasarraya *ndak dapek disabuik*. *Sarok jo bau busuak* menyengat jika selesai hujan. Kawasan pantai tak usah dibaca. Pantai Padang, Pantai Air Manis dan Pasir Jambak jadi lautan sampah pengunjung. GOR Agus Salim pagi hari Minggu setelah olahraga massal begitu juga. Jalan A Yani mungkin yang agak bersih dan rapih. Kawasan rumah dinas walikota soalnya.

Saya tanya ke *pasukan kuning* yang biasa mengumpulkan sampah setiap hari di Jalan Juanda, apa saja pengaruh Perda Sampah ini? Tidak ada katanya. Bahkan dia juga tidak paham bagaimana isi perda itu. "*Kami ndak paham Perda itu, nan sarok begitu saja banyaknya, orang buang sampah saja sembarangan, kami jalankan tugas semestinya,*" kata Pak Sarok, begitu dia senang dipanggil.

Masalah kebersihan kembali kepada kebiasaan individu. Orang yang biasa bersih kemana saja tak bisa buang sampah sembarangan. Kalau dia makan permen, jika tak ada tong sampah, dimasukkanlah sampah itu ke dalam tas atau saku. Orang yang tak biasa bersih, *sakalamak hati-nya* saja. Untuk itulah Perda ini dibuat. Menertibkan orang berkebiasaan buruk soal sampah. Agar muncul keasadaran.

Sampah ini jika tak diatur banyak akibatnya. Merusak pemandangan, menimbulkan berbagai penyakit, jika menyumbat selokan dan menumpuk di sungai banjir kesudahannya. Apalagi produksi sampah di Kota Padang per hari bisa mencapai 500 ton. Kalau dikumpulkan sudah bisa membuat bukit. Selama ini urusan sampah hanya dibebankan

kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja. Fasilitasnya juga sangat terbatas.

Soal Perda Sampah ini tak hanya terkait sanksi bagi yang melanggar. Tapi sudah sejauh mana sosialisasinya. Aturan tinggal aturan, jika orang tidak tahu. Sudah diperingatkan dengan sanksi saja masih banyak tak peduli. Harusnya petugas kebersihan berbaju kuning itu bisa digerakkan untuk sosialisasi. Setiap hari mereka *kan* berinteraksi dengan produsen sampah. Pelajar dari SD hingga SMA, mahasiswa di semua perguruan tinggi, komunitas-komunitas kreatif, pemanfaatan sosial media, transportasi umum, perkantoran, *email* dan *SMS blast* dan media lainnya mestinya bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi perda ini.

Beberapa waktu lalu saya diundang menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kantor Walikota Padang. Dalam sambutannya pejabat Pemko Padang yang membuka acara itu mewanti-wanti agar perda tentang disabilitas ini tak bernasib sama dengan perda sampah. Perda tinggal perda, banyak biaya membuatnya, tapi tak dijalankan, percuma saja. Begitu katanya. Nah!

Akuntabilitas Etika

TIDAK ada yang salah jika pejabat sekelas gubernur atau wakil gubernur membeli mobil dinas baru, bahkan berapa pun harganya. Jika sudah melalui tahapan anggaran, diusulkan ke legislatif, kemudian disetujui untuk ditenderkan, sudah sah mobil itu diadakan.

Sebagai pejabat tertinggi di sebuah provinsi, gubernur dan wakil gubernur punya hak untuk itu, apalagi jika benar mobil dinas lama sudah tidak layak. Itu dapat membahayakan keselamatan dirinya. Harganya pun masih di bawah Rp 1 miliar rupiah. Sangat wajar. Rakyat biasa saja juga bisa membelinya. Mobilitas gubernur dan wakil gubernur itu sangat tinggi. Wilayah teritorial kekuasaannya berbagai kabupaten/kota. Medan masing-masing daerah juga berbeda. Ada jalan yang mulus dan ada yang harus mendatangi rakyat ke daerah terpencil dengan jalan tanah, bahkan mobil melewati sungai.

Kadang, dalam bertugas sebagai kepala daerah disambulkan pula menjalankan tugas sebagai pimpinan partai menemui kadernya, tidak ada juga yang salah jika pimpinan legislatif (DPRD) menganggarkan rehab rumah dinas. Mau dibangun kembali semegah istana, bangunlah. Mau memperbesar rumah dinas itu sehingga mampu menampung ribuan kader partai berkumpul, buatlah. Jika memang anggarannya memadai, diusulkan-disetujui-ditenderkan, dan sesuai prosedur, hal itu sah-sah saja.

Juga tidak ada yang salah jika ada pejabat yang sering

makan enak di rumah makan atau restoran, kemudian hobi memposting di sosial media. Toh, bisa jadi dia makan dengan uangnya sendiri. Bahkan, kalau pun makan dengan uang negara, itu hak dan fasilitas yang melekat padanya sebagai pejabat. Makanlah sepuas-puasnya.

Yang kurang bagi sebagian pejabat kita adalah rasa atau akal sehat. Rakyat berada di kondisi sulit. Wabah pandemi 2021 berdampak luar biasa. Dampak ekonomi paling utama. Banyak rakyat kehilangan pendapatan karena diberhentikan dari pekerjaan. Mereka dibatasi beraktivitas, sementara mereka harus berjualan sekedar mencari makan.

Banyak yang terpapar Covid-19 dan butuh penanganan serius. Jika terlambat ditangani atau fasilitasnya tak memadai, resiko terburuknya adalah nyawa melayang. Pahlawan kesehatan atau nakes yang sudah berjuang sehabis tenaga, insentifnya pun terlambat dibayarkan.

Jika membeli mobil dinas baru, merehab rumah dinas yang masih sangat layak, atau hobi memperlihatkan makan enak ke publik dengan kondisi seperti ini, tanda malu benar-benar telah hilang dari pejabat kita. *Sense of crisis*-nya minus. Jika tetap membeli mobil dinas baru, merehab rumah dinas atau makan enak pejabat dengan uang negara bisa dipertanggungjawabkan anggarannya, tanpa ada temuan atau kerugian negara sekali pun.

Tapi yang harus diingat adalah pertanggungjawaban (akuntabilitas) moral dan etika di hadapan publik dan Allah Yang Maha Melihat. Etika tidak lagi menjadi *code of conduct* bagi pejabat negeri ini!

Politik Olahraga

SEMUA atlet dan pelatih utusan Sumbar yang berjuang di PON Papua, lebih dari sekedar patriot. Mereka adalah pahlawan. Pahlawan olahraga. Baik yang mendapat medali ataupun tidak.

Semangatnya bukan hanya pantang menyerah. Tapi menuju medan laga dengan segala pengorbanan. Bertaruh jiwa, raga dan harta.

Tidak hanya bersimbah keringat, tapi darah mengucur karena terluka. Tulang yang patah karena cedera. Aset tergadai untuk beli peralatan. Meninggalkan bangku sekolah demi latihan. Pamit ke anak istri untuk membawa nama baik provinsi.

Apresiasi juga untuk pengurus cabang olahraga yang telah menyiapkan atlet multitalenta. Menjadi pengurus cabang olahraga ini orang berjiwa sosial tinggi. Banyak berkorban baik waktu, bahkan materi. Kepuasan tertinggi pengurus cabang olahraga itu ketika atlet meraih prestasi.

PON merupakan medan laga tertinggi bagi atlet di bumi pertiwi. Mereka yang berkompetisi telah melewati serangkaian seleksi, hingga mewakili 34 provinsi. Bertarung demi marwah daerah.

PON ke XX tahun 2021 penuh tantangan. Pelaksanaannya sempat tertunda setahun dari 2020 karena pandemi. Akhirnya dilaksanakan juga tahun 2021 ketika pandemi sedikit mereda.

Papua provinsi hebat, segala hal terkait pelaksanaan perhelatan olahraga nasional ini disiapkan dengan maksimal. Berbagai *venue* pertandingan dibangun, bahkan berkelas

internasional. Selain didukung APBN, tentu juga APBD provinsinya tersedot.

Total biaya pelaksanaan PON XX 2021 Papua sebesar Rp10,43 triliun. Mulai dari persiapan tahun 2018 hingga pelaksanaan tahun 2021 ini.

PON telah usai. Prestasi daerah telah terukir dalam sejarah PON XX di Papua ini. Jabar jadi Juara Umum. Provinsi ini menyabet 133 medali emas, 105 medali perak, dan 115 perunggu dari total keseluruhan 353 medali.

DKI Jakarta menyusul *runner up*. Meraih 110 medali emas, 105 medali perak, dan 116 medali perunggu, total keseluruhan 301 medali. Menyusul Jawa Timur di urutan ketiga. Meraih 110 medali emas, 89 perak dan 88 perunggu, total 287 medali.

Tuan rumah Papua berada di urutan keempat. Meraih 93 medali emas, 66 perak, dan 102 perunggu, total 261 medali.

Bagaimana dengan Sumatera Barat? Atlet Tuah Sakato berada di urutan 16. Dengan raihan 8 emas, 12 perak, 18 perunggu, total 38 medali. Hasil ini jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya yakni 16 emas. Target 16 emas ini sudah perhitungan terukur dan rasional sebelum pelaksanaan PON. Target yang dirumuskan pengurus KONI di bawah kepemimpinan Syaiful. Persiapan atletnya pun sudah dimulai sejak tahun 2018.

Target 16 emas tak tercapai, malah jeblok ke urutan 16 dari 34 provinsi.

PON XX 2021 ini menjadi catatan buruk prestasi olahraga Sumatera Barat. Hasil akhir yang diraih menggambarkan olahraga prestasi kita mundur dibanding tiga PON sebelumnya. Mengapa?

Pada PON ke XVII tahun 2008 di Kaltim Sumbar meraih 8 emas, 16 perak, 38 perunggu, total 62 medali. Urutan 16

dari 33 provinsi. Saat PON ke XVIII tahun 2012 di Riau meraih 12 emas, 12 perak, 25 perunggu, total 49 medali. Urutan 11 dari 33 provinsi. Sementara PON XIX tahun 2016 di Jabar kita meraih 14 emas, 10 perak, 20 perunggu, total 44 medali. Urutan 11 dari 34 provinsi.

Memang tragis prestasi kita PON XX Papua, dibanding PON XVII Kaltim saja total perolehan medali jauh tertinggal, walaupun medali emas yang didapat sama 8. 62 : 38 total medali.

Apa penyebab jebloknya prestasi olahraga Sumbar padan PON XX ini? Menurut saya ada hal, masalah teknis dan faktor politik.

Pertama, masalah teknis. Diantaranya adalah latihan kurang terprogram. Kendala yang dihadapi saat pandemi Covid 19 membatasi pergerakan orang, termasuk juga latihan atlet. Sehingga atlet terpaksa melakukan latihan mandiri. Faktor pandemi juga mempengaruhi iven uji coba atau pra kompetisi menjelang PON XX.

Selain itu yang mempengaruhi capaian prestasi adalah peralatan yang tersedia untuk atlet latihan dan bertanding. Terutama cabang olahraga yang menggunakan peralatan. Juga *supporting* asupan gizi baik saat latihan apalagi menghadapi pertandingan.

Umumnya atlet Sumbar dan pelatih yang akan menghadapi PON Papua mengeluhkan soal pendanaan yang terlambat cair dari Pemprov dan KONI Sumbar. Diantara mereka bahkan menggadaikan asetnya untuk membeli peralatan latihan, juga membeli asupan gizi dan vitamin.

Hal teknis seperti ini harusnya tidak memecah konsentrasi atlet untuk menyiapkan diri. Karena merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan induk organisasi

olahraga.

Kedua, faktor politik. Saya istilahkan politik olahraga. Konsentrasi atlet dan pelatih Sumbar menjelang PON XX 2021 ini cukup terganggu karena kegaduhan politik organisasi induk olahraga, KONI Sumbar.

Periode kepengurusan KONI Sumbar yang dipimpin oleh Syaiful berakhir di awal tahun 2021. Namun ada SK perpanjangan kepengurusan dari KONI Pusat, dengan alasan agar tetap konsenstrasi menyiapkan atletnya.

Ada dua landasan SK itu diperpanjang yaitu hasil Rakornas KONI se-Indonesia pada 27-29 Agustus 2020 dan mempedomani AD/ART KONI pasal 35 ayat 4, berisi jika pada tahun pelaksanaan Musyawarah Olahraga bertepatan dengan iven olahraga nasional, maka paling lama Musorprov KONI Provinsi diadakan tiga bulan setelah iven tersebut selesai.

Bukan hanya KONI Sumbar yang diperpanjang SK-nya. Terdapat 20 KONI provinsi SK kepengurusannya diperpanjang.

Tidak lama setelah Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar menggantikan Irwan Prayitno, Ketua KONI Sumbar menyurutinya untuk audiensi dan melaporkan persiapan menghadapi PON 2021 di Papua. Surat itu tidak kunjung direspon Gubernur. Hanya sekali pengurus KONI Sumbar diterima tim Tim TPSPM. Kelompok kerja perpanjangan tangan gubernur.

Beberapa pengurus lainnya berusaha membantu untuk bisa menghadap langsung melaporkan persiapan PON XX 2021 ke Gubernur Mahyeldi. Tidak ada yang berhasil. Diduga alasannya karena Syaiful sebagai Ketua KONI Sumbar tidak mendukung Mahyeldi pada Pilkada 2020.

Tidak lama setelah itu 'bola panas' politik olahraga Sumbar bergulir. Beberapa cabor mendesak agar SK perpanjangan

kepengurusan KONI Sumbar kepemimpinan Syaiful dicabut. Hingga akhirnya SK perpanjangan itu benar-benar dicabut oleh KONI Pusat. Dasar pencabutannya dari permohonan resmi Pemprov Sumbar yang ditandatangani Kadispora waktu itu.

Kepengurusan KONI Sumbar di-*caretaker* oleh KONI Pusat. Ditugaskan para mandatori melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musyorprovlub) KONI Sumbar. Waktunya hanya satu bulan sejak surat mandat dikeluarkan.

Agus Suardi, akrab dipanggil Abien, Ketua KONI Padang ditetapkan sebagai Ketua KONI Sumbar yang baru. Ia memang dikondisikan sebelumnya mendapat jabatan itu, karena dianggap sebagai putra mahkota atau orangnya Gubernur Mahyeldi. Jalannya makin mulus jadi ketua, setelah mayoritas cabor mendukungnya.

Ketidaksabaran mengganti Syaiful hingga PON XX selesai sebagaimana SK perpanjangan kepengurusan KONI Sumbar itu mempengaruhi perhatian pahlawan olahraga yang akan berlaga di Papua.

Chemistry yang sudah dibangun sebelumnya dengan para atlet dan pelatih *ambyar*. Padahal waktu pelaksanaan PON XX semakin dekat. Para atlet dan pelatih perlu penyesuaian lagi dengan pengurus baru. Kepemimpinan Abien sebagai Ketua KONI Sumbar yang baru banyak dapat sorotan negatif. Bahkan dari internal pengurusnya sendiri. Pasca PON ini pengurus cabor yang mayoritas sebelumnya mendukung Abien mulai gerah. Sudah ada yang membuat mosi tidak percaya.

Kegagalan Sumbar dalam mencapai target pada PON XX 2021 tentu berimbas terhadap Gubernur Mahyeldi. Padahal selama periode gubernur sekarang PON hanya satu kali dilaksanakan.

Ke depan tatakelola organisasi KONI Sumbar harus dilakukan pembenahan. KONI Sumbar mestinya diurus oleh orang-orang yang berkompeten. Bukan karena alasan orang dekat gubernur. Semoga KONI Sumbar ke depan tidak lagi *direcoki* kepentingan politik!

Kekuasaan Tukang Parkir

BAGI kita yang punya kendaraan, baik motor atau mobil membayar parkir adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Seberapa sering kita memarkir kendaraan di tempat publik, sebanyak itu pula kita membayar parkir. Seolah ruang publik dan keramaian seperti pasar, kantor, rumah makan, sepanjang pinggir jalan, pusat perbelanjaan bahkan tempat ibadah memang dikuasai tukang parkir.

“Pak, parkirnya Rp.5000 kalau di siko, itu hari biasa. Kalau liburan atau lebaran bayarnya Rp.15.000-20.000,” begitu ucap seorang tukang parkir di Pasar Atas Bukittinggi kepada saya suatu waktu tahun 2014. Ketika saya minta karcisnya, dia tak mau memberikan. Cara memintanya juga tidak sopan. Saya hanya memarkir mobil sekitar 1 jam saja karena menunaikan sholat zuhur di Mesjid Raya Pasar Atas itu.

Melalui akun twitter @musfiyendra saya refleks ngetwit. *“Parkir satu jam di Pasar Atas Bukittinggi tanpa diberi karcis bayar Rp.5000”*. Beberapa netizen followers saya me-reply dan membenarkan. *“Malu wak Da. Iko sajo ndak salasai @kapuyuakkloting”. Iyo, apalagi hari-hari libur @che_andriani.* Itu di antara bentuk responnya.

Jauh sebelum apa yang saya alami, persoalan parkir di Bukittinggi sudah menjadi perbincangan pedas bagi wisatawan yang melancong ke kota itu. Bahkan ada ada yang menjuluki Bukittinggi sebagai kota tarif parkir termahal di dunia. Ada lagi yang menyebut, Bukittinggi kini sebagai kota preman karena dikuasai tukang parkir liar. Selain tarif

parkir yang mahal, tukang parkir sering mengancam kepada wisatawan.

Padahal jelas diatur. Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir telah mengatur bahwa tarif parkir di Bukittinggi sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua, serta Rp2.000 untuk kendaraan roda empat. Namun, nyatanya saat liburan dan lebaran, petugas parkir di kawasan Pasar Atas, Kampung Cina, gedung parkir baru dan di beberapa titik lainnya di Bukittinggi memungut parkir lebih mahal, berkisar antara Rp10.000-Rp20.000 per mobil. Sepeda motor dipungut antara Rp3.000-Rp5.000 per kendaraan.

Pihak pemerintah beralasan bahwa biaya parkir yang diminta mahal kepada pengunjung tersebut merupakan di titik parkir ilegal. Menurut data Dinas Perhubungan Bukittinggi, terdapat 18 titik parkir ilegal, yang pengelolaannya dilakukan perorangan sehingga retribusi yang dihasilkan tidak bisa dimasukkan ke dalam kas daerah. Tak hanya sekedar beralasan, harusnya Pemko Bukittinggi berpikir solusi lain. Itu kota wisata akan dikunjungi terus oleh banyak orang.

Menurut saya, pembiaran terhadap parkir mahal dan ilegal adalah pangkal masalahnya. pembiaran itu bukan hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat pelaku usaha. Masak iya, di rumah makan yang jelas disiapkan halaman parkir kita bayar juga. Di tempat jual sanjai, ada pungutan parkir, belanja di mini market pinggir jalan berhenti 10 menit bayar parkir lagi.

Parkir tak hanya sekedar persoalan mematikan mesin kendaraan sesaat di keramaian Bukittinggi, tapi adalah bentuk pemalakan terhadap orang berwisata. Inilah yang harus dibasmi oleh pihak keamanan dan aparat pemerintah. Selain itu Pemko Bukittinggi harus bisa menambah tempat

atau gedung parkir yang representatif. Wisatawan tidak peduli dengan jumlah ruang parkir yang ada di kota itu. Yang penting adalah kemudahan untuk menemukan ruang parkir pada lokasi dan waktu yang spesifik. Menjaga ketersediaan adalah tujuan utama, membangun tempat atau ruang parkir baru adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Ke depan Pemko Bukittinggi bisa mewacanakan konsep Remote Parking Area (PRA). Manajemen PRA menggunakan lahan diluar pusat kegiatan sebagai lahan parkir, kemudian menggunakan moda transportasi lain untuk memindahkan wisatawan ke pusat kegiatan wisata. Keberadaan remote parking area ini dapat ditunjang dengan adanya jalur pejalan kaki, *shuttle service*, zona transit bebas biaya dan biaya parkir yang lebih murah.

Harus dipahami oleh pengambil kebijakan di kota itu, berwisata bukan sekedar melihat-lihat alam, budaya atau belanja. Berwisata adalah menikmati kenyamanan, keteraturan dan kedamaian. Jika rasa aman wisatawan terusik, yakinlah orang tak akan berkunjung lagi. Jika tak berubah, lama-lama kota itu ditinggalkan wisatawan.

Parkir mahal, premanisme, kota semrawut dan tergerusnya keramahan warga adalah masalah. Demarketing pariwisata atas ketidaknyamanan akan cepat menggelinging. Apalagi jika sudah tersiar di sosial media. Berbenahlah Bukittinggi, rawatlah Ranah Minang.

Berdialog Masalah Siloam

TAHUN 2013 pro kontra rencana pembangunan Rumah Sakit Siloam di Padang bergulir. Kabarnya, tak hanya berencana membangun rumah sakit di Jalan Khatib Sulaiman itu, tapi Lippo Group akan membangun Super Blok. Di tanah yang tak seberapa luasnya itu akan didirikan rumah sakit, pusat perbelanjaan (mal), hotel dan sekolah. Rencana pembangunannya tak berjalan mulus, walaupun sudah diletakkan batu pertama.

Atas nama investasi berbagai pihak mendukung (pro) terhadap rencana pembangunan Super Blok itu. Sudut pandang pro berdasarkan logika ekonomi. Bahwa, pasca gempa 2009 yang memporak-porandakan kota Padang, perkembangan investasi di kota ini sangat lamban. Orang takut berinvestasi karena masih trauma dengan gempa. Tambah lagi masih adanya ancaman gempa yang lebih besar waktu itu.

Akibatnya, selain orang takut membuka investasi baru, banyak pengusaha yang menarik diri atau eksodus ke daerah lain. Selain itu, lapangan pekerjaan ruangnya semakin sempit. Kampus-kampus di Sumatera Barat terus mencetak sarjana. Ribuan sarjana-pun kini bertitel pengangguran. Sumatera Barat sangat butuh investasi. Sehingga kehadiran Lippo Group dari perspektif ekonomi menjadi sebuah harapan bagi pihak yang mendukung. Harapan kemajuan ekonomi.

Berbagai elemen masyarakat di Sumatera Barat, bergabung menolak (kontra) terhadap rencana itu. James Riady sebagai pemilik Lippo Group “dicurigai” tak hanya

berinvestasi murni ekonomi. Tapi investasi dengan membawa misi. Misinya adalah agama. Kristenisasi. Dari sudut pandang agama Islam, misi yang merusak aqidah tak ada kompromi dan toleransi.

Dari kacamata budaya Minangkabau, misi kristenisasi juga tak sesuai dengan kearifan lokal. Islam dan Minangkabau menjadi bagian yang tak terpisahkan. *Adat basandi syara, syarak basandi kitabullah*. Atas nama agama dan budaya, orang Minang tak menolak investasi selama ini. Investasi dengan membawa misi pemurtadan itu yang benar-benar diproteksi.

Perbedaan pendapat dalam menyikapi rencana investasi Lippo Group ini bagian dinamika hidup bermasyarakat. Semua pihak harus saling menghargai perbedaan. Pro punya alasan untuk mendukung. Kontra juga punya dalil dan data untuk menolak. Saling menyalahkan atau menuding diantara pro dan kontra ini yang tak elok. Kita hindari itu agar sesama kita tak rusak. Kalau kita saling menyerang, memfitnah dan membunuh karakter dunsanak sendiri berarti kita merusak nilai-nilai yang harusnya kita pertahankan sebagai orang yang terdidik, beragama dan berbudaya.

Forum Pemuda Sumbar (FPS), sebagai wadah berhimpunnya pemuda dan anak kemenakan yang peduli terhadap berbagai persoalan masyarakat, ikut mengambil peran. FPS belajar mencari solusi dan memberikan pencerahan terhadap berbagai isu yang muncul di tengah masyarakat kita. Terhadap masalah Siloam ini FPS menjadi wadah untuk duduk bersama mengkaji, menganalisa, mengkritisi dan mendiskusikan dari berbagai sudut pandang.

Senin, 2 Desember 2013 di Aula RRI Padang diskusi Forum Pemuda Sumbar dengan tema “Kontroversi Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Padang”.

Narasumber yang diundang MUI Sumbar diwakili Gusrizal Gazahar, LKAAM Sumbar langsung oleh ketua Sayuti Dt Rajo Panghulu, akademisi oleh Eko Alfares dan Ketua Pansus Investasi DPRD Padang. Ketua Pansus tak hadir karena alasan banjir. Moderatornya Hanky Mustav Sabarta Ketua Presidium FPS Bidang Hukum. Dihadiri ormas, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

Diskusi berjalan dengan menarik. Dimakikanya hidup. Masing-masing narasumber sangat *expert* dari sudut pandang yang berbeda. Gusrizal Gazahar sebagai ulama, menjelaskan penolakan terhadap pembangunan Rumah Silioam dari sejarah perjuangan Rasul yang tegas terhadap orang yang merusak aqidah umat Islam.

Sumbar harus bersyukur memiliki ulama sekaliber beliau. Masih muda tak hanya menguasai ilmu agama, beliau juga mengupas habis peraturan dan perizinan terkait investasi itu. Mengkaji juga dari dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. MUI ternyata punya data lebih lengkap terkait dokumentasi prosedur izinnnya.

Sayuti Dt Rajo Panghulu sebagai ninik mamak, arif benar menyikapi masalah ini. Filosofi adat budaya Minangkabau beliau jadikan pisau analisisnya. LKAAM tak menolak investasi, tapi menolak misi yang merusak budaya. Eko Alfares, melihat dari sudut pandang perizinan, tata ruang kota, dampak kemacetan dan lingkungan. Hingga kini kata beliau tak pernah dipublish gambar atau disain Super Blok itu. Jadi tak pasti bentuk bendanya yang akan dibangun.

MUI dan LKAAM mengakui murni perjuangan ini dilakukan tanpa ada yang memboncengi atas nama persaingan bisnis. Seperti yang dituduhkan beberapa pihak. Diskusi ini memang tak berimbang karena ketidakhadiran Pansus Investasi DPRD

Padang, yang dianggap mendukung pembangunan Super Blok. Masing-masing pembicara sepakat untuk kemudian mengembangkan masalah ini dalam bentuk dialog semua stakeholder yang terlibat atau peduli.

FPS sebagai penyelenggara tak membuat kesimpulan, tapi akan terus mewadahi berbagai dialog. Forum diskusi ini merekomendasikan FPS untuk mewadahi dialog yang lebih besar dengan melibatkan semua unsur. FPS diminta menghadirkan beberapa tokoh atau pejabat yang dianggap terkait dengan rencana investasi ini.

Diantaranya wajah-wajah yang terlihat di peletakan batu pertama lokasi itu. Mereka adalah Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar), Fauzi Bahar (Walikota Padang), Irman Gusman (Ketua DPD RI/tokoh Sumbar), Azwar Anas (tokoh/sesepuh Sumbar), James Riyadi (Investor), ada pula Hilmi Aminuddin (Ketua Dewan Syuro PKS).

FPS siap mewadahi semua pihak yang terkait dengan rencana ini untuk berdialog. Siapapun itu, yang mendukung dan menolak mari duduk bersama. Hadirkan James Riady. Hadir pula tokoh, pejabat, ormas, unsur kepemudaan, lembaga profesi, akademisi, bundo kanduang, ulama, ninik mamak, urang rantau dan lain sebagainya yang peduli. Agar terang masalah sebenarnya.

Musyawaharahlah cara terbaik kita menyelesaikan berbagai masalah. Jangan saling melepas tanggungjawab satu sama lain. FPS selalu dialog, mengakomodir niat baik semua pihak mencari solusi terbaik.

Sumpah Pemuda, Apa Kata Anak Muda?

MENONTON Selamat Pagi di Trans 7, Selasa, 28 Oktober 2008 jam 8.00 wib, ada yang menggelitik saya. Pada acara pagi yang dipandu Desy Ratnasari dan Adi Negoro itu, membahas tentang Sumpah Pemuda di salah satu tayangannya. Memang hari itu bertepatan dengan peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda. Beberapa anak muda ditanya tentang janji dan tanggal Sumpah Pemuda. Mereka menjawab dengan sangat tidak jelas. Sebagian mereka menjawab dengan tidak tahu, sebagian lagi mencoba beretorika. Dan yang paling memprihatinkan dari jawaban mereka, *“udah lupa mbak karena arus globalisasi....”*.

Setiap pagi tanggal 28 Oktober, semua instansi pemerintah, sekolah, perusahaan tertentu mengadakan upacara peringatan Sumpah Pemuda. Termasuk juga peringatan Sumpah Pemuda ke-80 tahun. Tapi apakah benar kita memaknai sesungguhnya Sumpah Pemuda itu? Ketika kita melagukan Indonesia Raya di setiap upacara itu, apakah kita memaknai isinya?

80 tahun yang lalu anak muda bangsa kita tersadar bahwa harus ada perekat persatuan untuk negara yang namanya Indonesia ini. Mereka berkumpul dari seluruh daerah, berkomitmen, bersumpah/berjanji/berikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, Indonesia. Begitu bermakna 3 sumpah yang diucapkan itu, menghapus semua hal-hal yang bersifat rasial, primordial dan individualis.

80 tahun yang lalu para pemuda membangun kekuatan dan pemikiran untuk kemerdekaan tanah air. Kemerdekaan

yang bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu saja di nusantara. Kesadaran yang sangat luar biasa dilakukan oleh para anak muda terdidik, peduli terhadap penderitaan.

Hidup dibawah penjajahan sangat menyiksa. Rakyat diperkerjakan secara paksa, hasil bumi dibawa kaum penjajah ke negerinya, kemiskinan merajalela dimana-mana, kaum perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi, anak-anak tidak bisa bersekolah hingga menjadi bodoh, kaum bangsawan “dijinaki” seperti binatang peliharaan , pahlawan diperangi, pemberontak dibantai dan ditembaki.

Ketika para pemuda bangsa bangkit 80 tahun lalu, ada ruh perjuangan baru. Kemerdekaan harus direbut, penjajah mesti hengkang. Perlawanan terhadap penjajah di daerah-daerah semakin bersemangat. Pahlawan-pahlawan baru muncul, semua komponen bangsa terjun ke medan perang. Hanya satu kata, kita harus merdeka!

Perjuangan dan perlawanan dilakukan terhadap penjajah, baik dalam bentuk peperangan fisik hampir diseluruh daerah se-Nusantara. Perundingan juga dilakukan oleh para intelektual bangsa baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah Belanda angkat kaki, datang Jepang yang lebih “ganas”. 350 tahun di jajah Belanda lebih ringan dibandingkan dengan dijajah Jepang yang hanya 3,5 tahun. Berkat keyakinan semua komponen bangsa dalam mengusir penjajah, akhirnya kita pun merdeka. 17 Agustus 1945, tonggak baru sejarah bangsa.

80 tahun lalu Sumpah Pemuda diikrarkan. Kata anak muda sekarang, menjawab sejarah dengan kata “*lupa, karena arus globalisasi*”. Generasi muda seperti apa yang lahir sekarang ini? Melupakan sejarah bangsa berarti “kurang ajar” terhadap pahlawan pendahulu kita. Anak muda yang tak pandai berterima kasih atas tetes darah para pahlawan dan

pendahulu kita. Menteri Pemuda dan Olah Raga, Adiaksa Dault waktu itu menyindir anak muda sekarang dengan ucapan “*mungkin karena sudah 80 tahun yang lalu jadi mereka lupa*”. Siapa lagi yang akan menghargai sejarah bangsa ini? Arwah para pahlawan kita bersedih melihat kondisi anak muda sekarang. Kita tak hargai mereka!

Mahasiswa Kita Hari ini

Zaman penjajahan, orang yang bisa bersekolah dan kuliah hanya dari kalangan tertentu. Keturunan priyayi saja yang punya kesempatan, orang biasa akan sangat kesulitan masuk pendidikan formal. Zaman kemerdekaan ini semua orang bisa menempuh pendidikan formal. Sekolah dari dasar sampai perguruan tinggi mudah diakses dimana-mana. Ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan dan pendahulu bangsa ini.

Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda adalah buah pikiran dan perjuangan para mahasiswa pada waktu itu. Mereka berkumpul di rumah Sie Kong Liang. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak 1908 Gedung Kramat disewa pelajar Stovia (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) dan RS (*Rechtsschool*) sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu dikenal dengan nama *Commensalen Huis*. Rumah ini lebih akrab dengan nama Gedung Keramat 106, sekarang Museum Sumpah Pemuda.

Gedung ini menjadi saksi perjuangan demi perjuangan anak bangsa, termasuk dilahirkannya Sumpah Pemuda. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diselenggarakan Kongres Pemuda Kedua pada Oktober 1928. Soegondo Djojopuspito, ketua PPPI terpilih sebagai ketua kongres. Kalau pada Kongres Pemuda Pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan

tercipta persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda Kedua menghasilkan keputusan yang lebih maju. Keputusan itu adalah Sumpah Pemuda.

Menengok mahasiswa hari ini, kita sangat prihatin. Tidak banyak yang berkarya untuk bangsanya. Mahasiswa kita kadang bertindak anarkis, tidak konstruktif menyelesaikan masalah bangsa. Mahasiswa kita mengandalkan aksi massa, tidak solusi cerdas terhadap kebijakan yang tak memihak rakyat. Mahasiswa kita suka plagiat dari pada belajar tekun. Mahasiswa kita membeli nilai pada dosennya. Mahasiswa hari ini berjiwa kerdil suka tawuran.

Tempat kost mahasiswa sekarang tidak lagi menjadi tempat berdiskusi. Tidak lagi tempat pertemuan membahas masalah bangsa. Betapa banyak ditemukan rumah kost mahasiswa sekarang sebagai tempat *kumpul kebo* dan prostitusi, pesta obat-obat terlarang, memproduksi film-film porno, dan lain sebagainya. Walaupun tentu juga banyak hal positif yang dilakukan mahasiswa sekarang.

Makna Sumpah Pemuda

Peringatan Sumpah Pemuda, mestinya memberikan penyadaran bagi kita semua bahwa betapa kondisi anak muda sekarang berada di ujung tanduk. Bukan berarti tidak ada yang peduli, tapi lebih banyak mereka yang tidak mau tahu.

Ini salah siapa? Salah anak muda? mungkin saja, karena mereka tidak mau membaca sejarah. Salah generasi tua? Juga mungkin, karena generasi tua tidak mengajarkan dan mentransformasi sejarah itu dengan baik. Keteladan dan kebijaksanaan adalah ruh generasi tua terhadap anak muda.

Yang kita khawatirkan kedepan adalah tidak ada lagi yang mengikat persamaan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Kalau globalisasi mengikis habis nilai-nilai nasionalisme dan

menggerus wawasan kebangsaan kita, apa jadinya bangsa ini kedepan? Bisa saja otonomi daerah penuh ini akan menguatkan kembali rasa primordial anak muda. Kalau ini tidak diantisipasi lebih cepat, negara Indonesia akan semakin mengecil.

Semoga generasi yang hidup kedepan masih merasakan utuhnya wilayah Indonesia tercinta ini!

JK dan Spirit Perubahan

SETELAH saya membaca buku Indonesia 2009 karya Ahmad Bahar (2009), saya tergugah untuk menulis tentang Jusuf Kalla (JK). Saya tahu, banyak orang akan beda pendapat dengan saya waktu itu.

Pilpres 2009 suhu politik memanas. Tiga pasangan capres-cawapres, Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto saling klaim bahwa mereka akan mampu memenangkan pesta demokrasi tersebut. Tentu saja, berbagai trik tim sukses calon R1 ini siang malam bekerja mengumpulkan simpul-simpul dukungan dari masyarakat. Satu suara akan sangat berarti dalam pertarungan demokrasi prosedural ini.

Perdebatan elektabilitas sebuah ilustrasi siapa yang akan memimpin negara ini kedepan. Lembaga survei dituding memperkeruh suasana demokrasi yang mulai tumbuh. Disebabkan semua pasangan capres-cawapres menyewa lembaga "kuli data" ini untuk mengukur tingkat popularitasnya. Persentase elektabilitas menunjukkan capres dan cawapres mana yang membayar lembaga survei, maka pasangan itulah yang diprediksi menang. Tak heran hampir tiap hari ada perang angka elektabilitas yang dilakukan. Lembaga survei sedang menikmati panen raya.

8 Juli 2009 rakyat dipaksa hanya memilih satu diantara tiga pasangan calon pemimpin negara. Pasca 11 tahun reformasi tantangan pemimpin negara sesungguhnya amatlah besar. Cita-cita reformasi masih jauh dari harapan. Reformasi dengan ruh kebebasan dan keterbukaan berdemokrasi

diterjemahkan salah dalam pelaksanaannya. Keterbukaan demokrasi digiring terlalu jauh oleh arus politik praktis untuk kepentingan sesaat.

Harapan reformasi dalam tubuh birokrasi jauh panggang dari api. Mental birokrat di negara ini masih minta dilayani bukan melayani. Pelayanan publik sebagai tugas pokok birokrasi, sulit melepaskan diri dari intervensi politik. Itu terjadi dari pusat hingga daerah.

Prinsip *Good Government* dan *Clean Governance* (GGCG) yang mulai dikampanyekan sejak 1999 pasca Soeharto lengser hanya sebagai komoditas politik. Tata pemerintahan baik dan bersih sering disebut-sebut oleh presiden maupun kepala daerah tapi sulit dilaksanakan. Pemerintah kita hanya mampu mengadopsi konsep GGCG dari UNDP, World Bank, GTZ dan lain sebagainya. Mengkampanyekan saja tanpa merubah paradigma dan mental aparatur tentu tak memberi hasil.

Penghargaan yang didapatkan kepala daerah atas nama GGCG dalam berbagai kesempatan cenderung bersifat populis. Korupsi merajela dari pusat hingga daerah dikala tata pemerintahan yang baik dan bersih terus digaungkan. Aneh!

Penegakan hukum pasca reformasi bersifat tebang pilih. Masyarakat biasa dengan kesalahan ringan bisa menerima hukuman berat. Penjahat besar dan "predator" uang negara bisa selamat dan diselamatkan oleh penegak hukum. Penegak hukum sendiri banyak berperilaku korup dengan memanfaatkan jabatan yang melekat.

Betapa banyak akhirnya oknum institusi Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman yang boroknya terbongkar juga. Ternyata sudah rahasia umum oknum-oknum tersebut "bermain rekening" dengan koruptor. Hingga detik ini betapa merdekanya para koruptor kakap yang dilindungi negara.

Contoh, tersangka kasus BLBI. *Kok didiemin aja?*

Otonomi daerah disatu sisi memberi ruang untuk daerah mengembangkan potensi dan kearifan lokal. Namun disisi lain memunculkan persoalan baru dalam ranah politik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang dianggap sebagai proses demokrasi menciptakan raja-raja kecil di daerah otonom. Rekrutmen kepala daerah juga tidak memperhatikan aspek kualitas. Hampir dipastikan bahwa siapa yang punya banyak uanglah yang akan dipilih oleh rakyat. Rakyat kita yang irrasional *kan* bisa dibeli oleh raja-raja kecil itu.

Jika hasrat dan libido politik elit lokal tak terakomodir dalam Pilkada, pemekaran daerah menjadi lahan garapan selanjutnya. Secara politis, pemekaran juga diartikan sebagai "pembukaan" lapangan pekerjaan politik menjadi anggota DPRD dan lapangan jabatan baru lain yang muncul sebagai konsekuensi terbentuknya daerah otonom.

Pemekaran juga sekaligus membuat konfigurasi baru kekuatan elit dan partai politik di daerah yang dimekarkan kata Eko Prasajo (2007). Karena dominan keinginan politik tak bertanggungjawab, 85 persen pemekaran wilayah tidak berdampak positif pada pelayanan publik dan peningkatan kehidupan masyarakat (*Kompas, 18 Februari 2009*).

Tentu masih banyak persoalan di bangsa ini yang tak "beres" setelah 11 tahun reformasi bergulir. Pendidikan gratis hanya isapan jempol semata, nyatanya banyak orang tak bisa bersekolah. Pengangguran kian meningkat dan berkorelasi dengan angka kemiskinan. Pertahanan dan keamanan kita di daerah perbatasan di *obok-obok* oleh negara tetangga seperti Malaysia. TKI kita disiksa di negara lain. Aset budaya dan kuliner kita dipatenkan oleh negara lain. Aset bangsa dari sumber daya alam diprivatisasi kepada negara kaya. Hutang

negara bertambah tiap tahun. Selain itu *seabrek* persoalan lain melilit bangsa ini.

Bahwa kedepan Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang kuat di tengah perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan politik dan masyarakat (*Kompas, 8 Juni 2006*).

Persoalan-persoalan bangsa kita mesti dibereskan pasca Pemilu 8 Juli 2009. Tidak bisa tidak presiden haruslah orang yang kuat, tegas, cerdas, bertindak cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah, tidak simbolis atau banyak basa basi, tidak *plin plan* dalam membuat keputusan menyangkut hajat rakyat, tidak bergantung kepada bangsa lain dan tidak memiliki cacat sosial.

Jusuf Kalla adalah orang yang tepat melakukan perubahan bangsa dengan lebih cepat dan tepat. Ada banyak alasan kenapa memilih JK untuk menjadi presiden periode 2009-2014. JK adalah politisi saudagar dalam arti seutuhnya ia lugas, ringkas, tangkas, *ceplas ceplos* apa adanya, cepat dan cakap kata Ahmad Bahar.

Terlepas dari perdebatan elektabilitas lembaga survei, kita mesti rasional dalam menentukan pilihan dalam setiap Pemilu. Sebagai anak bangsa yang bertugas mengisi kemerdekaan ini, kita mesti memilih orang yang tepat untuk memimpin negara ini. JK datang untuk perubahan yang lebih pasti tanpa basa basi!

Politik Santun Pensiunan Polisi

KALAH Pilkada DKI tahun 2007. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta Adang Daradjatun-Dani Anwar memang sudah diprediksi dari awal. Banyak lembaga yang melakukan penelitian bahwa pasangan ini tidak memiliki kans yang besar. Disebabkan oleh partai yang mengusung mereka hanya satu, PKS saja. Walaupun PKS adalah pemenang pemilu di DKI Jakarta pada tahun 2004. Pilkada beda dengan pemilu legislatif. Figur Adang juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat, begitupun Dani walaupun sebagai wakil rakyat di DKI Jakarta. Adang bukan asli warga Jakarta. Latar belakang dari polisi. Pensiunan polisi.

Kompetitornya adalah *incumbent*, Fauzi Bowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sudah dikenal ditataran birokrat dari tingkat propinsi sampai RT. Lima tahun mendampingi Sutiyoso punya modal cukup untuk dikenal. 30 tahun menjadi birokrat punya pengalaman banyak. Penduduk asli Betawi pula. Kekuatan lain adalah didukung oleh 20 partai, dari yang besar sampai yang gurem sekalipun. Terlepas dari banyak kepentingan dari partai-partai tersebut. Nyatanya Foke panggilan akrab Fauzi Bowo menang sampai pada angka 57,19 % dan sisanya buat Adang-Dani 42, 81%.

Ini adalah pilkada pertama di Ibukota Negara. Cukup menarik karena pilkada hanya meloloskan dua pasangan calon. DKI merupakan barometer perpolitikan di tanah air tercinta ini. Gubernur DKI Jakarta adalah posisi sangat strategis. Jakarta adalah pusat dari semua aktifitas. Biangnya

dari sendi kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan budaya. Tempat beraktivitasnya roda pemerintahan negara. Juga Jakarta dengan setumpuk persoalan, sebutlah kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas, pengangguran, kemiskinan, anak jalanan, pelacuran. Ditambah lagi dengan persoalan lingkungan diantaranya langganan banjir, kemacetan dimana-mana, polusi udara dan sangat sempitnya ruang publik di metropolitan itu.

Memang Jakarta butuh pemimpin yang punya kemampuan kepemimpinan terbaik. Visioner, berani, akuntabel, tanggap dan merakyat. Dan ternyata pilihan masyarakat Jakarta adalah Fauzi Bowo-Priyanto. Duet yang akan menentukan nasib Jakarta dari 2007-2012. Berhasilkah mereka, hanya waktu yang akan bisa menjawab. Komitmenkah, dengan visi dan misi yang mereka usung selama kampanye maka masyarakat Jakarta juga yang akan menilai. Bola ada ditangan Foke-Pri, kita liat saja gaya permainan kepemimpinan mereka.

Ada hal menarik yang kita lihat pada proses pilkada DKI Jakarta. Dengan hanya ada dua calon yang bertarung. Masyarakat Jakarta dihadapkan hanya pada dua pilihan. Foke-Pri atau Adang-Dani. Yang jelas kemenangan Foke hanya hal yang biasa, karena sudah diprediksi dari awal.

Tapi kekalahan Adang-Dani menjadi menarik untuk dibicarakan. Kalah terhormat itulah ungkapan yang pas untuk mereka. Menerima kekalahan dengan sportif dan lapang dada. Berjanji tidak akan menjadi oposan, tapi kritis konstruktif. Termasuk juga akan selalu membantu gubernur terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebuah sikap kedewasaan berpolitik. Budaya politik santun dengan berdasarkan moral ini yang di ajarkan kepada carut marut pepolitan kita. Ibarat telaga di padang pasir, membawa kesejukan. Tidak

ada dendam politik terhadap kekalahan. Malah mengulurkan tangan mengucapkan selamat kepada calon terpilih. Jarang sebelumnya sikap sportif seperti ini terjadi dalam ajang pertarungan kekuasaan yang memang menghabiskan banyak anggaran.

Masih kuat dalam ingatan kita ketika Nurmahdi menang pada Pilkada Depok beberapa waktu lalu. Kompetitor tidak terima kekalahan, sehingga berbagai cara dilakukan terhadap pemenang agar bisa dijatuhkan. Berakhir dipengadilan, sehingga yang menang tetaplah menang. Pemilu presiden yang dimenangkan SBY, tidak diterima oleh Megawati. Bahkan sampai sekarang pun tidak terdapat hubungan baik antara kedua tokoh nasional ini. Apa sebab, budaya berpolitik yang tidak sportif. Moral yang masih labil. Tujuan yang salah, hanya untuk kepentingan pribadi dan partai saja.

Proses suksesi kepemimpinan bukan hanya saja memilih pejabat dengan embel-embel pemimpin. Tapi juga mencari panutan yang akan melayani masyarakat, bukan minta untuk dilayani. Juga bukan semata hanya memilih politisi tangguh tapi mencari negarawan hebat. Sportif adalah ciri petarung sejati. Tetap berkontribusi dan memikirkan yang terbaik adalah negarawan. Menjadi pejabat atau tidak bukan persoalan.

Adang-Dani telah memulai kembali mengajarkan kepada kita berpolitik santun dan bermoral. Sesuatu yang sudah telah lama hilang ditengah-tengah carut marutnya politik kita, yang kadang memihak kepada rakyatnya hanya sebagai slogan saja. Menjelang kemerdekaan ke 62 tahun Indonesia ada sesuatu kesejukan dalam bepolitik. Adang-Dani juga manusia biasa bukan pahlawan apalagi malaikat. Kalah dengan tetap tersenyum adalah kalah terhormat.

Berpolitik butuh modal besar. Menjadi pejabat adalah harga yang sangat mahal baik materi maupun nonmateri. Pemilu dan pilkada menghabiskan banyak anggaran. Buktinya untuk proses Pilkada di DKI Jakarta saja pasangan Adang-Dani menghabiskan tidak sedikit anggaran, Rp.58 M. Mahal memang. Tapi menurut saya harga sportifitas dan mengulurkan tangan kepada pemenang dengan lapang dada oleh si kalah jauh lebih mahal dari uang 58 Milyar. Betapa tidak sikap terpuji seperti ini akan memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada pejabat-pejabat, politisi-politisi, partai-partai dan kepada seluruh masyarakat. Kalah berpolitik bukan menciptakan musuh baru.

Kita berharap, bahwa kedepan cara berpolitik bangsa ini bertahap-tahap harus di perbaiki. Oleh siapa? Ya, bagi semua warga negara agar meningkatkan partisipasi politik dengan rasional. Bagi calon pejabat dan pejabat yang berkuasa untuk meng-upgrade moral mereka. Sportif dan elegan, panutan dan negarawan. Sederhana dan mendahulukan rakyat. Sebagai pelayan dan bukan dilayani.

Sisi Lain MHM

SAYA sepakat hukum ditegakkan seadilnya. Tanpa tebang pilih. Prosesnya harus benar. Sesuai kaidah berlaku. Kitapun menolak jika hukum diperalat. Bagi semua orang.

Sebagai sahabat saya prihatin apa yang menimpa Mardani H. Maming (MHM). Dalam usia yang sangat muda ia mendapat ujian hidup yang berat. Berurusan dengan hukum. Prosesnya berjalan sangat cepat. Banyak yang mempertanyakan soal itu.

Kok bisa secepat itu?

MHM ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh KPK. Dugaan menerima suap izin tambang. Saat ia menjabat Bupati di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang diduga memberi suap tidak ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya sudah meninggal. Kasus ini dirasa janggal.

Jumat, 29 Juli 2022 malam MHM ditahan di rutan KPK. Biarlah proses hukum berjalan sesuai tahapannya. Harus dihormati. MHM dengan kepala tegak sudah siap menjalaninya.

Sisi lain dari MHM, ia anak muda hebat. Sukses berkarir sedari dini. Sebagaimana motto hidupnya yang inspiratif; kejar mimpimu di usia muda.

MHM seorang anak kepala desa yang dikenal sebagai pekerja keras dan petarung.

MHM pernah mendapat rekor MURI sebagai Bupati Termuda di Indonesia. Tahun 2010 ia menjadi Bupati Tanah Bumbu saat berusia 29 tahun. Sebelumnya ia juga menjadi anggota DPRD termuda di daerah itu.

Selama menjadi Bupati Tanah Bumbu ia menggratiskan

pendidikan, kesehatan, program 1000 guru berprestasi, memberikan beasiswa doktor (S3), berbagai program peningkatan UMKM, mendorong lahirnya pelaku usaha baru (start up) dan pembenahan tatakelola pemerintahan.

Ia membenahi birokrasi di Tanah Bumbu, dengan itu tahun 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memberinya penghargaan Innovative Government Award.

MHM juga mendapat penghargaan Sikompak Award tahun 2014 dari Wakil Presiden Boediono, atas prestasinya sebagai pembina terbaik nasional PNPM Mandiri Pedesaan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Tata Kelola Desa.

Kemudian juga menerima penghargaan Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi Award periode 2014, dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, dalam kategori website desa terbaik dan website desa terbanyak tingkat nasional.

Dengan berbagai capaian sebagai kepala daerah muda itu MHM juga mendapat penghargaan sebagai Tokoh Muda Berprestasi dari Jawa Pos tahun 2013.

MHM juga dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada tahun 2015–2020. Ia pun yang menjadi Ketua APKASI termuda pertama di Indonesia.

Pada periode kedua, MHM memenangi telak Pilkada di Tanah Bumbu tahun 2015. Namun tahun 2018 ia mengundurkan diri dari jabatan Bupati. MHM fokus menjadi pengusaha. Di dunia usaha MHM juga melesat. Melalui PT Batulicin 69 dan PT Maming 69, dua perusahaan holding itu membawahi 35 anak perusahaan.

Saya mengenal MHM sejak tahun 2019. Ketika ia mencalonkan diri menjadi Ketua Umum HIPMI. Hingga ia terpilih untuk periode 2019-2022 ini.

Ia sahabat yang sangat baik. Rendah hati. Sederhana. Kepeduliaannya tinggi kepada orang lain. Sebagai elit politik dan pengusaha sukses MHM tidak melihatkan kemewahan.

Kami tahu persis kebiasaan MHM; makan di warung kaki lima, mampir di jajanan makanan gerobak pinggir jalan tujuannya agar ia berbaur dengan kelas bawah, memakai sandal jepit biasa, berkaos oblong hanya sesekali pakai kemeja atau batik, memakai sepatu murah yang biasa dipakai mahasiswa.

MHM juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang miskin. Saya paling sering berdiskusi dengan MHM melalui Whatsapp atau DM Instagram soal bagaimana HIPMI Peduli hadir di tengah masyarakat terutama yang ditimpa musibah. Ia sangat responsif.

Di bawah arahan MHM HIPMI Peduli selalu hadir membantu masyarakat terdampak bencana alam, HIPMI menganggarkan Rp. 21,3 miliar untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 lalu, tahun ini HIPMI juga menebar 700 ekor hewan kurban di seluruh Indonesia, di zaman MHM jadi Ketum HIPMI juga sering diadakan pengajian secara virtual dihadiri ribuan anggota dan pengurus HIPMI se-Indonesia, dan berbagai program sosial lainnya.

Selama tiga tahun ini memimpin HIPMI banyak capaian dan inovasi program yang dilakukan MHM dan jajaran pengurus pusat. MHM memimpin HIPMI di periode paling sulit, karena *turbulensi* ekonomi akibat Covid-19. MHM bergerak aktif membangun sinergisitas antara pemerintah, perbankan, BUMN, mendorong investasi baru tumbuh untuk

membantu bangkitnya pelaku usaha, terutama UMKM pasca Covid-19 ini.

Proses hukum yang akan dijalankan MHM saat ini, itulah momentum penting dalam hidupnya. Apapun keputusan pengadilan, itulah takdir bagi MHM.

Pada waktunya suatu saat MHM akan menjadi lebih besar, karena sudah ditempa kian matang.

Sebagai sahabat kami memberikan doa terbaik. Semangat, Ketum MHM!

Daftar Pustaka

- Bahar, Ahmad. 2009. *Indonesia 2009*. Pena Multi Media : Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan : Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia : Jakarta
- Chaniago, Hasril. 2011. *Inmemorium; Ikasuma Hamid*. Head Infomarko : Padang
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press : Yogyakarta
- Diamond, Larry. 1992. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Freedom House : London
- Friedrich, Carl J. 1957. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltam. Blaisdell Publishing Company : North Hollywood
- Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press : Boston
- Ida, Laode. 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Media Indonesia : Jakarta
- Imawan, Riswanda. 2004. *"Desentralisasi, Demokrasi, dan Pembentukan Good Governance", dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. LIPI Press, Jakarta.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Penerbit Pembaruan : Yogyakarta

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Mokken RJ. 1976. *Power and Influence as Political Phenomena*. Wiley : London
- Osborne, David dan Ted Gaebler. Abdul Rosyid (Terj). 1992. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik*. Penerbit PPM : Jakarta.
- Osborne, David dan Peter Plastrik. Abdul Rosyid (Terj). 1997. *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Penerbit PPM : Jakarta
- Parsons, Talcott. 1957. *The Distribution of Power in American Society*. The Johns Hopkins University Press : USA
- R.H Soltau. 1967. *Pengantar Ilmu Politik : an Introduction to Politics*. Leonita : Jakarta
- Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*. Suara Bebas : Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Sigmund Neumann. 1963. *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. The Free Press of Glencoe : London
- Siegel, James. 1986. *Solo in The New Order Language and Hierarchy in An Indonesian City*. Princeton University Press : New Jersey
- Syafii, Inu Kencana. 1996. *Al Quran dan Ilmu Politik*. Rineka Cipta : Jakarta
- Tjokrowinoto, Moejito Dkk. 2006. *Birokrasi Dalam Polemik*. Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah : Malang

- Thoha, Miftah. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Weber, Max. 1982. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen Mohr : Germany
- Zainudin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Gramedia, Jakarta

Daftar Riwayat Tulisan

- 24 Februari 2008. *Konflik Pilkada*. Harian Haluan
- 3 April 2008. *Dilema Penunjukan Langsung Gubernur*. Harian Haluan
- 5 Mei 2008. *Evaluasi Parpol*. Harian Haluan
- 9 April 2008. *Fungsi Parpol*. Harian Haluan
- 8 Mei 2008. *Catatan Incumbent*. Harian Haluan
- 2 Juni 2008. *Kompetensi Walinagari*. Harian Haluan
- 28 Juni 2008. *Politik "Sportif" Hillary*. Harian Haluan
- 7 Juli 2008. *Partisipasi Politik*. Harian Haluan
- 16 Juli 2008. *Berebut Menjadi Caleg*. Harian Singgalang
- 28 Juli 2008. *Demokrasi Multi Partai*. Harian Haluan
- 13 Agustus 2008. *Isu Kampanye dan Pendidikan Politik*. Harian Haluan
- 7 September 2008. *Ketika Golput Menjadi Pilihan*. Harian Haluan
- 10 September 2008. *Security Printing Pilkada*. Harian Haluan
- 16 November 2008. *Pilkada Padang, Evaluasi Demokrasi*. Padang Ekspres
- 3 Juni 2020. *E-Voting Pilkada*. Padang Ekspres
- 8 Juni 2020. *Pilkada Pandemi*. Harian Haluan
- 27 Juni 2022. *Politik Kerja Andre Rosiade*. Harian Singgalang
- 31 Desember 2007. *Reinventing Government Otoda*. Harian Haluan
- 2 April 2008. *Membangkitankan Wawasan Kebangsaan*. Harian Haluan
- 29 Maret 2008. *Mencari Intelektual Profetik*. Harian Haluan
- 5 April 2008. *Meneladani Buya Hamka*. Harian Haluan

20 Februari 2008. *Menanti Hamka Baru*. Padang Ekspres
19 April 2008. *Surat Politik Kartini*. Harian Haluan
9 Juni 2008. *Belajar Otoda dari Jembrana*. Harian Haluan
16 Juni 2008. *Belajar e-Government dari Sragen*. Harian Haluan
30 Juni 2008. *Pentingnya Inovasi dalam Otoda*. Harian Haluan
3 Juli 2008. *Otoda; Sudahkah Rakyat Sejahtera?* Harian Haluan
8 Juli 2008. *Pemekaran Daerah Dampak Otoda Penuh*. Harian Haluan
1 September 2008. *Merubah Paradigma Birokrasi*. Harian Haluan
4 Desember 2008. *Menggagas Hari Partai Politik*. Antara Sumbar
4 Desember 2008. *Dari Otoda ke Federal*. Antara Sumbar
15 Desember 2008. *Merangkai Konsolidasi Demokrasi*. Harian Haluan
28 November 2014. *Legislator Pro Poor*. Harian Singgalang
10 September 2016. *Cerdas Mengelola Informasi*. Sumbar Satu
21 September 2018. *Politik Belum Jalan Saya*. Padang
5 Juni 2020. *Transformasi Pelayanan Publik*. Harian Singgalang
11 Juni 2020. *Mencari Figur Kombinasi; Preferensi Pilkada Tanah Datar 2020*. Harian Khazanah
15 Juni 2021. *Politik Gagagsan*. Harian Rakyat Sumbar
28 Agustus 2021. *Ayah NA, Teruslah ke Syurga*. Harian Haluan
6 September 2021. *Jagalah Buva Mahyeldi!* Harian Haluan
25 Oktober 2021. *Magnet Politik Sutan Riska*. Padang Ekspres
24 Agustus 2011. *Ring Piston Kekuasaan*. Harian Singgalang
26 November 2007. *DPR di Mata Rakyat*. Padang Ekspres
16 April 2008. *Menyorot Citra DPR Kita*. Harian Haluan
16 April 2008. *Konflik Internal Partai dan Solusi*. Harian Haluan
24 April 2008. *Menyoal Moral dan Etika Politik*. Harian Haluan
14 Juli 2008. *Esensi Kekuasaan*. Harian Haluan

- 19 Juli 2008. *Mungkinkah Kampanye Damai?* Harian Singgalang
- 13 Oktober 2008. *Kepemimpinan Dua Periode*. Padang Today
- 28 November 2008. *Iklan Politik PKS*. Padang Today
- 17 Desember 2008. *Kurban Politik*. Padang Ekspres
- 20 Desember 2008. *Sepatu Al Zeidi dan Demokrasi*. Harian Singgalang
- 9 Desember 2009. *Caleg-caleg Latah*. Harian Singgalang
- 7 April 2009. *Politik Kangkung Darat*. Padang Today
- 7 Agustus 2014. *Arogansi Oknum Pejabat*. ArRahmah.Com
- 26 September 2014. *Membaca Baliho Gubernur*. Harian Singgalang
- 10 November 2015. *Generasi Bersumbu Pendek*. Tabloid Target
- 19 Juni 2020. *Korupsi dan Kemiskinan*. Harian Singgalang
- 19 Juni 2020. *Koalisi Basa-basi*. Harian Singgalang
- 23 Juni 2020. *Candu Politik*. Padang Ekspres
- 25 Juni 2020. *Politik, Jangan Baper!*. Harian Haluan
- 24 September 2021. *Kegagalan Satire Gubernur*. Singgalang
- 14 April 2008. *Kepemimpinan Kaum Muda*. Harian Haluan
- 15 April 2008. *Bangsa Instan*. Padang Ekspres
- 7 Mei 2008. *Gerakan Mahasiswa di Tahun Politik*. Harian Singgalang
- 10 Mei 2008. *Patologi Birokrasi Vs New Public Management*. Harian Haluan
- 19 Mei 2008. *Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik*. Harian Haluan
- 17 Mei 2008. *Kebangkitan, Reformasi Dan Kemiskinan*. Harian Haluan
- 14 Juni 2008. *FPI: Kronologis Monas dan Sejarah*. Harian Haluan
- 27 Juli 2008. *Dinamika Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Harian Haluan

- 23 Agustus 2008. *NKRI dan Gerakan Separatis*. Harian Haluan
- 3 November 2008. *Politisi Jalanan*. Harian Haluan
- 3 April 2009. *Dukun Politik*. Padang Today
- 15 April 2009. *Kebangkitan Politik Anak Muda Minangkabau*. Padang Today
- 19 Juli 2009. *Mengenang Tragedi Simpang Kandih*. Koran Posmetro
- 1 November 2013. *KNPI Sumbar, Apa Kabar?* Harian Singgalang
- 28 Desember 2014. *Membangun Negarawan Muda*. Harian Singgalang
- 3 Mei 2014. *Zakat Membangun Negara*. Harian Singgalang
- 9 Juni 2014. *Merawat Indonesia*. Harian Singgalang
- 25 November 2014. *Kemiskinan di Antara Bencana dan Harga BBM*. Harian Singgalang
- 18 Februari 2015. *Doa untuk Koruptor*. Harian Singgalang
- 25 Mei 2015. *Nasihat untuk Pemimpin*. Harian Singgalang
- 16 September 2015. *Perda Sampah Apa Kabar?* Harian Singgalang
- 20 Agustus 2021. *Akuntabilitas Etika*. scienta.id
- 23 Oktober 2021. *Politik Olahraga*. Harian Singgalang
- 5 Desember 2014. *Kekuasaan Tukang Parkir*. Koran Metro Andalas
- 6 Desember 2013. *Berdialog Masalah Siloam*. Harian Singgalang
- 4 November 2008. *Sumpah Pemuda, Apa kata Anak Muda*. Padang
- 29 Juni 2009. *JK dan Spirit Perubahan*. Padang
- 19 Januari 2008. *Politik Santun Pensiunan Polisi*. Padang
- 30 Juli 2022. *Sisi Lain MHM*. hariansinggalang.co.id

Tentang Penulis



Musfi Yendra, S.IP, M.Si, lahir di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, 22 Mei 1982. Orang tuanya H. Asmadikar Iskandar dan Hj. Liza Yuniarti.

Musfi merupakan alumni SDN 15 Nagari Tabek, MTSN Batusangkar, MAN 2 Batusangkar. Menamatkan S1 di Universitas Andalas Jurusan Ilmu Politik dan S2 Prodi Politik Lokal dan Otonomi Daerah di kampus yang sama.

Sejak siswa, mahasiswa hingga saat ini Musfi dikenal sebagai seorang aktivis. Dari organisasi Remaja Mesjid dan OSIS di sekolah. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unand, Ketua Forum Studi Islam (FSI) FISIP Unand, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Sosial Unand, Pendiri dan Sekjend Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Unand, hingga dinobatkan sebagai bintang aktivis mahasiswa saat wisuda S1 tahun 2007.

Sejak tahun 2011-2016 menjadi Kepala Cabang lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa Singgalang, yang merupakan cabang Dompot Dhuafa Republika di Sumatera

Barat, mendirikan Dompot Dhuafa Riau tahun 2013. Sejak 2016 hingga saat ini menjadi Pembina di lembaga yang mengurus berbagai persoalan orang miskin tersebut.

Melalui aktivitas sosial yang ditekuni, Musfi pernah menerima penghargaan *Marketeer of The Year* Padang kategori *Public Service* tahun 2014 dari MarkPlus, *Social Welfare Award* Sumbar tahun 2016 dari LKKS, lembaga sosial di bawah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumbar.

Sebagai organisatoris ia pernah menjadi pengurus dan menjabat posisi strategis sejumlah organisasi tingkat Sumatera Barat; KNPI, HIPMI, KADIN, KONI, BKPRMI, IKA UNAND, MES, KARANG TARUNA dan PA KAMMI.

Saat ini Musfi menjalankan amanah sebagai Sekretaris Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) DPD Sumbar, Sekretaris Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sumbar, Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Padang dan Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar.

Sejak mahasiswa Musfi aktif menulis di berbagai media masa, baik cetak maupun online. Lebih 250 judul tulisan sudah publikasi di berbagai media. Tulisannya bertemakan politik, pemerintahan, pendidikan dan sosial. Melalui tulisan-tulisan tersebut ia kritis menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, isu politik dan mengungkap fakta sosial kehidupan masyarakat.

Selain itu jadi tim penulis buku Sok Paten, *Dialektika Panas di Ruang Digital Sumatera Barat, Gagasan dan Pemikiran dalam WAG TOP 100 (2021)*, *Kilas Balik Pengabdian IKAL-Lemhannas Sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa (2022)*, juga menulis berbagai jurnal ilmiah yang dipublikasi.

Beberapa tahun ini mulai menulis tema parenting,

edukasi tentang pengasuhan anak. Ide menulis ini merupakan pengalamannya sejak menjadi seorang ayah dari puteri tunggalnya, Hanna Rubiah Musfi, yang kini berusia 6 tahun. Istrinya, Syafitri Ikhnas juga merupakan seorang pembicara dan penulis tentang pendidikan dan pengasuhan anak.

Karena aktif sebagai penulis ia juga pernah menjadi jurnalis di media online Padang-Today.com, yang merupakan grup Jawa Pos. Dari editor hingga menjabat redaktur di media tersebut.

Selain aktif sebagai penulis Musfi juga menjadi narasumber berbagai seminar, baik tingkat daerah, nasional dan internasional, serta menjadi pembicara di media televisi dan radio.

Musfi juga menekuni profesi sebagai Dosen Ilmu Politik di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Ekasakti, sesuai disiplin ilmunya di bidang politik.

Ia juga menjadi tim dosen Kewirausahaan di Universitas Ekasakti, dan mengampu Mata Kuliah Perencanaan Bisnis dan Wirausaha di Universitas Tamansiswa Padang karena pengalamannya sebagai praktisi bisnis.

Di dunia usaha Musfi mendirikan perusahaan di bidang ritel, pertanian, pelatihan dan lingkungan dengan konsep sosial bisnis.

